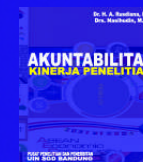


Dr. H. A. Rusdiana, MM  
Drs. Nasihudin, M.Pd.

# AKUNTABILITAS KINERJA PENELITIAN

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
UIN SGD BANDUNG  
TRESNA BHAKTI PRESS  
BANDUNG

## AKUNTABILITAS KINERJA PENELITIAN



Buku ini di gagas atas dorongan dan motivasi Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Seiring berjalannya periode Penelitian tahun 2018, masih banyak rekan-rekan peneliti yang masih berhadapan dengan kesulitan teknis administrasi pelaporan penelitian. Informasi-informasi dalam buku ini, bemula dari celotehan di group WA Forum Riset Inovasi, Pengelola Jurnal UIN, Persiapan Upload Laporan Penelitian, dan WA ACRP Dosen Peneliti Kopertais Wilayah II Jabar Banten. Dalam buku ini, penulis mencoba memandukan teori dengan pengalaman mengelola penelitian Kesiapan PTKIS Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah". Penyajiannya, diawali dari Tuntutan Akuntabilitas dalam Perspektif *Good Governance*, Akuntabilitas Kinerja Publik, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Manajemen Perencanaan Kegiatan Penelitian, Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Berbasis Kinerja, Manajemen Evaluasi Program Kegiatan Penelitian, Laporan Pertanggungjawaban Penelitian, diakhiri dengan Model Laporan Pertanggungjawaban Penelitian. Tak jauh berbeda dengan tujuan Laporan Pertanggungjawaban pada umumnya, maka kami berharap jika

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
UIN SGD BANDUNG  
TRESNA BHAKTI PRESS  
BANDUNG

ISBN 978-602-5623-27-5





**Dr. H. A. Rusdiana, MM**  
**Drs. Nasihudin, M, Pd.**

# **AKUNTABILITAS**

## **KINERJA DAN PELAPORAN PENELITIAN**

**Pengantar;**  
**Dr. Wahyuddin Darmalaksana, M.Ag.**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN**  
**UIN SGD BANDUNG 2018**





# AKUNTABILITAS

## KINERJA DAN PELAPORAN PENELITIAN

ISBN: 978 – 602 – 5823 – 04 – 6  
Cetakan Pertama, Agustus 2018  
16 cm x 24 cm 425 hlm +(i – vii)

Penulis:

Dr. H. A. Rusdiana, MM  
Drs. Nasihudin, M, Pd.

Editor:

Encep Dulwahab., M.Si.  
Tresna Nurhayati, M.Pd.

Desain *Cover* dan Tata letak:

M. Zaky Nurzaman

Diterbitkan oleh:

Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung  
Jl. A.H. Nasution No. 105 Bandung  
Tlp. (022) 7800525, Fax (022) 7800525  
<http://lp2m.uinsgd.ac.id>

Hak Cipta dilindungi UU RI No 19/Th. 2002

Dilarang memperbanyak dalam bentuk dan dengan cara apapun  
tanpa seizin penerbit.



# Kata Pengantar

Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung

**A**kuntabilitas Kinerja Dan Pelaporan Penelitian merupakan suatu keniscayaan. Mendesak dari segi keharusan regulasi dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Tuntutan akuntabilitas berkembang pesat sejak masa reformasi. Tidak hanya akuntabilitas keuangan yang menjadi tuntutan publik tapi juga akuntabilitas kinerja. Oleh sebab itulah pemerintah kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 dan diperbarui dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mengharuskan itu. Mendesak dari segi tuntutan masyarakat, agar output penelitian perguruan tinggi terstandarisasi dan layak berkompetisi ditingkat regional, nasional dan global.

Permasalahan yang terjadi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2017, Kinerja Peneliti belum mengalami kategori peningkatan, berdasarkan penilaian akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Hal tersebut menunjukkan masih ada kekurangan dalam implementasi SISLITAPDIMAS.

Penulis buku “Akuntabilitas Kinerja Dan Pelaporan Penelitian” disajikan secara monograf bertujuan untuk mengidentifikasi penetapan indikator kinerja, mendeteksi faktor-faktor penyebab permasalahan dan strategi yang digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. *Performance Blueprint* digunakan untuk menganalisis ketepatan indikator kinerja yang digunakan. Faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan dalam akuntabilitas kinerja ialah perubahan peraturan perundangan, sosialisasi kebijakan yang belum tepat sasaran, kuantitas dan kualitas SDM, dan data kinerja yang belum akurat. Lebih spesifik pada tingkat individu disebabkan belum adanya

konsistensi antara sistem perencanaan dengan sistem penganggaran dan perbedaan persepsi di antara evaluator. Strategi yang dilakukan yaitu mengadakan pendampingan, mengadakan koordinasi dan membangun sistem informasi yang terintegrasi.

Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung, mengapresiasi atas terbitnya buku “Akuntabilitas Kinerja Dan Pelaporan Penelitian. Merupakan Perspektif baru, sekaligus menggeser paradigma akuntabilitas dari teori klasik yang berfokus pada sistem administrasi dengan penekanan pada struktur formal dan institusi pemerintahan yang memisahkan antara administrasi dan politik, dan neo-klasik yang berfokus pada penggunaan praktek manajemen yang berbasis bisnis (*new public management*). Dengan demikian Akuntabilitas Kinerja Dan Pelaporan Penelitian, dalam perspektif *good governance* tidak hanya menekankan pada efisiensi penggunaan sumberdaya tetapi lebih jauh bagaimana sumberdaya yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

Bandung, 27 Agustus 2018

a.n. Ketua LP2M,

Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



**Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag**  
NIP. 1971082719980310007

## Pengantar Penulis

**S**egala puji kami panjatkan kepada Allah swt. yang telah memberikan nikmat-Nya yang tidak terbatas. Salawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membawa umat dari alam kegelapan ke alam yang terang berderang dengan cahaya iman dan Islam. Berkat rahmat dan taufik dari Allah swt., pulalah, penyusunan buku “Akuntabilitas Kinerja Pelaporan pelaoran Penelitian”.

Buku monograf ini di gagas atas dorongan dan motivasi Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Seiring berjalannya periode Penelitian tahun 2018, masih banyak rekan-rekan peneliti yang masih berhadapan dengan kesulitan teknis administrasi pelaporan penelitian. Informasi-informasi dalam buku ini, bermula dari celotehan di group WA Forum Riset Inovasi, Pengelola Jurnal UIN, Persiapan *Uplod* Laporan Penelitian, dan WA ACRP Dosen Peneliti Kopertais Wilayah II Jabar Banten.

Atas dasar itu, kami mencoba untuk memenuhi amanah dengan sebaik-baiknya dan berusaha untuk memberikan yang terbaik walau di tengah perjalanan penelitian kami pun, masih mengalami hambatan. Tetapi kami tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik walaupun kami sadari masih ada *planning* kerja yang tidak terealisasi. Karena sesungguhnya kita hanya pantas untuk merencanakan namun Allah berkehendak lain, andaipun adanya sebuah keberhasilan dari program yang terlaksana itu tidak terlepas dari bantuan-Nya dan berkat usaha teman-teman yang berusaha menjalankan tugas ini.

Dalam buku ini, kami mencoba memandukan teori dengan pengalaman mengelola penelitian Kesiapan PTKIS Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah”. Penyajiannya, diawali dari Pendahuluan, memuat: Tuntutan Akuntabilitas dalam Perspektif *Good Governance*, Akuntabilitas Kinerja Publik, Manajemen Kinerja

Sektor Publik, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Manajemen Perencanaan Kegiatan Penelitian, Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Berbasis Kinerja, Manajemen Evaluasi Program Kegiatan Penelitian, Laporan Pertanggungjawaban Penelitian, diakhiri dengan Model Laporan Pertanggungjawaban Penelitian.

Tak jauh berbeda dengan tujuan Laporan Pertanggungjawaban pada umumnya, maka kami berharap jika penyajian materi buku ini, jauh dari harapan dan kenyataan, namun materi ini, dapat dijadikan sebuah rujukan maupun pelajaran yang bagi penyelenggaraan kepengurusan Penelitian berikutnya dan menjadi sebuah momentum untuk menjadikan periode kepengurusan ke depan akan lebih baik dan lebih professional. Tiada embun yang lebih bening selain kebeningan hati, tulusnya jiwa membuka pintu maaf.

Sekali lagi tidak ada keberhasilan yang sempurna selain keberhasilan rencana-rencana Allah SWT, namun hendaknya suatu keberhasilan tidaklah dilihat dari faktor hasil yang tercapai maupun kegagalan yang terjadi, tetapi lebih indah jika dilihat dari faktor proses tercapainya tujuan tersebut ataupun usaha-usaha maksimal yang telah dilaksanakan. Karena dari proses itulah banyak hikmah yang dapat dipelajari dan menjadi acuan pada kegiatan berikutnya.

Kami tim peneliti Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi tahun 2018 “Kesiapan PTKIS Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah” memohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan dalam melaksanakan amanah ini. Terakhir, kami serahkan seluruh daya dan upaya kami kepada Zat Yang Maha Mengatur segalanya, Allah swt.

Bandung, 17 Agustus 2018  
Tim Peneliti,

**Dr. H. A. Rusdiana, MM**  
**Drs. Nasihudin, M.Pd.**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Pengantar Penulis.....	iii
Daftar Isi.....	v
<b>BAB I</b>	
<b>TUNTUTAN AKUNTABILITAS DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE .....</b>	<b>1</b>
A. Filosofi Makna dan Pentingnya Akuntabilitas .....	2
B. Memposisikan Akuntabilitas Pada Sektor Publik .....	4
C. Orientasi Pelaksanaan Akuntabilitas.....	8
D. Akuntabilitas dan Good Governance .....	13
<b>BAB II</b>	
<b>KONSEP AKUNTABILITAS UBLIK .....</b>	<b>19</b>
A. Konsep Dasar Akuntabililitas.....	20
B. Akuntabililitas Publik .....	23
C. Akuntabililitas dan Tranfarasi.....	25
D. Kebijakan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan .....	29
<b>BAB III</b>	
<b>AKUNTABILITAS KINERJA PUBLIK.....</b>	<b>35</b>
A. Konsep dasar Kinerja .....	36
B. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	39
C. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .....	40
D. Akuntabilitas Kinerja Perguruan Tinggi.....	57
<b>BAB IV</b>	
<b>MANAJEMEN KINERJA SEKTOR PUBLIK.....</b>	<b>69</b>
A. Konsep Dasar Manajemen Kinerja.....	70
B. Orirntasi Tahapan, Proses Penerapan Manajemen Kinerja	75
C. Langkah Manajemen Kinerja.....	80
D. Pandangan dasar, Prinsip, Kebijakan, dan Orientasi Penerapan Konsep Manajemen Kinerja di Indonesia .....	94

<b>BAB V</b>	
<b>MODEL MANAJEMEN PERENCANAAN KEGIATAN PENELITIAN .....</b>	<b>105</b>
A. Identitas Kegiatan.....	106
B. Masukan Proses dan Target dihasilkan dari Kegiatan .....	108
C. Waktu, Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian .....	109
D. Anggaran dan sumber Dana.....	114
<b>BAB VI</b>	
<b>MANAJEMEN PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN BERBASIS KINERJA.....</b>	<b>119</b>
A. Konsep dasar Pelaksanaan Kegiatan Penelitian .....	120
B. Prosedur dan Proses Penelitian.....	128
C. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian .....	140
D. Pelaporan Penelitian .....	148
<b>BAB VII</b>	
<b>MANAJEMEN EVALUASI PROGRAM KEGIATAN PENELITIAN .....</b>	<b>175</b>
A. Pentingnya Evaluasi Program Penelitian .....	176
B. Metode Model-Model Evaluasi .....	180
C. Desain dan Prosedur Evaluasi Program Penelitian .....	183
D. Pelaksanaan Evaluasi Program Penelitian.....	186
<b>BAB VIII</b>	
<b>LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENELITIAN .....</b>	<b>191</b>
A. Konsep Dasar Laporan Pertanggungjawaban.....	192
B. Laporan Pertanggungjawaban.....	200
C. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban .....	204
D. Komponen Laporan Pertanggung Jawaban Penelitian ....	213
<b>BAB IX</b>	
<b>MODEL LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN .....</b>	<b>219</b>
A. Ketentuan Laporan Pertanggungjawaban Penelitian.....	220
B. Model Laporan Antara .....	222
C. Laporan Akhir.....	291
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>417</b>
<b>PFOFIL PENULIS.....</b>	<b>423</b>







# BAB I

## TUNTUTAN AKUNTABILITAS

### DALAM PERSPEKTIF *GOOD GOVERNANCE*

**B**erbagai makna akuntabilitas muncul seiring dengan perkembangan orientasi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perspektif *good governance* penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berupaya mencapai tujuan-tujuan ekonomi, tetapi juga dalam konteks hubungan antara tanggungjawab negara dengan masyarakat (warga Negara). Dalam konteks hubungan antara negara dengan warga negara, warga negara harus ditempatkan tidak hanya sebagai konsumen dari produk kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara, tetapi juga sebagai warga negara yang memiliki hak terhadap pemerintahnya, berhak menilai segala tindakan pemerintahnya. Selain itu, warga negara harus dihormati keinginannya agar pemerintahnya dalam melaksanakan aktivitasnya lebih efisien menggunakan sumberdaya, hak-haknya dilindungi, suaranya lebih didengar, nilai-nilai dan pilihannya juga dihormati.

Berangkat dari dasar berpikir tersebut menyebabkan terjadi perubahan orientasi mekanisme akuntabilitas yang selama ini lebih banyak dikenal dengan akuntabilitas politik. Pergeseran tersebut ditandai dengan munculnya berbagai jenis mekanisme akuntabilitas profesional, hukum/legal, organisasi/birokrasi, sosial/masyarakat. Dengan demikian akuntabilitas harus dimaknai sebagai bentuk responsif, bertanggung jawab, transparan, dapat dikontrol, dan *liability*.

Perspektif baru ini sekaligus menggeser paradigma akuntabilitas dari teori klasik yang berfokus pada sistem administrasi dengan penekanan pada struktur formal dan institusi pemerintahan yang memisahkan antara administrasi dan politik, dan neo-klasik yang berfokus pada penggunaan praktek manajemen pemerintahan yang berbasis bisnis (*new public management*). Dengan demikian akuntabilitas dalam perspektif *good governance* tidak hanya menekankan pada efisiensi penggunaan sumberdaya tetapi lebih jauh bagaimana sumberdaya yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

### **A. Filosofi Makna dan Pentingnya Akuntabilitas**

Akuntabilitas (*accountability*) dalam konteks administrasi publik senantiasa menarik untuk dikaji, sebab pusat daripada praktek administrasi pemerintahan justru terletak pada isu-isu sekitar akuntabilitas (Frederickson, 1997: 172). Di negara-negara Eropa misalnya, akuntabilitas telah lama menjadi perhatian terutama dalam kaitan dengan pembuatan kebijakan. Akuntabilitas merupakan konsep yang terus menerus mengalami perkembangan dan terus menerus digunakan karena memberikan citra transparansi dan kepercayaan bagi yang menjalankannya.

Pertimbangan agar institusi publik dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan maupun sumberdaya yang digunakan semakin hari semakin tinggi intensitasnya. Hal ini tentu saja tidak berdiri sendiri, tetapi disebabkan oleh berbagai faktor antara lain;

#### **1. Tekanan fiskal (*fiscal pressures*)**

Adanya kewajiban pertanggungjawaban, karena tekanan fiskal (*fiscal pressures*), yaitu meningkatnya belanja pemerintah di satu sisi dan semakin tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di sisi yang lain sehingga mendorong berbagai pihak

mempertanyakan efektivitas birokrasi pemerintah. Tudingan tersebut muncul karena di satu sisi mesin pemerintah dianggap terlalu gemuk dan terlalu mahal, sementara di sisi yang lain mengabaikan kondisi-kondisi sosial yang terkait dengan persoalan pengangguran dan tingginya biaya ekonomi.

Pengelolaan pemerintahan pada dasarnya tidak hanya berupaya mencapai tujuan ekonomi dan efisiensi, tetapi juga dalam konteks hubungan antara tanggungjawab negara dengan masyarakat. Masyarakat ingin diperlakukan tidak hanya sebagai konsumen tetapi sebagai *citizens* (warga), yang memiliki hak terhadap pemerintahnya, serta berhak menilai segala tindakan pemerintah. Masyarakat menginginkan pemerintah lebih efisien, dan idealnya lebih hemat. Masyarakat juga menginginkan hak-haknya dilindungi, suaranya lebih didengar, nilai-nilai dan pilihan mereka juga dihormati.

## **2. Tuntutan Kualitas**

Faktor kedua adalah kualitas. Warga masyarakat pada dasarnya bukanlah orang yang sekedar pengkonsumsi, tetapi dia juga adalah pemilik modal dari negara ini. Karena itu, warga masyarakat secara aktif mendefinisikan terus menerus dirinya sebagai konsumen daripada hanya sekedar pengkonsumsi dari jasa dan kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah.

## **3. Tuntutan Perubahan**

Gelombang reformasi telah melahirkan tekanan-tekanan baru terutama dalam kaitan dengan perubahan. Perubahan tidak hanya dalam hal perubahan fundamental dalam memberikan pelayanan, tetapi juga menawarkan peluang kepada pembuat kebijakan untuk mencari satu solusi terhadap tekanan pertentangan antara perbaikan layanan dan pengurangan peran negara. Para pembuat kebijakan terkadang melihat perubahan sebagai alat untuk menambah dan memperkuat kekuasaan ditingkat pusat, padahal jarak mereka dengan permasalahan

ada pada level bawah (desentralisasi), bahkan mereka kadang beranggapan bahwa perubahan merupakan peluang untuk mendapatkan keuntungan politik dan pribadi.

## **B. Memposisikan Akuntabilitas Pada Sektor Publik**

Di dalam administrasi publik modern, akuntabilitas adalah raja, dan hasil yang dapat diukur adalah satu keharusan (Hodge, Graeme, 1993: 4). Persoalannya adalah bagaimana menentukan dengan tepat konsep mengenai akuntabilitas. Pemahaman yang tepat memungkinkan kita menentukan aspek-aspek apa saja yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai akuntabilitas dari pemangku jabatan. Oleh karena itu, persoalan pertama yang terkait dengan dengan hal tersebut yaitu persoalan konseptual. Persoalan konseptual bermakna bahwa apa sebenarnya yang dimaksud dengan akuntabilitas?

Akuntabilitas seringkali digunakan dalam pengertian yang agak luas, misalnya seringkali disamakan dengan konsep evaluasi, namun hakekatnya akuntabilitas merupakan konsep yang dapat dipersaingkan dengan responsivitas, tanggung-jawab, dan efektivitas. Pertanyaan kedua terkait dengan persoalan analitis, yaitu apa saja yang mencakup tipe-tipe akuntabilitas?

Berdasarkan definisi yang sempit, akuntabilitas merupakan serangkaian dimensi yang dapat digunakan untuk menggambarkan berbagai macam hubungan pertanggung jawaban dan susunannya dapat ditemukan di dalam domain yang berbeda dari pemerintahan. Pertanyaan ketiga terkait dengan pertanyaan evaluatif, yaitu mengenai bagaimanakah seharusnya kita menilai hubungan antara akuntabilitas dengan rezim ?

Kata akuntabilitas awalnya berasal dari bahasa Anglo-Norman, dan bukan dari Anglo-Saxon. Secara historis dan semantik kata akuntabilitas sangat terkait dengan kata akuntansi (*accounting*) dimana secara harfian berarti pembukuan. Di dalam

diskursus politik, akuntabilitas dan akuntabel tidak lagi membawa citra pembukuan yang kaku dan administrasi keuangan, tetapi membawa janji keadilan dan kepastian. Akuntabilitas tidak mengacu kepada raja untuk menilai, tetapi sebaliknya yaitu kewenangan yang dimiliki raja dipertanggungjawabkan kepada rakyatnya.

Pada akhir abad dua puluh, bentuk akuntabilitas bergerak dari pemahaman akuntansi keuangan ke akuntabilitas publik dan berjalan paralel dengan kemunculan pendekatan *new public management* oleh pemerintahan Margaret Thatcher dan *Reinventing Government* yang digagas oleh pemerintahan Clinton dan Gore di Amerika Serikat. Kedua bentuk reformasi tersebut memperkenalkan gaya manajemen dan instrumen swasta ke dalam sektor publik.

Dalam idiologi *new public management*, akuntabilitas publik merupakan instrumen dan sekaligus sebagai sasaran. Instrumen berfungsi meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan, dan secara gradual menjadi sasaran di dalam dirinya sendiri. Sebagai sebuah konsep akuntabilitas agak sukar dipahami, ia telah menjadi kata yang dipersoalkan seperti *learning*, *responsibility*, *solidarity* dimana tidak ada yang dapat menjadi objek. Ini adalah satu kata politik yang dapat digunakan untuk menambah argumen yang bertele-tele, untuk memasukkan satu citra kebenaran, kesetiaan, dan keadilan.

Di dalam ilmu politik dewasa ini dan wacana para cendekiawan, akuntabilitas seringkali menjadi payung konseptual yang mencakup berbagai macam konsep yang berbeda. Digunakan sebagai sinonim untuk berbagai kebutuhan definisi politik seperti transparansi, keadilan, demokrasi, efisiensi, responsivitas, tanggungjawab, dan integritas (Mulgan, Richard. 2000:3). Terminologi ini telah muncul sebagai terminologi umum untuk berbagai macam mekanisme yang

membuat institusi lebih responsif terhadap publiknya. (Behn, R.D. 2001:6).

Para cendekiawan di Amerika dan didalam wacana politik, akuntabilitas seringkali digunakan secara bergantian dengan kata *good governance* atau perilaku berbudi. Akuntabilitas dalam pengertian yang luas ini bukanlah konsep yang bertentangan, atau sebuah konsep tanpa batas tertentu. Bagi O'Connell, akuntabilitas terlihat apabila layanan yang diberikan publik berkualitas tinggi, biaya yang dikeluarkan minim, dan terlaksana dengan baik (O'Connell, Lenahan. 2005: 85).

Koppel dalam bukunya *Patahologies of Accountability* menjelaskan dimensi-dimensi akuntabilitas. Koppel menyebutkan tidak lebih dari lima dimensi akuntabilitas yaitu *trasparency, liability, controllability, responsibility, dan responsiveness*, dimana masing-masing dimensi tersebut memberi gambaran dan konsep yang memayungi dirinya sendiri (Koppel, Jonathan GS. 2005:94). Sedangkan menurut Bovens pengertian akuntabilitas dapat dibagi ke dalam pengertian luas dan sempit. Akuntabilitas dalam pengertian luas akuntabilitas lebih bernuansa konsep evaluatif, bukan konsep analitik. Akuntabilitas juga terkait erat dengan aspek *responsiveness* dan *sense of responsibility*, keinginan untuk berperilaku atau bertindak secara transparan, adil, dan dengan cara-cara yang wajar. Menurut Bovens akuntabilitas ini dinamakan dengan tanggungjawab aktif (*active responsibility*) atau tanggungjawab sebagai kebajikan, karena memberikan standar untuk lebih proaktif mempertanggungjawabkan perilaku aktor (Bovens, Mark. 1998:433). Namun menurut Gallie akuntabilitas dalam pengertian ini pada hakekatnya masih merupakan konsep yang masih dipertentangkan (Bovens, Mark. 2006:9).

Definisi yang paling ringkas mengenai akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjelaskan dan membenarkan tindakan. Definisi ini memberikan pengertian secara tidak



langsung terhadap hubungan antara aktor (yang dinilai), penilai, dan forum, pejabat penilai atau yang dinilai. Penjelasan dan pembenaran tidak dibuat dalam satu ruang hampa, tetapi berhadapan-hadapan atau berlawanan secara signifikan dengan pihak yang lain. Hal ini biasanya mencakup tidak hanya sekedar memberikan informasi tentang kinerja dari pihak yang dinilai, tetapi juga kemungkinan untuk dilakukan perdebatan, pengajuan pertanyaan oleh forum dan jawaban oleh aktor, dan akhirnya penilaian aktor oleh forum. Penilaian juga memberikan pengertian secara tidak langsung tentang penerapan sanksi informal dan formal bagi aktor atas kinerja yang tidak tercapai di satu sisi, dan pemberian penghargaan bila kinerjanya baik di sisi yang lain. Inilah yang kita sebut dengan akuntabilitas yang sempit (*narrow accountability*). Oleh Bovens disebut dengan istilah tanggungjawab pasif (*passive responsibility*) atau tanggungjawab sebagai akuntabilitas (*responsibility-as-accountability*), karena aktor berkewajiban untuk dinilai oleh forum, *ex post facto*, bagi tingkah lakunya.

Paling kurang menurut Bovens terdapat tujuh elemen yang disebut dengan akuntabilitas sempit yaitu ada aktor yang menyediakan informasi mengenai tindakannya kepada forum; harus ada unsur menjelaskan dan menilai tindakan aktor-dan bukan propaganda, atau menyediakan informasi atau instruksi kepada publik. Penjelasan harus diarahkan pada forum tertentu dan tidak diberikan secara acak. Aktor mesti merasa berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban. Harus ada kemungkinan untuk diperdebatkan dan dinilai akuntabilitas yang disampaikan oleh aktor kepada forum, ada satu pilihan penggunaan sanksi (informal) atau penghargaan, dan bukan satu monolog tanpa keterlibatan. Terakhir, memenuhi syarat-syarat sebagai akuntabilitas publik, penilaian yang telah diberikan harus dapat diakses oleh publik, bukan hanya semata-mata dari kalangan internal saja, dan informasi yang diperoleh

publik tidak boleh berlainan. (Bovens, Mark. 2006:9).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas publik terjadi manakala: ada hubungan antara aktor dengan forum; dimana aktor diwajibkan menjelaskan dan dinilai tindakannya, forum dapat mengajukan pertanyaan, memberikan penilaian, dan aktor dapat menghadapi konsekuensi.

### **C. Orientasi Pelaksanaan Akuntabilitas**

Dalam dua dekade terakhir kita telah menjadi saksi dari pendewaan pemikiran Neo-liberalisme. Prinsip-prinsip Neo-Liberalisme bahkan telah diterjemahkan keseluruh spektrum reformasi dan merasuk ke dalam sektor publik. Reformasi ekonomi yang terjadi telah berfokus pada liberalisasi pasar sebagai akibat dari distorsi yang dihasilkan oleh intervensi pemerintah sebelumnya: reformasi sektor publik pun akhirnya mengikuti logika yang sama, ketidakjelasan perbedaan antara publik dan swasta (privat), dan upaya mengurangi ukuran dan aktivitas negara, sambil memperkenalkan disiplin atau prinsip-prinsip sektor swasta ke dalam sektor publik.

Penerapan ini berlangsung dari satu konsepsi ekonomi politik tertentu kepada suatu ide bahwa sektor publik terdiri dari seperangkat institusi yang khusus dan sempit serta dengan identitas yang unik. Menilai pemerintah atau sektor publik dapat dilakukan dengan cara menganalisis negara dalam konteks hubungan yang lebih luas antara masyarakat dengan ekonomi; mengikuti logika ini kemudian prinsip-prinsip neo-liberalisme selanjutnya diterapkan kepada area kebijakan sosial dan juga kebijakan ekonomi.

Perkembangan hubungan yang nampak nyata tersebut ditandai dengan munculnya ide mengenai "*good governance*" yang mendasarkan diri pada konsepsi politik, terutama ditujukan pada pelaksanaan reformasi yang lebih tepat. Ketika akar sosialisme runtuh di Uni Sovyet dan di beberapa negara Eropa Timur, ide ini kemudian mendapatkan bentuk dan

substansinya dimana berasal dari kebijakan baru mengenai kondisi politik yang diterapkan, baik oleh negara donor yang sifatnya bilateral maupun multilateral terkait dengan pembangunan dan transisi ekonomi. Strategi awal pembangunan ekonomi pada saat itu terkait dengan reformasi struktural. Pendekatan baru ini mendua karena tidak konsisten baik di dalam konsepsi maupun dalam praktek. Lebih nyata dari kontroversi tersebut yaitu munculnya intervensi ekonomi oleh donor. Hal ini memunculkan pertanyaan termasuk juga kecurigaan akan adanya tekanan politik baru jika diterapkan.

Studi administrasi publik terutama bila dikaitkan dengan apa yang seharusnya pemerintah lakukan ternyata lebih kompleks bila dibandingkan dengan abad dua puluh sebelumnya, karena ia merefleksikan perluasan secara substansial dari tanggungjawab sosial dan ekonomi pemerintahan modern. Karena itu, bentuk tradisional pemerintahan pada awalnya berasal dari teori klasik birokrasi yang diperkenalkan oleh ahli sosiologi Jerman yang dipelopori oleh Max Weber. Birokrasi klasik lebih berfokus pada sistem administrasi, dan secara esensial terdiri dari analisis struktur formal dan institusi pemerintahan, dimana secara konseptual melakukan pemisahan antara administrasi dan politik.

Kerangka analisis tersebut selanjutnya diperluas dan dikritisi lebih jauh oleh dua perspektif lainnya yaitu perspektif kebijakan publik dan administrasi/manajemen publik. Perspektif kebijakan publik lebih berkonsentrasi pada proses kebijakan daripada institusi formal. Perspektif ini memiliki perhatian utama pada: konteks politik dimana administrasi publik berlangsung; organisasi dan jaringan pribadi yang mencakup formulasi dan penyampaian kebijakan; kesuksesan, kegagalan dan keinginan mengenai kebijakan aktual, terkait dalam mekanisme implementasi sampai kepada hasilnya; konsep utama dari negara, esensinya untuk memahami hubungan

antara administrasi dan sistem politik, dan antara politik, ekonomi dan masyarakat (Minogue,dkk.207:3).

Perspektif manajemen publik pada dasarnya terbentuk dari prinsip-prinsip ekonomi neo-klasik, telah diarahkan pada pertanyaan penting mengenai ukuran, peran dan struktur sektor publik, termasuk pada negara-negara yang sedang membangun. Hasil penilaian menunjukkan bahwa di beberapa negara sektor publik justru telah gagal menjadi mesin pembangunan nasional. Di beberapa negara bahkan menjadi penghambat bagi pembangunan. Birokrasi publik dianggap tidak mampu mengelola dengan efektif sarana yang terkait dengan kepentingan publik seperti suplai listrik atau telekomunikasi. Pegawai dipandang sangat tidak fleksibel dan terlalu berdasar pada aturan untuk merespon kebutuhan perubahan, sehingga kebijakan industri yang dicanangkan justru menghalangi perusahaan berkembang daripada membantu mempromosikan perusahaan. Sebaliknya sektor swasta justru dipandang lebih memiliki kapasitas manajerial, lebih fleksibel karena didorong oleh tingkat persaingan untuk lebih efisien dan efektif dalam menyediakan berbagai aktivitas yang sebelumnya diasumsikan menjadi bagian sektor publik.

Pemerintahan di berbagai negara, baik yang sudah maju maupun yang masih berkembang selanjutnya melakukan *review* terhadap peran pegawai, kewenangan pemerintah daerah, dan perusahaan publik. Banyak fungsi-fungsi sebelumnya dijalankan oleh organisasi sektor publik diprivatisasi agar lebih menguntungkan. Kewenangan pemerintah daerah kemudian diperkuat terutama dalam kegiatan-kegiatan seperti tender (*procurement*), namun dengan catatan harus mampu bersaing dengan pemasok dari swasta. Perubahan dramatik ini didorong oleh konsensus ideologi global, dan di banyak negara perubahan ini justru menjadi satu masalah namun sekaligus juga menantang. Isu-isu mengenai nilai-nilai institusional,

kepercayaan, norma-norma serta sikap individual, mengarah kepada satu fokus yakni pada kultur organisasi, dan bagaimana hal ini dapat dirubah oleh pembuat kebijakan dan pimpinan tertinggi (UNDP, 1995:415). Keseluruhan label manajemen publik dianggap sebagai cara yang akurat menangkap keseluruhan hubungan publik dan sektor swasta. Gelombang reformasi ini yang pada awalnya berasal dari negara-negara ekonomi maju seperti Inggris, selanjutnya meluas tidak hanya kepada ke negara-negara transisi ekonomi namun juga ke negara-negara yang sedang membangun.

Meskipun orientasi privatisasi dari reformasi di dalam pemerintahan diakui penting, namun peran penting pemerintah di negara-negara yang sudah maju atau negara yang terlebih dahulu menerapkannya ternyata masih tetap ada dalam kaitan dengan upaya mengelola responsivitas dengan efektif terutama kebutuhan sosial dan ekonomi dari masyarakatnya, atau dengan kata lain terkait dengan manajemen pembangunan (World Bank, 1997: 211). Pemerintah di negara maju nampaknya telah mampu mengurangi terpusatnya kebijakan ekonomi, namun pusat masih akan terus bertanggungjawab dalam mendesain dan menerapkan kebijakan publik secara efektif, terutama dalam hubungannya dengan transformasi ekonomi, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kinerja pertanian, penyediaan lapangan kerja, pasokan layanan sosial yang lebih baik dan perlindungan terhadap lingkungan (UNDP 1995:307).

Manajemen dan administrasi pembangunan tidak dapat mengelak dari munculnya isu-isu seperti desain, implementasi dan evaluasi kebijakan. Pengembangan kebijakan merupakan tanggungjawab utama pemerintah di negara-negara berkembang, yang mencakup isu-isu ekonomi (pertumbuhan ekonomi, perdagangan, belanja dan kebijakan fiskal, hubungan antara desa dan perkotaan). Manajer publik merupakan '*agen pembangunan*', karena itu manajer publik harus diberdayakan

dan dilengkapi kemampuan untuk melakukan perannya. Efektifitas manajemen pembangunan juga secara tidak langsung menyatakan efektivitas pembangunan manajemen. Isu ini dipandang memiliki hubungan erat baik pada negara-negara yang berada dalam transisi ekonomi maupun pada negara-negara yang perekonomiannya telah maju. Reformasi sektor publik dikenal sebagai komponen penting dari program reformasi, baik pada negara yang mengalami transisi ekonomi maupun yang telah maju.

Reformasi sektor publik dibanyak negara telah mampu mencapai tujuan ekonomi dan efisiensi. Namun harus disadari bahwa pemerintahan modern tidak hanya sekedar efisiensi, tetapi juga terkait dengan hubungan akuntabilitas antara negara dengan masyarakatnya; masyarakat yang yang diperlakukan tidak hanya semata-mata sebagai konsumen atau kustomer (seperti di dalam pendekatan manajemen publik baru) tetapi sebagai warga negara (*citizen*), yang memiliki hak terhadap pemerintahnya, menilai tindakan yang telah diambil termasuk berbagai kegagalan pemerintahnya. Warga negara berkeinginan agar pelayanan yang diperoleh lebih efisien, dan idealnya dengan pajak yang rendah, dan secara simultan hak-hak mereka dapat dilindungi, suara mereka didengar, nilai-nilai dan pilihan-pilihannya dihargai.

Pada level penyediaan layanan, perubahan manajerial dapat mengurangi akuntabilitas: pada level sistem pemerintahan, institusi akuntabilitas dapat menjadi lemah atau tidak hidup. Isu-isu akuntabilitas, pengawasan, responsivitas, transparansi dan partisipasi, paling tidak sangat penting sebagai isu ekonomi dan efisiensi. Dengan demikian bagi warga negara, pertanyaan tentang hukum hanya dapat dijamin oleh negara – dan dilegitimasi oleh negara.

#### D. Akuntabilitas dan *Good Governance*

Istilah “*governance*” pada dasarnya dimaksudkan untuk menggambarkan perhatian yang lebih luas, namun istilah tersebut ternyata tidak tepat dan tidak disepakati, dan ini terlihat ketika kita menilai serangkaian definisi yang dipakai oleh beberapa badan publik yang berbeda. Kelahiran kata *good governance* dalam definisi politik pertama kali digunakan oleh *Department for International Development* (tadinya pembangunan administrasi di luar Inggris) di bawah label “*good government*”. Hal ini disusun atas empat komponen utama. *Pertama*, legitimasi yang menyatakan secara tidak langsung bahwa sistem pemerintahan mesti berlangsung dengan persetujuan pemerintah, karenanya pemerintah mempunyai alat untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan; *kedua*, legitimasi dipandang di dalam dokumen kebijakan di Inggris dijamin oleh kaum pluralis, dan demokrasi multi partai. Akuntabilitas mencakup keberadaan mekanisme dimana ada kepastian bahwa pejabat publik dan pemimpin politik bertanggungjawab bagi tindakannya, bertanggungjawab terhadap penggunaan sumberdaya publik, dan melakukan transparansi pemerintah serta kebebasan media. Memiliki kompetensi membuat dan menjalankan kebijakan publik yang tepat termasuk kemampuan menyampaikan layanan kepada publik secara efisien.

Definisi lain diberikan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP, 1995:55) yaitu dengan membedakan label dari kata ‘*governance*’. Sedangkan prinsip-prinsip *governance* tetap sama, dan hanya ada dua variasi makna yang signifikan. *Pertama*, UNDP kurang menekankan pada asumsi superioritas pluralis, multi partai, sistem yang berorientasi pada pemilihan, pengakuan bahwa bentuk kewenangan politik dapat menggabungkan efisiensi dan akuntabilitas di dalam cara yang berbeda. *Kedua*, mengakui bahwa ada satu masalah mengenai

nilai-nilai budaya, dan bahwa sistem *governance* dapat beragam dalam merespon perbedaan susunan nilai-nilai yang ditempatkan pada ekonomi, politik, dan hubungan sosial, memberikan perbedaan bobot ide-ide seperti partisipasi, individualitas, perintah dan kewenangan.

Contoh terakhir yang digunakan oleh Bank Dunia, dimana melompat dari label netral '*governance*' menjadi "*good governance*". Menurut dokumen Bank Dunia *good governance* pada awalnya lebih menekankan pada ketebukaan dan pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi, kebijakan profesional dan manajemen kapabilitas, dan penggunaan dengan efektif sumberdaya untuk mencapai perbaikan tingkat pembangunan sosial dan ekonomi. Namun kondisi tersebut masih memerlukan partisipasi masyarakat yang kuat, pelaksanaan yang jelas di dalam aturan hukum, sehingga akhirnya Bank Dunia tidak dapat menolak loncatan ke arah wilayah teritori politis (dan kontroversial); dan hampir separuh pinjaman pemerintah antara tahun 1991-1993 merupakan proyek dengan konotasi politik yang tidak dapat dielakkan (World Bank, 1994: 307).

Jika membandingkan definisi tersebut, maka kita bisa melihat bahwa *good governance* bertujuan untuk mencapai tidak hanya sekedar manajemen efisiensi dari sumber daya ekonomi dan finansial, atau layanan publik tertentu, tetapi juga merupakan strategi reformasi yang luas untuk memperkuat lembaga masyarakat sipil, dan membuat pemerintah lebih terbuka, responsif, akuntabel dan demokratis. Karena itu, manajemen publik adalah komponen strategik yang lebih luas dari *good governance* dan kita bisa melihat bahwa pertimbangan efisiensi manajemen publik senantiasa dikombinasikan dengan pertimbangan akuntabilitas pemerintah (Stokke, O. 1995: 209).

Pertanyaan terakhir yang muncul jika kita mulai mengidentifikasi model efisiensi global (*new public management*),



dapatkah juga kita mengidentifikasi model global akuntabilitas tersebut? jika kita menghubungkan dan mengintegrasikan dua model ini (efisiensi dan akuntabilitas) maka kita kemudian pada akhirnya akan bersentuhan dengan satu model global pemerintahan dengan penerapan yang bersifat universal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, perhatian yang semakin tinggi tentang akuntabilitas mencapai momentumnya ketika paradigma administrasi publik memasuki era yang disebut dengan *good governance*. Karena itu, *good governance* pada saat ini merupakan salah satu terminologi yang sangat populer dan merupakan konsep yang banyak diacu dalam studi administrasi publik. *Good governance* dianggap sebagai obat mujarab untuk menyembuhkan penyelenggaraan pemerintahan yang sangat terpusat pada kekuasaan pemerintah semata. Agere menggambarkan *good governance* sebagai sebuah paradigma baru dalam administrasi publik (Sam Agere, 2000:1). Mahathir Mohamad mendefinisikan *good governance* sebagai berikut:

*“....good governance as the exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation’s affairs. This include the complex array of mechanisms, processes, relationships and institutions through which citizens manage affairs involving public life.”* (Sam Agere, 2000:2).

Definisi Mahathir Muhamad di atas memperlihatkan bahwa *good governance* merupakan pelaksanaan dari otoritas politik, ekonomi dan administratif dalam kaitannya dengan pengelolaan negara. Termasuk di dalamnya mekanisme, proses, hubungan dan institusi yang bersifat kompleks dimana masyarakat juga ikut mengelolanya sejauh menyangkut kepentingan umum. Sedangkan pilar utama dalam *good governance* adalah akuntabilitas, transparansi, pemberantasan korupsi, partisipasi, dan kepastian hukum (Sam Agere, 2000:2).

Pemerintahan yang baik dan bersih atau *good and clean government* juga merupakan bagian penting dari *good governance*.

Itu berarti pemerintah harus bebas dari pelaksanaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Sam Agere, 2000:61). Sejalan dengan keterlibatan yang semakin luas dan mendalam dari pemerintah ke berbagai proses pembuatan kebijakan pelayanan publik dan implementasinya, maka semakin bertambah pula kegiatan dan ukuran birokrasi pemerintahan. Selain itu, birokrasi pemerintahan masih dibebani dengan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan tradisional, yaitu mempertahankan hukum dan ketertiban masyarakat, serta membangun berbagai infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Pada masa kini pemerintah terpanggil pula untuk menangani masalah-masalah yang lebih luas seperti sektor pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Keadaan ini memposisikan birokrasi sebagai pemain sentral dalam melayani berbagai kebutuhan publik, mulai dari perumus dan pembuat kebijakan, sebagai agen perubahan sosial, agen pembangunan, sebagai manajer untuk menghadapi krisis, pekerja sosial, perantara berbagai kelompok kepentingan (*interest brokers*), pejabat humas (*public relations expert*), pengatur tata niaga berbagai komoditas ekonomi, sampai menjadi juru bicara berbagai kelompok kepentingan (OPD.Jabbara, 1989:1).

Akibat lebih lanjut dari situasi ini semakin terkonsentrasinya kekuasaan di tangan para pelaksana kebijakan publik. Jika kondisi ini tidak dikontrol dan dicermati dengan baik, berbagai kemungkinan tindak penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pelaksana kebijakan publik tidak dapat dihindari, seperti melakukan korupsi, tindakan tidak etis, sampai penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi dan golongan. Perilaku penyimpangan tersebut terbuka lebar karena kesempatan dan peluang untuk melakukan tindakan itu relatif cukup lebar bagi pemegang mandat pelayanan publik.

Dengan demikian, kebijakan publik yang telah dihasilkan pemerintah harus dapat dinilai akuntabilitasnya termasuk dalam hal kualitas pelayanan publik yang telah mereka hasilkan. Dalam kondisi ini terlihat betapa pentingnya akuntabilitas yang mengedepankan aspek-aspek *good governance*. Atas dasar itulah, maka penting ditekankan bahwa mekanisme akuntabilitas penyelenggara negara tidak hanya bertumpu pada akuntabilitas politik saja seperti yang banyak dipaktekkan selama ini, dimana bila pemerintah memberikan laporan pertanggungjawaban di parlemen dianggap telah menjalankan akuntabilitasnya. Yang perlu dikembangkan lebih jauh sejalan nafas prinsip *good governance* yaitu mekanisme akuntabilitas profesional/birokrat, legal, organisasi/birokrasi, masyarakat/social.



## BAB II

### KONSEP AKUNTABILITAS UBLIK

**R**epublik Indonesia saat ini sedang memasuki masa pemulihan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Seluruh pihak termasuk pemerintah sendiri mencoba mengatasi hal ini dengan melakukan reformasi di segala bidang. Salah satu usaha memulihkan kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah dengan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dengan mencoba mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau yang dikenal dengan istilah *good governance*. Upaya ini juga didukung oleh banyak pihak baik pemerintah sendiri sebagai lembaga eksekutif, DPR sebagai lembaga legislatif, pers dan juga oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Menurut Arie Soelendro (2000:13), unsur-unsur pokok upaya perwujudan *good governance* ini adalah *transparency, fairness, responsibility dan accountability*. Sedangkan Hadori Yunus (2000:1) berpendapat bahwa unsur-unsur *good governance* adalah tuntutan keterbukaan (*transparency*), peningkatan efisiensi di segala bidang (*efficiency*), tanggung jawab yang lebih jelas (*responsibility*) dan kewajaran (*fairness*). Hal ini muncul sebenarnya sebagai akibat dari perkembangan proses demokratisasi di berbagai bidang serta kemajuan profesionalisme.

Dengan demikian pemerintah sebagai pelaku utama pelaksanaan *good governance* ini dituntut untuk memberikan

pertanggungjawaban yang lebih transparan dan lebih akurat. Hal ini semakin penting untuk dilakukan dalam era reformasi ini melalui pemberdayaan peran lembaga-lembaga kontrol sebagai pengimbang kekuasaan pemerintah.

Memasuki era reformasi, masyarakat di sebagian besar wilayah Indonesia, baik di propinsi, kota maupun kabupaten, bahkan di Perguruan Tinggi, para dosen saat ini mulai sibuk membahas laporan pertanggungjawaban kepada atasannya masing-masing dengan lebih seksama. Kerap terjadi pernyataan ketidakpuasan atas hasil kinerja kepemimpinan dalam melakukan manajemen pelayanan publik maupun penggunaan anggaran belanja. Melihat pengalaman di negara-negara maju, ternyata dalam pelaksanaannya, keingintahuan masyarakat tentang akuntabilitas kinerja tidak dapat dipenuhi hanya oleh informasi keuangan saja. Masyarakat ingin tahu lebih jauh apakah pemerintah yang dipilihnya telah beroperasi dengan ekonomis, efisien dan efektif.

## **A. Konsep Dasar Akuntabilitas**

### **1. Pengertian akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/ sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. (Syahrudin Rasul, 2002: 8). Menurut UNDP, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang (Tim Penyusun Sistem AKIP, 2002; 12).

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi) (Turner and Hulme; 1997:17).

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun secara horizontal.

## **2. Aspek-Aspek Akuntabilitas**

Menurut Malik Imron, (2005:24), ada 5 aspek yang harus difahami, berkaitan dengan akuntabilitas, diantaranya:

### **a. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan**

Akuntabilitas adalah komunikasi dua arah/ sebagaimana yang diterangkan oleh *Auditor General Of British Columbia* "yaitu merupakan sebuah kontrak antara dua pihak "

### **b. Akuntabilitas Berorientasi Hasil**

Pada struktur organisasi sektor swasta dan publik saat ini akuntabilitas tidak melihat kepada input ataupun output melainkan kepada outcome.

### **c. Akuntabilitas memerlukan pelaporan**

Pelaporan adalah tulang punggung dari akuntabilitas Akuntabilitas itu tidak ada artinya tanpa konsekuensi. Kata kunci yang digunakan dalam mendiskusikan dan mendefinisikan akuntabilitas adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu mengindikasikan kewajiban dan kewajiban datang bersama konsekuensi.

### **d. Akuntabilitas meningkatkan kinerja**

Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kinerja, bukan untuk mencari kesalahan dan memberikan hukuman.

## **3. Alat-alat Akuntabilitas**

Karena akuntabilitas memerlukan pelaporan, fokus dari alat-alat akuntabilitas adalah pada pelaporan kinerja, baik perhatian maupun hasilnya. Malik Imron, (2005:25), Alat-alat Akuntabilitas mencakup:

### **a. Rencana Strategik**

Rencana strategik adalah suatu proses yang membantu

organisasi untuk memikirkan tentang sasaran yang harus diterapkan untuk memenuhi misi mereka dan arah apa yang harus dikerjakan untuk mencapai sasaran tersebut. Hal tersebut adalah dasar dari semua perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan suatu organisasi. Manfaat dari Rencana Strategik antara lain membantu kesepakatan sekitar tujuan, sasaran dan prioritas suatu organisasi; menyediakan dasar alokasi sumber daya dan perencanaan operasional; menentukan ukuran untuk mengawasi hasil; dan membantu untuk mengevaluasi kinerja organisasi.

#### **b. Rencana Kinerja**

Rencana kinerja menekankan komitmen organisasi untuk mencapai hasil tertentu sesuai dengan tujuan, sasaran, dan strategi dari rencana strategis organisasi untuk permintaan sumber daya yang dianggarkan.

#### **c. Kesepakatan Kinerja**

Kesepakatan kinerja didesain, dalam hubungannya antara dengan yang melaksanakan pekerjaan untuk menyediakan sebuah proses untuk mengukur kinerja dan bersamaan dengan itu membangun akuntabilitas.

#### **d. Laporan Akuntabilitas**

Dipublikasikan tahunan, laporan akuntabilitas termasuk program dan informasi keuangan, seperti laporan keuangan yang telah diaudit dan indikator kinerja yang merefleksikan kinerja dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan utama organisasi.

#### **e. Penilaian Sendiri**

Adalah proses berjalan dimana organisasi memonitor kinerjanya dan mengevaluasi kemampuannya mencapai tujuan kinerja, ukuran capaian kinerjanya dan tahapan-tahapan, serta mengendalikan dan meningkatkan proses itu.

#### **f. Penilaian Kinerja**

Adalah proses berjalan untuk merencanakan dan memonitor kinerja. Penilaian ini membandingkan kinerja aktual



selama periode review tertentu dengan kinerja yang direncanakan. Dari hasil perbandingan tersebut, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, perubahan atas kinerja yang diterapkan dan arah masa depan bisa direncanakan.

#### **g. Kendali Manajemen**

Akuntabilitas manajemen adalah harapan bahwa para manajer akan bertanggungjawab atas kualitas dan ketepatan waktu kinerja, meningkatkan produktivitas, mengendalikan biaya dan menekan berbagai aspek negatif kegiatan, dan menjamin bahwa program diatur dengan integritas dan sesuai peraturan yang berlaku.

#### **4. Tingkatan Akuntabilitas**

Ada sepuluh tingkatan akuntabilitas menurut majalah Akuntansi (Malik Imron, 2005:19), diantaranya:

- a. Akuntabilitas Personal
- b. Akuntabilitas berkaitan dengan diri sendiri.
- c. Akuntabilitas Individu
- d. Akuntabilitas yang berkaitan dengan suatu pelaksanaan.
- e. Akuntabilitas Tim
- f. Akuntabilitas yang dibagi dalam kerja kelompok atau tim.
- g. Akuntabilitas Organisasi
- h. Akuntabilitas Internal dan Eksternal didalam organisasi.
- i. Akuntabilitas Stakeholders
- j. Akuntabilitas yang terpisah antara stakeholders dan organisasi.

#### **B. Akuntabilitas Publik**

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor *public* terdiri atas beberapa dimensi. Menurut Elwood (Syahrudin Rasul, 2002: 11), mengelompokan dimensi akuntabilitas ada lima, yaitu:

##### **1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran**

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang

disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan kepatuhan terhadap hukum.

## **2. Akuntabilitas manajerial**

Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (performance accountability) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

## **3. Akuntabilitas program**

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang akan ditetapkan dapat dicapai atau tidak. Alternatif program yang memberikan hasil yang maksimal dengan biaya yang minimal.

## **4. Akuntabilitas kebijakan**

Lembaga-lembaga public hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggung-jawaban pemerintah atas kebijakan yang telah diambil.

## **5. Akuntabilitas financial**

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (public money) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas financial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar.

### **C. Akuntabilitas dan Transparansi**

#### **1. Akuntabilitas dan transparansi**

Akuntabilitas dan transparansi merupakan atribut yang terpisah. Akan tetapi, kedua istilah tersebut tidak independen, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan transparansi (Shende dan Bennett, 2004).

Sementara itu, Mohamad dkk. (2004) menyatakan bahwa esensi dari demokrasi adalah akuntabilitas, sedangkan esensi dari akuntabilitas adalah keterbukaan (transparansi).

Akuntabilitas muncul sebagai jawaban terhadap permasalahan information asymmetry. Teori asimetri informasi beranggapan bahwa banyak terjadi kesenjangan informasi antara pihak manajemen yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak konstituen atau masyarakat yang berada di luar manajemen. Scott (1997) menjelaskan bahwa kelanggengan suatu organisasi ditentukan oleh kemampuan untuk menciptakan informasi yang terbuka, seimbangan dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Fungsi, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada

peraturan perundang-undangan (KK, SAP,2005).

Adapun, akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (KK, SAP,2005).

Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban (LAN, 2003)

## **2. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan**

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan.

Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN, 2003). Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2002).

Transparansi mengisyaratkan bahwa laporan tahunan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah dalam rangka menjalankan amanat rakyat. Sekarang ini, banyak Negara mengklasifikasikan catatan atau laporan sebagai top secret, secret, confidential dan restricted, dan official secrets acts membuat unauthorized disclosure terhadap suatu criminal offence. Kultur secara umum di banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang, adalah kerahasiaan (Shende dan Bennet, 2004).

Pelaporan keuangan adalah segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan.

Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat (misalnya penyusunan standar, badan pengawas dari pemerintah atau pasar modal, organisasi profesi, dan entitas pelapor), peraturan yang berlaku termasuk PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum atau *Generally Accepted Accounting Principles/ GAAP*).

Setiap entitas pada hakikatnya harus mempertanggungjawabkan seluruh proses kegiatan kepada stakeholder termasuk masyarakat umum agar dapat menunjukkan bentuk transparansi serta akuntabilitas yang baik. Tujuan penyajian laporan keuangan sektor publik menurut Governmental Accounting Standard Board (GASB, 1999), adalah sebagai berikut:

- a. Untuk membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik;
- b. Untuk membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, keterbatasan kemampuan atau sumber daya untuk memperoleh informasi dan oleh sebab itu mereka menyandarkan pada laporan sebagai sumber informasi penting.

### **3. Kriteria Akuntabilitas Laporan Keuangan**

Kriteria Akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut.

- b. Pertanggungjawaban dana publik
- c. Penyajian tepat waktu
- d. Adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan akan memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Adanya pertanggungjawaban terbuka;
- b. Adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan;
- c. Adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja.

Jika dilihat dari definisi dan kriteria di atas, tidak ada kriteria yang jelas mengenai seperti apa bentuk laporan keuangan itu sehingga sebuah laporan keuangan dapat disebut

sebagai laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Definisi dan criteria di atas hanya mencakup akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, bukan laporan keuangan.

Dalam ranah keuangan public, UU no 17 tahun 2003 menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan publik. Laporan keuangan memang merupakan salah satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan public. Dan ini berarti laporan keuangan yang disusun pun harus memenuhi syarat akuntabilitas dan transparansi. Namun, hingga saat ini belum ada criteria normative mengenai transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Bahkan dalam PSAP pun belum disebutkan criteria laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan criteria laporan yang relevan dan andal. Dalam PSAK no 1, laporan keuangan disebut relevan jika berguna bagi pengguna informasi untuk mengambil keputusan. Sedangkan laporan keuangan disebut andal jika dapat memenuhi syarat sebagai berikut.

- a. Mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan perusahaan.
- b. Menggambarkan substansi ekonomi dari sesuatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya.
- c. Netral, yaitu bebas dari keberpihakan.
- d. Mencerminkan kehati-hatian.
- e. Mencakup semua hal yang material

Jadi, jelas jika sebuah laporan keuangan memenuhi syarat tersebut, maka laporan keuangan dapat dikatakan relevan dan andal.

Menurut Mulyadi (2007) menguraikan pengertian kinerja keuangan ialah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya

Analisis laporan keuangan berarti melakukan kegiatan menganalisis atau menelaah hubungan antara satu atau lebih pos-pos dalam neraca, Angka-angka yang tertera dalam laporan keuangan itu menggambarkan kinerja perusahaan dan kemampuan manajemennya dalam mengelola usaha tersebut. Dari angka tersebut juga dapat dijadikan dasar untuk memproyeksikan apa yang akan terjadi.

#### **D. Kebijakan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan di Indonesia**

Di Indonesia diatur mengenai ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Peraturan mengenai ketepatan waktu tersebut diatur oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Peraturan tersebut diatur dalam UU No.8 tahun 1995 dan Peraturan Bapepam No. X.K.2 keputusan ketua Bapepam No.80/PM/1996 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala setiap perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangantahunan yang sudah diaudit selambat-lambatnya 120 hari sejak tanggalberakhirnya tahun buku.

Pada tanggal 30 September 2003 Bapepam mengeluarkan PeraturanBapepam No X.K.2, Lampiran keputusan ketua Bapepam No. Ke.36/PM/2003tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala untuk memperbaharui keputusan ketua Bapepam No.80/PM/1996. Pada keputusan ketua Bapepam dijelaskan bahwa laporan keuangan harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga atau 90 hari setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Apabila perusahaan tidak menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu maka akan dikenakan sanksi administratif. Dari peraturan tersebut diketahui bahwa ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tersebut

sangat penting. Perusahaan yang tidak menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan pasal 63 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pasar Modal yang menyatakan bahwa: "Emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, dikenakan sanksi denda Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dengan ketentuan jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

### **1. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan**

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu:

- a. Dapat Dipahami; Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami peserta dan bentuk serta istilahnya disesuaikan dengan batas para pengguna;
- b. Relevan; Laporan keuangan dianggap jika informasi yang disajikan didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna;
- c. Keandalan; Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material;
- d. Dapat diperbandingkan; Informasi yang disajikan akan lebih berguna bila dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan pada periode ((Suwardjono, 2005.:122).

### **2. Tujuan Pelaporan Keuangan**

Menurut SFAC No. 1 tentang *Objective of Financial Reporting by Business Enterprises* (Yadiati, 2007: 44), tujuan pelaporan keuangan adalah:



- a. Menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan pengguna potensial lainnya dalam membantu proses pengambilan keputusan yang rasional atas investasi, kredit, dan keputusan lain yang sejenis.
- b. Menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan pengguna lainnya yang membantu dalam menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian prospek penerimaan kas dari deviden atau bunga dan pendapatan dari penjualan, penebusan atau jatuh tempo, sekuritas atau pinjaman. Menaksirkan aliran kas masuk (future cash flow) pada perusahaan.
- c. Memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi, klaim atas sumber daya tersebut dan perubahannya.

Rumusan tujuan pelaporan keuangan tersebut, berkaitan dengan aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Informasi yang berguna untuk keputusan kredit dan investasi.
- b. Informasi yang berguna untuk menilai prospek arus kas.
- c. Informasi tentang alokasi sumber daya ekonomi, klaim dan perubahannya.

Tujuan laporan keuangan menurut Trueblood (Suwardjono, 2005: 116), dikhtisarkan sebagai berikut:

- a. Tujuan dasar laporan keuangan adalah menyediakan informasi untuk membuat dasar keputusan ekonomi.
- b. Pemakaian informasi memiliki keterbatasan wewenang informasi. Oleh karena itu, bagaimana laporan tersebut harus dapat menyajikan informasi kepada berbagai jenis pengguna yang memiliki segala keterbatasan.
- c. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh investor dan kreditor dalam menaksirkan earning power dan aliran kas

perusahaan. Perbandingan dan evaluasi aliran kas, baik jumlah dan ketidakpastian yang meliputinya.

- d. Earning power adalah bukan semata-mata kemampuannya dalam menghasilkan laba bersih semata (akuntansi) tetapi meliputi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas.

Tujuan laporan keuangan harus menyajikan informasi yang *factual*, aktual, objektif, dan informative yang cukup untuk melakukan penafsiran tentang transaksi-transaksi bisnis yang berguna untuk memprediksi, membandingkan earning power tersebut. Perlu diketahui bahwa informasi yang diperlukan untuk menafsirkan tentang transaksi-transaksi bisnis yang berguna untuk memprediksi, membandingkan earning power tersebut. Perlu diketahui bahwa informasi yang diperlukan untuk penafsiran dan prediksi tersebut kadang kala bersifat subjektif. Oleh karena itu, asumsi-asumsi yang digunakan mendasari evaluasi dan prediksi tersebut kadang kala bersifat subjektif, maka harus diungkapkan.

Dari tujuan pelaporan dalam teori akuntansi yang telah diuraikan diatas, diakui bahwa kenyataannya masih ada kelemahan yang dirasakan dari konseptual framework tersebut. Kelemahan tersebut pada akhirnya akan menimbulkan erosi kredibilitas pelaporan keuangan seperti berikut ini:

- a. Beberapa metode akuntansi diterapkan untuk fakta yang sama
- b. Metode akuntansi kadang diterapkan untuk melakukan praktik income smooting secara artificial.
- c. Laporan keuangan gagal memberikan tanda terhadap masalah keuangan perusahaan dimasa mendatang.
- d. Off balance sheet financing dianggap praktik lazim.

Sementara itu, bagi organisasi nirlaba (nonbisnis) tujuan pelaporan keuangan akan berbeda dengan pelaporan keuangan untuk perusahaan bisnis. Perbedaan tujuan tersebut dikarenakan karakteristik organisasi yang berbeda. Berikut adalah karakteristik dari organisasi nonbisnis antara lain:

- a. Tidak terdapatnya indikator kinerja seperti pada perusahaan bisnis.
- b. Tujuannya tidak mencari keuntungan
- c. Jumlah sumber daya yang diterima dari penyedia sumber daya, maka penyedia sumber daya tersebut tidak berharap menerima pembayaran atau manfaat ekonomi dari sumber daya yang diberikannya.
- d. Hak kepemilikan tidak dapat dijual, ditransfer atau ditebus, atau tidak terdapat hak untuk memperoleh bagian distribusi sumber daya residual ketika organisasi tersebut dilikuidasi.

Contoh organisasi nirlaba adalah yayasan social, lembaga swadaya masyarakat (LSM), non-government organization (NGO), universitas, unit pemerintahan pusat dan daerah, dan organisasi keagamaan. Jadi siapa pengguna informasi dari organisasi nonbisnis ini?

Berikut ini merupakan pengguna informasi dari organisasi nirlaba, diantaranya:

- e. Penyandang dana dan pemberi kontribusi
- f. Anggota dari organisasi tersebut yang memperoleh manfaat dari jasa yang diberikan oleh organisasi tersebut.
- g. Badan pengawas yang mengatur dan bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan dari organisasi tersebut.
- h. Manajer yang mengelola organisasi tersebut. (Yadiati, 2007:53)

*Statement of Financial Accounting Concepts* (SPAC) mengemukakan bahwa tujuan pelaporan keuangan organisasi nonbisnis sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi yang berguna kepada pengguna dalam mengambil keputusan rasional tentang alokasi sumber daya dalam organisasi.
- b. Memberikan informasi yang berguna bagi penyedia sumber daya dalam menilai jasa yang dalam organisasi nonbisnis dan kemampuannya untuk meneruskan penyediaan jasa tersebut.
- c. Memberikan informasi yang berguna untuk menilai pekerjaan manajemen dan kinerja manajer organisasi nonbisnis dalam melaksanakan tugasnya, seperti akuntabilitasnya.
- d. Memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi, kewajiban, penggunaan sumber daya (aktivitas organisasi), atau sumber daya bersih dari organisasi non bisnis tersebut. (Suwardjono, 2005.:133).

### **1. Kriteria Pelaporan Keuangan**

Dalam paragraf berikutnya SFAC mengemukakan bahwa pelaporan harus menyajikan tentang kinerja dan *earnings* dari satu kesatuan usaha tersebut, yaitu:

- a. Pelaporan harus menyediakan informasi tentang kinerja keuangan perusahaan (financial performance) selama satu periode tertentu.
- b. Pelaporan kinerja keuangan tersebut berguna untuk mengukur earning power dengan seluruh komponennya, karena para pengguna sangat berkepentingan atas prospek penerimaan kas bersih dari perusahaan.
- c. Pelaporan keuangan harus menyajikan informasi, bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan kepada para stakeholders-nya atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang telah dipercayakan kepada manajemen.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA PUBLIK**

**U**ndang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) nomor 20 Tahun 2003 pasal 47 ayat 2 menyatakan bahwa sumber anggaran pendidikan berasal dari anggaran internal dan eksternal. Anggaran internal bersumber dari masyarakat dalam bentuk dana pendidikan dari orang tua peserta didik yang diserahkan kepada sekolah, sedangkan anggaran eksternal bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, pasal 49 UU Sisdiknas menyatakan bahwa pemerintah (pusat maupun daerah) harus mengalokasikan minimal 20% anggarannya untuk keperluan sektor pendidikan di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Dana penyelenggaraan pendidikan tidak cukup hanya dari APBN. Pihak sekolah juga harus menggali dana dari orang tua murid. Kesemua anggaran tersebut dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS).

Besarnya perhatian pemerintah dan masyarakat tersebut, menuntut institusi pendidikan (Sekolah-Pendidikan Tinggi), untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja. Sistem akuntansi digunakan sebagai alat untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan entitas sebagai suatu kesatuan dari unit-unitnya serta penafsiran atas hasil-hasil dari aktivitas (sistem dan mekanisme penganggaran) yang dilakukan.

## A. Konsep dasar Kinerja

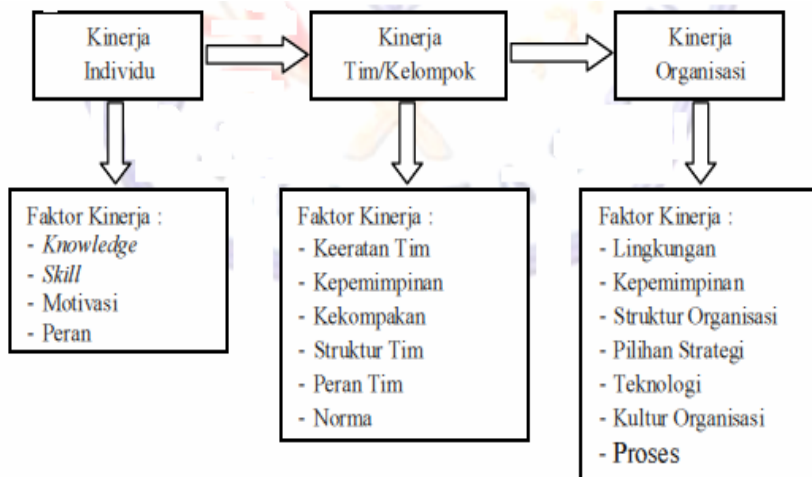
### 1. Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan sebuah istilah yang mempunyai banyak arti. Menurut Abdul Halim (2002) kinerja dapat berarti suatu prestasi kerja dan proses penyelenggaraan di mana tujuan organisasi ingin dicapai. Definisi lain dari kinerja menurut Sri Ningsih (2002) kinerja mungkin berfokus pada *input*, misalnya uang, staf/karyawan, wewenang yang legal, dukungan politik atau birokratis. Kinerja mungkin juga berfokus pada aktivitas atau proses yang mengubah *input* menjadi *output* dan kemudian menjadi *outcome*, misalnya: kesesuaian program atau aktivitas dengan hukum, peraturan, dan pedoman yang berlaku atau standar proses yang ditetapkan.

Kinerja mungkin juga berfokus pada jumlah *output* suatu program atau kegiatan, misalnya jumlah produk atau jasa yang telah diberikan atau disediakan bagi kolega, klien dan publik atau masyarakat. Kinerja juga mungkin berfokus pada efisiensi atau produktivitas yang menghubungkan *output* dengan *input*. Sedangkan menurut Indra Bastian (2001), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi suatu organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi.

Maksudnya setiap kegiatan organisasi harus diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah organisasi di masa yang akan datang dalam visi dan misi organisasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian kinerja adalah suatu konstruk yang bersifat multidimensional yang pengukurannya bervariasi tergantung kompleksitas faktor-faktor yang membentuk kinerja.

Kinerja merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh seluruh manajemen, baik pada tingkatan organisasi kecil maupun besar. Hasil kerja yang dicapai oleh organisasi atau karyawan adalah bentuk pertanggung jawaban kepada organisasi dan publik. Kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berhubungan dengan kepuasan kerja karyawan dan tingkat besaran imbalan yang diberikan, serta dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan dan sifat-sifat individu. Menurut Moehariono (2012:133), pengaruh kinerja individu dan kelompok terhadap kinerja organisasi disajikan pada gambar 3.1 berikut:



**Gambar 2.1**  
**Pengaruh kinerja individu dan kelompok terhadap kinerja organisasi**

Sumber : Moehariono (2012)

## 2. Indikator Kinerja

Indikator kinerja menurut Mahmudi (2002) didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Definisi di atas juga dikemukakan oleh LAN (2003:13) dalam mendefinisikan indikator kinerja, dan

ditambahkan dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*).

Penetapan indikator kinerja yang baik sangatlah penting, karena indikator kinerja dapat dijadikan suatu dasar dalam mengukur suatu kinerja. Dengan adanya indikator kinerja kita dapat mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Oleh sebab itu, penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasikan.

### **3. Penilaian dan Pengukuran Kinerja**

Penilaian kinerja menurut Simanjuntak (2005) adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian operasional dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan menurut Mahmudi (2002) pengukuran kinerja didefinisikan sebagai pengukuran hasil dan efisiensi jasa atau program berdasarkan basis reguler (tetap, teratur). Untuk melakukan pengukuran kinerja, diperlukan informasi akuntansi terutama menentukan indikator kinerja (*performance indicator*) sebagai dasar penilaian kinerja. Manajemen akan mengalami kesulitan untuk melakukan pengukuran kinerja apabila tidak ada indikator kinerja yang memadai. Dalam pengukuran kinerja, informasi yang digunakan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu:

#### **a. Informasi Finansial**

Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Analisis varians secara garis besar berfokus pada:



- 1) Varians pendapatan (*revenue variance*)
- 2) Varians pengeluaran (*expenditure variance*)
- 3) Varians belanja rutin (*recurrent expenditure variance*)
- 4) Varians belanja investasi/modal (*capital expenditure variance*)

#### **b. Informasi Non-Finansial**

Penilaian kinerja menurut Simanjuntak (2005) memberikan dua alasan penting, yaitu:

- 1) Untuk memperbaiki pelayanan publik (*improved public service*)
- 2) Untuk memperbaiki akuntabilitas (*improved accountability*)

#### **B. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Definisi kinerja instansi pemerintah sendiri menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No: 239/IX/6/8/2003 adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

##### **1. Pengertian Instansi Pemerintah**

Definisi instansi pemerintah menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No: 239/IX/6/8/2003 adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menurut peraturan perundangan yang berlaku terdiri dari: Kementrian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Markas Besar TNI (meliputi: Markas Besar TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut), Kepolisian Republik Indonesia, Kantor Perwakilan Pemerintah RI di Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Perangkat Pemerintahan Provinsi, Perangkat Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan lembaga/badan lainnya yang dibiayai dari anggaran negara, termasuk Lembaga Pendidikan.

## **2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

### **3. Syarat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Agar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara
- b. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan
- c. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
- d. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh
- e. Jujur, obyektif, transparan, dan akurat
- f. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. (LAN, 2003:5).

### **C. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Sistem merupakan suatu cara tertentu dan biasanya dilakukan berulang untuk melaksanakan suatu serangkaian aktivitas. Sejumlah karakteristik sistem yakni lebih kurang membentuk ritme tertentu, terkoordinasi, dan mengulang serangkaian tahap tertentu (Anthony dan Govindarajan, 2002). Pembangunan serangkaian sistem dalam organisasi bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip pengorganisasian yang baik

dalam rangka mencapai tujuan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja (LAN, 2003:3).

## **1. Kebijakan Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 dikatakan bahwa tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan atas semua kegiatan utama instansi pemerintah yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Dikatakan juga dalam Inpres tersebut bahwa sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

- a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya
- b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah
- c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan nasional
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

## **2. Strategi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

### **a. Perencanaan Strategis**

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1

(satu) sampai 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, sehingga Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan/sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai (Instruksi Presiden No : 7 Tahun 1999). Dengan perencanaan strategis berarti organisasi telah mempunyai komitmen dan menyiapkan diri melakukan perubahan (LAN, 2003:14).

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

### **1) Visi**

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah, visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif (LAN, 2003:7). Menurut Keputusan Kepala LAN Nomor 239/1X/6/8/2003 rumusan visi hendaknya:

- (a) Mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah organisasi
- (b) Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas
- (c) Mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategik yang terdapat dalam sebuah organisasi
- (d) Memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan

membentuk masa depan organisasinya

- (e) Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi
- (f) Mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi

Dan dengan adanya rumusan visi yang jelas, diharapkan mampu:

- (a) Menarik komitmen dan menggerakkan orang
- (b) Menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi
- (c) Menciptakan standar keunggulan
- (d) Menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan

Visi instansi perlu ditanamkan pada setiap unsur organisasi sehingga menjadi visi bersama (*shared vision*) yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi.

## **2) Misi**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan (LAN, 2003:7). Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi karena misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, misi juga membawa organisasi kepada suatu fokus, menjelaskan mengapa organisasi ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya.

Menurut Keputusan Kepala LAN Nomor 239/1X/6/8/ 2003, Perumusan misi instansi pemerintah harus memperhatikan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan stratejik. Rumusan misi hendaknya:

- (a) Melingkup semua pesan yang terdapat dalam visi
- (b) Memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan

dicapai

- (c) Memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah
- (d) Memperhitungkan berbagai masukan dari stakeholders

### **3) Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan (LAN, 2003:8). Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan juga tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa datang.

Kriteria penyusunan tujuan stratejik menurut Modul Diklat Teknis LAKIP yang diterbitkan oleh Departemen Dalam Negeri Tahun 2006 adalah sebagai berikut:

- (a) Harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah, dan memperjelas visi yang telah ditetapkan;
- (b) Merupakan jawaban dari prioritas atau permasalahan yang teridentifikasi dalam kajian lingkungan internal/eksternal serta dikembangkan untuk menjawab isu-isu stratejik;
- (c) Tidak akan mengalami perubahan yang bermakna, kecuali apabila terjadi sesuatu perubahan yang sangat mendasar atau apabila hasil yang diinginkan dalam mengatasi isu stratejik tertentu tidak tercapai;
- (d) Mencangkup jangka waktu yang relatif panjang, lebih dari dua tahun;
- (e) Menjawab kesenjangan antara tingkat pelayanan pada saat kini dengan tingkat pelayanan yang ingin dicapai;

- (f) Menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai oleh organisasi;
- (g) Menunjukkan kejelasan arah organisasi dan program-programnya Harus menantang, akan tetapi realistis dan dapat dicapai

#### **4) Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Yang dimaksud indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing (LAN, 2003:8).

#### **b. Strategi (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran)**

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program (LAN, 2003:8).

##### **1) Kebijakan**

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah (LAN, 2003:8).

##### **2) Program**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu (LAN, 2003:9).

##### **3) Perencanaan Kinerja**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program

yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan (LAN, 2003:12).

#### **(a) Sasaran**

##### **-Indikator Kinerja Kegiatan**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan (LAN, 2003:13). Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi. Indikator kinerja hendaknya:

- Spesifik dan jelas
- Dapat diukur secara obyektif
- Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai
- Tidak bias

##### **-Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah (LAN, 2003:18). Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Untuk melakukan pengukuran kinerja, pemerintah memerlukan informasi akuntansi terutama menentukan indikator kinerja (*performance indicator*) sebagai dasar penilaian kinerja. Pemerintah akan mengalami kesulitan untuk melakukan pengukuran kinerja apabila tidak ada indikator kinerja yang memadai. Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja



ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen renstra. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya) (LAN, 2003:12).

**(b) Program**

Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi diuraikan pada dokumen rencana strategik. Selanjutnya diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan (LAN, 2003:13).

**(c) Kegiatan**

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu (LAN. 2003:13).

**c. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan yaitu penetapan indikator kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Penetapan indikator kinerja yang dimaksud adalah indikator kinerja sebagaimana yang diuraikan dalam perencanaan kinerja. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya diperoleh melalui dua sumber yaitu:

- Data internal, berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi
- Data eksternal, berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder

Pengumpulam data kinerja diarahkan untuk

mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas (LAN, 2003:18).

Pengukuran kinerja mencakup: (LAN, 2003:19)

- Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan
- Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja

### **1) Evaluasi Kinerja**

Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Dalam evaluasi kinerja dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak (LAN, 2003:25).

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara:

- Kinerja nyata dengan kinerja direncanakan
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang

unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta

- Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional

## **2) Analisis Akuntabilitas Kinerja**

Analisis akuntabilitas kinerja meliputi keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Dalam analisis ini

perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya (LAN, 2003:26).

## **3. Pelaporan Kinerja**

### **a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

## **b. Penanggung Jawab Penyusunan LAKIP**

Penanggung jawab penyusunan LAKIP adalah pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab melakukan dukungan administratif di instansi masing-masing. Pimpinan instansi, sebagaimana tersebut dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999, dapat menentukan tim kerja yang bertugas membantu penanggung jawab LAKIP di instansinya masing-masing.

## **c. Prinsip-Prinsip LAKIP**

Penyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan pada umumnya, yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Selain itu penyusunan laporan harus memperhatikan prinsip-prinsip lain agar kualitas laporan menjadi baik yaitu: (LAN, 2003:28)

### **1) Prinsip Lingkungan Pertanggungjawaban**

Isi laporan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing, dan memuat keberhasilan maupun kegagalan

### **2) Prinsip Prioritas**

Isi laporan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan dan upaya-upaya tindak lanjutnya

### **3) Prinsip Manfaat**

Manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya, dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja

## **d. Format dan Isi LAKIP**

Agar LAKIP dapat lebih berguna sebagai umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka bentuk dan isinya diseragamkan. Format LAKIP ini dimaksudkan untuk mengurangi perbedaan isi dan cara penyajian yang dimuat dalam LAKIP sehingga memudahkan perbandingan ataupun evaluasi akuntabilitas yang harus dilakukan.

LAN, (2003:29), menjelaskan bahwa Format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal terdiri dari:

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

### I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang instansi serta uraian singkat mandat apa yang dibebankan kepada instansi (gambaran umum tupoksi).

### II. RENCANA STRATEGIS

Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis dan Rencana Kinerja. Pada awal bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi.

#### *Rencana Strategis*

Uraian singkat tentang rencana strategis instansi, mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program instansi.

#### *Rencana Kinerja*

Disajikan rencana kinerja pada tahun yang bersangkutan, terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun tersebut, dan indikator keberhasilan pencapaiannya.

### III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

### IV. PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

Setiap bentuk penjelasan lebih lanjut, perhitungan-perhitungan, gambar, dan aspek pendukung seperti SDM, sarana prasarana, metode, dan aspek lain dan data yang relevan, hendaknya tidak diuraikan dalam badan teks laporan, tetapi dimuat dalam lampiran. Keputusan-keputusan atau peraturan-peraturan dan perundangundangan tertentu yang merupakan kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran perlu dilampirkan. Jika jumlah lampiran cukup banyak, hendaknya dibuat daftar lampiran, daftar gambar, dan daftar tabel secukupnya

## 4. Evaluasi atas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/1 3 5/M. PAN/9/2004 Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan dengan meneliti setiap elemen dalam Sistem AKIP yaitu: Rencana Strategis, Sistem Pengukuran Kinerja, Penyajian informasi dalam LAKIP.

#### **a. Evaluasi atas Perencanaan Strategis**

Perencanaan strategis beserta dokumen Rencana Strategis harus dievaluasi untuk mengetahui apa yang harus dicapai organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Evaluasi yang dilakukan terhadap perencanaan strategis meliputi perumusan visi, misi, tujuan, cara mencapai tujuan dan sasaran, serta pemanfaatan rencana strategis.

##### **1) Evaluasi Perumusan Visi**

Proses perumusan visi dilakukan melalui tahapan dari penggalian nilai-nilai individu, kelompok dan kemudian organisasi. Proses ini harus dilakukan secara bertahap untuk menghasilkan suatu visi organisasi yang dapat diterima oleh seluruh anggota organisasi dan membangun komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi untuk secara bersama-sama mewujudkannya.

Langkah evaluasi

(a) Teliti dan nilai apakah visi:

- Dirumuskan cukup jelas
- Menarik dan menantang
- Memberikan motivasi kepada anggota organisasi/instansi
- Dirumuskan secara partisipatif
- Mempertimbangkan kebutuhan pihak-pihak yang terkait
- Mempertimbangkan nilai-nilai luhur

(b) Membuat kesimpulan penilaian

##### **2) Evaluasi Perumusan Misi**

Misi merupakan rangkaian tugas utama yang harus

terselenggara dengan baik sebagai langkah pertama dalam rangka mewujudkan visi.

Langkah evaluasi

(a) Teliti dan nilai apakah misi:

- Sesuai dengan mandat yang diperoleh
- Sesuai dengan visi instansi
- Terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi instansi
- Sempel, jelas, dan tidak berdwimakna
- Mudah diingat
- Menjelaskan mengapa organisasi ada

(b) Membuat kesimpulan penilaian

### **3) Evaluasi Perumusan Tujuan**

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai oleh organisasi merupakan rincian visi dimana tergambar bukan hanya kurun waktu yang dicakup, melainkan juga berbagai faktor organisasional lainnya, seperti peran dan mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Langkah evaluasi

(a)Teliti dan nilai apakah tujuan:

- Tidak bertentangan dengan visi
- Terkait dengan pelaksanaan misi
- Mempertimbangkan lingkungan internal dan eksternal
- Mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan
- Dirumuskan dengan tepat dan jelas

(b)Membuat kesimpulan penilaian

### **4) Evaluasi Perumusan Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran lebih konkret atau lebih nyata daripada hal-hal yang tertuang dalam tujuan organisasi. Sasaran lebih bersifat kuantitatif atau dapat juga bersifat kualitatif dengan didukung oleh indikator kinerja yang kuantitatif. Sasaran diprediksi untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tidak lebih dari satu tahun. Dengan

dirumuskannya sasaran maka organisasi telah dapat menentukan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan dalam suatu tahun anggaran. Langkah evaluasi

- (a) Teliti dan nilai apakah sasaran: Spesifik. Terukur, Dapat dicapai, Berorientasi hasil dan manfaat, Disusun sesuai dengan batas-batas tahun fiskal
- (b) Membuat kesimpulan penilaian

#### **5) Evaluasi Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran**

Evaluasi cara mencapai tujuan dan sasaran termasuk penelitian dan penilaian terhadap struktur program dan kegiatan yang nyata dan logis. Dalam melakukan evaluasi cara mencapai tujuan dan sasaran, harus dilakukan analisis logika program.

Analisis ini meneliti kelayakan struktur program yang mencantumkan berbagai kegiatan, memetakan hubungan (meneliti hierarki) antara kebijakan, program, dan kegiatan dengan hierarki yang ingin dicapai, serta indikator-indikator yang diperlukan guna mengukur kemajuan dan keberhasilan.

- (a) Teliti apakah penetapan suatu kebijakan, program, dan kegiatan dapat diterima akal sehat;
- (b) Dilakukan analisis atas logika hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat ini harus menjadi *justifikasi* mengapa suatu kegiatan atau program diberikan prioritas alokasi pembiayaannya

#### **6) Evaluasi Pemanfaatan Renstra**

Penelaahan atas pemanfaatan Renstra merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Jika dalam penyusunan Renstra sudah memenuhi kaidah-kaidah yang baik, maka tidak hanya proses perumusannya yang baik, tetapi dokumen Renstra-nya juga akan baik, sehingga perlu diteliti apakah Renstra telah dimanfaatkan dengan baik. Simpul penting yang menandakan adanya pemanfaatan Renstra dengan baik adalah jika Renstra tersebut dijadikan acuan utama



dalam penyusunan rencana kinerja, rencana operasional, dan penganggaran.

## **b. Evaluasi atas Sistem Pengukuran Kinerja**

Sistem pengukuran kinerja merupakan inti dari Sistem AKIP, yang bermanfaat mengetahui kinerja organisasi sehingga pimpinan organisasi dapat mengendalikan organisasi. Inti dari pengukuran kinerja adalah membandingkan antara capaian kinerja yang diukur dengan indikator kinerja atau ukuran kinerja sebagai alat ukurnya. Evaluasi atas Sistem Pengukuran Kinerja meliputi evaluasi atas indikator kinerja, perencanaan kinerja, cara pengukuran kinerja, dan review atas evaluasi instansi/unit kerja

### **1) Evaluasi atas Indikator Kinerja**

Indikator kinerja merupakan suatu alat bagi manajemen untuk menilai dan melihat perkembangan kinerja yang dicapai selama ini atau dalam jangka waktu tertentu. Keberhasilan pengukuran kinerja suatu instansi sangat ditentukan oleh ketepatan indikator kinerja yang digunakan sehingga evaluasi atas kewajaran dan kebenaran dari indikator kinerja sangat diperlukan.

Langkah evaluasi

(a) Teliti dan nilai apakah indikator kinerja yang digunakan:

- Memenuhi ciri-ciri indikator yang baik dan memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya
- Dapat menunjukkan keberhasilan atau kegagalan
- Tepat untuk mengukur suatu dan selaras satu sama lain di dalam struktur organisasi

(b) Membuat kesimpulan penilaian

### **2) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja**

Evaluasi perencanaan kinerja bertujuan untuk:

(a) Menilai bahwa rencana kinerja digunakan sebagai wahana untuk memonitoring dan persiapan yang matang dalam mengelola sumber daya dan meningkatkan kinerja instansi

(b) Memberikan rekomendasi perbaikan atas perencanaan kinerja

Langkah evaluasi

(a) Teliti dan nilai apakah:

- Dokumen rencana kinerja telah ditetapkan oleh pimpinan instansi/unit yang berwenang
- Proses penyusunan rencana kinerja telah dilakukan secara partisipatif sehingga merupakan komitmen bersama
- Sasaran telah dijabarkan dalam target-target yang nyata dan terukur serta mempertimbangkan kemampuan sumber daya organisasi

(b) Target ditetapkan sebelum tahun anggaran yang direncanakan dimulai

2. Membuat kesimpulan penilaian

### **3) Evaluasi atas Cara Pengukuran Kinerja**

Evaluasi atas cara pengukuran kinerja bertujuan untuk:

(a) Menilai kewajaran dan ketepatan penilaian kinerja organisasi

(b) Menilai keandalan sistem informasi yang digunakan untuk pengumpulan data kinerja organisasi

(c) Memberikan rekomendasi perbaikan atas cara pengukuran kinerja

Langkah evaluasi

(a) Teliti dan nilai apakah:

- Sistem informasi yang digunakan untuk mengumpulkan data mengandung pengendalian intern yang baik
- Data dasar yang digunakan sebagai pembanding dapat diandalkan
- Terdapat alternatif lain yang menggambarkan tingkat kinerja yang ada

(b) Membuat kesimpulan penilaian

#### **4) Evaluasi atas Penyajian Informasi dalam LAKIP**

Evaluasi atas penyajian informasi dalam LAKIP dapat dilakukan dengan menelaah dokumen LAKIP dan menggali informasi mengenai penggunaan informasi dalam LAKIP. Penyajian informasi dalam LAKIP yang baik adalah bahwa LAKIP berisi pertanggungjawaban pimpinan instansi yang dapat menggambarkan kinerja yang sebenarnya secara jelas dan transparan, sesuai dengan prinsip penyusunan laporan, relevan, konsisten, akurat, objektif dan wajar.

Langkah evaluasi, meliputi:

- (a) Teliti dokumen LAKIP dengan menitikberatkan pada format penyajian laporan dan isi informasi dalam LAKIP
- (b) Teliti pengkomunikasian LAKIP dan pemanfaatan LAKIP
- (c) Membuat kesimpulan penilaian

#### **D. Akuntabilitas Kinerja Perguruan**

##### **Tinggi**

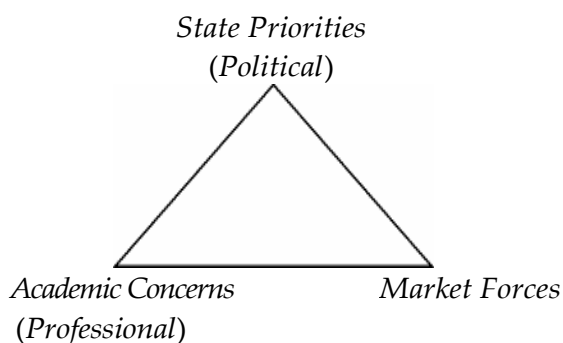
##### **1. Akuntabilitas Kinerja Pendidikan**

Akuntabilitas kinerja sangat penting karena tingginya tuntutan *stakeholder* terhadap pertanggungjawaban kinerja sekolah. Akuntabilitas publik adalah Kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Herawati, 2011), sedangkan Akuntabilitas kinerja pendidikan adalah kemampuan (sekolah PT), mempertanggungjawabkan kepada publik segala sesuatu mengenai kinerja yang telah dilaksanakan (Fatah, 2004).

Tujuan akuntabilitas program-program pada perguruan tinggi bergeser kearah kualitas pendidikan, produktivitas organisasi, dan responsibilitas eksternal terhadap prioritas-

prioritas masyarakat atau tuntutan pasar (Burke, 2005:4). Berdasarkan konsepsi ini maka akuntabilitas pengelolaan sebuah perguruan tinggi, bersifat internal berupa tanggung gugat kepada atasan atau pihak yayasan saja, tetapi juga memiliki dimensi tanggung gugat kepada pihak-pihak luar (eksternal) sebagai pemangku kepentingan.

Ada berbagai macam jenis akuntabilitas, sebagaimana dikemukakan Vidovich dan Slee dalam Burke (2005:3) sebagai berikut: (1) *upward accountability* menunjukkan hubungan tradisional dalam bentuk tanggung jawab bawahan kepada atasan, mencakup akuntabilitas prosedural, birokratik, legal, dan vertikal; (2) *downward accountability* berfokus pada tanggung jawab pimpinan terhadap bawahan dalam pengambilan keputusan atau akuntabilitas kesejawatan pada perguruan tinggi; (3) *inward accountability*, sebagai organisasi yang didominasi oleh para profesional, maka berpusat pada tindakan staf pengajar dalam menerapkan berbagai standar profesional dan etis, yang disebut sebagai akuntabilitas profesional, dan (4) *outward accountability*, dimaksudkan terkait dengan pelanggan luar, para pemangku kepentingan, pendukung (donatur), dan pada akhirnya kepada masyarakat dalam arti luas.



**Gambar 3.1.**

### **Tiga pilar akuntabilitas Perguruan Tinggi**

Burke (2005: 21) menggambarkan dalam Gambar 3.1. ketiga tekanan program akuntabilitas tersebut sebagai tiga pilar akuntabilitas perguruan tinggi. Prioritas negara, urusan

akademik, dan tuntutan pasar masing-masing mencerminkan kepentingan warganegara, rekan sejawat, dan budaya atau kepentingan komersial. Prioritas negara mencerminkan akuntabilitas politik, urusan akademik mewakili akuntabilitas profesional, dan tuntutan pasar mendorong akuntabilitas pasar. Organisasi publik adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan organisasi publik diukur keberhasilannya melalui efektivitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun organisasi publik tidak bertujuan untuk mencari profit, organisasi ini terdiri dari unit-unit yang saling terkait yang mempunyai misi yang sama yaitu melayani masyarakat.

Pengukuran kinerja didefinisikan oleh Neely (2005) sebagai *“as the process of quantifying the efficiency and effectiveness of action”*. Pengukuran kinerja memerlukan keselarasan dengan misi organisasi, kebijakan, dan tujuan (Kaplan dan Norton (2004); Pongatichat dan Johnston (2008) dalam Phusavat *et al* (2008). Perguruan tinggi membantu meningkatkan basis pengetahuan bangsa dan memainkan peranan penting dalam membentuk masa depan bangsa. Institusi pendidikan adalah institusi nirlaba (Druker (1990); Situ, (1999) dalam ShunHsing Chen (2006). Perguruan tinggi memerlukan perencanaan strategis. Perencanaan strategis menggambarkan arah dari posisi sekarang ke posisi yang diinginkan di masa depan yang diterjemahkan dalam visinya. Perguruan tinggi saat ini menghadapi pasar yang kompetitif. Hal tersebut berimplikasi terhadap pemanfaatan sumber daya yang dimiliki agar dapat menarik minat pasar.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat komunikasi yang dilakukan sebuah organisasi agar dapat mengevaluasi pelaksanaan dari rencana strategis yang telah ditetapkan. Menurut Brookes (2007), pengukuran kinerja

pengukuran tinggi dapat dilakukan dengan menggunakan *quality management models* yang tercantum dalam Tabel 1., berikut:

**Tabel 3.1.**  
**Quality Management Models**

<b>Model Definition</b>	<b>Definition</b>
<i>EFQM Excellence Model</i>	<i>Non-prescriptive framework that establishes 9 criteria (divided between enablers and results), suitable for any organisation to use to assess progress towards excellence.</i>
<i>Balanced Scorecard</i>	<i>Performance/strategic management system which utilises 4 measurement perspectives: financial, customer, internal process, and learning and growth.</i>
<i>Malcolm Baldrige Award</i>	<i>Based on a framework of performance excellence which can be used by organisations to improve performance. 7 categories of criteria: leadership; strategic planning; customer and market focus; measurement, analysis, and knowledge management; human resource focus; process management; and results.</i>
<i>ISO 9000 Series</i>	<i>International standard for generic quality assurance systems. Concerned with continuous improvement through preventative action. Elements are customer quality and regulatory requirements, and efforts made to enhance customer satisfaction and achieve continuous improvement.</i>
<i>Business Process Reengineering</i>	<i>System to enable redesign of business processes, systems and structures to achieve improved performance. It is concerned with change in five components: strategy, processes, technology, organisation and culture.</i>
<i>SERVQUAL</i>	<i>Instrument designed to measure consumer perceptions and expectations regarding quality of service in 5 dimensions: reliability, tangibles, responsiveness, assurance and empathy and to identify where gaps exist.</i>

Sumber: Brookes (2007),

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang amat penting bagi sebuah organisasi. Pengukuran tersebut, dapat digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan serta sebagai dasar penyusunan imbalan dalam perusahaan. Pengukuran kinerja dengan menggunakan *Balance Scorecard* (B SC) (Kaplan dan Norton, 2001) mempunyai 4 perspektif yaitu: (1) *the financial perspective*, (2) *the customer perspective*, (3) *internal business processes perspective*, dan (4) *learning and growth perspective*.

Setiap ukuran dalam balance scorecard menyajikan suatu aspek dari strategi perusahaan, karena dengan sistem ini manajemen dapat menggunakannya untuk berbagai alternatif pengukuran terhadap hal-hal berikut: (1) faktor-faktor kritis yang menentukan keberhasilan strategi perusahaan; (2)

menunjukkan hubungan individu/sub bisnis unit dengan yang dihasilkannya, sebagai akibat dari penetapan pengukuran yang telah dikomunikasikannya; menunjukkan bagaimana pengukuran nonfinansial mempengaruhi finansial jangka panjang, serta memberikan gambaran luas tentang perusahaan yang sedang berjalan.

Menurut Mark H. Moore (2003) BSC dapat diterapkan di organisasi sektor publik karena manajer sektor publik berupaya menciptakan sesuatu yang setara dengan "*financial bottom line*" untuk organisasi sektor publik. Kebanyakan organisasi nirlaba memahami bahwa tujuan mereka adalah menghasilkan hasil sosial yang berharga, bukan memaksimalkan kinerja keuangan. Di sisi lain, organisasi nirlaba harus memperhatikan kinerja keuangan mereka untuk memastikan kelangsungan hidup mereka.

Aslani (2009) mengungkapkan bahwa terdapat tiga tantangan dalam penerapan BSC di sektor publik. Pertama, dukungan dari atasan sangat dibutuhkan oleh sektor publik atas pelaksanaan BSC. Dukungan tersebut diperlukan sebagai landasan bagi karyawan untuk ataupun departemen untuk terlibat dalam penerapan BSC. Kedua, rencana strategis melalui mekanisme BSC membutuhkan partisipasi dan keterlibatan aktif dari semua karyawan. Insentif program dan imbalan bagi karyawan atas keselarasan dengan kinerja organisasi harus direncanakan dan ditetapkan. Ketiga, sarana komunikasi harus diciptakan (misal melalui *webs ite* atau sarana lainnya), sehingga komunikasi tersebut dapat diharapkan untuk menyisipkan informasi, memberikan hak akses kepada semua pihak yang terlibat, dan mudah digunakan oleh semua pihak yang terlibat.

## **2. Indikator Akuntabilitas Kinerja Perguruan Tinggi**

Akuntabilitas Kinerja pendidikan tinggi mempunyai makna dari para *stakeholders*-nya, dapat tidaknya kinerja

(produk), perilaku pengelola dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum, etika akademik, agama, dan nilai budaya. Daulat P.Tampubolon, dalam bukunya Perguruan Tinggi Bermutu (A.Rusdiana, 2012:102). menegaskan, akuntabilitas perguruan tinggi dapat dilihat yaitu:

- a. apakah peraturan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dapat dipertanggung jawabkan secara undang-undang?
- b. apakah materi kuliah yang diberikan dosen dapat dipertanggung-jawabkan secara kurikuler dan etika akademik?,
- c. apakah nilai hasil ujian (IP/IPK) yang diperoleh mahasiswa terpercaya?,
- d. apakah perilaku/sikap pelayanan para pengelola perguruan tinggi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, etika, agama, dan nilai budaya?,
- e. apakah penelitian yang dilakukan dan hasilnya tidak bertentangan dengan agama dan atau undang-undang?, serta
- f. apakah perguruan tinggi mempunyai kode etik,

Kajian empiris tentang kinerja telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Antipova dan Antipov (2014), Micheli dan Neely (2010), Ghobadian dan Ashworth (1994), Kassel (2008), Moxham dan Boaden (2007), Yuen dan Ng (2012), Dhermawan *et al.* (2014), Karmandita dan Subudi (2014), Safwan *et al.* (2014), Sanjaya dan Indrawati (2014), Sulistyaningsih (2009), Winanti (2011), (A. Rusdiana, 2011), sehingga memberi wawasan baru pada perkembangan kinerja pada sektor publik seperti Lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga lainnya, masih jarang ditemukan yang fokus pada individu atau kelompok, seperti halnya dibidang penelitian dan pengabdian Kepada masyarakat.

Akuntabilitas kinerja sangat penting karena tingginya tuntutan *stakeholder* terhadap pertanggung jawaban kinerja. Akuntabilitas publik adalah Kewajiban pihak pemegang amanah



untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Herawati, 2011), sedangkan.

Implikasi dari itu, muncul masalah asimetri informasi antara pihak pemegang amanah dengan *stakeholders* (pemerintah dan masyarakat) sebagai akibat tingginya perhatian pemerintah dan masyarakat dalam bidang pendidikan dalam konteks ini termasuk penelitian yang menuntut pihak pemegang amanah, untuk melakukan akuntabilitas kinerja, oleh karena permasalahan tersebut, yang menjadi grand teori pada kajian ini adalah teori keagenan dan teori sinyal.

Hubungan keagenan sebagai suatu kontrak antara satu orang atau lebih yang bertindak sebagai *prinsipal* (pemilik) yang menunjuk orang lain sebagai *agen* (manajer) untuk melakukan jasa untuk kepentingan *prinsipal* termasuk mendelegasikan kekuasaan dalam pembuatan keputusan (Kassel, 2008).

Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa hubungan keagenan dalam penelitian ini yaitu dengan *stakeholders* (pemerintah dan masyarakat), dimana pimpinan sebagai *agen* sedangkan *stakeholders* adalah *prinsipal*. Instansi mempunyai tujuan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan Anggaran dengan sebaik-baiknya serta melakukan sistem pelaporan keuangan secara transparan. Spence dalam Moxham dan Boaden (2007) menyatakan bahwa dengan memberikan suatu sinyal, pihak pengirim (pemilik informasi) berusaha memberikan informasi relevan yang dimanfaatkan oleh pihak penerima. Sistem pelaporan keuangan yang baik akan memberikan sinyal kepada pemerintah dan masyarakat bahwa akuntabilitas

kinerja yang dilakukan oleh pemegang amanah sudah bejalan. Dengan demikian, maka masalah asimetri informasi antara pihak sekolah selaku *agent* dengan pemerintah dan masyarakat (*stakeholders*) selaku *principal* dapat dikurangi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Trisnawati dan Ahmad (2013) yang menyatakan bahwa teori *signaling* dapat mengurangi asimetri informasi antara pihak agen dengan principal.

Dalam sektor swasta, Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan sebagai suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (principal) meminta pihak lainnya (agen) untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan atas nama principal yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen.

Pengertian ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep teori keagenan sektor publik. Zimmerman (A.Rusdiana, 2014) menjelaskan bahwa masalah keagenan dapat terjadi dalam semua konteks organisasi baik organisasi sektor swasta maupun organisasi sektor publik. Hal tersebut karena ia berasumsi bahwa umumnya semua pelaku ekonomi adalah rasional, suka mengevaluasi, dan memaksimalkan kesejahteraan individual. Saat kita membandingkan antara *agency problem* di pemerintahan dan di lingkungan bisnis maka implikasi besar yang muncul adalah informasi Pemerintah memiliki *demand* yang lebih sedikit dibandingkan di lingkungan bisnis.

### **3. Faktor yang memengaruhi Rendahnya akuntabilitas kinerja**

Rendahnya akuntabilitas kinerja sekolah di atas tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Menurut Kenis dalam Anjarwati (2012), kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut. Selain itu, Perilaku manusia sebagai individu maupun kelompok akan berpengaruh

terhadap penyusunan anggaran dan sebaliknya, anggaran akan berpengaruh terhadap perilaku individu dan kelompok. Proses penyusunan anggaran dapat memotivasi pimpinan untuk mengembangkan arah bagi organisasi, meramalkan kesulitan, mengembangkan kebijakan masa depan, karena anggaran mempunyai dampak fungsional dan disfungsional terhadap sikap dan perilaku anggota organisasi.

Cara untuk mencegah terjadinya dampak disfungsional anggaran, bawahan harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran (Nurhalimah dan Abdullah 2013). Beberapa peneliti pernah melakukan penelitian terkait dengan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah Kusumaningrum (2010), Herawati (2011), Anjarwati (2012), dan Emilia *et al.* (2013) yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja adalah kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, dan pengendalian akuntansi.

#### **a. Kejelasan Sasaran Anggaran**

Proses penyusunan anggaran dapat memicu perilaku dari pelaksana anggaran untuk melakukan senjangan anggaran yang dikarenakan adanya sikap dan norma subjektif yang negatif yang dimiliki oleh pelaksana anggaran (Su dan Ni, 2013). Locke dalam Herawati (2011) menyatakan bahwa sasaran adalah apa yang hendak dicapai oleh karyawan, dimana dengan adanya sasaran yang jelas akan memudahkan dalam menyusun target-target anggaran. Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauhmana target anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran dapat dipahami oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran (Anjarwati, 2012).

Darwanis dan Chairunnisa (2013) menyatakan bahwa anggaran secara umum dapat diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijaksanaan untuk

suatu periode di masa yang akan datang. Informasi yang jelas, tepat waktu, dan obyektif sangat diperlukan dalam proses penyusunan anggaran (Lavarda dan Almeida, 2013). Adanya informasi yang memadai akan memudahkan penyusun anggaran untuk dapat menyusun anggaran dengan baik. Information Asymmetry merupakan suatu keadaan dimana terdapat ketidakpastian informasi karena di dalam organisasi ada salah satu pihak yang memiliki informasi lebih banyak (Busuic dan Birau, 2011).

#### **b. Partisipasi Anggaran**

Partisipasi dalam proses penganggaran dilakukan untuk mentransfer informasi yang dimiliki bawahan kepada atasan (Shields dan Young, 1993). Menurut Milani (1975), partisipasi anggaran adalah keterlibatan dan pengaruh bawahan dalam proses pembuatan keputusan anggaran, dimana aspirasi bawahan akan lebih diperhatikan sehingga lebih dimungkinkan bagi bawahan dalam melakukan negosiasi dengan atasan mengenai target anggaran yang dapat dicapai, sedangkan Anjarwati (2012) mendefinisikan partisipasi penyusunan anggaran sebagai suatu pernyataan formal yang dibuat oleh manajemen tentang rencana-rencana yang akan dilakukan pada masa yang akan datang pada periode tertentu.

Menurut Aprila dan Hidayani (2012), Partisipasi yang tinggi dalam proses penganggaran diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi bawahan untuk berpartisipasi dan memberikan saran pada persiapan anggaran sehingga anggaran yang akan dibuat lebih efektif dan efisien. Manajemen sumber daya manusia selama ini telah diterapkan, namun hasil dari penerapan tersebut belum terealisasi secara optimal sesuai yang diharapkan. Ini tercermin dari pencapaian kinerja pegawai yang masih rendah dalam mengembangk amanah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Amri *et*

al. (2009) menyatakan menilai pemerintahan tercermin dari pencapaian kinerja. Kinerja pemerintahan yang baik dihasilkan dari aparatur yang bersih dan berwibawa sesuai hasil kerja yang dicapai.

### **c. Sistem Pelaporan**

Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggung- jawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan (Anjarwati, 2012)

### **d. Pengendalian Akuntansi**

Pengendalian akuntansi di sekolah sangat penting, terutama dalam pengelolaan inventaris aset sekolah. Pengendalian akuntansi menurut Herawati (2011), pengendalian akuntansi adalah perencanaan organisasi serta prosedur dan catatan terkait dengan pengamanan harta kekayaan organisasi dan reliabilitas laporan keuangan, sedangkan menurut Kusumaningrum (2010), pengendalian akuntansi (*Accounting Controls*) adalah pengendalian yang bertujuan membantu menjaga aktiva dan menjamin akurasi dan daya andal catatan keuangan.

Hal ini menunjukkan bahwa pengendali an akuntansi cenderung untuk menciptakan senjangan anggaran (Yilmaz dan Ozer, 2011). Penggunaan system pengendalian akuntansi memungkinkan para manajer dapat membuat keputusan-keputusan yang lebih baik, mengontrol operasi-operasi dengan lebih efektif, mampu mengestimasi biaya dan profitabilitas keberhasilan ter tentu dan memilih alternatif terbaik dalam setiap kasus dan masalah sehingga dapat meningkatkan kinerja (Nuraini dkk, 2012:63).





## **BAB IV**

### **MANAJEMEN KINERJA SEKTOR PUBLIK**

**M**anajemen kinerja sektor publik (pemerintahan) telah dimulai sejak dicanangkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sistem AKIP) melalui Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999. Sistem AKIP mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun rencana strategik (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Hasil dari pelaksanaan rencana strategik, berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, sehingga diperoleh informasi umpan balik sebagai perbaikan kinerja pada periode mendatang. Pelaksanaan sistem AKIP, selanjutnya disempurnakan dengan dukungan sistem lainnya yaitu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU Nomor 25 Tahun 2004) dan Sistem penyusunan anggaran berbasis kinerja UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Namun demikian, pelaksanaan sistem AKIP yang telah didukung dengan sistem perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja tersebut, belum mampu meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sistem AKIP, SPPN dan Sistem Penganggaran



Berbasis Kinerja, masih terbatas pada tataran formal, belum banyak menyentuh pada tataran substansi kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kondisi ini antara lain disebabkan kurang efektifnya pelaksanaan manajemen kinerja instansi pemerintah, serta belum adanya dukungan sistem informasi manajemen kinerja. Harmonisasi antar sub sistem AKIP belum terlaksana dengan baik antara Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja (SPBK), Sistem Manajemen Berbasis Kinerja (MBK) serta Sistem Informasi Manajemen Kinerja (SIM Kinerja).

## **A. Konsep Dasar Manajemen Kinerja**

### **1. Pengertian Manajemen Kinerja**

Secara mendasar, Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan kinerja, pemantauan/peninjauan kinerja, penilaian kinerja dan tindak lanjut berupa pemberian penghargaan dan hukuman. Rangkaian kegiatan tersebut haruslah dijalankan secara berkelanjutan.

Manajemen Kinerja adalah komunikasi yang dilakukan secara terus menerus, dimana antara bawahan dengan atasan merupakan suatu mitra, Bacal (2005: 3). Proses ini akan menghasilkan harapan dan pemahaman yang jelas mengenai pekerjaan yang dilakukan. Menurut Ruky (2001:6), Manajemen Kinerja terkait dengan usaha, program dan kegiatan oleh pimpinan organisasi dalam merencanakan, mengarahkan dan mengendalikan kinerja pegawai. Selanjutnya, Wibowo (2007: 9), menyebutkan bahwa manajemen kinerja merupakan suatu pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan berdasarkan visi bersama dan pendekatan strategis yang terpadu.

Menurut Udekusuma (2007:104), manajemen kinerja adalah suatu proses manajemen yang dirancang untuk menghubungkan tujuan organisasi dengan tujuan individu

sedemikian rupa, sehingga baik tujuan individu maupun tujuan perusahaan dapat bertemu. Dalam hal ini bagi pekerja bukan hanya tujuan individunya yang tercapai tetapi juga ikut berperan dalam pencapaian tujuan organisasi, yang membuat dirinya termotivasi serta mendapat kepuasan yang lebih besar.

Dari beberapa tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen kinerja merupakan cara pimpinan organisasi dalam melakukan komunikasi dengan bawahan guna pencapaian tujuan organisasi yang ditetapkan. LAN, membatasi pengertian manajemen kinerja kepada suatu proses dalam membangun kesepakatan bersama tentang apa dan bagaimana untuk mencapai tujuan organisasi. (LAN, 2008: 12).

## 2. **Tujuan Manajemen Kinerja**

Tujuan dari manajemen kinerja adalah (Williams, 1998; Armstrong & Baron, 2005; Wibisono, 2006):

- a. Mengatur kinerja organisasi dengan lebih terstruktur dan terorganisir.
- b. Mengetahui seberapa efektif dan efisien suatu kinerja organisasi.
- c. Membantu penentuan keputusan organisasi yang berkaitan dengan kinerja organisasi, kinerja tiap bagian dalam organisasi, dan kinerja individual.
- d. Meningkatkan kemampuan organisasi secara keseluruhan dengan perbaikan berkesinambungan.
- e. Mendorong karyawan agar bekerja sesuai prosedur, dengan semangat, dan produktif sehingga hasil kerja optimal.

Manajemen kinerja yang efektif akan memberikan beberapa hasil, diantaranya adalah:

- a. Tujuan yang jelas bagi organisasi dan proses yang benar untuk mengidentifikasi, mengembangkan, mengukur, dan membahas tujuan.
- b. Integrasi antara tujuan secara luas yang dibuat oleh manajemen senior dengan tujuan masing-masing pekerja.

- c. Kejelasan yang lebih baik mengenai aspirasi dan tujuan organisasi.
- d. Pelaksanaan dialog berkelanjutan antara manajemen dengan pekerja.
- e. Pengembangan lingkungan yang lebih terbuka.
- f. Perusahaan dapat mencapai hasil yang diinginkan.
- g. Mendorong pengembangan pribadi.

Secara spesifik Armstrong (1994:117), menegaskan bahwa tujuan manajemen kinerja, memiliki empat tujuan yaitu:

**a. Tujuan Strategik**

Mengaitkan kegiatan pegawai dengan tujuan organisasi. Pelaksanaan strategi tersebut perlu mendefinisikan hasil yang akan dicapai, perilaku, karakteristik pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan strategi, mengembangkan pengukuran dan sistem feedback terhadap kinerja pegawai.

**b. Tujuan Administratif**

Menggunakan informasi manajemen kinerja khususnya evaluasi kinerja untuk kepentingan keputusan administratif, penggajian, promosi, pemberhentian pegawai dll.

**c. Tujuan pengembangan**

Dapat mengembangkan kapasitas pegawai yang berhasil di bidang kerjanya, pemberian training bagi yang berkinerja yang tidak baik, penempatan yang lebih cocok.

**d. Tujuan Khusus Manajemen Kinerja**

Tujuan Khusus Manajemen Kinerja, antara lain:

- (1) Guna Memperoleh peningkatan kinerja sustainable,
- (2) Meningkatkan motivasi & komitmen karyawan,
- (3) Memungkinkan individu untuk mengembangkan kemampuan, meningkatkan kepuasan kerja dan mencapai potensi pribadi yang bermanfaat bagi individu & organisasi,
- (4) Daya

- dongkrak untuk perubahan yang lebih berorientasi kinerja,  
 (5) Mengembangkan hubungan yang terbuka konstruktif antara individu & organisasi dalam dialog yang berkesinambungan,  
 (6) Menyediakan kerangka kerja bagi kesepakatan sasaran kerja,  
 (7) Memfokuskan perhatian kepada atribut dan kompetensi yang diperlukan, Manajer & karyawan membuat kesepakatan tentang rencana pengembangan,  
 (8) Menyediakan kriteria untuk melakukan pengukuran kinerja, Landasan bagi pemberian imbalan,  
 (9) Memberdayakan karyawan,  
 (10) Mempertahankan karyawan yang berkualitas,  
 (11) Mendukung inisiatif manajemen yang berkualitas secara keseluruhan,  
 (12) Mendemonstrasikan bagaimana individu menghargai karyawan.

### 3. Fungsi dan Manfaat Manajemen Kinerja

Armstrong & Baron, (2005; menyatakan bahwa, fungsi Manajemen Kinerja sebagai proses yang terintegrasi:

- a. Manajemen Kinerja;
- b. Meningkatkan Kinerja Individu & kinerja Organisasi;
- c. Manajemen Reward;
- d. Meningkatkan Efektifitas manajerial;
- e. Mengembangkan Kemampuan dan kompetensi; (Amstrong; 1994:119),

Kelima fungsi manajemen kinerja di atas adalah suatu yang saling terintegrasi satu denganlainnya. Satu dan lainnya saling mendukung sehingga akan menguntungkan bagi individu dan organsasi tempat individu tersebut bernaung. Oleh karena itu kelima hal itu tidak dapat dipisahkan satu sama liannya.

Wibowo (2010: 33), menyatakan manfaat manajemen kinerja tidak hanya untuk organisasi ataupun manajer tetapi juga berguna untuk masing-masing individu anggota organisasi.

**a. Untuk Organisasi**

Manfaat Manajemen Kinerja Untuk Organisasi, antara lain:

- 1) Sebagai penyesuaian tujuan organisasi dengan tujuan tim (kelompok) dan individu dalam memperbaiki kinerjaSebagai motivasi karyawan
- 2) Sebagai peningkatan komitmen
- 3) Sebagai perbaikan proses pelatihan dan pengembangan
- 4) Sebagai peningkatan keterampilan
- 5) Sebagai mengupayakan perbaikan dan pengembangan berkelanjutan
- 6) Sebagai pengupayaan basis perencanaan karir
- 7) Sebagai pembangu menahan karyawan untuk pindah atau minta berhenti
- 8) Sebagai pendukung inisiatif kualitas total dan pelayanan pelanggan
- 9) Sebagai pendukung program perubahan budaya.

**b. Untuk Manjer atau Atasan**

Manfaat Manajemen Kinerja Untuk Manajer Atau Atasan

- 1) Sebagai pengupayaan klasifikasi kinerja dan harapan perilaku
- 2) Sebagai penawaran peluang memanfaatkan waktu dengan berkualitas
- 3) Sebagai perbaikan kinerja tim dan individu

- 4) Sebagai pengupayaan penghargaan nonfinansial untuk staf
- 5) Sebagai pengupayaan dasar untuk membantu karyawan yang mempunyai kinerja rendah
- 6) Sebagai pengembangan individu
- 7) Sebagai pendukung kepemimpinan
- 8) Sebagai motivasi dan pengembangan tim
- 9) Sebagai pengupayaan kerangka kerja untuk meninjau kembali kinerja dan tingkat kompetensi

**c. Untuk Individu**

Manfaat Manajemen Kinerja Untuk Individu

- a. Sebagai penjelas peran dan tujuan
- b. Sebagai pendorong dan pendukung agar tampil lebih baik
- c. Sebagai pembantu pengembangan kemampuan dan kinerja
- d. Sebagai peluang memanfaatkan waktu yang berkualitas
- e. Sebagai dasar objektivitas dan kejujuran untuk pengukuran kinerja
- f. Agar fokus tujuan dan rencana perbaikan cara bekerja dikelola dan dilaksanakan.

**B. Orirntasi Tahapan, Proses Penerapan Manajemen Kinerja**

**1. Orientasi Kebijakan Penerapan Manajemen Kinerja**

Orientasi Manajemen Kinerja adalah bahwa Seluruh aktivitas dalam lingkungan instansi pemerintah akan diukur dari sisi akuntabilitas kinerjanya, baik dari sisi kinerja individu, kinerja unit kerja dan kinerja instansi, dan bahkan juga kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Penerapan manajemen yang berorientasi pada peningkatan kinerja (performance based management) atau disebut pula “manajemen kinerja” (performance management) di lingkungan instansi pemerintah membutuhkan suatu proses

yang sistematis sehingga perlu dibuat desain sistem manajemen kinerja yang tepat untuk mencapai kinerja optimal (high performance). Dalam konteks pemahaman ini, manajemen kinerja dipandang sebagai cara bagaimana mencapai tingkat hasil yang diinginkan sesuai dan sinergis dengan yang ditetapkan atau didesain dalam perencanaan (managing for result).

Pada dasarnya seluruh instansi pemerintah sebagian besar berpendapat telah menerapkan sistem manajemen dalam lingkungan instansinya. Namun, yang penting untuk dicermati, bagaimanakah implementasinya khususnya dalam mendorong peningkatan kinerja pegawai, kinerja unit kerja dan kinerja instansi. Begitu pentingnya masalah kinerja individu ini, sehingga tidak salah bila inti pengelolaan sumber daya manusia adalah bagaimana mengelola kinerja SDM.

Disamping membuat pemetaan profil manajemen pemerintah, kajian ini juga mengeksplorasi pendapat instansi pemerintah tentang kriteria instansi pemerintah yang memiliki kinerja tinggi. Beberapa kriteria yang dominan yang dapat disebut sebagai kriteria utama instansi pemerintah yang memiliki kinerja tinggi, diantaranya:

- a. menjalankan tupoksi secara konsisten,
- b. memiliki disiplin, loyalitas dan etos kerja yang tinggi,
- c. adanya konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan,
- d. memiliki manajemen dan prosedur kerja yang jelas,
- e. kinerja pelayanan publik yang optimal,
- f. memiliki perencanaan secara sistematis dan aspiratif serta berdasarkan kinerja,
- g. memiliki visi dan misi organisasi yang jelas,
- h. berorientasi pada hasil kegiatan dan manfaat kegiatan, dan kriteria lainnya.

Faktor-faktor dalam manajemen pemerintah yang dapat mendukung pencapaian peningkatan kinerja instansi

pemerintah, memperlihatkan kondisi yang hampir seragam di antara instansi pemerintah. Meskipun dengan intensitas pendapat yang berbeda. Beberapa faktor pendukung tersebut adalah sumber daya manusia aparatur yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai termasuk anggaran, penerapan reward and punishment yang adil dan kepemimpinan (leadership) yang baik.

Sebaliknya untuk faktor-faktor yang dapat menghambat pencapaian peningkatan kinerja instansi pemerintah di antaranya adalah penempatan SDM yang kurang tepat, lemahnya penegakan disiplin pegawai, kompetensi dan skill pegawai, kelemahan dalam manajemen birokrasi, keterbatasan anggaran, kurangnya dukungan sarana dan prasarana, lemahnya koordinasi antar berbagai pihak, dan faktor lainnya. Sebagian besar berpendapat lingkungan internal (pengaruh lingkungan internal birokrasi (kompetensi SDM, kelemahan manajemen, reward and punishment tidak jalan, dll) sebagai faktor penyebab permasalahan di birokrasi pemerintah.

## **2. Tahapan Manajemen Kinerja**

Tahapan Manajemen Kinerja Menurut Williams (1998), terdapat empat tahapan utama dalam pelaksanaan manajemen kinerja. Tahapan ini menjadi suatu siklus manajemen kinerja yang saling berhubungan dan menyokong satu dengan yang lain.

- a. Tahap pertama: directing/planning. Tahap pertama merupakan tahap identifikasi perilaku kerja dan dasar/basis pengukuran kinerja. Kemudian, dilakukan pengarahannya konkret terhadap perilaku kerja dan perencanaan terhadap target yang akan dicapai, kapan dicapai, dan bantuan yang akan dibutuhkan. Indikator-indikator target juga didefinisikan di tahap ini. Menurut Khera (1998), penentuan target/goal akan efektif bila mengadopsi SMART. SMART merupakan singkatan dari Specific, Measureable, Achievable, Realistic, dan Timebound (Ilyas, 2006: 28). Sebuah target harus jelas apa



yang akan dicapai dan bagaimana mencapainya (spesific), terukur keberhasilannya (measureable) dan orang lain dapat memahami/melihat keberhasilannya. Target harus memungkinkan untuk dicapai, tidak terlalu rendah atau berlebihan (achievable), masuk akal dan sesuai kondisi/realita (realistic), serta jelas sasaran waktunya (timebound).

- b. Tahap kedua: managing/supporting. Tahap kedua merupakan penerapan monitoring pada proses organisasi. Tahap ini berfokus pada manage, dukungan, dan pengendalian terhadap jalannya proses agar tetap berada pada jalurnya. Jalur yang dimaksudkan disini adalah kriteria maupun proses kerja yang sesuai dengan prosedur berlaku dalam suatu organisasi.
- c. Tahap ketiga: review/appraising. Tahap ketiga mencakup langkah evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan flashback/review kinerja yang telah dilaksanakan. Setelah itu, kinerja dinilai/diukur (appraising). Tahap ini memerlukan dokumentasi /record data yang berkaitan dengan obyek yang dievaluasi. Evaluator harus bersifat obyektif dan netral agar didapat hasil evaluasi yang valid.
- d. Tahap keempat: developing/rewarding. Tahap keempat berfokus pada pengembangan dan penghargaan. Hasil evaluasi menjadi pedoman penentu keputusan terhadap action yang dilakukan selanjutnya. Keputusan dapat berupa langkah perbaikan, pemberian reward/punishment, melanjutkan suatu kegiatan/prosedur yang telah ada, dan penetapan anggaran.

### **3. Proses Manajemen Kinerja**

Preses manajemen kinerja menurut Wibowo (2007:19) mencakup suatu proses pelaksanaan kinerja dan bagaimana kinerja dijalankan. Manajemen kinerja diawali dengan suatu perencanaan tujuan yang diharapkan dan menyusun semua sumber daya dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun proses dari manajemen kinerja antara

lain yakni:

**a. Masukan**

Manajemen kinerja membutuhkan berbagai masukan yang harus diolah supaya dapat saling bersinergi dalam meraih tujuan organisasi. Masukan tersebut dalam bentuk Sumber Daya Manusia (SDM), modal, material, peralatan dan teknologi dan juga metoda serta mekanisme kerja.

Manajemen kinerja memerlukan masukan dalam bentuk adanya kapabilitas SDM, baik pada perorangan ataupun pada tim. Kapasitas sumber daya manusia ditunjukkan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan dan kompetensi.

Sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan diinginkan bisa melakukan peningkatan kualitas proses kinerja ataupun hasil kerja. Sedangkan kompetensi diperlukan supaya SDM mempunyai kemampuan yang sesuai dengan keperluan organisasi menjadikan dapat memberikan kinerja terbaiknya.

**b. Proses**

Manajemen kinerja berawal dari perencanaan tentang bagaimana merencanakan tujuan yang diinginkan di masa yang akan datang dan merancang seluruh sumber daya dan juga aktivitas yang diperlukan untuk meraih tujuan.

Jalannya rencana dimonitoring dan diukur kemajuannya dalam meraih tujuan. Penilaian dan peninjauan kembali dilakukan untuk mengoreksi dan menetapkan langkah yang harus ditempuh apabila ada deviasi terhadap rencana.

Manajemen kinerja menjalin terjadinya saling menghargai kepentingan antara pihak yang terlibat dalam prose kinerja. Prosedur dalam manajemen kinerja dilaksanakan secara jujur untuk melakukan pembatasan dampak kerugian pada individu. Proses manajemen kinerja dilaksanakan secara transparan utamanya pada orang yang terpengaruh oleh keputusan yang

timbul dan orang yang memperoleh kesempatan melalui dasar dibuatnya suatu keputusan.

### **c. Keluaran**

Keluaran merupakan hasil langsung dari kinerja organisasi, baik berupa barang ataupun jasa. Hasil kerja yang diraih organisasi harus dibandingkan dengan tujuan yang diharapkan. Keluaran dapat lebih besar ataupun lebih rendah dari tujuan yang sudah ditentukan. Apabila terdapat deviasi akan menjadi umpan balik dalam perencanaan tujuan yang akan datang dan implementasi kinerja yang telah dilakukan.

### **d. Manfaat**

Selain memperhatikan keluaran, manajemen kinerja juga memperhatikan manfaat dari hasil kerja. Dampak hasil kerja dapat bersifat positif untuk organisasi, seperti karena keberhasilan seseorang mewujudkan prestasinya akan memberi dampak terhadap peningkatan motivasi sehingga semakin tinggi kinerja organisasi.

Tetapi dampak keberhasilan seseorang bisa bersifat negatif, apabila karena keberhasilannya dia menjadi sombong yang akan membuat suasana kerja tidak lagi kondusif.

## **C. Langkah Manajemen Kinerja**

Manajemen merupakan langkah-langkah pengelolaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang meliputi unsur perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengendalian (*Controlling*). Kinerja atau *performance* merupakan suatu hasil (*outcome*) organisasi sesuai dengan visi dan misinya.

Kinerja merupakan hasil yang menggambarkan nilai/manfaat kehadiran sebuah organisasi yang dirumuskan dalam visi dan misi. Dengan demikian, manajemen kinerja merupakan suatu pengelolaan sumber daya organisasi dalam menghasilkan manfaat baik bagi organisasi maupun pelanggan sesuai dengan visi dan misinya.

Untuk menerapkan pola manajemen kinerja tersebut, berikut disampaikan sepuluh langkah praktis sebagai panduan manajemen menerapkan polamanajemen berbasis kinerja yang efektif. Menurut Bacal, (2005: 33), langkah-langkah untuk mengembangkan system manajemen kinerja antara lain, sebb.:

### **Langkah 1 - Penajaman Visi dan Misi**

Instansi pemerintah pada saat ini dihadapkan pada suatu tantangan untuk memberikan suatu pelayanan publik yang berkualitas dan prima secara ekonomis, efektif dan efisien; di sisi lain, pemerintah dihadapkan pula pada kendala sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, organisasi publik seperti instansi pemerintah dituntut mampu merumuskan dan mempertajam visi dan misi yang mampu mendorong instansi untuk memberikan pelayanan prima-berkuakitas dan menyiapkan organisasi untuk memenuhi kebutuhan masa mendatang tersebut. Visi dan misi harus mampu memberikan pengaruh dan menantang seluruh anggota organisasi dan pemangku kepentingan lainnya (*stakeholders*) untuk mewujudkan pelayanan publik tersebut.

Pada saat ini, perumusan visi pada renstra instansi pemerintah masih merupakan “untaian kata-kata indah, yang panjang dan penuh dengan paduan nilai-nilai luhur yang melangit (abstrak)”.

Perumusan visi demikian, selain sulit untuk diingat dan dipahami, juga tidak memberikan spirit pengaruh yang menantang bagi organisasi untuk merealisasikan. Perumusan seperti: “Terwujudnya Kabupaten/Kota sejahtera, demokratis dan agamis serta dijiwai oleh semangat reformasi menuju masyarakat madani dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”, merupakan salah satu contoh perumusan visi dan terlalu panjang, tidak mudah diingat serta tidak memberikan

pengaruh yang menantang untuk merealisasikannya. Bandingkan dengan salah satu contoh visi Pemerintah Miami-Dade County, salah satu negara bagian Florida, USA, yang merumuskan visinya sebagai berikut: *"Delivering Excellence Everyday/memberikan pelayanan publik yang prima setiap saat"*.

Visi yang baik selain singkat dan mudah untuk diingat, juga mengandung makna yang memberikan pengaruh, menantang serta menarik bagi seluruh karyawan, pelanggan dan *stakeholders* untuk bersama-sama merealisasikan kondisi ideal yang diinginkan. Visi juga sebaiknya tetap sepanjang waktu dan selalu mutakhir dan tidak usang (*up-date*) sesuai dengan perkembangan kondisi dan lingkungan strategi disekitarnya. (Vincent Gaspersz: 2004, 32-33).

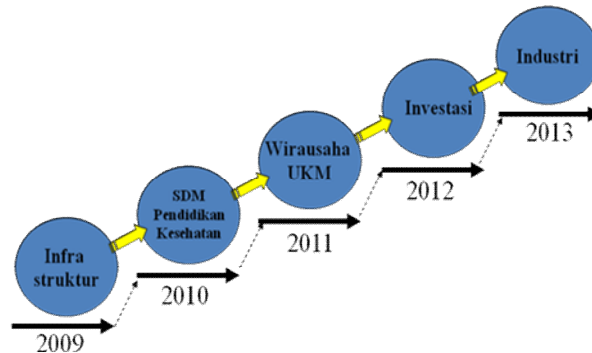
Demikian juga dengan penajaman perumusan misi. Perumusan misi hendaknya merupakan suatu pernyataan singkat dan menyeluruh tentang manfaat keberadaan suatu organisasi publik serta program yang akan dilakukan dalam rangka merealisasikan visi. Perumusan misi menunjukkan jati diri organisasi publik, program yang akan dilakukan, untuk siapa program tersebut dilaksanakan, serta bagaimana sumber daya disediakan untuk melayani usaha/program tersebut. (Vincent Gaspersz: 2004, 35)

Kelemahan perumusan misi pada instansi pemerintah adalah bahwa merumuskan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi serta dirumuskan sesuai dengan bidang organisasi pada struktur organisasi. Perumusan misi seperti demikian, selain tidak memenuhi kriteria perumusan misi yang baik, juga menimbulkan perilaku ego-sektoral/ego-bidang yang justru akan menimbulkan tindakan kontra produktif (entropi) dalam pencapaian visi organisasi.

Langkah pertama untuk melakukan penajaman visi dan misi tersebut merupakan langkah awal bagi pimpinan organisasi

untuk menggerakkan seluruh sumber daya organisasi untuk bergerak bersama dalam satu tekad, bahasa, dan satu langkah mewujudkan visi dan misi.

## Langkah 2 - Penajaman Prioritas / Pemilihan Focus Area



**Gambar: 4.1**

### **Penajaman Prioritas/Pemilihan Focus Area**

Sumber: Vincent Gaspersz: 2004

Sebagaimana diungkapkan pada uraian sebelumnya bahwa instansi pemerintah dewasa ini, disatu sisi dihadapkan pada tantangan dan tuntutan untuk memberikan pelayanan publik yang prima dan berkualitas; dan di sisi lainnya instansi pemerintah juga dihadapkan pada kendala keterbatasan sumber daya publik (anggaran, SDM, dan sarana) untuk memberikan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan keterbatasan sumber daya tersebut, instansi pemerintah dituntut untuk mampu menajamkan prioritas pada bidang (*focus area*) yang akan diutamakan di dahulukan (*First things First*). Dalam pengertian ini, dengan keterbatasan sumber daya, tidak seluruh bidang tugas harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah pada saat atau pada tahun anggaran yang sama. Perspektif renstra dengan periode jangka menengah (5 tahunan), menuntun instansi pemerintah untuk lebih memfokuskan pada bidang tertentu yang mempunyai dampak (*multiplier effect*) yang lebih besar bagi pencapaian visi dan misi. Penajaman prioritas, bukan berarti mengabaikan sektor atau

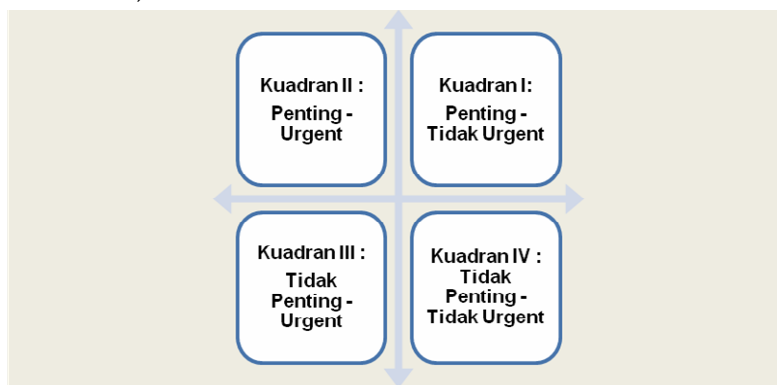
bidang lainnya, tetapi lebih merupakan upaya mensinergikan pembangunan bidang lain tersebut pada *focus area* yang dijadikan prioritas. Oleh karena itu, pemahaman terhadap proses bisnis pelayanan publik serta pemetaan strategi (*strategic mapping*) perlu mendapatkan perhatian instansi pemerintah ketika menyusun perencanaan program dan penganggarannya.

Kelemahan dalam praktik penyusunan prioritas program pada instansi pemerintah dewasa ini adalah proses perencanaan yang lebih terfokus pada upaya alokasi anggaran pada semua sektor secara proporsional dan bukan pada capaian kinerja yang diinginkan dan dijadikan prioritas tahunan. Perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja belum menjadi paradigma dan pola pikir instansi pemerintah. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada pemerintah daerah masih merupakan upaya rutinitas tahunan alokasi anggaran per sektor daripada upaya pencapaian kinerja. Dengan pola pikir demikian, maka seluruh sektor atau bidang akan menjadi prioritas pada satu tahun anggaran.

Penyusunan program lebih cenderung memenuhi kepentingan-kepentingan jangka pendek yang bersifat "URGENT" dan memomorduakan pertimbangan apakah program tersebut merupakan program yang "PENTING" dan layak dijadikan prioritas. Dengan mempertimbangkan urgensi dan arti penting program, maka penetapan prioritas dapat dilakukan secara berturut-turut sebagai berikut:

- Prioritas pertama: Program yang "PENTING" dan belum "TIDAK URGENT"
- Prioritas Kedua: Program yang "PENTING" dan "URGENT"
- Sedangkan program yang "Tidak PENTING" tetapi "URGENT", seharusnya mulai dikurangi dan agar dihindari pelaksanaan program yang "TIDAK PENTING" dan "TIDAK URGENT".

Sebagai contoh : program yang penting dan Belum urgent seperti pemasangan sistem hidran pemadam kebakaran pada setiap gedung, sedangkan program yang penting dan urgent adalah kegiatan pemadaman kebakaran. Penyusunan program harus lebih memprioritaskan program yang penting tetapi belum urgent (lebih bersifat pencegahan dan berdampak jangka panjang), seperti pemasangan sistem hidran pemadam kebakaran daripada program pemadaman kebakaran, yang lebih bersifat penanganan masalah (represif dan telah menimbulkan pengorbanan sumber daya yang besar. (Lihat gambar Kuadran “URGENSI”).



**Gambar: 4.2**  
**Kuadran Urgensi**

Sumber: Vincent Gaspersz: 2004

### **Langkah 3 - Penyusunan Indikator Kinerja yang realistis**

Manajemen kinerja berusaha untuk mampu menjawab keberhasilan atau kegagalan suatu program prioritas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Untuk itu, harus ada ukuran yang akurat, realistis dan menyeluruh untuk menetapkan tingkat capaian kinerja yang disebut indikator kinerja.

Ukuran-ukuran kinerja (indikator kinerja) yang menyeluruh harus terkait dengan misi, tujuan dan sasaran program prioritas. Ukuran kinerja yang bersifat menyeluruh harus memperhatikan berbagai aspek sekaligus, baik aspek



kualitas, kuantitas, efisiensi dan ketepatan waktu. Selain itu, ukuran kinerja harus memiliki kemampuan untuk mengukur dengan akurat (*measurability*), dapat dipercaya (sahih/valid), memberikan tanggung jawab yang jelas, memperhatikan prioritas dan berguna untuk pelanggan internal dan eksternal, pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta pengambil keputusan (Vincent Gespertsz: 2004 hal. 57). Dengan kata lain, ukuran kinerja (indikator kinerja) harus memenuhi aspek kualitas, kualitas, efisiensi dan ketepatan waktu. Kriteria umum yang sering digunakan adalah kriteria SMART (*specific, measurable, achievable, result oriented dan timeliness*).

Satu hal yang penting harus diperhatikan, bahwa kriteria kinerja (indikator kinerja) yang ditetapkan sebaiknya merupakan indikator hasil (*outcome*) dan bukan sekedar indikator keluaran (*output*). Berdasarkan kriteria dan pertimbangan dalam pemilihan indikator kinerja, Indikator hasil (*outcome*) lebih menunjukkan kualitas sebuah keluaran (*output*) yang dapat memberikan manfaat (tepat waktu).

Kelemahan penetapan indikator kinerja pada instansi pemerintah sebagian besar menetapkan indikator keluaran (*output*) dan bukan hasil (*outcome*). Indikator keluaran hanya memberikan gambaran ukuran kuantitatif dan tidak menunjukkan ukuran kualitas sebuah keluaran. Indikator demikian, berpotensi besar memberikan gambaran yang menyesatkan dan mengarahkan kepada hal yang salah dalam pengambilan keputusan.

Sebagai contoh : Indikator Kinerja: "jumlah kasus yang ditangani" merupakan indikator keluaran (*output*) yang hanya berorientasi pada ukuran kuantitas dan belum memberikan ukuran kualitatif seperti manfaat. Indikator ini akan memberikan gambaran yang mengarahkan anggota organisasi untuk bekerja hanya sekedar menyelesaikan kasus yang diproses (yang penting selesai) dan mengabaikan kualitas proses

penangannya. Indikator seperti demikian, seharusnya direvisi dengan mengarahkan pada indikator hasil (*outcome*), seperti: “jumlah kasus yang dimenangkan di pengadilan”. Indikator ini lebih menunjukkan ukuran kualitatif, tanpa mengabaikan ukuran kuantitatif serta ketepatan waktu proses penanganan kasus; artinya, jika proses penanganan kasus ditangani secara profesional, maka penanganan kasus tersebut akan mampu dimenangkan di pengadilan dan memberikan hasil penyelamatan kerugian keuangan negara.

#### **Langkah 4 - Penganggaran yang Rasional dan Efektif**

Manajemen kinerja akan terlaksana dengan baik jika didukung dengan suatu mekanisme penganggaran yang berbasis pada pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam tahap sebelumnya (langkah #3). Mekanisme penganggaran ini dikenal dengan istilah Penganggaran Berbasis Kinerja. Penganggaran Berbasis Kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. (DPKU-BPKP: 2005: 28-29).

Cara untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut dituangkan dalam strategi berupa kebijakan dan program kerja/kegiatan yang diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan. Elemen-elemen yang penting untuk diperhatikan dalam penganggaran berbasis kinerja adalah:

- a. Tujuan yang disepakati dan ukuran pencapaiannya.
- b. Pengumpulan informasi yang sistematis atas realisasi pencapaian kinerja dapat diandalkan dan konsisten, sehingga dapat diperbandingkan antara biaya dengan prestasinya.

Penyediaan informasi secara terus menerus sehingga dapat

digunakan dalam manajemen perencanaan, pemrograman, penganggaran dan evaluasi.

Kondisi yang harus disiapkan sebagai faktor pemicu keberhasilan implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja, yaitu:

- a. Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi.
- b. Fokus penyempurnaan administrasi secara terus menerus.
- c. Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (uang, waktu dan orang).
- d. Penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang jelas.
- e. Keinginan yang kuat untuk berhasil.

Sarana yang harus disiapkan agar pelaksanaan PBK dapat berhasil antara lain:

- a. Indikator kinerja, ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program/kegiatan yang direncanakan
- b. Capaian/target kinerja; ukuran prestasi yang akan dicapai (kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas);
- c. Analisis standar belanja; penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan;
- d. Standar satuan harga; harga standar setiap satuan unit barang yang berlaku di suatu daerah dengan SK Kepala Daerah;
- e. Standar pelayanan minimal; tolok ukur kinerja (jenis dan mutu pelayanan dasar)

### **Langkah 5 - Fit & Proper Test : Participative Leadership**

Melalui penerapan manajemen kinerja, maka kepemimpinan suatu instansi menerapkan Prinsip Kepemimpinan Partisipatif (*Participative Leadership*). Dalam prinsip ini, setiap kepemimpinan di instansi yang diseleksi melalui upaya *Fit and proper Test*, akan menerapkan prinsip partisipatif dengan pokok-pokok sebagai berikut:

- a. Kepemimpinan adalah upaya membimbing seluruh anggota organisasi mencapai tujuan/ sasaran/ indikator kinerja utama yang telah ditetapkan (*The Leadership is to lead achieving goals*)
- b. Setiap level kepemimpinan memberikan kontribusi Kinerja kepada capaian instansi instansi di atasnya. Setiap level kepemimpinan bertanggung jawab & akuntabel terhadap pencapaian kinerja.

Sebagai contoh dalam kasus pemerintahan daerah, Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pencapaian hasil (*outcome*). Kepemimpinan dibawahannya adalah para Kepala Dinas (eselon II), para Kepala Bidang (eselon III) dan setiap Kepala Seksi. Setiap jenjang kepemimpinan pemerintahan daerah mulai dari staf, eselon IV, III, dan II akan memberikan kontribusi kinerja yang bermanfaat bagi pencapaian kinerja pada pimpinan level atasnya.

Kondisi ini dapat terjadi, penyusunan indikator kinerja harus dilakukan mulai dari tingkatan yang paling bawah (Staf / eselon IV) sampai dengan Kepala Daerah dan DPRD. Selanjutnya, Kepala SKPD berkewajiban untuk meneruskan kontrak kinerjanya dengan membagi kinerja tersebut ke masing-masing level pimpinan.

Melalui penerapan *participative leadership* tersebut, setiap tingkatan mempunyai peran dan memberikan kontribusi kinerjanya kepada pimpinan level atasnya.

#### **Langkah 6 - Penandatanganan Kontrak Kinerja**

Setiap jenjang kepemimpinan menandatangani Kontrak Kinerja yang disertai kewenangan penuh terhadap pengelolaan sumber daya, baik keuangan, sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana.

Dalam struktur pejabat pengelola keuangan negara di pemerintahan di Indonesia, kewenangan penuh ini diberikan kepada pejabat Pengguna Anggaran. Pengguna anggaran berwenang untuk menyusun dokumen anggaran, melaksanakan

anggaran, memerintahkan pembayaran atas beban anggaran negara, melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.

Penyusunan kontrak kinerja ini harus jelas mencantumkan butir-butir kontrak kinerja yang akurat yaitu antara lain meliputi:

- a. Indikator kinerja yang jelas yaitu berupa indikator kinerja utama (IKU) serta target yang harus dicapai selama tahun anggaran. Dalam pelaksanaan akuntabilitas di Indonesia ditetapkan dalam bentuk Penetapan Kinerja (TAPKIN).
- b. Sumber Daya Organisasi yang diberikan oleh pemberi mandat berupa anggaran, yang dituangkan dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA ini disusun oleh penerima mandat mengacu pada target kinerja yang disepakati dan disanggupi untuk dicapai sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN).

Kontrak kinerja ini harus ditandatangani antara pemberi mandat (pimpinan) kepada penerima mandat sebagai pelaksana, misalnya antara Presiden (Pemberi Mandat) dengan Menteri/Pimpinan Lembaga (Penerima Mandat), atau Kepala daerah (Bupati, Walikota, Gubernur) dengan Kepala SKPD (Kepala Dinas). Selanjutnya, secara hirarkis kontrak kinerja ini akan diteruskan sampai kepada jenjang kepemimpinan yang paling bawah, seperti dari Kepala Dinas kepada Kepala Bidang, Kepala Bidang kepada Kepala seksi, dst.

### **Langkah 7 - Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kinerja**

Pelaksanaan manajemen kinerja yang didukung dengan anggaran berbasis kinerja akan dapat terlaksana dengan baik, jika infrastruktur administrasi publik telah terbangun dengan baik. Selama ini, menerapkan laporan kinerja (LAKIP) tetapi

belum didasarkan pada sistem informasi manajemen kinerja yang handal dan akurat. Dengan demikian, hasil yang dituangkan dalam LAKIP pun masih diragukan keakuratannya. Oleh karena itu, sudah saatnya dibangun Sistem Informasi Manajemen Kinerja yang dioperasikan dengan basis teknologi informasi (TI). Dengan SIM Kinerja ini, akan diperoleh data-data akurat tentang kondisi kinerja pemerintah yang riil dan akurat.

SIM kinerja harus dirancang untuk memenuhi penerapan manajemen berbasis kinerja, baik dalam penyusunan rencana strategik, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja secara terintegrasi dan komprehensif. Dengan data dan informasikinerja yang akurat tersebut, akan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan oleh para manajer pengambil keputusan, baik untuk meningkatkan kinerja yang akan datang maupun merevisi rencana kinerja dan anggaran tahun sebelumnya, jika diperlukan.

### **Langkah 8 - Pengendalian dan Pemantauan Program (Program Review)**

Kaidah umum dalam manajemen meliputi unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Pengendalian merupakan salah satu unsur penting dalam manajemen untuk selalu melihat kesesuaian pelaksanaan program dengan rencananya. Pengendalian program dilakukan secara terus menerus, tidak perlu menunggu sampai dengan selesainya suatu program. Pengendalian secara terus menerus ini dilakukan melalui proses reviu yang kontinyu dan berkelanjutan meliputi 3 perspektif reviu program yaitu reviu relevansi program, reviu efektivitas kinerja program dan reviu efisiensi program.

#### **a. Reviu atas relevansi program**

Reviu atas kesesuaian program terhadap tujuan dan

sasaran yang akan dicapai. Apakah program dan sasaran yang dilaksanakan secara logis akan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Apakah program yang telah dilaksanakan telah mampu menjawab kebutuhan masyarakat (*community needs*), sebagai pelanggan utama instansi pemerintahan.

#### **b. Reviu atas kinerja program**

Reviu atas pelaksanaan program dan tingkat capaian kinerja program terhadap target kinerja yang ditetapkan. Apakah program telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan? Jika terjadi kesenjangan capaian kinerja (*performance gap*), maka dilakukan evaluasi atas hambatan dan kendala pencapaian target tersebut serta dicarikan solusi pemecahan masalah untuk mempercepat pencapaian capaian kinerja.

#### **c. Reviu atas efisiensi program**

Reviu atas penggunaan sumber daya organisasi untuk pelaksanaan program telah dilakukan secara ekonomis dan efisien? Dalam reviu pengelolaan sumber daya ini perlu diberlakukannya standar-standar penilaian seperti standar belanja umum atau standar harga untuk mereviu keekonomisan suatu pengeluaran dana, sarana dan prasarana. Standar belanja khusus serta standar pelayanan minimal, juga perlu diterapkan dalam mengukur tingkat keefisienan pelaksanaan suatu program/kegiatan.

Hasil dari reviu yang berupa kesenjangan, hambatan dan kendala harus segera ditindaklanjuti pada saat terjadinya, tanpa harus menunggu program selesai dilaksanakan. Tindak lanjut yang dilakukan mungkin berupa perbaikan, serta pemecahan masalah atas hambatan dan kendala yang dihadapi.

### **Langkah 9 - Pelaporan Tahunan Akuntabilitas Kinerja**

Laporan Akuntabilitas kinerja merupakan sarana komunikasi dan informasi untuk melaporkan keberhasilan /

kegagalan pelaksanaan amanah, tingkat capaian kinerja yang telah dicapai hingga saat ini, serta evaluasi atas keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja. Beberapa butir penting yang harus dilaporkan dalam laporan kinerja ini meliputi :

- a. Tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian visi dan misi yang ditunjukkan dari tingkat capaian indikator kinerja utama (*key performance indicator*) instansi pemerintah; seperti kinerja peningkatan kesejahteraan masyarakat, kinerja peningkatan pelayanan aparatur, kinerja peningkatan daya saing
- b. Tingkat capaian kinerja program yang ditunjukkan dengan tingkat capaian indikator kinerja sasaran program yang berorientasi pada pencapaian hasil suatu program (*outcome*); seperti capaian indikator kinerja program wajib belajar 12 tahun berupa tingkat Angka Partisipasi Murni (APM) setiap jenjang pendidikan, tingkat capaian penurunan tingkat kematian Balita, dsb.
- c. Evaluasi atas kesenjangan capaian kinerja (*performance gap*) yang melaporkan kesenjangan capaian kinerja yang terjadi serta hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja, baik internal maupun eksternal. Informasi atas hasil evaluasi ini merupakan informasi utama dan sangat penting yang harus dilaporkan dalam LAKIP, karena informasi ini bermanfaat bagi manajemen dalam mengambil keputusan guna merumuskan strategi lanjutan untuk perbaikan peningkatan kinerja pada periode berikutnya.
- d. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya organisasi, baik sumber daya keuangan, manusia, maupun sarana dan prasarana. Informasi ini sebagai sarana pertanggungjawaban atas efisiensi dan kehematan atas penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja yang telah dilaporkan.
- e. Rekomendasi dan saran berupa strategi pemecahan masalah atas beberapa permasalahan yang telah dilaporkan. Informasi



ini antara lain memuat alternatif-alternatif strategi yang disarankan untuk manajemen dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

### **Langkah 10 - Performance Evaluation Jangka menengah**

Pada akhir tahun atau pada akhir periode rencana stratejik jangka menengah (renstra/RPJM) dilakukan evaluasi atas pelaksanaan program sekaligus penilaian kinerja atas hasil pembangunan yang dilaksanakan selama beberapa periode: apakah telah mencapai tujuan dan sasaran dalam renstra.

Evaluasi strategi program jangka menengah tersebut meliputi :

#### **a. Evaluasi Kelayakan (Appropriate Evaluation)**

Mengevaluasi apakah program-program pemerintah telah menyentuh kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat (*community needs*)

#### **b. Evaluasi atas efektivitas program (Effectiveness Evaluation)**

Bagaimana pencapaian hasil proses pembangunan ? Apakah masyarakat telah sejahtera? Apakah pelayanan telah memuaskan masyarakat ? Apakah kondisi daerah mempunyai daya saing atau keunggulan untuk dikembangkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat

#### **c. Evaluasi atas efektivitas biaya pelaksanaan program dan Evaluasi atas efisiensi pelaksanaan program (Efficiency & Cost Effectiveness Evaluation)**

Bagaimana proses manajerial pemerintahan apakah telah berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah tata kelola pemerintahan yang baik yang ditunjukkan dengan indikator tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program.

### **D. Pandangan dasar, Prinsip, Kebijakan, dan Orientasi Penerapan Konsep Manajemen Kinerja di Indonesia**

#### **1. Pandangan Dasar Sistem Manajemen Kinerja**

Bacal (1998) mengungkapkan lima pandangan dasar dalam sistem manajemen kinerja., yaitu:

- a. Model integratif untuk kinerja organisasi. Pada pandangan ini, manajemen kinerja sebagai suatu struktur sistem integratif yang saling berkesinambungan antar aspek. Sehingga, keberhasilan manajemen kinerja ditentukan oleh keseluruhan aspek yang ada dalam suatu organisasi, tidak ditentukan bagian per bagian.
- b. Fokus pada proses dan hasil. Manajemen kinerja menjadi suatu sistem yang tidak hanya berorientasi pada hasil (pandangan tradisional). Proses menjadi salah satu aspek penunjang yang penting dalam penentuan hasil yang baik.
- c. Keterlibatan pihak yang berkaitan dalam pencapaian tujuan. Pekerja sebagai subyek utama yang melakukan proses bisnis organisasi secara langsung. Maka dari itu, keterlibatan pihak yang berkaitan (pekerja) menjadi penunjang dalam pencapaian tujuan organisasi.
- d. Penilaian kinerja objektif dan mengena pada sasaran. Manajemen kinerja mencakup penilaian kinerja objektif dan sesuai dengan sasaran tiap bagian organisasi yang berkaitan. Akhirnya, hal ini berpotensi pada dampak positif dari penilaian kinerja yang sukses dan terstruktur.
- e. Evaluasi dan pembelajaran antara atasan dan bawahan. Manajemen kinerja yang baik mampu menyediakan suatu hasil evaluasi kinerja terukur. Hasil evaluasi dapat memberikan informasi pada pihak terkait (atasan maupun bawahan). Informasi mengenai hasil evaluasi dapat menjadi sarana pembelajaran dan penentu tindakan perbaikan di masa mendatang.

## **2. Prinsip Dasar Manajemen Kinerja**

Adapun prinsip dasar manajemen kinerja sebuah organisasi/perusahaan antara lain:

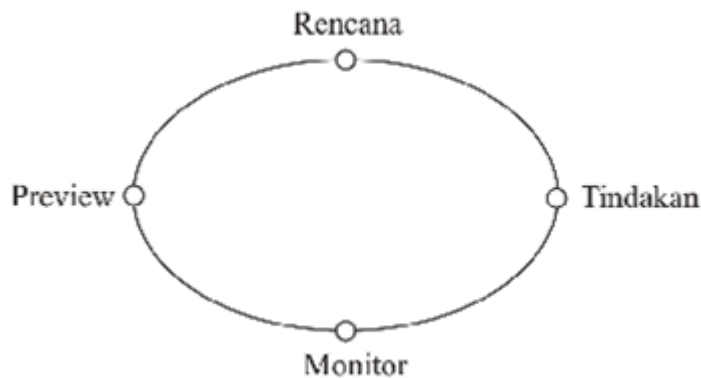
- a. Menghargai kejujuran
- b. Melakukan pelayanan
- c. Memiliki tanggung jawab
- d. Dirasakan seperti bermain

- e. Terdapat perasaan kasihan
- f. Terdapat perumusan tujuan
- g. Terdapat konsensus dan kerja sama
- h. Sifatnya berkelanjutan
- i. Terjadi komunikasi dua arah
- j. Memperoleh umpan balik

### 3. Model Manajemen Kinerja

Model Manajemen kinerja adalah proses tentang dijalankan dan di ungkapkannya manajemen kinerja dengan cara yang berbeda beda, dari yang sangat sederhana dan mendasar sampai pada proses yang mendalam. Menurut Wibowo (2007:110), ada 5 model manajemen kinerja yang mungkin untuk diterapkan, diantaranya sebagai berikut :

#### a. Model Deming



Gambar: 4.3

#### Model Manajemen Kinerja Deming

Sumber: Wibowo (2007)

Model Deming menjelaskan proses manajemen kinerja dimulai dengan menyusun:

- 1) Menyusun Rencana
- 2) Melakukan tindakan pelaksanaan
- 3) Memonitor jalan dan hasil pelaksanaan
- 4) Mereview atau peninjauan

Hasil dari mereview dapat menyimpulkan kemajuan telah dicapai sesuai dengan rencana. Namun, dapat terjadi deviasi antara rencana dengan kemajuan yang telah dicapai. Dalam keadaan seperti itu perlu dilakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja agar tujuan yang direncanakan dapat tercapai.

### **b. Model Torrington dan Hall**

Torrington dan Hall menggambarkan proses manajemen kinerja dengan cara merumuskan terlebih dahulu harapan terhadap kinerja dan hasil dari suatu kinerja. Kemudian, ditentukan dukungan yang diberikan terhadap kinerja untuk mencapai tujuan. Setelah itu dilakukan penilaian dan langkah terakhir pengelolaan terhadap standar kinerja.



**Gambar: 4.3**

### **Model Manajemen Kinerja Torrington dan Hall**

Sumber: Wibowo (2007)

### **c. Model Costello**

Proses manajemen yang di kemukakan oleh Costello di mulai dengan perencanaan sehingga dapat dibuat rencana dalam bentuk kinerja dan pengembangan. Untuk meningkatkan kinerja dengan cara *Coaching* pada SDM dan Pengukuran kemajuan kinerja. *Coaching* dan *Review* dilakukan berkala dan akhir tahun untuk meninjau

pengembangan kinerja. Hasil dari penilaian untuk menjadikan umpan balik di rencana tahun berikutnya. Berikut gambaran model Costello:



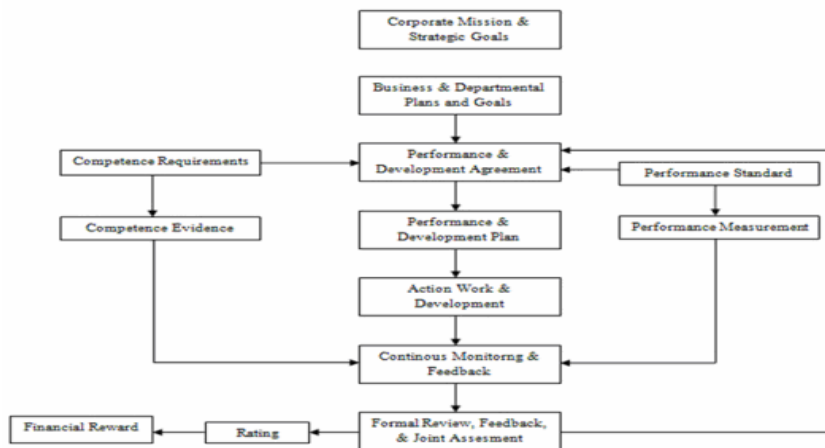
Gambar: 4.5

### Model Manajemen Kinerja Costello

Sumber: Wibowo (2007)

#### d. Model Armstrong dan Baron

Proses Manajemen kinerja merupakan serangkaian aktivitas yang di lakukan secara berurutan agar dapat mencapai hasil yang di harapkan. Siklus manajemen kinerja sebagai sekuen atau urutanyang di sajikan dalam bentuk gambar dan penjelasan sebagai berikut:



**Gambar: 4.6**  
**Model Manajemen Kinerja Armstrong dan Baron**

Sumber: Wibowo (2007)

Dari gambar: 4.6, Armstrong dan Baron, menkonsepsikan Manajemen Kinerja, kepada delapan komponen sebagai berikut:

- 1) Misi dan tujuan strategis titik awal dari proses manajemen kinerja dan dijadikan sebagai acuan untuk tingkat di bawahnya. Perumusan misi dan tujuan organisasi ditujukan untuk setiap kegiatan harus sejalan dan di harapkan dapat memberikan kontribusi pada prestasi.
- 2) Rencana dan Tujuan bisnis dan Departemen merupakan penjabaran dari misi dan tujuan organisasi.
- 3) Proses kesepakatan kinerja menjadi mudah jika kedua pihak menyiapkan pertemuan dengan mereview ulang progress terhadap sasaran yang disetujui.
- 4) Rencana Kinerja dan Pengembangan merupakan Eksplorasi Bersama tentang yang perlu dilakukan dan di ketahui individu untuk memperbaiki kinerja dan mengembangkan keterampilan serta kompetensinya, Manajer dapat memberikan dukungan dan bimbingan.
- 5) Tindakan Kerja dan Pengembangan: Manajemen kinerja dapat membantu orang untuk bertindak sehingga mencapai hasil yang sudah di rencanakan.
- 6) Monitoring dan Umpan Balik berkelanjutan: Konsep terpenting manajemen kinerja adalah proses mengelola dan mengembangkan standar kinerja yang baik dan secara normal tentang menetapkan arah, monitoring dan mengukur kinerja.
- 7) Review Formal dan Umpan balik: Dalam melakukan review secara formal pimpinan memberikan kesempatan individu untuk memberikan komentarnya. Hasil dari review dapat memberikan umpan balik bagi kontrak kerja.

8) Penilaian Kinerja dan Menyeluruh; Dengan memperhatikan hasil atau prestasi kerja dapat di tetapkan penilaian kinerja

#### **e. Model Ken Blanchard dan Garry Ridge**

Model Manajemen Kinerja menurut Ken Blanchard dan Garry Ridge cukup sederhana dan disebut sebagai sistem. Menurut Ken Blanchard dan Garry Ridge Manajemen kinerja yang efektif terdiri dari tiga bagian, yaitu:

- 1) Perencanaan kinerja
- 2) Coaching setiap hari
- 3) Evaluasi kinerja

Dari ketiga bagian tersebut yang paling menyerap waktu manajer adalah evaluasi kinerja karena manajer harus menilai kinerja tahunan dari masing-masing orang.

#### **4. Kebijakan Penerapan Manajemen Kinerja di Indonesia**

Salah satu aspek penting dalam reformasi birokrasi adalah penataan manajemen pemerintahan pusat dan daerah (provinsi, kabupaten, kota). Hal tersebut dinilai penting antara lain karena keberhasilan suatu kebijakan ditentukan pula oleh kemampuan manajemen di dalam birokrasi pemerintahan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara efisien dan efektif. Dewasa ini, terminologi "kinerja" menjadi ikon dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

Penerapan dan pembaharuan manajemen berbasis kinerja di Indonesia sebenarnya telah dilakukan pemerintah sejak diterbitkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang selanjutnya diterbitkan pula Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 yang terkait dengan Penetapan Kinerja sebagai bagian yang integral dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya dalam membangun pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Sistem AKIP yang merupakan salah satu wujud dari penerapan manajemen

berbasis kinerja mencakup:

- a. perencanaan strategik yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran);
- b. perencanaan kinerja yang meliputi sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja;
- c. pengukuran kinerja yang mencakup kinerja kegiatan dan kinerja sasaran;
- d. pelaporan kinerja yang dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pada perkembangan selanjutnya juga telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang antara lain mengamanatkan perlunya pengembangan sistem akuntabilitas yang terintegrasi dengan sistem perencanaan, penganggaran, akuntansi pemerintahan, dan pengawasan.

Terkait dengan penerapan manajemen berbasis kinerja tersebut, Sjahrudin Rasul (2005) menyatakan bahwa:

"....Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah diterapkan di Indonesia memiliki beberapa komponen yang memenuhi kriteria dalam siklus manajemen berbasis kinerja, yaitu: (1) perencanaan strategis; (2) rencana kinerja tahunan yang menekankan komitmen organisasi untuk mencapai hasil tertentu sesuai dengan rencana strategis organisasi untuk permintaan sumber daya yang dianggarkan; (3) penetapan (kontrak) kinerja yang didesain untuk menyediakan sebuah proses meningkatkan komitmen untuk mengukur kinerja dan membangun akuntabilitas serta kesediaan untuk membuat organisasi menjadi transparan; (4) pengukuran dan evaluasi kinerja; serta (5) laporan kinerja yang dipublikasikan tahunan. (Rasul, 2005: 77).

Implikasi dari itu, berbagai praktik untuk memperbaiki akuntabilitas dan kinerja pada dasarnya (Sjahrudin Rasul, 2008. 64), mencakup lima tingkatan akuntabilitas, yaitu:

- a. Tingkatan Sosial, yaitu bahwa suatu proses konsultasi public harus ditetapkan untuk membangun visi jangka panjang dan tujuan yang lugs dari masyarakat. Dalam kaitan



- ini, suatu laporan perkembangan tahunan harus disiapkan untuk publik;
- b. Tingkatan Pemerintah, yaitu pemerintah menyiapkan Renstra yang mengikhtisarkan prioritas 5 tahun selama berkuasa, pemerintah juga bisa menyiapkan perencanaan fiskal/ anggaran yang multi-tahun (medium term expenditure framework), indikator kinerja program menjadi bagian dari proyeksi tahunan, penganggaran berbasis kinerja harus dilakukan, suatu manajemen keuangan yang fleksibel harus ditetapkan dengan agak kurang menekankan kepada pengendalian input dan lebih pada pengendalian hasil program;
  - c. Tingkatan Korporat, para menteri dan pimpinan BUMN menyiapkan Renstra dan business plan terkait dengan prioritas pemerintah, suatu renstra harus mengidentifikasi bisnis apa yang ada dalam misi organisasi, tujuan, strategi untuk mencapainya, suatu business plan dibuat untuk mengidentifikasi saran manajemen dan ukuran kinerja, program dan kegiatan, serta prakiraan sumber daya yang digunakan, pelaporan yang efektif dibuat untuk penyiapan anggaran pemerintah dan ke lembaga DPR;
  - d. Tingkatan Program, ukuran kinerja dikembangkan dan sistem informasi diselaraskan untuk mengumpulkan data kinerja, kontrak/ penetapan kinerja harus ditetapkan, kinerja dimonitor terus menerus, evaluasi program yang komprehensif dilaksanakan, value for money audit dilakukan oleh auditor internal dan/atau auditor eksternal, pelatihan kepada penanggungjawab program untuk peningkatan implementasi manajemen berorientasi hasil dilakukan secara berkelanjutan;
  - e. Tingkatan individual, penetapan kinerja pegawai atau individual harus ditetapkan, pendidikan dan pelatihan manajemen kinerja kepada pegawai harus dilakukan secara berkelanjutan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi menekankan penyelenggaraan pemerintahan kepada tiga aspek yaitu kelembagaan, sumber daya manusia dan ketata

laksanaan. Aspek terakhir disebut juga *business process*, yang tidak lain adalah manajemen kinerja.

Dengan bergulirnya reformasi manajemen pemerintahan yang antara lain ditandai terbitnya Inpres No 7/1999, UU No 25/2004, UU No 17/2003, UU No 1/2004, Inpres No 5/2004, UU No 32/2004, UU No 33/2004, PP No 6/2006, PP No 39/2006, PP No 40/2006 dan peraturan lainnya, maka penerapan manajemen yang berorientasi pada peningkatan kinerja atau disebut pula “manajemen kinerja” di lingkungan instansi pemerintah merupakan suatu keniscayaan.

Kinerja pada dasarnya merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diemban kepadanya. Seluruh aktivitas dalam lingkungan instansi pemerintah akan diukur dari sisi akuntabilitas kinerjanya, baik dari sisi kinerja individu, kinerja unit kerja dan kinerja instansi, dan bahkan juga kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

## BAB V

# MODEL MANAJEMEN PERENCANAAN KEGIATAN PENELITIAN

**P**erencanaan Penelitian sering pula disebut sebagai desain Penelitian. Rancangan Penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah aplikatif Penelitian yang berguna sebagai pedoman dalam melaksanakan Penelitian ilmiah bagi si peneliti yang bersangkutan. Rancangan Penelitian harus ditetapkan secara terbuka sehingga orang lain dapat mengulang prosedur yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran Penelitian ilmiah yang telah dilakukan peneliti.

Perencanaan dan penganggaran Penelitian merupakan kegiatan awal yang dilakukan para dosen/peneliti untuk menyusun rencana kebutuhan, kegiatan dan rencana pengeluaran biaya Penelitian, dengan merujuk pada ketentuan penggunaan keuangan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, terutama yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017; dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017;

Orang yang terlibat dalam penelitian ilmiah dan berperan sebagai sumber data disebut subjek penelitian. Seringkali subjek Penelitian berkaitan dengan populasi dan sampel Penelitian. Apabila Penelitian ilmiah yang dilakukan menggunakan sampel Penelitian dalam sebuah populasi penelitian, maka peneliti harus berhati-hati dalam menentukannya. Hal ini dikarenakan, Penelitian yang menggunakan sampel sebagai subjek Penelitian akan menyimpulkan hasil penelitian yang berlaku umum terhadap seluruh populasi, walaupun data yang diambil hanya merupakan sampel yang jumlah jauh lebih kecil dari populasi penelitian. Pengambilan sampel penelitian yang salah akan mengarahkan peneliti kepada kesimpulan yang salah pula. Sampel yang dipilih harus merepresentasikan populasi Penelitian.

Dalam menuju akuntabilitas kinerja penelitian, bagian ini menyajikan model Manajemen Perencanaan Kegiatan Penelitian Berbasis Kinerja.

#### **A. Identitas Kegiatan**

Secara operasional Rencana kegiatan Penelitian Kesiapan PTKIS Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, dituangkan dalam bentuk *Term Of Reference* (TOR). TOR merupakan *outline* dari suatu kegiatan, yang mendiskripsikan tujuan dan struktur suatu kegiatan/proyek, negosiasi, pertemuan dll sebelum kegiatan dimulai. TOR dalam kegiatan Penelitian ini, mencakup hal-hal sbb:

##### **1. Nama kegiatan**

Judul Penelitian: Kesiapan PTKIS Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah: Studi di lingkungan PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten.

##### **2. Latar belakang kegiatan**

Keberadaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) di lingkungan KOPERTAIS Wilayah II Jawabaratan dan Banten tidak kurang dari 119 PTKIS, pada umumnya, belum menerapkan kebijakan SKPI pada lulusannya. Padahal PTKIS, Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan S-1- yang ditempuh kurang lebih 4 tahun (8 semester) untuk S1, kurang lebih 3 tahun (6 semester) untuk Diploma. Lulusannya diharapkan sudah memiliki Kompetensi yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Kompetensi (lulusan) berarti kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Kompetensi perlu dimiliki oleh setiap lulusan karena itu, dapat pastikan mereka setelah lulus akan terjun ke masyarakat dan akan bersaing dengan lulusan dari perguruan tinggi lainnya. Hal itu, harus dibuktikan dengan pemilikan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijazah, Transkrip Akademik, Dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan. Berlaku sejak tanggal petetapannya. Tanggal 12 Januari 2016.

Dengan adanya kebijakan tersebut, maka tujuan Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kesiapan; sumberdaya manusia PTKIS dalam menerapkan SKPI, infrastruktur pendukung PTKIS dalam menerapkan SKPI, dan komitmen organisasi PTKIS dalam menerapkan SKPI.

### **3. Tujuan, penelitian**

Mencermati berbagai fenomena dari perkembangan manajemen pendidikan dan pemanfaatannya di dalam dunia pendidikan saat ini, maka bagaimana seharusnya pihak-pihak terkait mengantisipasi perkembangan kebijakan manajemen pendidikan serta pemanfaatannya tanpa kehilangan kontrol dan landasan organisasi pendidikan yang antara lain menyangkut efektivitas dan efisiensinya, khususnya dalam implementasi kebijakan SKPI di PTKIS, maka Penelitian ini, memiliki tujuan umum dan tujuan khusus:

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang Kesiapan PTKIS Wilayah II Jawa Barat dan Banten dalam mendukung Implementasi Kebijakan SKPI..

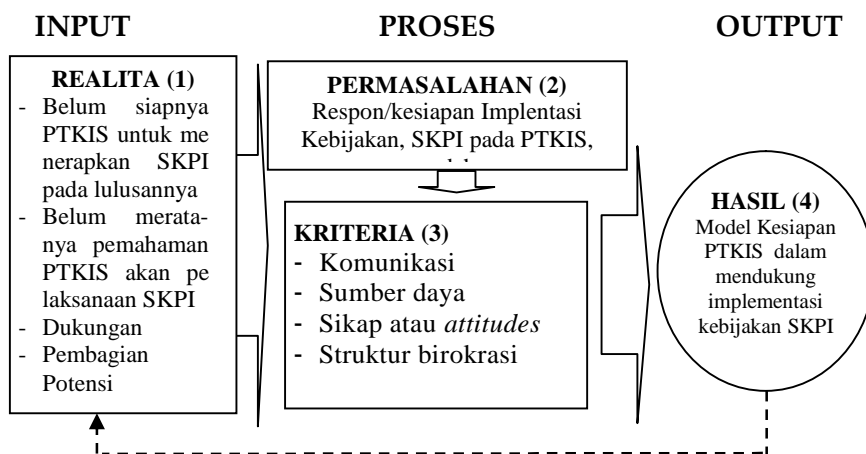
Secara khusus penelitian ini, bertujuan untuk:

- a. Mendeskripsikan bentuk Komunikasi dalam menyiapkan Implementasi Kebijakan SKPI di PTKIS;
- b. Mendeskripsikan kekuatan sumberdaya dalam menyiapkan Implementasi Kebijakan SKPI di PTKIS;
- c. Mendeskripsikan bentuk disposisi dalam menyiapkan Implementasi Kebijakan SKPI di PTKIS;
- d. Mendeskripsikan bentuk struktur birokrasi/organisasi dalam menyiapkan Implementasi Kebijakan SKPI di PTKIS?

## B. Masukan Proses dan Target yang dihasilkan dari Kegiatan

### 1. Masukan/input Proses dan cakupan Output kegiatan

Untuk mengetahui tentang masukan/input Proses dan cakupan Output kegiatan, dapat dilihat pada gambar 1 berikut:



Gambar: 3.1

### Masukan Proses dan cakupan Output kegiatan Penelitian

### 2. Target Hasil Penelitian diharapkan

#### a. Aspek Penafsiran kebijakan penerapan SKPI dilingkungan PTKIS

Mendapatkan gambaran penafsiran kebijakan SKPI, yaitu diperolehnya data informasi mengenai pemahaman khusus dalam mengimplementasikan, dikarenakan kebijakan penerapan SKPI, bisa dikatakan tergolong kebijakan baru di dunia Pendidikan Tinggi, khususnya di lingkungan PTKIS. Pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu sangat menentukan keberhasilan diterapkannya kebijakan ini. Menafsirkan kebijakan SKPI menjadi program.

#### b. Pengorganisasian penerapan kebijakan SKPI, di PTKIS

Mendapatkan gambaran pengorganisasian implementasi kebijakan penempatan SKPI, yaitu diperolehnya data informasi mengenai: (1) desain organisasi dan struktur organisasi; (2) pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan; (3)

integrasi dan koordinasi; (4) perekrutan dan penempatan sumber daya manusia, (5) hak, wewenang dan kewajiban, (6) pendelegasian, (7) pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas sumber daya manusia, dan (8) Budaya organisasi.

### **c. Strategi Penerapan Kebijakan SKPI di PTKIS**

Mendapatkan gambaran tentang tantangan implementasi kebijakan penenerapan SKPI, yaitu diperolehnya data informasi mengenai: (1) struktur dengan strategi; (4) melembagakan strategi; (5) mengoperasikan strategi; (6) menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi.

### **d. Kendala yang dihadapi, dan Solusi dalam mengimplemetasi Kebijakan SKPI di lingkungan PTKIS;**

Mendapatkan gambaran tentang kendala dan solusi implementasi kebijakan penenerapan SKPI, yaitu diperolehnya data informasi mengenai: (1) Komunikasi, (2) Sumber daya (3) Sikap (*dispositions* atau *attitudes*), dan (4) Struktur birokrasi.

## **C. Waktu, Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian**

### **1. Waktu, Ksanaan Kegiatan Penelitian**

Perencanaan Waktu Kegiatan Penelitian mulai dari pembuatan TOR Pelaksanaan sampai dengan penyusunan penyerahan Laporan, direncanakan selama 6 bulan dan akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2018. Bedasar pada Surat Perjanjian Kerja No.B 113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018. tanggal 21 Maret 2018. Penelitian “Kesiapan PTKIS Wilayah II Jawa Barat dan Banten dalam mendukung Implementasi Kebijakan SKPI” Waktu pelaksanaan selama 6 bulan, mulai tanggal 21 Maret sampai 20 Agustus 2018. Adapun, tahapan dan waktu kegiatan Penelitian diuraikan pada tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1**  
**Jadwal Kegiatan Penelitian**

Dasar: Surat Perjanjian Kerja No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018. tanggal 21 Maret 2018. Waktu pelaksanaan selama 6 bulan, mulai tanggal 21 Maret sampai 20 Agustus 2018.

No	Bulan Kegiatan	Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				Ket.
		Minggu	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Perencanaan	√																								
2.	Penyusunan TOR Penelitian		√	√	√	√																				
3.	Revue Ped/Instrumen dg pakar					√																				
5.	Studi pendahuluan/observasi						√	√	√	√																
6.	Penyebaran, Instrumen									√																
7.	Penyusunan Bab I-II-III													√	√	√										
8.	Pengumpulan data									√	√	√	√	√	√											
9.	Pengolahan/analisis data													√	√	√	√									
10.	Laporan Kegiatan 60% Termin.I																√1									
11.	Validasi data ke lokasi																√	√								
12.	Penyusunan Laporan																√	√	√	√						
13.	Seminar Hasil Penelitian																					√				
14.	Editing/Proses HAKI/Publikasi JI																		√	√	√					
15.	Laporan 100% T.II (dg SPJB)																				√	√2				

Ket: √1=Waktu Penyerahan Laporan Antara  
√2=Waktu Penyerahan Laporan Antara



## 2. Lokasi kegiatan

Lokasi kegiatan Penelitian ini, dilaksanakan di 24 PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten, tampak pada tabel 3.2, berikut:

**Tabel: 3.2**  
**Sebaran Lokasi Kegiatan Penelitian**

No	Nama PTKIS	Kualifikasi	Alamat	Kab/Kota/Propinsi
1	2	3	4	5
1.	Universitas Mathlauul Anwar	Univ	Sindang Hayu Saketi Kab. Pandeglang Tlp.	Pandeglag-Banten
2.	IAIB Serang	Ins	Jl. Ki Fathoni no 12/51 depan masjid Agung	Serang-Banten
3.	STAI Latansa Masiro	ST	Jl. Soekarno-Hatta Pasirjati Rangkasbitung	Lebak-Banten
4.	STAI Fatahilah	ST	Jln. Raya Puspitek (depan Mesjid Agung) Serpong	Tangerang-Banten
5.	FAI Univ Juanda	Univ	Jl. Tol Ciawi No. 1, Bogor 16720 Telp. (0251) 243357,	Bogor-Jawa Barat
6.	IAIN Laroiba	Ins	Jl, Raya Leuwiliang No. I Bogor	Bogor-Jawa Barat
7.	STAI Al-Karimiyah	ST	Jl. H. Maksum No. 52 Sawangan Depok	Depok-Jawa Barat
8.	STAI Karisma	ST	Jl. Raya Siliwangi No. 39 Curug, Sukabumi, Jawa Barat	Kab.Sukabumi Jabar
9.	STAI Sukabumi	ST	Jl. Veteran I No. 36 PO BOX 19 Sukabumi 43 11 1 Jawa Barat	Kota Sukabumi Jabar
10	STAI Nurul Hikmah	ST	Jln. Pertigaan Pasir Hayam No. 32 Cilaku Cianjur 43285	Kab. Cianjur-Jabar
11	STAI Agus Salim	ST	Jl. Jend. Urip Sumoharjo Kali Ulu RT 003/001 Tanjungsari-Cikarang	Bekasi-Jawa Barat
12	STAI As Sidiqiyah	ST	Pondok Pesantren Asshiddiqiyah Desa Pasirukem Kecamatan Cilamaya Kulon	Karawang-Jabar
13	STAI KHE. Z Muttaqin	ST	Jl. Baru Maracang Srikan di No. 35, Purwakarta,	Purwakarta Jabar

1	2	3	4	5
14	STAI Riyaduljannah	ST	Jl. Raya Jalancagak	Subang-Jawa Barat
15	STAIS Dharma	ST	Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 1/1 Segeran Kidul Juntinyuat	Indramayu-Jabar
16	STAI Cirebon	ST	Komplek Islamic Centre Jl. Tuparev No. 111 Cirebon	Cirebon-Jabar
17	FKIS UNSIA	Univ	Mayasih Cigugur Kuningan	Kuningan-Jabar
18	STAI Miftahul Huda Al Azhar	ST	Jl. Pesantren No.2 Citangkolo Kujangsari Kec. Langensari	Kota Banjar Jabar
19	STAI Putra Galuh	ST	Jalan Raya Banjar No. 141 Cijantung Cijeungjing Ciamis	Ciamis-Jabar
20	STAINU Tasikmaya	ST	Jl. DR. Sukardjo No. 47 Tasikmalaya	Tasikmalaya-Jabar
21	IAIC Cipasung	Ins	Jl. Mukhtamar NU No. 1 Tasikmalaya Pondok Pesantren Cipasung	Tasikmalaya-Jabar
22	STAI Siliwangi Garut	ST	Jl. Raya Tutungan No. 117 Leles	Garut-Jawa Barat
23	STAI Al-Falah	ST	Pondok Pesantren Al-Falah Cicalenka	Bandung-Jabar
24	STAI Siliwangi Cimahi	ST	Jl. Ters. Jend. Sudirman Kb Rumpit	Cimahi Jawa Barat

Keterangan: 3 Univ ; 3 Ins; dan 18- ST= 24 PTKIS

### 3. Pelaksana kegiatan

Pelaksana kegiatan Penelitian ini, serta tugas, tanggung jawabnya, tampak pada tabel 3,3, berikut:

**Tabel: 3.3**

#### **Pelaksana Lokasi Kegiatan Penelitian**

N o	Nama / NIDN/ID Litapdimas	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
1.	Dr. H. A. Rusdiana, MM -2021046101 -2017-10-20 15:05:57	3	-Mengkoordinasikan kegiatan Penelitian -Analisis kebutuhan -Monitoring
2.	Drs. Nasihudin, M.Pd. -2020096201 -2020096010800	3	-Mengolah data -Mendokumentasikan -Menyusun Laporan

## **D. Anggaran dan sumber Dana**

### **1. Sumber Biaya Penelitian**

Kegiatan Penelitian ini, dibiayai dari Dana DIPA RM UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2018. Perencanaan dan penganggaran Penelitian merupakan kegiatan awal yang dilakukan tim peneliti untuk menyusun rencana kebutuhan, kegiatan dan rencana pengeluaran biaya Penelitian, dengan merujuk pada ketentuan penggunaan keuangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, terutama Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017; dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017;

### **2. Dasar Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Penelitian**

Perencanaan dan penganggaran Penelitian ini, secara teknis mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, sebagai berikut:

- a. Anggaran tidak mencantumkan honorarium peneliti, karena Penelitian termasuk bagian dari pelaksanaan fungsi dosen dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. Komponen biaya Penelitian, dapat mencakup biaya sebagai berikut:
  - 1) Komponen biaya persiapan/pras Penelitian ini, mencakup pembiayaan:
    - (a) Penyusunan proposal mencakup narasumber dalam forum diskusi dengan teman sejawat;
    - (b) Presentasi proposal, mencakup transportasi, akomodasi dan narasumber;
    - (c) Persiapan Penelitian dapat mencakup penyusunan instrumen, *tryout* instrumen dan lain sebagainya.
  - 2) Komponen biaya pelaksanaan Penelitian ini, mencakup pembiayaan:
    - (a) Pengumpulan data melalui penyebaran instrumen,

- observasi dan wawancara, meliputi belanja bahan, biaya akomodasi, transportasi, honorarium, pengumpulan data, dan lain-lain;
- (b) Pengumpulan data dan validasi data, melalui *focus group discussion* (FGD) mencakup belanja bahan, akomodasi, transportasi dan lain- lain;
  - (c) Analisa data melalui teknik Deplhi, aplikasi analisis data statistik melalui SPSS (Statistical Product and Service Solutions), MOS (Model Output Statistics) dan SEM (Structural Equation Modeling) mencakup belanja bahan, transportasi dan honorarioium pengolahan data dan lain-lain.
- 3) Komponen biaya pra pelaksanaan Penelitian ini, mencakup pembiayaan:
- (a) Seminar ekspose hasil Penelitian meliputi biaya narasumber dan moderator, transportasi, akomodasi dan belanja bahan
  - (b) Diseminasi melalui publikasi ilmiah jurnal dan penerbitan buku hasil Penelitian, biaya layout, penerjemahan dan pengiriman artikel;
  - (c) Pengurusan HKI/Paten, pembuatan poster, temu lapangan, pelatihan profesi mencakup biaya transportasi, akomodasi, dan sebagainya.
- c. Besaran atas belanja barang dan belanja perjalanan serta pembelanjaan lainnya disesuaikan dengan sifat, ukuran, jenis dan luas Penelitian;
- d. Semua biaya yang dikeluarkan dari kegiatan Penelitian dikenakan pajak yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **3. Rencana Penggunaan Biaya Penelitian**

Berdasarkan pada Keputusan Dirjen Pendis Nomor 1056 Tahun 2017, dan Surat Perjanjian Kerja No.B 113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018, tanggal 21 Maret 2018. Biaya Penelitian “Kesiapan PTKIS Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI”, dialokasikan sebesar Rp. 75.000.0000,- atas dasar itu, maka perencanaan penggunaan biaya kegiatan Penelitian , dirinci pada tabel 3.4, berikut:

**Tabel. 3.4**  
**Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Penelitian**

Jenis Kegiatan	Vol/Frek/Satuan			Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
	Vol	Frek	Sat		
<b>A. Pra Kegiatan</b>					
ATK	1	1	PK	503,000	503,000
Foto Copy ref &ref	1	1	PK	707,500	707,500
Konsumsi NS/Peserta	12	1	OA	45,000	540,000
Honor Narasumber Rapat	3	1	JPL	500,000	1,500,000
Uang Saku Peserta Rapat	7	1	OJ	150,000	1,050,000
<b>Jumlah Sub A</b>					<b>4,300,500</b>
<b>B. Pelaksanaan Kegiatan</b>					
<b>1. Alat Bahan</b>					
ATK	1	1	PK	800,500	800,500
Foto Copy ref &kel adm	1	1	PK	816,500	816,500
Konsumsi NS/Peserta	12	1	OA	45,000	540,000
<b>2. Biaya Perjalanan</b>					
Uang Harian	37	2	OH	430,000	31,820,000
Tiket PP	27	2	O/P	210,000	11,340,000
Penginepan	13	2	OH	120,000	3,120,000
<b>3. Jasa Profesi</b>					
Tenaga Pembantu	7	24	OH	80,000	13,440,000
Honor Narasumber	3	1	JPL	500,000	1,500,000
Transfort Peserta Rapat	1	7	OJ	150,000	1,050,000
Pengolah Data	1	1	PK	1,500,000	1,500,000
<b>Jumlah Sub B</b>					<b>65,927,000</b>
<b>C. Pasca Pelaksanaan</b>					
<b>1. Alat Bahan</b>					
ATK	1	1	PK	515,000	515,000
Foto Copy &kel adm	1	1	PK	867,500	867,500
Konsumsi NS/Peserta	12	1	OA	45,000	540,000
Transport Lokal	2	1	PK	150,000	300,000
<b>2. Jasa Profesi</b>					
Honor Narasumber	3	1	JPL	500,000	1,500,000
Transfort Peserta	7	1	OJ	150,000	1,050,000
<b>Jumlah Sub C</b>					<b>4,772,500</b>
<b>Jumlah Total</b>					<b>75,000,000</b>

Bandung, 22 Maret 2018  
Ketua Tim Peneliti,  
ttd,  
**Dr.H.A. Rusdiana, MM**  
NIP. 196104211986021001



**Tabel. 3. 5**  
**Rencana Tahapan Penggunaan Biaya Kegiatan Penelitian**

Jenis Kegiatan	Vol/Frek/Satuan			Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)	Tahap I 60 % (Rp)	Tahap II 40 % (Rp)	JumlahI Total (Rp)
	Vol	Frek	Sat					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A. Pra Kegiatan</b>								
ATK	1	1	PK	503,000	503,000	503,000		
Foto Copy ref &ref	1	1	PK	707,500	707,500	707,500		
Konsumsi NS/Peserta	12	1	OA	45,000	540,000	540,000		
Honor Narasumber Rapat	3	1	JPL	500,000	1,500,000	1,500,000		
Uang Saku Peserta Rapat	7	1	OJ	150,000	1,050,000	1,050,000		
<b>Jumlah Sub A</b>					<b>4,300,500</b>	<b>4,300,500</b>		<b>4,300,500</b>
<b>B. Pelaksanaan Kegiatan</b>								
<b>1. Alat Bahan</b>								
ATK	1	1	PK	800,500	800,500	800,500		
Foto Copy ref &kel adm	1	1	PK	816,500	816,500	816,500		
Konsumsi NS/Peserta	12	1	OA	45,000	540,000	540,000		
<b>2. Biaya Perjalanan</b>								
Uang Harian	37	2	OH	430,000	31,820,000	21.500,000	10.320.000	
Tiket PP	27	2	O/P	210,000	11,340,000	8.224,000	3.116.000	
Penginapan	13	2	OH	120,000	3,120,000	1.800.000	1,320.000	
<b>Jumlah Sub B.1 dan B.2</b>					<b>47,636.000</b>	<b>33.884,000</b>	<b>14.760.000</b>	
<b>Jumlah Sub. A dan B.1-B.2</b>					<b>51,396,500</b>	<b>38.184.500</b>	<b>14.760.000</b>	<b>14.760.000</b>
<i>Jumlah dipindahkan</i>					<i>51,396,500</i>	<i>38.184.500</i>	<i>14.760.000</i>	<i>14.760.000</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Jumlah pindahan</b>					<b>51,396,500</b>	<b>38.184.500</b>	<b>14.760.000</b>	<b>14.760.000</b>
<b>3. Jasa Profesi</b>								
Tenaga Pembantu	7	24	OH	80,000	13,440,000		13,440,000	
Honor Narasumber	3	1	JPL	500,000	1,500,000	1,500,000		
Transfort Peserta Rapat	1	7	OJ	150,000	1,050,000	1,050,000		
Pengolah Data	1	1	PK	1,500,000	1,500,000	1,500,000		
<b>Jumlah Sub B 3</b>					<b>16,490,000</b>	<b>4,050,000</b>	<b>13,440,000</b>	<b>16,490,000</b>
<b>C. Pasca Pelaksanaan</b>								
<b>1. Alat Bahan</b>								
ATK	1	1	PK	515,000	515,000		515,000	
Foto Copy & kel adm	1	1	PK	867,500	867,500		867,500	
Konsumsi NS/Peserta	12	1	OA	45,000	540,000		540,000	
Transport Lokal	2	1	PK	150,000	300,000		300,000	
<b>2. Jasa Profesi</b>								
Honor Narasumber	3	1	JPL	500,000	1,500,000		1,500,000	
Transfort Peserta	7	1	OJ	150,000	1,050,000		1,050,000	
<b>Jumlah Sub C</b>					<b>4,772,500</b>		<b>4,772,500</b>	<b>4,772,500</b>
<b>TOTAL BIAYA</b>					<b>75,000,000</b>	<b>45.000,000</b>	<b>30.000,000</b>	<b>75,000,000</b>

Setiap orang lembaga/organisasi/tim peneliti memiliki cita-cita dalam kehidupannya. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut diperlukan perencanaan terlebih dahulu. Akan tetapi rencana tidak akan bergerak kemana-mana jika tidak dijalankan atau direalisasikan. Sehebat apapun rencana tidak akan ada hasilnya jika tidak direalisasikan. Oleh karena itu realisasi dari sebuah rencana sangatlah penting dalam berbagai bidang kehidupan, apakah pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya, terlebih pada kegiatan penelitian.



## BAB VI

# MANAJEMEN PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN BERBASIS KINERJA

**P**elaksanaan penelitian pada hakikatnya bertumpu proses pengumpulan data sesuai dengan desain atau rancangan Penelitian yang telah dibuat. Maka daitu, pelaksanaan Penelitian harus dilakukan secara cermat dan hati-hati karena akan berhubungan dengan data yang dikumpulkan, keabsahan dan kebenaran data Penelitian tentu saja akan menentukan kualitas Penelitian yang dilakukan. Seringkali peneliti saat berada di lapangan dalam melaksanakan Penelitian nya terkecoh oleh beragam data yang sekilas semuanya tampak penting dan berharga.

Untuk, itu, peneliti harus fokus pada pemecahan masalah yang telah dirumuskannya dengan mengacu pada pengambilan data berdasarkan instrumen penelitian yang telah dibuatnya secara ketat. Berdasarkan cara pengambilan data terhadap subjek penelitian , data dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu data langsung dan data tidak langsung. Data langsung adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber data (subjek penelitian), sementara data tidak langsung adalah data yang diperoleh peneliti tanpa berhubungan secara langsung dengan subjek penelitian yaitu melalui penggunaan media tertentu misalnya wawancara menggunakan telepon, dan sebagainya.

Dalam menuju akuntabilitas kinerja penelitian, bagian ini

menjajikan model Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Berbasis Kinerja.

## **A. Konsep dasar Pelaksanaan Kegiatan Penelitian**

### **1. Pengertian Pelaksanaan Penelitian**

#### **a. Memahami Makna Pelaksanaan**

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan (Nurdin Usman. 2002: 70).

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula (Abdullah Syukur. 1987: 40).

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan

suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

#### **b. Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan**

Sebagaimana telah disampaikan di atas, pelaksanaan merupakan implementasi, biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Apabila implementasi dilihat dari teori kebijakan, ada beberapa faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- b. Resources (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;
- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku (A.Rusdiana, 2015: 138).

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain.

#### **c. Unsur-unsur dalam program pelaksanaan**

Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya

terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:

- 1) Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- 2) Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
- 3) Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. (Abdullah Syukur. 1987: 398).

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

## **2. Pelaksanaan Penelitian**

### **a. Memahami Makna Penelitian**

Penelitian adalah suatu usaha atau cara yang sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu dengan tujuan mencari jawaban dari masalah yang diteliti dilakukan secara ilmiah. Purwanto (2010:163) mendefinisikan “Penelitian adalah cara penemuan kebenaran atau pemecahan masalah yang dilakukan secara ilmiah”. Dalam penelitian ada tiga syarat penting yang harus dimiliki yaitu, penelitian harus sistematis, penelitian harus terencana, dan penelitian harus mengikuti konsep ilmiah.

Sistematis diartikan dalam penelitian harus dilaksanakan berdasarkan urutan yang paling sederhana hingga yang paling kompleks sampai tercapainya tujuan dari penelitian yang efektif dan efisien.

Terencana diartikan sebelum melaksanakan penelitian sudah di konsep apa yang akan dilaksanakan dan apa yang akan diteliti dari masalah yang ada, sehingga penelitian dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang dibuat sehingga tidak memerlukan biaya dan waktu yang sia-sia.

Mengikuti konsep ilmiah artinya penelitian yang dilakukan harus mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan atau ditentukan mulai dari awal sampai akhir kegiatan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan.

Secara umum, penelitian diartikan sebagai suatu proses

pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan- tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data menggunakan metode-metode ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, eksperimental atau noneksperimental, interaktif atau noninteraktif.

Metode-metode tersebut telah dikembangkan secara intensif, melalui berbagai uji coba sehingga telah memiliki prosedur yang baku. Penelitian dapat di tinjau dari beberapa segi diantaranya:

- 1) Dari segi proses penelitian merupakan berbagai kegiatan yang meliputi, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisa data, serta interpretasi dan pengambilan kesimpulan.
- 2) Dari segi pendekatan penelitian merupakan kegiatan dengan mempergunakan pendekatan-pendekatan ilmiah (metode ilmiah).
- 3) Dari segi tujuan suatu penelitian dilakukan untuk menemukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam rangka memecahkan permasalahan- permasalahan baik untuk kebutuhan secara praktis maupun teoritis. Penelitian merupakan upaya untuk mengembangkan pengetahuan, mengembangkan dan menguji teori.

Dalam kaitannya dengan upaya pengembangan pengetahuan, Welberg (1986) mengemukakan lima langkah pengembangan pengetahuan melalui penelitian, yaitu:

- 1) Mengidentifikasi masalah penelitian
- 2) Melakukan studi empiris
- 3) Melakukan replikasi atau pengulangan
- 4) Menyatukan (sintesis) atau mereviu
- 5) Menggunakan dan mengevaluasi (McMillan dan Schumacher, 2001: 6).

Penelitian dapat pula diartikan sebagai cara dan proses penemuan melalui pengamatan atau penyelidikan yang bertujuan untuk mencari jawaban permasalahan atau persoalan sebagai suatu masalah yang diteliti.

Kerlinger (1986) mengemukakan, penelitian adalah proses penemuan yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, dan berdasarkan pada teori dan hipotesis atau jawaban sementara. Hasil penemuan tersebut, baik *discovery* atau *invention*. Hasil temuan sesuatu yang memang sudah ada dengan dukungan fakta biasa disebut *discovery*.

Sukardi (2005) mengatakan, *discovery* diartikan sebagai hasil temuan memang sebetulnya sudah ada. Ia mencontohkan, misalnya penemuan Benua Amerika. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa *invention* dapat diartikan sebagai penemuan hasil penelitian yang betul-betul baru dengan dukungan fakta, misalnya hasil kloning dari hewan yang sudah mati dan dinyatakan punah, kemudian diteliti untuk menemukan jenis yang baru. Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif memiliki dasar positivis dan banyak diterapkan dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan alam, sosial, ekonomi dan pendidikan.

#### **b. Ciri-ciri Pelaksanaan Penelitian**

Sukardi (2005) mengemukakan beberapa ciri penelitian yang memiliki dasar positivis, antara lain sebagai berikut:

- a. Menekankan objektivitas secara universal dan tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu
- b. Menginterpretasi variabel yang ada melalui peraturan kuantitas atau angka
- c. Memisahkan antara peneliti dengan objek yang hendak diteliti
- d. Menekankan penggunaan metode statistik untuk mencari jawaban permasalahan yang hendak diteliti Suatu kerja penelitian menuntut obyektivitas, terfokus, memerlukan proses yang intensif, sistematis, dan lebih formal, baik di dalam proses atau pengukuran maupun penganalisaan dan penyimpulan hasil-hasilnya.

Suatu kerja penelitian bisa juga dilakukan dalam rangka penemuan dan pengembangan pengetahuan. Metode ilmiah mengikuti proses identifikasi masalah, pengembangan hipotesis, melakukan observasi, menganalisis, dan kemudian menyimpulkannya.

Proses-proses dimaksud dapat digunakan secara informal dalam kehidupan sehari-hari dan belum tentu bisa disebut

suatu kerja penelitian. Dalam metode ilmiah yang dipentingkan ialah aplikasi berfikir deduktif-induktif didalam pemecahan suatu masalah. Contoh: di suatu ruang praktek, seorang dokter sedang melakukan kegiatan mendiagnosis penyakit pasiennya.

Dilihat dari cara kerjanya, dokter tersebut bisa disebut melakukan metode ilmiah, tetapi belum dapat disebut melakukan suatu kerja penelitian. Cara ilmiah berarti kegiatan itu dilandasi oleh metode keilmuan.

Metode keilmuan merupakan gabungan antara pendekatan rasional dan empiris. Pendekatan rasional memberikan kerangka berfikir yang koheran dan logis. Sedangkan pendekatan empiris memberikan kerangka pengujian dalam memastikan suatu kebenaran dengan cara yang ilmiah itu diharapkan data yang objektif, valid dan reliabel. Objektif berarti semua orang akan memberikan penafsiran yang sama. Valid berarti adanya ketepatan antara data yang terkumpul oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya. Sedangkan reliabel berarti adanya keajekan data yang didapat dari waktu ke waktu.

Untuk jelasnya, anda dapat memahami pengertian atau batasan dari istilah penelitian itu sendiri dengan memperhatikan beberapa ciri suatu kerja penelitian antara lain sebagai berikut ini.

- 1) Penelitian dirancang dan diarahkan guna memecahkan sesuatu masalah tertentu sebagai jawaban terhadap suatu masalah yang menjadi fokus penelitian;
- 2) Penelitian memiliki nilai deskripsi dan prediksi serta hasil temuannya terhadap sampel yang terfokus pada suatu kelompok atau situasi objek tertentu yang spesifik yang penekanannya pada pengembangan generalisasi, prinsip-prinsip, serta teori-teori.
- 3) Penelitian memerlukan instrumen dan prosedur pengumpulan data yang valid sehingga membuahkan hasil analisis/penemuan yang akurat dan terpercaya.
- 4) Penelitian berkepentingan bukan sekedar mensistesa atau mengorganisasi hal-hal yang telah diketahui sebelumnya tetapi lebih diarahkan untuk penemuan baru
- 5) Penelitian dirancang dengan prosedur-prosedurnya secara

teliti dan rasional

- 6) Penelitian menuntut keahlian untuk mengetahui secara memadai permasalahan yang diselidikinya
- 7) Penelitian yang menggunakan hipotesis, tekanannya pada pengujian hipotesis, bukan pada pembuktian hipotesis
- 8) Penelitian menuntut kesabaran dan tak dilakukan secara tergesa-gesa.
- 9) Penelitian memerlukan pencatatan dan pelaporannya dilakukan secara teliti dan cermat, baik terhadap prosedurnya maupun hasil-hasil dan kesimpulannya disajikan atas dasar bukti-bukti yang ada secara objektif, hati-hati, dan cermat sehingga dapat dijadikan bahan yang berharga.

### **c. Penelitian Pendidikan**

Dalam dunia pendidikan, dengan penelitian bisa membawa pengertian yang semakin baik terhadap perilaku orang perseorangan, termasuk subjek didik atau pendidik, proses belajar mengajar serta situasi atau kondisi yang bisa membuat lebih berhasilnya proses pendidikan. Pada ilmu-ilmu tingkah laku, penelitian mengarah pada pengembangan dan pengujian teori-teori tingkah laku.

Pemahaman terhadap tingkah laku peserta didik maupun pendidik semakin diperlukan dari hasil-hasil penelitian dalam bidang pendidikan, baik dari segi ilmu maupun prakteknya. Pada umumnya penelitian-penelitian pendidikan tergolong penelitian jenis terapan guru mengembangkan generalisasi-generalisasi yang berkenaan dengan proses belajar mengajar dan bahan-bahan mengajar.

Karena itu, penelitian pendidikan memberikan perhatiannya pada pengembangan dan pengujian teori-teori tentang bagaimana peserta didik (pelajar, mahasiswa) berperilaku dalam setting pendidikan.

Berangkat dari hakikat penelitian yang dikemukakan di atas, penelitian pendidikan dapat diartikan sebagai proses yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan (to discover knowledge) dan pemecahan masalah (problem solving) pendidikan melalui metode ilmiah, baik dalam pengumpulan maupun analisis datanya, serta membuat rumusan generalisasi berdasarkan penafsiran data tersebut.



Penelitian pendidikan adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya memahami proses kependidikan dalam lingkungan formal, pendidikan informal maupun pendidikan nonformal. Menemukan prinsip-prinsip umum atau penafsiran tingkah laku yang dapat dipakai untuk menerangkan, meramalkan, dan mengendalikan kejadian-kejadian dalam lingkungan pendidikan merupakan tujuan dari suatu kerja penelitian.

### **3. Esensi Pelaksanaan Penelitian berbasis Kinerja**

Pelaksanaan penelitian pada hakikatnya bertumpu proses pengumpulan data sesuai dengan desain atau rancangan penelitian yang telah dibuat. Maka dari itu, pelaksanaan Penelitian harus dilakukan secara cermat dan hati-hati karena akan berhubungan dengan data yang dikumpulkan, keabsahan dan kebenaran data penelitian tentu saja akan menentukan kualitas penelitian yang dilakukan. Seringkali peneliti saat berada di lapangan dalam melaksanakan penelitian nya terkecoh oleh beragam data yang sekilas semuanya tampak penting dan berharga.

Untuk itu, peneliti harus fokus pada pemecahan masalah yang telah dirumuskannya dengan mengacu pada pengambilan data berdasarkan instrumen penelitian yang telah dibuatnya secara ketat.

Berdasarkan cara pengambilan data terhadap subjek penelitian, data dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu data langsung dan data tidak langsung. Data langsung adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber data (subjek Penelitian), sementara data tidak langsung adalah data yang diperoleh peneliti tanpa berhubungan secara langsung dengan subjek penelitian yaitu melalui penggunaan media tertentu misalnya wawancara menggunakan telepon, dan sebagainya.

Dalam menuju akuntabilitas kinerja penelitian, bagian ini

menjajikan model Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Berbasis Kinerja. Artinya manajemen Penelitian. Penelitian yang bermutu dapat dihasilkan melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 2951 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dana Boptn Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Untuk itu, perlu pelaksanaan yang meliputi seleksi proposal, pendampingan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan. (lamp. Kep.Dirjen Pendis no 291/2017).

Berdasar pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7177 Tahun 2017. Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Program Penelitian Tahun Anggaran 2018, tanggal 28 Desember 2017. bahwa Laporan Penelitian mutlak diwujudkan dan diukur dalam bentuk laporan akademik, yaitu laporan hasil pelaksanaan Penelitian . terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- 1) Laporan pelaksanaan Penelitian dengan cara mengisi buku harian (log book). Buku harian ini berisi tentang catatan-catatang kegiatan Penelitian .
- 2) Laporan Hasil Penelitian; dalam bentuk buku. Laporan inti sebagaimana dimaksud pada huruf a di-lay out dalam bentuk buku siap dipublikasikan dengan ukuran B5 (18x 25cm), dengan ukuran spasi 1,15 s.d 1,5 pt. (old).
- 3) Laporan *Output/Draft* Artikel; Laporan yang sudah diformat dalam bentuk tulisan/artikel yang siap dikirimkan ke Jurnal. Laporan jenis ini mengikuti sistematika sesuai dengan ketentuan Jurnal Nasional dan internasional.
- 4) Laporan *Out come*, yaitu laporan yang mengatur tentang *out come* program sesuai ketentuan besaran dana bantuan yang di berikan.

## **B. Prosedur dan Proses Penelitian**

Prosedur pengumpulan data didasarkan pada prinsip yang dianjurkan oleh *Naturalistic Approach* yang melekat pada tradisi ilinu. sosial (Lofland & Lofland,1984: 44), mengarah pada situasi dan kondisi setting Penelitian, kejadian yang dialami oleh subyek Penelitian individu atau, kelompok atas dasar latar

belakang (biografi, histori dan hubungan) personal atau kelompok yang tedalin. Menurut Lofland & Lofland, proses ini mencakup tiga tahap kegiatan, yaitu:

#### **1. Persiapan memasuki kancan Penelitian (getting in)**

Agar proses pengumpulan data dan informasi berjalan sesuai rencana, peneliti terlebih dahulu telah menyiapkan segala sesuatu diperlukan, baik kelengkapan bersifat administratif maupun semua masalah dan persoalan berhubungan dengan setting dan subyek penelitian untuk mencari relasi awal. Ketika berusaha memasuki lokasi penelitian. Peneliti harus menempuh pendekatan informal dan formal, serta juga harus mampu menjamin hubungan yang akrab dengan informan.

Untuk itu, agar diperoleh suatu data yang valid, peneliti melakukan adaptasi dan proses belajar dari sumber data tersebut dengan berlandaskan yang etis dan simpatik sehingga bisa mengurangi jarak antara peneliti dengan para informan. Peneliti berperilaku dengan sopan, baik dalam kata bahasa dan bertindak. Pada tahap ini yang diutamakan adalah bagaimana peneliti dapat diterima dengan baik pada waktu memasuki *setting area*. Hal ini, peneliti memerlukan persiapan dan pembekalan. Pembekalan dilakukan melalui FGD, Pakar dan teman sejawat, dilaksanakan tanggal 12 April 2018.

#### **4. Ketika berada di lokasi Penelitian (getting along)**

Disaat peneliti memasuki situasi lokasi Penelitian, maka hubungan yang terjalin harus tetap dipertahankan. Kedudukan subyek harus dihormati dan diberikan kebebasan untuk mengemukakan semua persoalan, data serta informasi yang diketahui, peneliti tidak boleh mengarahkan dan melakukan intervensi terhadap *worldview* subyek Penelitian. Imajinasi dan daya nalar peneliti harus diasah dan dikembangkan untuk menangkap apa yang disampaikan, tindakan apa yang dilakukan, apa yang dirasakan serta kerangka mental dari dalam yang dimiliki subyek (*emic*). Berdasarkan *emic* yang diperoleh, peneliti mencoba memahami, menafsirkan dan mencoba untuk

membuat pemaknaan baru atas *worldview peneliti etic*.

## 5. Pengumpulan data (logging to data)

Untuk mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan, maka peneliti dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yang terdiri dari: (a) Observasi; (b) wawancara secara mendalam dan (c) dokumentasi, sehingga *thick description* didapatkan. Adapun perangkat instrumen yang diaiakkan antara lain:

### a. Instrumen Observasi

#### Lembar IPD I : Observasi

Judul Penelitian: Kesiapan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi di PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat Dan Banten.

---

#### Ketentuan Observasi:

1. Pengamat/observer: Peneliti
2. Objek yang diamati:  
Kondisi lokasi PTKIS, dan aktivitas kesiapan dalam mendukung implementasi kebijakan SKPI.
3. Lokasi & Sumber : 24 PAI PTKIS

#### Substansi Materi Observasi:

1. Kondisi geografis lokasi penelitian:
  - a. Letak wilayah PTKIS di Wilayah II pada umumnya
  - b. Letak wilayah geografis PTKIS sampel di Jawa Barat dan Banten;
  - c. Letak Geografis PTKIS sampel dalam konteks lingkungan setempat.
2. Alat bantu: 1). perekam; (2) catatan; (3) photo.
3. Identitas Program Studi PAI PTKIS sampel:
  - a. Status dan tahun pendirian Program Studi PAI
  - b. Jumlah Mahasiswa
  - c. Jumlah Lulusan
  - d. Junlah Dosen/Tenaga Pendidik

- e. Jumlah Tenaga Kependidikan
  - f. Luas Tanah
  - g. Ruang Kelas
4. Kondisi Fasilitas dan sarana PTKIS sampel:
- a. Kondisi bangunan lokasi PTKIS sampel;
  - b. Kondisi sarana fisik terkait teknologi informasi: Komputer, fasilitas internet, telpon, printer, dll.
  - c. Fasilitas alat komunikasi dengan sumber informasi: Website, internet; e-mail; whats-app, telpon, dll
  - d. Fasilitas kerja tim kerja administrasi: Ruang kerja; fasilitas computer, internet, printer, dll
5. Aktivitas Manajemen mendukung implementasi kebijakan SKPI, di PTKIS sampel:
- a. Pengarahan dari pimpinan (jika ada)
  - b. proses pelatihan (jika ada)
  - c. Kegiatan Rapat/workshop (jika ada)
6. Bukti fisik yang ada di PTKIS sampel:
- a. Produk draft/bundel berkas aktivitas kesiapan implementasi kebijakan SKPI;
  - b. Proses: spanduk kegiatan/artefak yang menandakan adanya proses manajemen pengembangan implementasi kebijakan SKPI.

Ketua Tim Peneliti,

**H. A. Rusdiana**

## **b. Instrumen Wawancara**

### **Lembar IPD II: Pedoman Wawancara**

Judul Penelitian: Kesiapan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam  
Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan  
SKPI: Studi di PTKIS Kopertais Wilayah Ii Jawa  
Barat Dan Banten.

---

#### **Ketentuan Wawancara:**

1. Pelaku wawancara: Peneliti
2. Sumber utama : Pimpinan PTKIS yang ditetapkan sebagai sampel
3. Sumber pelengkap : Pelaksana / Tim Teknis PTKIS sampel
4. Bentuk/ jenis : (1) Terstruktur semi tertutup (tersedia draft pertanyaan, dan sebagian pertanyaan sudah tersedia jawaban pilihan); (2) Terbuka: terkait ide, proses, dan masalah masalah yang muncul dalam proses
5. Alat bantu : (1). perekam; (2) catatan; (3) photo

#### **Substansi Materi Wawancara:**

##### **1. Pemahaman PTKIS terhadap Penerapan SKPI**

- Respon terhadap Kebijakan SKPI
- Menafsirkan kebijakan SKPI menjadi program
- Pengarahan program yang tepat agar dapat diterima dan ksanakan;

##### **2. Panafsiran PTKIS terhadap Penerapan SKPI**

- Desain dan struktur organisasi ;
- Pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan;
- Integrasi dan koordinasi;
- Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia;
- Hak, wewenang dan kewajiban;
- Pendelegasian (Sentralisasi dan Desentralisasi);
- Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas sumber daya manusia;
- Budaya organisasi

3. **Pengorganisasian penerapan kebijakan SKPI, di PTKIS;**
  - Perlengkapan rutin bagi pelayanan,
  - Pembiayaan atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan
  - Pedoman/Panduan/juklak/juknis atau kelengkapan program lainnya
4. **Strategi Penerapan Kebijakan SKPI di PTKIS;**
  - menyusun struktur dengan strategi;
  - melembagakan strategi;
  - mengoperasikan strategi;
  - menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi.
5. **Kendala, dan Solusi dalam mengimplemetasi Kebijakan SKPI di PTKIS;**

**Kendala:**

  - Komunikasi/Informasi
  - Isi Kebijakan
  - Dukungan
  - Pembagian Potensi

**Solusi:**

  - Komunikasi (communications),
  - Sumber daya (resources),
  - Sikap (dispositions atau attitudes)
  - Struktur birokrasi (bureucratic structure).

Ketua Tim Peneliti,

**H. A. Rusdiana**

### **Instrumen Catatan lapangan, penulisan wawancara**

Pencatatan data dan penulisannya dilakukan dengan cara memanfaatkan bentuk-bentuk instrumen Penelitian, diantaranya: Instrumen Catatan lapangan, penulisan wawancara

Model instrumen untuk wawancara, di siapkan format instrumen, sebagai berikut:

### **MODEL CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA**

Waktu : .....  
 Tempat : Kantor .....  
 Yang diwawancara: .....  
 Topik Wawancara :

Kesiapan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi di PTKIS Kopertais Wilayah Ii Jawa Barat Dan Banten.

**TRANSKRIP WAWANCARA**

Saya ....., datang ke ....., Hari .....tanggal.....pukul ..... diterima oleh salah ..... staf, sambil menunggu waktu pimpinannya sedang melayani tamu lain, sekitar pukul ....., saya menuju ruang Rapat /kantor..... kemudian saya adakan wawancara.

Saya menginformasikan maksud dan tujuan kedatangan Saya. Saya diterima dengan ramah oleh ..... dan ....., kami berdua berjabat tangan dan bertegur sapa. Saya disuruh duduk di sofa ruang kerja beliau. Untuk mempersingkat waktu, beberapa saat wawancara dimulai:

<b>PWWCR?</b> .....	:	Saya ingin mendapatkannya secara lebih komprehensif. (petanyaan sesuai dengan tujuan..... nasarsi pertanyaan (lihat Kode I sd IV di atas)
<b>Informan</b>	:	..... ..... ..... ..... .....

**PWWCR?** : Saya ingin mendapatkannya secara lebih komprehensif. (petanyaan sesuai dengan tujuan..... nasarsi pertanyaan (lihat Kode I sd IV di atas)

**Informan** : .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 Dst.....

**Gambar/Form. 6.1.**  
**Model Catatan Lapangan Hasil Wawancara**  
**Dokumen Peneliti (Kesiapan.....)**



#### **d. Instrumen Pemetaan Data**

##### **Lembar IPD III: Pedoman Pengambilan Dokumen Data**

Judul Penelitian: Kesiapan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam  
Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan  
SKPI: Studi di PTKIS Kopertais Wilayah Ii Jawa  
Barat Dan Banten.

---

Nama Instansi : .....

Alamat : .....

##### **Tujuan Pengumpulan Data/Dokumen:**

Pengumpulan data ini bertujuan bertujuan untuk mengumpulkan data dalam rangka Penelitian terapan dan pengembangan Perguruan Tinggi yang berjudul: Kesiapan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi di PTKIS Kopertais Wilayah Ii Jawa Barat Dan Banten.

Secara khusus Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji masalah-masalah yang mencakup:

1. Pemahaman Pimpinan PTKIS terhadap Penerapan SKPI
2. Panafsiran Pimpinan PTKIS terhadap Penerapan SKPI
3. Pengorganisasian Sistem dalam Implementasi kebijakan SKPI, di PTKIS
4. Strategi Penerapan Kebijakan SKPI di PTKIS
5. Kendala, dan Solusi dalam mengimplemetasi Kebijakan SKPI di PTKIS
  - a. Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan SKPI di PTKIS;
  - b. Sumberdaya dalam Implementasi Kebijakan SKPI di PTKIS;
  - c. Disposisi dalam Implementasi Kebijakan SKPI di PTKIS;
  - d. Struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan SKPI di PTKIS;

##### **Petunjuk pelaksanaan pengumpulan Data/Dokumen:**

Seluruh materi pengumpulan data ini disampaikan dalam rangka penulisan disertasi. Penulis menjamin kerahasiaan jawaban. Bapak/Ibu dimohon untuk mengisi setiap pertanyaan secara objektif. Penulis akan sangat gembira apabila Bapa/Ibu berkenan untuk melampirkan data penunjang.

### Form. Model Isian Data

Model instrumen untuk pemetaan data, di siapkan format instrumen, sebagai berikut:

No	Kelembagaan Prodi/Akreditasi	Tenaga		Sapras			Mhs	Alm
		Pendidik	Kepen	Knt	RK	Lab		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	<b>Jumlah</b>							

#### b. Instumen beberapa dokumen penting

##### 1) Aspek Landasan, Tujuan Implementasi Kebijakan SKPI Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Ptkis

##### (a) Landasan Yuridis yang memayungi Implementasi Kebijakan SKPI

(1)Jelaskan landasan yuridis yang memayuni SKPI bagi PTKIS yang harus dilaksanakan oleh PTKIS (*lampirkan bukti dokumen*)

(2)Sebutkan harapan-harapan atau keluhan yang dirasakan oleh Kopertais selama ini dari isi kebijakan SKPI

##### (b) Tujuan Kebijakan SKPI

(1)Jelaskan tujuan implementasi kebijakan SKPI bagi PTKIS yang harus dilaksanakan oleh PTKIS (*lampirkan bukti dokumen*)

(2)Sebutkan anfaat yang dirasakan oleh PTKIS selama ini dari isi kebijakan SKPI

**(c) Dasar-dasar pertimbangan Implentasi Kebijakan SKPI**

(1)Jelaskan dasar-dasar pertimbangan perencanaan kebijakan SKPI bagi PTKIS yang harus dilaksanakan oleh PTKIS (*lampirkan bukti dokumen*)

(2)Sebutkan harapan-harapan atau keluhan yang dirasakan oleh PTKIS selama ini dari isi kebijakan SKPI

**(d) Sasaran Perencanaan Kebijakan**

(1)Jelaskan sasaran perencanaan kebijakan SKPI bagi PTKIS yang harus dilaksanakan oleh Kopertais (*lampirkan bukti dokumen*)

(2)Sebutkan harapan-harapan atau keluhan yang dirasakan

oleh PTKIS selama ini dari isi kebijakan SKPI

**2) Aspek faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Impletasi Kebijakan Tersebut.**

**(a) Komunikasi dan Informasi Kebijakan SKPI**

Jelaskan bentuk komunikasi dan informasi dalam implentasi kebijakan SKPI-PTKIS (*lampirkan bukti dokumen*)

**(b) Disposisi/kesiapan implementator dalam Implentasi Kebijakan SKPI**

Jelaskan bentuk disposisi/kesiapan, mencakup; kejujuran, keterbukaan, konsistensi terhadap norma dalam implentasi kebijakan SKPI-PTKIS (*lampirkan bukti dokumen*)

**(c) Stuktur Birokrasi dalam Implentasi Kebijakan SKPI**

Jelaskan Struktur birokrasi, mencakup; fragmentasi/penyebaran tugas dan tanggung jawab., dan *Standars Oprsional Prosedur (SOP)* (*lampirkan bukti dokumen*)

**3) Aspek Dampak Impletasi Kebijakan SKPI PTKIS**

Tuliskan dan Jelaskan dampak Kinerja SKPI mencakup; dampak kuantitas dan dampak kualitas (*lampirkan bukti dokumen*)

**4) Aspek Masalah yang dihadapi dalam Mengimplementasikan Kebijakan SKPI Dalam Mewujudkan Akuntabilitas PTKIS**

(a) Jelaskan tentang kesesuaian antara program dengan kebutuhan kelompok (*lampirkan bukti dokumen*)

(b) Jelaskan tentang kesesuaian antara tugas program dengan kemampuan organisasi pelaksana (*lampirkan bukti dokumen*)

(c) Jelaskan tentang kesesuaian antara program dengan apa yang dapat dilakukan kelompok sasaran (*lampirkan bukti dokumen*)

(d) Sebutkan harapan atau keluhan tentang kesiapan aparat

pelaksana SKPI pada PTKIS (*lampirkan bukti dokumen*)

**5) Aspek Langkah Strategis yang harus dilakukan oleh PTKIS dalam menanggulangi masalah implementasi SKPI dalam Mewujudkan Akuntabilitas PTKIS**

(a) Tulis dan jelaskan Rencana Strategi penanggulangan masalah (*lampirkan bukti dokumen*)

(b) Tuliskan Visi, Misi, Tujuan dan Program pengembangan SKPI PTKIS (*lampirkan bukti dokumen*)

**Gambar/Form. 6.2.**

**Model Instrumen untuk pemetaan data  
Dokumen Peneliti (Kesiapan.....)**

**C. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian**

Pelaksanaan pengumpulan data Penelitian Kesiapan PTKIS Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, dilaksanakan di 24 PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten. Kegiatan ini dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu:

**1. Kegiatan Observasi**

Kegiatan oservasi Penelitian ini, dilaksanakan di 24 PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten. Waktu peleksanaan tanggal 21 April sd 9 Mei 2018, rician kegiatan pada tabel 6.1, berikut:

**Tabel 6.1**

### Pelaksanaan Kegiatan Observasi

N o	Nama PTKIS	Waktu (Tgl)	Alamat	Pelaksana
1	2	3	4	5
1.	Universitas Mathlauul	21/4/018	Sindang Hayu Saketi Kab. Pandeglang	Nasihudin
2.	IAIB Serang		Jl. Ki Fathoni no 12/51 Serang	sda
3.	STAI Fatahilah		Jln. Raya Puspitek Serpong Tangerang	A.Rusdiana
4.	STAI Al-Karimiyah		Jl. H. Maksum No. 52 Sawangan Depok	sda
5.	STAI Latansa Masiro	24/4/018	Jl. Soekarno-Hatta Rangkasbitung	Nasihudin
6.	IAIN Laroiba		Jl. Raya Leuwiliang No. I Bogor	sda
7.	FAI Univ Juanda		Jl. Tol Ciawi No. 1, Bogor	A.Rusdiana
8.	STAI Karisma		Jl. Raya Siliwangi No. 39 Curug, Sukabumi	sda
9.	STAI Sukabumi	26/4/018	Jl. Veteran I No. 36 Sukabumi	Nasihudin
10.	STAI Nurul Hikmah		Jln. Ps. Hayam No. 32 Cilaku -Cianjur	sda
11.	STAI Agus Salim		Jl. Jend. Urip Sumoharjo Cikarang Bekasi	A.Rusdiana
12.	STAI As Sidiqiyah		Ponpes As hiddiqiyah Cilamaya Krawang	sda
13.	STAI KHE. Z Muttaqin	28/4/018	Jl. Maracang Srikandi No. 35, Purwakarta,	Nasihudin
14.	STAI Riyaduljannah		Jl. Raya Jalancagak Subang	sda
15.	STAIS Dharma		Jl.KH. Hasyim Asy'ari Segeran Indramayu	A.Rusdiana
16.	STAI Cirebon		Jl. Tuparev No. 111 Cirebon	sda
17.	FKIS UNSIA	02/5/018	Mayasih Cigugur Kuningan	Nasihudin
18.	STAI Putra Galuh		Jl. Raya Banjar No. 141 Cijantung Cijeungjing	sda
19.	STAI Miftahul Huda Al Azhar		Jl. Pesantren No.2 Citangkolo Banjar	A.Rusdiana
20.	STAINU Tasikmaya		Jl. DR. Sukardjo No. 47 Tasikmalaya	sda
1	2	3	4	5

21.	IAIC Cipasung	05/05/018	Jl. Mukhtamar NU No. 1 Cipasung Tasikmalaya	Nasihudin
22.	STAI Siliwangi Garut		Jl. Raya Tutungan No. 117 Leles Garut	sda
23.	STAI Al-Falah	08/05/018	Pondok Pesantren Al-Falah Cicalengka	A.Rusdiana
24.	STAI Siliwangi Cimahi	09/05/018	Jl. Trs. Jend. Sudirman Kb Rumput Cimahi	sda

Keterangan Lengkap pada *Log Book*

## 2. Kegiatan Dokumentasi/Data

Kegiatan Dokumentasi Penelitian ini, dilaksanakan di 24 PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten, dilaksanakan dengan dua tahap yaitu penyebaran instrumen dan pengembilan hasil. Adapun waktu penyebaran daftar isian (tahap I) dilaksanakan tanggal 15 Mei sd 5 Juni 2018, rician kegiatan pada tabel 6.2, berikut:

**Tabel 6.2**  
**Pelaksanaan Kegan Penyebaran IP Dokumen**

No	Nama PTKIS	Waktu (Tgl)	Alamat	Pelaksana
1	2	3	4	5
1.	Universitas Mathlauul	15/05/018	Sindang Hayu Saketi Kab. Pandeglang	Nasihudin
2.	IAIB Serang		Jl. Ki Fathoni no 12/51 Serang	sda
3.	STAI Fatahilah		Jln. Raya Puspitek Serpong Tangerang	A.Rusdiana
4.	STAI Al-Karimiyah		Jl. H. Maksum No. 52 Sawangan Depok	sda
5.	STAI Latansa Masiro	19/05/018	Jl. Soekarno-Hatta Rangkasbitung	Nasihudin
6.	IAIN Laroiba		Jl, Raya Leuwiliang No. I Bogor	sda
7.	FAI Univ Juanda		Jl. Tol Ciawi No. 1, Bogor	A.Rusdiana
8.	STAI Karisma		Jl. Raya Siliwangi No. 39 Curug, Sukabumi	sda
1	2	3	4	5



9.	STAI Sukabumi	22/05/018	Jl. Veteran I No. 36 Sukabumi	Nasihudin
10.	STAI Nurul Hikmah		Jln. Ps. Hayam No. 32 Cilaku -Cianjur	sda
11.	STAI Agus Salim		Jl. Jend. Urip Sumoharjo Cikarang Bekasi	A.Rusdiana
12.	STAI As Sidiqiyah		Ponpes As hiddiqiyah Cilamaya Krawang	sda
13.	STAI KHE. Z Muttaqin	26/05/018	Jl. Maracang Srikandi No. 35, Purwakarta,	Nasihudin
14.	STAI Riyaduljannah		Jl. Raya Jalancagak Subang	sda
15.	STAIS Dharma		Jl.KH. Hasyim Asy'ari Segeran Indramayu	A.Rusdiana
16.	STAI Cirebon		Jl. Tuparev No. 111 Cirebon	sda
17.	FKIS UNSIA	30/5/018	Mayasih Cigugur Kuningan	Nasihudin
18.	STAI Putra Galuh		Jl. Raya Banjar No. 141 Cijantung Cijeungjing	sda
19.	STAI Miftahul Huda Al Azhar		Jl. Pesantren No.2 Citangkolo Banjar	A.Rusdiana
20.	STAINU Tasikmaya		Jl. DR. Sukardjo No. 47 Tasikmalaya	sda
21.	IAIC Cipasung	02/06/018	Jl. Mukhtamar NU No. 1 Cipasung Tasikmalaya	Nasihudin
22.	STAI Siliwangi Garut		Jl. Raya Tutungan No. 117 Leles Garut	sda
23.	STAI Al-Falah	02/06/018	Pondok Pesantren Al-Falah Cicalengka	A.Rusdiana
24.	STAI Siliwangi Cimahi	05/06/018	Jl. Trs. Jend. Sudirman Kb Rumpit Cimahi	sda

Keterangan Lengkap pada *Log Book*

### 3. Kegiatan Wawancara dan Pengambilan Data Isian

Kegiatan wawancara dan pengambilan data (dokumentasi Penelitian tahap I), dilaksanakan di 24 PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten, dilasanakan secara bersamaan dengan kegiatan wawancara. Adapun waktu kegiatan tersebut dilaksanan tanggal 25 Juni sd 10 Juli 2018, rician kegiatan pada tabel 6.3, berikut:

**Tabel 6.3**

### Pelaksanaan Kegiatan Wawancara dan pengambilan Data

N o	Nama PTKIS	Waktu (Tgl)	Alamat	Pelaksana
1	2	3	4	5
1.	Universitas Mathlauul	25/06/018	Sindang Hayu Saketi Kab. Pandeglang	Nasihudin
2.	IAIB Serang	26/06/018	Jl. Ki Fathoni no 12/51 Serang	sda
3.	STAI Fatahilah	25/06/018	Jln. Raya Puspitek Serpong Tangerang	A.Rusdiana
4.	STAI Al-Karimiyah	26/06/018	Jl. H. Maksum No. 52 Sawangan Depok	sda
5.	STAI Latansa Masiro	27/06/018	Jl. Soekarno-Hatta Rangkasbitung	Nasihudin
6.	IAIN Laroiba	28/06/018	Jl, Raya Leuwiliang No. I Bogor	sda
7.	FAI Univ Juanda	27/06/018	Jl. Tol Ciawi No. 1, Bogor	A.Rusdiana
8.	STAI Karisma	28/06/018	Jl. Raya Siliwangi No. 39 Curug, Sukabumi	sda
9.	STAI Sukabumi	29/06/018	Jl. Veteran I No. 36 Sukabumi	Nasihudin
10.	STAI Nurul Hikmah	30/06/018	Jln. Ps. Hayam No. 32 Cilaku -Cianjur	sda
11.	STAI Agus Salim	29/06/018	Jl. Jend. Urip Sumoharjo Cikarang Bekasi	A.Rusdiana
12.	STAI As Sidiqiyah	30/06/018	Ponpes As hiddiqiyah Cilamaya Krawang	sda
13.	STAI KHE. Z Muttaqin	02/07/018	Jl. Maracang Srikandi No. 35, Purwakarta,	Nasihudin
14.	STAI Riyaduljannah	03/07/018	Jl. Raya Jalancagak Subang	sda
15.	STAIS Dharma	02/07/018	Jl.KH. Hasyim Asy'ari Segeran Indramayu	A.Rusdiana
16.	STAI Cirebon	03/07/018	Jl. Tuparev No. 111 Cirebon	sda
17.	FKIS UNSIA	06/07/018	Mayasih Cigugur Kuningan	Nasihudin
18.	STAI Putra Galuh	07/07/018	Jl. Raya Banjar No. 141 Cijantung Cijeungjing	sda
19.	STAI Miftahul Huda Al Azhar	06/07/018	Jl. Pesantren No.2 Citangkolo Banjar	A.Rusdiana
20.	STAINU Tasikmaya	07/07/018	Jl. DR. Sukardjo No. 47 Tasikmalaya	sda
1	2	3	4	5

21.	IAIC Cipasung	09/07/018	Jl. Mukhtamar NU Cipasung Tsikmalaya	Nasihudin
22.	STAI Siliwangi Garut	10/07/018	Jl. Raya Tutungan No. 117 Leles Garut	sda
23.	STAI Al-Falah	09/07/018	Pondok Pesantren Al- Falah Cicalengka	A.Rusdiana
24.	STAI Siliwangi Cimahi	10/07/018	Jl. Trs. Jend. Sudirman Kb Rumput Cimahi	sda

Keterangan Lengkap pada *Log Book*

#### 4. Kegiatan Pengolahan Data Penelitian

Kegiatan ini, dilakukan setelah data terkumpul semuanya (data hasil observasi, wawancara, dan dokumen isian), dari 24 PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten. Kegiatan pengolahan data dilaksanakan di Kampus UIN Bandung, oleh Tim dengan melibatkan petugas khusus. Adapun waktu kegiatan tersebut dilaksanan selama tighari tanggal 13 Juli sd 15 Juli 2018, rician kegiatan pada tabel 6.4, berikut:

**Tabel 6.4**  
**Pelaksanaan Pengolahan Data**

No	Pengolahan Data dari TKIS Lokasi Penelitian	Waktu (Tgl)	Pelaksana
1	2	3	4
1.	Universitas Mathlauul Anwar	13/07/018	A.Rusdiana
2.	IAIB Serang		Nasihudin
3.	STAI Fatahilah		Muhardi
4.	STAI Al-Karimiyah		
5.	STAI Latansa Masiro		
6.	IAIN Laroiba		
7.	FAI Univ Juanda		
8.	STAI Karisma		
9.	STAI Sukabumi	14/07/018	A.Rusdiana
10.	STAI Nurul Hikmah		Nasihudin
11.	STAI Agus Salim		Muhardi
12.	STAI As Sidiqiyah		
13.	STAI KHE. Z Muttaqin		
14.	STAI Riyaduljannah		
15.	STAIS Dharma		
16.	STAI Cirebon		
1	2	3	4

17.	FKIS UNSIA	15/07/018	A.Rusdiana
18.	STAI Putra Galuh		Nasihudin
19.	STAIMA Banjar		Muhardi
20.	STAINU Tasikmaya		
21.	IAIC Cipasung		
22.	STAI Siliwangi Garut		
23.	STAI Al-Falah		
24.	STAI Siliwangi Cimahi		

Keterangan Lengkap pada *Log Book*

## 5. Kegiatan Validasi Data

### a. Validasi Data dengan Informan

Kegiatan ini, dilakukan setelah data terolah semuanya (data hasil observasi, wawancara, dan dokumen isian), dari 24 PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten. Kegiatan validasi data (member check) dilaksanakan di 24 PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten, oleh Tim dengan melibatkan informan asal. Adapun waktu kegiatan tersebut dilaksanakan mulai tanggal 14 Juli sd 3 Agustus 2018, rician kegiatan pada tabel 6.5, berikut:

**Tabel 6.5**  
**Pelaksanaan Validasi data (member check)**

No	Nama PTKIS	Waktu (Tgl)	Alamat	Pelaksana
1	2	3	4	5
1.	Universitas Mathlauul	13/07/018	Sindang Hayu Saketi Kab. Pandeglang	Nasihudin
2.	IAIB Serang	14/07/018	Jl. Ki Fathoni no 12/51 Serang	sda
3.	STAI Fatahilah	13/07/018	Jln. Raya Puspitek Serpong Tangerang	A.Rusdiana
4.	STAI Al-Karimiyah	14/07/018	Jl. H. Maksum No. 52 Sawangan Depok	sda
5.	STAI Latansa Masiro	16/07/018	Jl. Soekarno-Hatta Rangkasbitung	Nasihudin
6.	IAIN Laroiba	17/07/018	Jl, Raya Leuwiliang No. I Bogor	sda
7.	FAI Univ Juanda	16/07/018	Jl. Tol Ciawi No. 1, Bogor	A.Rusdiana
8.	STAI Karisma	17/07/018	Jl. Raya Siliwangi No. 39 Curug, Sukabumi	sda
1	2	3	4	5

9.	STAI Sukabumi	20/07/018	Jl. Veteran I No. 36 Sukabumi	Nasihudin
10.	STAI Nurul Hikmah	21/07/018	Jln. Ps. Hayam No. 32 Cilaku -Cianjur	sda
11.	STAI Agus Salim	20/07/018	Jl. Jend. Urip Sumoharjo Cikarang Bekasi	A.Rusdiana
12.	STAI As Sidiqiyah	21/07/018	Ponpes As hiddiqiyah Cilamaya Krawang	sda
13.	STAI KHE. Z Muttaqin	23/07/018	Jl. Maracang Srikandi No. 35, Purwakarta,	Nasihudin
14.	STAI Riyaduljannah	24/07/018	Jl. Raya Jalancagak Subang	sda
15.	STAIS Dharma	23/07/018	Jl.KH. Hasyim Asy'ari Segeran Indramayu	A.Rusdiana
16.	STAI Cirebon	24/07/018	Jl. Tuparev No. 111 Cirebon	sda
17.	FKIS UNSIA	27/07/018	Mayasih Cigugur Kuningan	Nasihudin
18.	STAI Putra Galuh	28/07/018	Jl. Raya Banjar No. 141 Cijantung Cijeungjing	sda
19.	STAI Miftahul Huda Al Azhar	27/07/018	Jl. Pesantren No.2 Citangkolo Banjar	A.Rusdiana
20.	STAINU Tasikmaya	28/07/018	Jl. DR. Sukardjo No. 47 Tasikmalaya	sda
21.	IAIC Cipasung	30/07/018	Jl. Mukhtamar NU Cipasung Tsikmalaya	Nasihudin
22.	STAI Siliwangi Garut	31/07/018	Jl. Raya Tutungan No. 117 Leles Garut	sda
23.	STAI Al-Falah	30/07/018	Pondok Pesantren Al-Falah Cicalengka	A.Rusdiana
24.	STAI Siliwangi Cimahi	31/07/018	Jl. Trs. Jend. Sudirman Kb Rumpit Cimahi	sda

Keterangan Lengkap pada *Log Book*

#### **b. Validasi Data dengan Teman Sejawat dan Ahli**

Kegiatan ini, dilakukan setelah data validasi (member check) dengan informan asal dari 24 PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten, melalui *edititing*. Kegiatan validasi data (member check) dengan teman sejawat dan ahli, dilaksanakan melalui *focus group discussion* (FGD), dengan tujuan untuk memastikan bahwa lapora peneleitian ini telah memenuhi tuntutan/kepentingan ilmiah dan memenuhi tuntutan/ketentuan administratif surat perjanjian kerja Penelitian No.B 113/Un.05/V.2/ PP.00.9/03/2018, tanggal 21 Maret 2018.

Kegiatan FGD ini dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus

2018, dengan melibatkan ahli lulsan PLPA 2 Orang, pakar adminitrasi/manajemen pendidi kan 1 orang, unsur SPI 1 orang serta dihadiri teman sejawat 9 orang. Kegiatan FGD, ini menghasilkan rekomendasi kesefahaman pakar dan teman sejawat, yang memastikan bahwa Laporan Penelitian: Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi kebijakan SKPI: Studi di PTKIS Wilayah II Jawa Barat dan Banten” dianggap valid, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun secara administratif. Kesefahaman itu dituangkan dalam bentuk berita acara rapat (BA terlampir).

#### **D. Pelaporan Penelitian**

Pelaporan penelitian merupakan bentuk pertanggung jawaban dari peneliti atau pelaksana kegiatan kepada atasan, sponsor, atau pembaca bahwa Penelitian atau kegiatan sudah dilaksanakan. Sementara itu, laporan penelitian dan laporan kegiatan mengemban fungsi penting. Kedua jenis laporan ini mempunyai fungsi informatif, fungsi pertanggungjawaban, fungsi pengawasan, dan fungsi pengambilan keputusan. (1) fungsi informatif, laporan dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pembaca atau siapa pun yang berkepentingan dengan laporan; (2) fungsi pertanggungjawaban; laporan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari peneliti atau pelaksana kegiatan kepada atasan, sponsor, atau pembaca bahwa Penelitian atau kegiatan sudah dilaksanakan; (3) fungsi pengawasan; laporan dapat menjadi sarana untuk melakukan pengawasan kepada peneliti atau pelaksana kegiatan tanpa harus melakukan pengecekan langsung ke lapangan, dan (4) fungsi pengambilan keputusan; laporan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan mengenai sesuatu agar keputusan itu tidak salah sasaran.

Berdasar pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7177 Tahun 2017. Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Program Penelitian Tahun Anggaran 2018, tanggal 28 Desember 2017. bahwa Laporan Penelitian mutlak diwujudkan dan diukur dalam bentuk laporan akademik, yaitu laporan hasil pelaksanaan Penelitian . terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- a. Laporan pelaksanaan Penelitian dengan cara mengisi buku harian (log book). Buku harian ini berisi tentang catatan-catatang kegiatan Penelitian .
- b. Laporan Hasil Penelitian; dalam bentuk buku. Laporan inti sebagaimana dimaksud pada huruf a di-lay out dalam bentuk buku siap dipublikasikan dengan ukuran B5 (18x 25cm), dengan ukuran spasi 1,15 s.d 1,5 pt. (old).
- c. Laporan *Output/Draft* Artikel; Laporan yang sudah diformat dalam bentuk tulisan/artikel yang siap dikirimkan ke Jurnal. Laporan jenis ini mengikuti sistematika sesuai dengan ketentuan Jurnal Nasional dan internasional.
- d. Laporan *Out come*, yaitu laporan yang mengatur tentang *out come* program sesuai ketentuan besaran dana bantuan yang di berikan, di antaranya adalah:
  - 1) Hasil Penelitian di submit dalam jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal international; dan/atau
  - 2) Hasil Penelitian diformat dalam bentuk ukuran buku yang di rencanakan untuk publikasi oleh lembaga penerbit skala nasional/internasional bereputasi akan lebih baik jika sudah ber- ISBN.

Kebijakan UIN Sunan Gunung Djati melalui Instruksi Kerja Penelitian dan Publikasi Ilmiah Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung tahun 2018, bahwa jenis laporan akhir Penelitian ditentukan sebagai berikut: (1) *Logbook* Penelitian; (2) Artikel ilmiah; (3) Buku hasil Penelitian; (4) Hak Kekayaan Intelektual; dan (5) Laporan keuangan.

### **1. *Logbook* Penelitian**


*Log book* merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dalam laporan Penelitian yang akuntabel, transparan dan objektif dalam arti tepat guna, tepat sasaran, tepat hasil, dan tepat waktu. Posisinya sebagai laporan hasil pelaksanaan Penelitian .

Secara substansial *log book* Penelitian, berupa catatan harian Penelitian memiliki fungsi audit kinerja yang diserahkan secara formal oleh peneliti pada laporan antara dan laporan akhir dihadapan *reviewer*. bagi penilaian akuntabilitas, transparansi dan objektifitas. Oleh karena itu, tim peneliti memiliki kewajiban untuk menyusun *log book*.

Log book Penelitian; “Kesiapan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI”, disusun dan disajikan dalam dua bentuk yaitu bentuk manual dan bentuk ringkasan.

**a. Log Book Bentuk Manual**

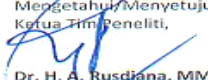
Log book bentuk manual, dimaksudkan dalam rangka memenuhi bukti otentik pencatatan secara detail setiap langkah aktivitas dalam proses Penelitian . Pencatatan dimulai sejak penerimaan surat perjanjian kerja tanggal 21 Maret 2018 (Gambar 3.1), sampai penyerahan laporan Penelitian tanggal 20 Agustus 2018, ditunjukkan pada (gambar 6.6) berikut:

  
**LOG BOOK**  
**KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI**  
 (Studi pada PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten)  
 SPK: No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018. Tgl.21 Maret 2018. Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

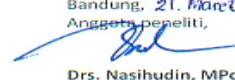
Lembar ..... dari .....

1.	Tanggal/Bulan/Tahun	Pabu, 21 Maret 2018.
2.	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Persiapan dan Perencanaan Kegiatan.
3.	Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	- Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja. - Penyusunan rancangan jadwal operasional Kegiatan.
4.	Catatan kemajuan: (Hasil yang diperoleh)	- Dimilikinya dasar legalitas formal untuk operasional kegiatan penelitian. - Dimilikinya jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian berdasarkan Rd Surat Perjanjian Kerja No. B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018 tgl. 21 Maret 2018 (jadwal terlampir) dengan alokasi waktu yg di gunakan untuk penelitian hari Selasa, Rabu, Kamis dan Sabtu. (Senin dan Jumat Mengajar penuh).
5.	Kendala	- Tidak ada.
6.	Kesimpulan dan saran	- Dengan dimilikinya dasar legalitas formal untuk operasional kegiatan penelitian, maka pelaksanaan penelitian, hukumnya menjadi jelas, memiliki pinakan yg kuat. - Dengan dimilikinya rancangan jadwal operasional kegiatan penelitian berdasarkan Rd Surat Perjanjian Kerja Nomor B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018 tgl. 21 Maret 2018, maka pelaksanaan akan lebih terarah. - Sebaiknya kontrak di lengkapi dengan Panduan/Revisi teknis kegiatan, menjadi satu paket. - Penyiapan / Pengadaan aam perlengkapan dan Review Re-STAIN Penelitian.
7.	Rencana kegiatan selanjutnya	

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

  
**Dr. H. A. Rusdiana, MM**  
 NIP: 1963022119860201001

Bandung, 21. Maret 2018  
 Anggota peneliti,

  
**Drs. Nasihudin, MPd.**  
 NIP:196209201991031001

**Catatan:**  
 - Bila kolom yg tersedia tidak cukup harap ditambahkan pada halaman berikutnya.  
 - Bila hasil berupa tabel/gambar ditempelkan, pada halaman belakang.

**Catatan Monev:**

**Gambar 6.3. Form. Materi Log Book Awal**

Gambar 6.4, (bagian belakang gambar 6.4) menunjukkan telah dimilikinya kontrak kerja Penelitian dan rancangan jadwal



kegiatan:

**Lampiran :**

**KONTRAK PELAKSANAAN KERJA  
PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI  
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2018  
Nomor: B-I 13/Un.05/V.2/PP.009/03//2018**

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas Islam Negeri yang Unggul dan Kompetitif Berbasis Wahyu Memandu Ilmu dalam Bingkai Akhlak Karimah di Tingkat ASEAN Tahun 2025” Universitas Islam Negeri, disingkat UIN, Sunan Gunung Djati Bandung melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, disingkat LP2M, menyelenggarakan kegiatan penelitian Tahun Anggaran 2018”.

Sehubungan dengan hal itu, pada hari ini Rabu tanggal 21 Maret 2018 (Dua Puluh Satu Bulan Maret Tahun Dua Ribu Delapan Belas) di Kota Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Munir, M.A.  
Jabatan : Ketua LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Alamat : Jalan A.H. Nasution Nomor 105, Cibiru, Bandung.  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang selanjutnya dalam kontrak ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : Dr. H. A. Rusdiana, MM.  
Jabatan : Ketua Peneliti  
Fungsional : Dosen  
Alamat : Jalan A.H. Nasution Nomor 105, Cibiru, Bandung.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Peneliti, yang selanjutnya dalam kontrak ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.  
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. PARA PIHAK telah sepakat terkait hal-hal yang ditentukan di bawah ini:

..Potongan Kontrak.....

tabel 1

**Jadwal Kegiatan Penelitian**

No	Kegiatan	Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				Ket.
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Perencanaan	?																								
2.	Penyusunan TOR Penelitian	?	?	?	?																					
3.	Review Ped/Instumen dg pakar					?																				
5.	Studi pendahuluan/observasi							?	?	?	?															
6.	Penyebaran, Instrumen									?																
7.	Penyusunan Bab I-II-III												?	?	?											
8.	Pengumpulan data									?	?	?	?	?	?											
9.	Pengolahan/analisis data												?	?	?	?										
10.	Laporan Kegiatan 60% Termin.I																									
11.	Validasi data ke lokasi																									
12.	Penyusunan Laporan																									
13.	Seminar Hasil Penelitian																									
14.	Editing/Proses HAKI/Publikasi JI																									
15.	Laporan 100% T.II (dg SPJB)																									

Dasar: Surat Perjanjian Kerja No.B-113/Un.05/V.2/PP.009/03/2018, tanggal 21 Maret 2018. Waktu pelaksanaan selama 6 bulan, mulai tanggal 21 Maret sampai 20 Agustus 2018,

**Monev:**

**Gambar 6.5**  
**Materi Lampiran Log Book Awal**

Gambar 6.6 di bawah, menunjukkan kegiatan Penelitian memasuki tahap wawancara tanggal 25 Juni 2018, berikut:



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018, Tgl 21 Maret 2018. Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar ..... dari .....

1.	Tanggal/Bulan/Tahun	Senin 25 Juni 2018.
2.	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Wawancara IPD II dan pengumpulan dokumen/data IPD II - UNMA Pandeglang/Nasihudin, ST dan SPPD, 7/6/2018 - STAI Fatahillah Tangerang /A. Rusdiana, ST dan SPPD 7/6/18.
3.	Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Tertaksananya: Wawancara IPD II, dan terkumpulnya data isian IPD II Dokumen /data Kesiapan implementasi SKPI dari UNMA; dan STAI Fatahillah, meliputi dokumen data: Penafsiran atau interpretasi kebijakan penerapan SKPI; Pengorganisasian penerapan kebijakan SKPI; Strategi penerapan kebijakan SKPI; Mendata dan solusi dalam implementasi kebijakan SKPI;
4.	Catatan kemajuan: (Hasil yang diperoleh)	Dimilikinya data; Hasil wawancara, dan isian IPD II Dokumen /Data Kesiapan implementasi SKPI dari UNMA dan STAI Fatahillah, untuk kepentingan penyusunan laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI; Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten.
5.	Kendala	- Linear
6.	Kesimpulan dan saran	Dengan dimilikinya data hasil wawancara, dan isian IPD II Dokumen /Data Kesiapan implementasi SKPI dari UNMA dan STAI A. Kharimiyah, di harapkan dapat menunjang kelancaran penyusunan laporan penelitian: "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI; Studi PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten" yang valid, kredibel dan akuntabel.
7.	Rencana kegiatan selanjutnya	Pelaksanaan; wawancara dan pengumpulan data isian IPD II, di LAIE.

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,  
  
Drs. H. A. Rusdiana, MM  
NIP: 1961042119860201001

Bandung, 25 Juni 2018  
Anggota peneliti,  
  
Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP: 196209201991031001

Catatan:  
- Bila kolom yg tersedia tidak cukup harap ditambahkan pada halaman berikutnya;  
- Bila hasil berupa tabel/gambar ditempelkan, pada halaman belakang.

Catatan Monev:

Gambar 6.6.

Materi Log Book Penelitian pada tahap Wawancara

Selanjutnya gambar 6.7 (lampiran gambar 6.6), menunjukkan hasil transkrip wawancara Pa Nasihudin wawancara tanggal 25 Juni 2018, dengan informan UNMA Pandeglang, dan Pa Rusdiana wawancara dengan informan STAI Fatahillah Serpong, berikut:

**Lampiran 1**

TRANSKRIP WAWANCARA

1. FAI UNMA Pandeglang (LP.01)

Saya Nasihudin, datang ke Kantor FAI-UNMA Pandeglang, Hari Senin, tanggal, 25 Juni 2018 pukul 08.00, diterima oleh salah satu staf, sambil menunggu waktu pimpinannya sedang melayani tamu lain, sekitar pukul 8.20, saya menuju ruang Dekan FAI-UNMA, kemudian saya adakan wawancara. Saya diterima dengan ramah oleh Dekan, WD I, WD. II, WD. III, dan Ketua Prodi PAI, kami berempap berjabatan tangan dan bertegur sapa. Saya disuruh duduk di sofa ruang kerja beliau. Untuk mempersingkat waktu, beberapa saat wawancara dimulai:

Pww	: Saya ingin mendapatkan informasi lebih komprehensif. Tentang sikap dan pemahaman Bapak terhadap PMA no.1 tahun 2016, "penerapan SKPI", yang sejatinya harus diterapkan sejak tanggal 12 Januari 2018.
-----	---

**Lampiran 1**

TRANSKRIP WAWANCARA

3. STAI FATAHILLAH Serpong (LP.04)


Saya Rusdiana, datang ke Kampus STAI Fatahilah, Hari Senin, tanggal, 25 Juni 2018 pukul 07.00, diterima oleh Kabag Umum, sekitar pukul 7.25, saya menuju ruang Ketua, dan diterima langsung oleh Ketua, sambil menunggu pimpinannya lainnya kami berdua tegur sapa menceritakan tentang hal yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian Waket I, II, III dan Kujur PAI, telah semua berkumpul, saya memulai pembicaraan. Saya menginformasikan maksud dan tujuan kedatangan Saya., Untuk mempersingkat waktu, beberapa saat wawancara dimulai:

Pww	: Saya ingin mendapatkan informasi lebih komprehensif. Tentang sikap dan pemahaman Bapak terhadap PMA no.1 tahun 2016, "penerapan SKPI", yang sejatinya harus diterapkan sejak tanggal 12 Januari 2018.
Informan 4.1	: Ketua STAI Fatahilah "...sebenarnya kami sangat memahami dan setuju bahwa semua kebijakan wajib dilaksanakan, seperti halnya kebijakan SKPI, bagi kami hal itu tidak bisa ditinggalkan dari pengembangan TP, menjadi tanggungjawab kami untuk segera dilaksanakan, namun dalam hal ini, kami sedang memperioritaskan kegiatan yang lebih yang jelas sanksinya seperti pengalaman kami harus menghentikan kelas jajah, Akreditasi prodi dan bisuitasi Perguruan Tinggi, apabila kami tidak melaksanakannya kena sanksi "ditutup atau merger. Hal ini bukan berarti kami bukan menonor duakan kebijakan SKPI, tidak penting".
Pww	: Selajutnya, Saya ingin mendapatkannya informasi mengenai pengorganisasian kebijakan, setelah menerima Kebijakan PMA no.1 tahun 2016, tentang penerapan SKPI", segera diberlakukan?
Informan 4.2	: Wakil ketua I STAI Fatahilah, sebagai berikut: "...sebenarnya, kami memahami bahwa pengembangan kapasitas sangat berguna bagi peningkatan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan, serta sikap dan perilaku. Kami menyadari pula bahwa terlaksana dan tidaknya suatu kebijakan sangat bergantung pada keseriusan, kepedulian dan kualitas SDM. Untuk mengatasi permasalahan hingga bisa sampai ke tujuan, diperoleh adanya suatu penesis antara idealita dan realita. Pelajaran yang diperoleh adalah disadurinya adanya kelemahan, kemudian penentuan langkah strategis sebagai pemecahan masalah sampai pada langkah pelaksanaan dan berujung pada hasil. Namun hal itu, kami belum memilikinya, itulah kemudian kewajiban kami untuk melaksanakan kebijakan SKPI, belum terwujud".
Pww	: Selajutnya, Saya ingin mendapatkannya informasi mengenai Strategi pengoperasian, setelah menerima Kebijakan PMA no.1 tahun 2016, SKPI", segera diberlakukan?
Informan 4.3	: Ketua prodi PAI, STAI Fatahilah, "...kami menyadari bahwa: "...strategi operasi dibuat dan dilakukan agar pengoperasian program kegiatan SKPI berjalan mulai dari penerima informasi sampai ke tahap pencapaian. Namun demikian, hal itu terhambat oleh keadaan yang memaksa, diantaranya: waktu, sarana, dan sumberdaya yang harus dipersiapkan, bagi kami hal itu belum tercapai.
Pww	: Selajutnya, Saya ingin mendapatkannya informasi mengenai faktor yang menghambat, sehingga Kebijakan PMA no.1 tahun 2016, SKPI", tidak segera diberlakukan?
Informan 4.4	: Waket III STAI Fatahilah: "...kami menyadari bahwa: Lembaga kami telah berdiri sejak tahun 2000 an, bahkan telah mengeluarkan alumni lebih dari seribu-an. Namun kondisi yang memaksa seperti halnya, pada tahun Akadenik 2017/2018, ini, kami membina dan mengembangkan mahasiswa tidak kurang dari 465 mahasiswa, dibina dan dikembangkan oleh 38 Dosen dan 38 tenaga administrasi, yang notebe mereka kebanyakan tenaga honorer, bisa dibayangkan berapa biaya yang harus ditanggung oleh lembaga" dari sisi lain semua biaya itu mengandalkan dari masukan SPP mahasiswa".

**Gambar 6.7**

**Materi Lampiran Log Book pada tahap Wawancara (dilengkapi dengan transkrip hasil wawancara)**

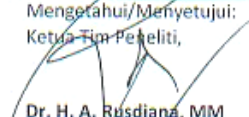
Gambar 6.8, menunjukkan tanda berakhirnya kegiatan Penelitian tanggal 20 Agustus 2018, berikut:

  
**LOG BOOK**  
**KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI**  
 (Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)  
 SPK: No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018, Tgl 21 Maret 2018, Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018


Lembar ..... dari .....

1.	Tanggal/Bulan/Tahun	Senin, 20 Agustus 2018.
2.	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Penyerahan Dokumen laporan dan spj penelitian.
3.	Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Sampai dan diterimanya laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI" Studi pada PTKIS Kopertais wilayah II Jawa Barat dan Banten. Dalam bentuk ; A-4-B-5 SPJ dan log Book, Draft jurnal dan bukti daftar HAKI oleh Admin LPPM.
4.	Catatan kemajuan: (Hasil yang diperoleh)	Dimilikinya bukti penerimaan dari Admin LPPM, yang memastikan ; laporan penelitian " laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI; Studi pada PTKIS Kopertais wilayah II Jawa Barat dan Banten. Dalam bentuk : A-4-B-5 SPJ dan log Book, Draft jurnal dan bukti daftar HAKI telah memenuhi ketentuan yang berlaku (Bukti Penerimaan Terlampir)
5.	Kendala	Landar.
6.	Kesimpulan dan saran	Dengan dimilikinya ; bukti penerimaan dari Admin LPPM yang memastikan ; laporan penelitian " Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI; Studi pada PTKIS Kopertais wilayah II Jawa Barat dan Banten. Dalam bentuk ; A-4-B-5 SPJ dan log Book, Draft jurnal dan bukti daftar HAKI, telah memenuhi ketentuan yg berlaku. Maka Selesai Rangkaian Kegiatan Penelitian berdasarkan Surat Perjanjian No. B-113/un.05/v.2/pp.00.9/03/2018 tgl. 21 Maret 2018.
7.	Rencana kegiatan selanjutnya	No. B-113/un.05/v.2/pp.00.9/03/2018 tgl. 21 Maret 2018. ..... 0.....

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

  
**Dr. H. A. Rusdiana, MM**  
 NIP: 1961042119860201001

Bandung, 20 Agustus 2018,  
 Anggota peneliti

  
**Drs. Nasihudin, MPd.**  
 NIP:196209201991031001

Catatan:

- Bila kolom yg tersedia tidak cukup harap ditambahkan pada halaman berikutnya;
- Bila hasil berupa tabel/gambar ditempelkan pada halaman belakang.

Catatan Monev:

Gambar 6.8. Materi Log Book Akhir Kegiatan

Selanjutnya, pada bagian belakang form (gambar 6.9) ditempelkan bukti penerimaan laporan, dari Lemlit tanggal 20 Agustus 2018, berikut:

**Lampiran :**



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT  
**UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**  
Jl. AH. Nasution No. 105 Bandung

**TANDA TERIMA**

**A. Identitas**  
Telah terima Berkas Laporan Pembiayaan BOPTN Tahun  
Anggaran 2018 atas nama:

Ketua : DR. H. A. Rusdiana, MM  
Kluster : Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi

**B. Berkas Laporan**

<input checked="" type="checkbox"/> Logbook	Luaran Lain:
<input checked="" type="checkbox"/> Buku	<input checked="" type="checkbox"/> Teknologi Tepat Guna
<input checked="" type="checkbox"/> HKI	<input checked="" type="checkbox"/> Poster
<input checked="" type="checkbox"/> Artikel	<input checked="" type="checkbox"/> Buku Logbook dan
<input checked="" type="checkbox"/> Laporan Keuangan	<input checked="" type="checkbox"/> Laporan Keuangan
	<input checked="" type="checkbox"/> Buku Pendidikan/Kelembagaan dan Pedoman SKP

Bandung, 20 Agustus 2018



**Catatan:**

- ✓ A Diisi oleh peneliti
- ✓ B Ceklis oleh petugas LP2M
- ✓ Peneliti agar mengirim file document buku dan artikel secara elektronik pada aplikasi puslitpen

**Gambar 4.10.**  
**Materi Log Book Akhir**

*Log Book* manual, selengkapnya ada pada lampiran 1.

**b. Log Book Bentuk Ringkasan**

*Log book* bentuk ringkasan, dimaksudkan dalam rangka memenuhi: (1) kebutuhan informasi petunjuk/arah dan sekaligus panduan peneliti dalam pelaksanaan penelitian sesuai standar;



(2) sebagai catatan kemajuan yang berisi data yang diperoleh, keterangan data, sketsa, gambar, analisis singkat, dan lain sebagainya.

Dengan dimilikinya ringkasan *log book* bentuknya *landscape*, dapat membantu peneliti dalam menggungkannya lebih efektif dibanding *log book* manual dan pertkal. Pencatatan secara detail setiap langkah aktivitas dalam proses penelitian. Ringkasan dimulai sejak penerimaan surat perjanjian kerja tanggal 21 Maret 2018 (Gambar 3.1), sampai penyerahan laporan Penelitian tanggal 20 Agustus 2018, ditunjukkan pada (tabel 3.5) berikut:

**Tabel 6.6**  
**Ringkasan Log Book**

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan Penelitian	Output/Catatan Kemajuan	Kendala	Pelaksana
1	2	3	4	5	6
1.	Rabu 21 Maret 2018	- Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja B-113/Un.05/V.2/ PP.00.9/03/2018. Tgl. 21/3/018	Dimilikinya dasar legalitas formal untuk operasional kegiatan penelitian	Lancar	Ketua dan anggota Tim
		- Penyusunan jadwal operasional Kegiatan sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor: B-113/Un.05/V.2/ P.00.9/03/2018. Tgl. 21/3/018	Dimilikinya jadwal operasional kegiatan penelitian berdasar pada Surat Perjanjian Kerja Nomor: 113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018. Tgl. 21/3/018	Lancar	Ketua Tim, bersama Anggota Tim
2.	Kamis 22 Maret 2018	- Pengadaan perlengkapan adminis trasi kantor - Rewew Desain Penelitian, disesuaikan dengan kontrak	- Dimilikinya perlengkapan adm kantor - Dimilikinya Desains penelitian sesuai dengan ketentuan SPK	Lancar	Ketua dan Anggota tim dibantu oleh staf,
3.	Sabtu 24 Maret 2018	Penyusunan Kelengkapan perangkat sistem/administrasi penelitian - Permohonan Izin Lokasi ke Koord Kopertais - Permohonan Izin Lokasi 24 PTKIS	Dimilikinya Sistem penelitian, untuk kepentingan penelitian Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat Dan Banten	Lancar	Ketua dan Anggota tim dibantu oleh staf,
4.	Selasa, 27 Maret 2018	- Penyusunan Alokasi Waktu dan Biaya (Pengembangan jadwal dan RAB).	Dimilikinya: Alokasi Waktu dan Biaya ksunya untuk keg di Lokasi/Perjalanan Dinas untuk: (1) Observasi/izin lokasi; (2) penyebaran IPD III; (3) Wawancara & pengambilan Isian IPD III; (4) Validasi data.	Lancar	Ketua dan Anggota tim dibantu oleh staf,
5.	Rabu, 28 Maret 2018	- Penyiapan Rancangan Pedoman Operasional Penelitian	Dimilikinya: Rancangan/ Sistematika Pedoman Operasional Penelitian, berisi: pendahuluan, Konsep, metode, Kerangka. Jadwal Kisi-kisi, IPD	Lancar	Ketua dan Anggota tim dibantu oleh staf,

Ringkasan *Log Book*, selengkapnnya ada pada lampiran 1.

## 2. Artikel Ilmiah/Jurnal

Menulis dan mempublikasikan karya Ilmiah bagi sebagian besar pendidik (dosen) masih menjadi persoalan serius. Tidak sedikit dosen yang tertunda, dan terhalang karir dan kepengkatannya disebabkan oleh tidak terpenuhinya publikasi

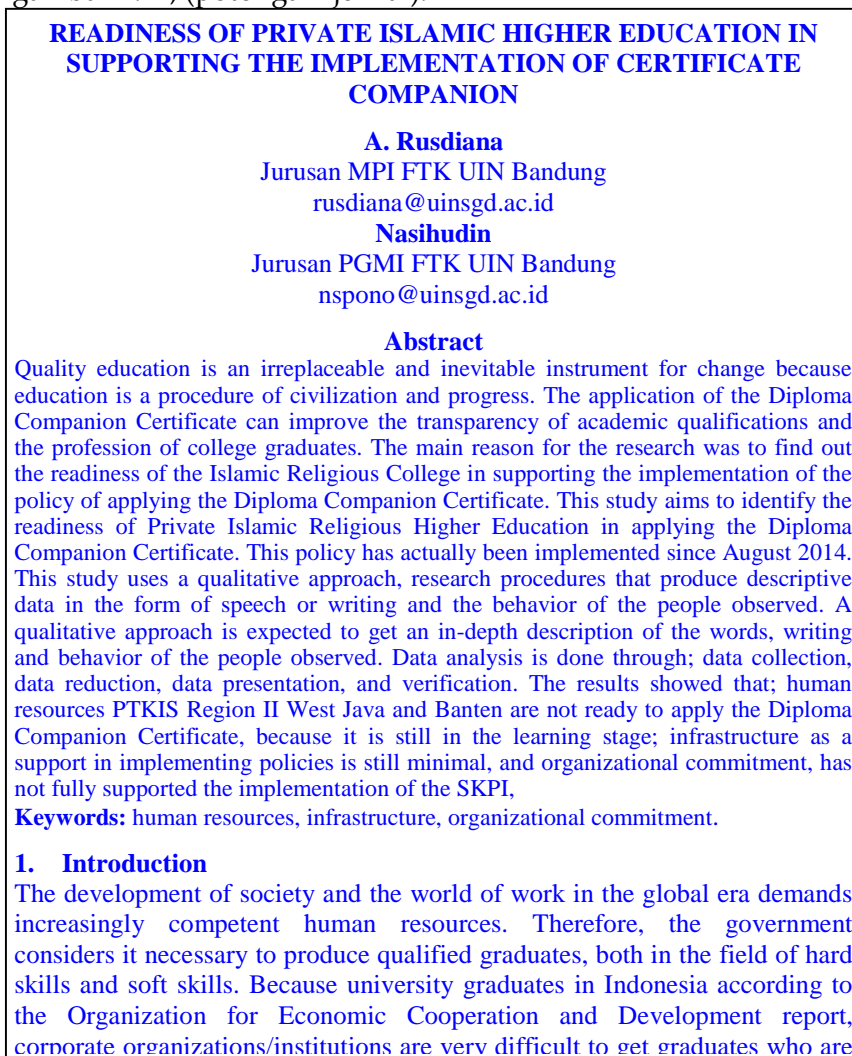
ilmiah ini. padahal publikasi ilmiah menjadi syarat wajib dan bagian tidak terpisahkan dari pengembangan profesionalisme dan kompetensi berkelanjutan dosen. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nomor 17 Tahun 2013. Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Tagihan angka kredit yang disyaratkan digunakan sebagai salah satu persyaratan peningkatan karir, dan kemudian sebagai acuan pemberian penghargaan secara adil, profesional dan sebagai bentuk pengakuan terhadap profesi, serta kemudian memberikan peningkatan kesejahteraan.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2014, tersebut dengan jelas mengatur prosedur peningkatan karir/jabatan bagi dosen, bahwa karya ilmiah dan publikasi ilmiah adalah bagian unsur yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir dosen, meskipun realitasnya unsur tersebut paling sulit dipenuhi oleh sebagian dibandingkan dengan unsur-unsur lain. Hal ini sebabkan belum terbangunnya budaya meneliti, dan menulis di kalangan para dosen. Para dosen lebih banyak menghabiskan waktunya untuk kegiatan pembelajaran di kelas, dan pelatihan-pelatihan pembelajaran. Sementara menggali problem dan menelitinya, kemudian dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dan dipublikasikan di lembaga-lembaga pempublikasi, seperti jurnal, seminar, konferensi dan lain-lain masih sangat minim dilakukan.

Begitu pentingnya karya ilmiah/jurnal bagi dosen, sampai-sampai Direktur Jenderal Pendidikan Islam memposisikan jurnal sebagai salah satu bentuk Laporan *Outcome* dari penelitian, disamping laporan lainnya, format buku, dan memperoleh hak paten sebagai perlindungan kekayaan intelektual untuk beberapa hasil penelitian. Kebijakan tersebut, tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7211 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018 .

Atas dasar kebijakan itu, tim peneliti pada penelitian "Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi kebijakan

SKPI: Studi di PTKIS Wilayah II Jawa Barat dan Banten”, memiliki kewajiban untuk merealisasikannya. Adapun upaya yang dilakukan untuk memenuhi tahgihan penelitian tersebut, sampai saat ini tim sudah menyiapkan draf, untuk siap submit, direcakan masuk Jurnal internasional terindeks *scopus*, brtikut gambar 4.11, (potongan jurnal):



**Gambar 6.7**

**Potongan artikel Jurnal Ilmiah siap submit**

Artikel lengkap, pada lampiran: 2

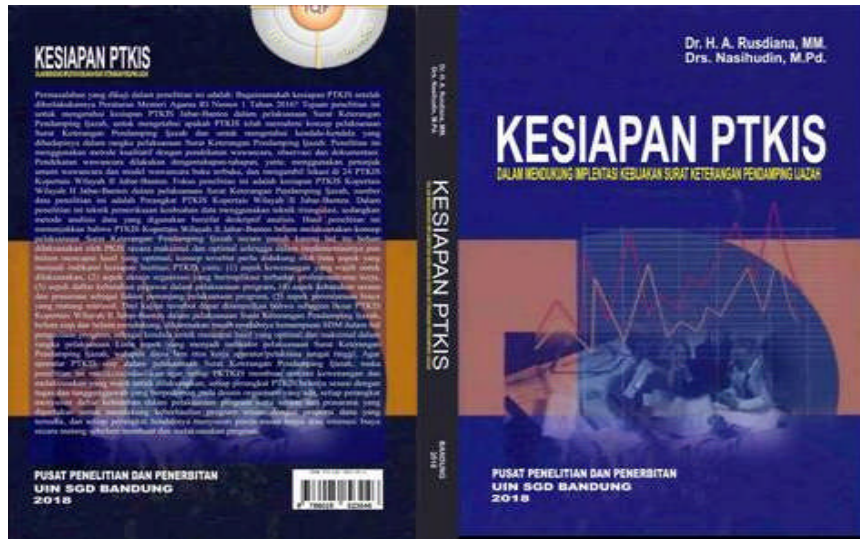


### 3. Buku Hasil Penelitian

Format buku, merupakan tagihan *outcome* penelitian ketiga. Untuk memenuhi tagihan itu, tim peneliti pada penelitian "Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi kebijakan SKPI: Studi di PTKIS Wilayah II Jawa Barat dan Banten", telah berupaya melakukan kegiatan:

#### a. Buku Laporan Penelitian Ber ISBN

Gambar 6.7. Bagian-bagian buku Laporan Penelitian terdiri atas:



Coper ISBN

Ceter

<p style="text-align: right;">Dr. H. A. Rusdiana, MM Drs. Nasihudin, M.Pd.</p> <p style="text-align: center;"><b>KESIAPAN PTKIS</b> DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH</p> <p style="text-align: center;">PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN UIN SGD BANDUNG 2018</p>	<p style="text-align: center;"><b>KESIAPAN PTKIS</b> DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH</p> <p>ISBN: 978 - 602 - 5823 - 04 - 6 Cetakan Pertama, Agustus 2018 16 cm x 24 cm 316 hlm +(i - xii)</p> <p>Penulis: Dr. H. A. Rusdiana, MM Drs. Nasihudin, M.Pd.</p> <p>Editor: Mr. Muhandi, Ss., M.Pd.</p> <p>Desain Ceter dan Tata letak: M. Zaky Nurzaman</p> <p>Diterbitkan oleh: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jl. H.A. Nasution No. 105 Bandung</p> <p>Hak Cipta dilindungi UU RI No 19/Th.2002 Dilarang memperbanyak dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa seizin penerbit.</p>
---	--

Testimoni/Apresiasi dari Koordinatorat Kopertai Wil II (Disyaratkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7211 Tahun 2017)

## Kata Pengantar

Penerapan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) merupakan suatu keniscayaan. Mendesak dari segi keharusan regulasi dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Dari segi regulasi, karena UU Nomor 12 mengharuskan setiap perguruan tinggi memberikan sertifikat kompetensi bagi setiap lulusannya sebagai keterangan resmi tentang kompetensi mereka sekaligus bisa digunakan untuk mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Dengan demikian, UU Nomor 12 tahun 2012 secara tegas mengarahkan agar setiap lulusan perguruan tinggi bisa memasuki pasar kerja. Dan untuk itu, setiap lulusan pendidikan tinggi, harus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Pada kenyataannya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) khususnya pada perguruan tinggi swasta di Jawa Barat dan Banten belum mendukung secara optimal, baik dalam aspek penafsiran kebijakan SKPI, secara normatif maupun pengorganisasian Kebijakan SKPI, strategi operasional penerapan SKPI, dan menanggulangi faktor-faktor kesiapan dalam mendukung kebijakan SKPI.

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Jawa Barat dan Banten dari jumlah 117 tahun 2017-2018 sebagian besar penyelenggaranya adalah berbasis Yayasan Pendidikan Islam atau pesantren. Pimpinan PTKIS umumnya belum tentu berbasis keilmuan tentang kurikulum baik magister atau program doktor. Terlepas dari basis keilmuan atau keahlian personal pimpinan, peran pimpinan dalam optimalisasi kurikulum pada sebuah lembaga pendidikan adalah sebuah kepastian.

Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI

| i

Hasil Penelitian tentang Kesiapan PTKIS dalam mendukung implementasi Kebijakan SKPI, yang dilaksanakan oleh Rusdiana dan Nasihudin pada dua puluh empat PTKIS: Studi PAI di Wilayah II Jawa Barat dan Banten berhasil mengidentifikasi aspek-aspek peran yang masih memerlukan pembenahan agar penerapan SKPI berjalan optimal. Peran dalam makna ilmu sosial sebagai "sekumpulan hak dan kewajiban yang melekat pada individu dan lembaga sesuai dengan statusnya sebagai penyalenggara PT". Aspek-aspek hasil penelitian tersebut menjadi penting terkait duahal: *pertama*: aspek-aspek yang masih menjadi kendala optimalnya peran individu dan lembaga; *kedua*: isyarat yang harus menjadi kesadaran bersama mengenai soslusu penerapannya.

Sesederhana apapun penelitian yang telah dilakukan, dan sekecil apapun sampelnya, Hasil penelitian ini menjadi sumbangan yang sangat bermakna untuk dua hal tersebut. Kesadaran dan inspirasi untuk solusi adalah bagian dari rekomendasi untuk pengembangan selanjutnya. Semoga.

Bandung, 17 Agustus 2018  
An. Tim Pembimbing,

Drs. H. Yaya Suryana, M.Ag.

## Pengantar Penulis

### Pengantar Penulis

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) merupakan amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. Permendikbud sendiri merupakan turunan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Dalam Pasal 44 ayat 1 sampai ayat 3, UU Nomor 12 mengharuskan setiap perguruan tinggi memberikan sertifikat kompetensi bagi setiap lulusannya sebagai keterangan resmi tentang kompetensi mereka sekaligus bisa digunakan untuk mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Dengan demikian, UU Nomor 12 tahun 2012 secara tegas mengarahkan agar setiap lulusan perguruan tinggi bisa memasuki pasar kerja. Dan untuk itu, setiap lulusan pendidikan tinggi, harus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah setiap program studi termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS), harus mampu memperjelas kompetensi yang diperoleh para mahasiswanya saat mereka lulus menjadi sarjana yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Nantinya, sertifikat ini bisa mereka gunakan untuk memasuki pasar kerja.

Untuk merespon kebijakan pemerintah tersebut, maka Kemenag RI, meluncurkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijazah, Transkrip Akademik, Dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan. Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Januari 2016.

Persoalannya adalah mengapa PTKIS di lingkungan Kopertais Wilayah II Jawa Barat belum mampu mengimplementasikan kebijakan tersebut?

Atas dasar itu, kami meneliti "Kesiapan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan penerapan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI): Studi di duapuluhempat PTKIS Wilayah II Jawa Barat dan Banten. Dengan tujuan untuk mengidentifikasi; penafsiran kebijakan SKPI, pengorganisasian Kebijakan SKPI, strategi operasional penerapan SKPI, dan faktor-faktor kesiapan dalam mengimplementasikan kebijakan SKPI.

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap model kesiapan implementasi kebijakan penerapan SKPI di PTKIS, khususnya pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten.

Bandung, 17 Agustus 2018  
Tim Penulis,

## Daftar Isi

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar Pembimbing Ahli.....	i
Pengantar Penulis.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan masalah.....	9
1. Identifikasi Permasalahan.....	9
2. Batasan Permasalahan.....	10
B. Tujuan Penelitian.....	11
1. Tujuan Umum.....	11
2. Tujuan Khusus.....	11
C. Signifikansi Penelitian.....	11
1. Kegunaan bagi ilmu pengetahuan.....	11
2. Kegunaan bagi institusi.....	12
3. Kegunaan bagi masyarakat.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Dasar Kesiapan.....	13
1. Definisi Kesiapan.....	13
2. Prinsip, dan Aspek Kesiapan.....	13
3. Makna, Ciri, dan Faktor Kesiapan kerja.....	15
4. Esensi Kesiapan Implementasi Kebijakan SKPI.....	20
B. Konsep dan Teori Implementasi Kebijakan.....	23
1. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	23
2. Operasi Penyiapan Implementasi Kebijakan.....	24
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi.....	25
4. Variabel yang memengaruhi Implementasi Kebijakan.....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	71
1. Profil Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten.....	71
2. Profil 24 PTKIS Kop. Wilayah II Jawa Barat dan Banten.....	72
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	90
1. Data Informasi Penelitian.....	90
2. Temuan Penelitian.....	170
C. Pembahasan.....	271
1. Analisis Data Kesiapan 24 PTKIS dalam Mendukung Kebijakan SKPI.....	271
2. Interpretasi Data Temuan Penelitian.....	280
3. Analisis Dampak Ketidaksiapan PTKIS dalam Mendukung penerapan Implementasi Kebijakan SKPI.....	287
4. Langkah Antisipatif Penyiapan Implementasi Kebijakan.....	296
<b>BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI</b>	
A. Kesimpulan.....	305
B. Implikasi.....	306
C. Rekomendasi.....	309
DAFTAR PUSTAKA.....	311
PROFIL PENULIS.....	315

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>hlm</b>
2.1.01 Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Edward III.....	29
2.1.02 Diagram Persentase Keberhasilan Kebijakan.....	38
3.1.01 Proses analisis data Model Miles and Huberman.....	59
4.1.01 Peta Propinsi Jawa Barat dan Banten.....	71
4.2.01 Temuan data tunggal di FAI UNMA.....	172
4.2.02 Temuan data tunggal di IAIB Serang.....	175
4.2.03 Temuan data tunggal di STAI Latansa Mashiro.....	178
4.2.04 Temuan data tunggal di STAI Fatahillah.....	181
4.2.05 Temuan data tunggal di STAI Kharisma.....	184
4.2.06 Temuan data tunggal di FPSI-UNIDA.....	187
4.2.07 Temuan data tunggal di IAIN Laroiba.....	190
4.2.08 Temuan data tunggal di STAI Kharisma.....	193
4.2.09 Temuan data tunggal di STAI Sukabumi.....	196
4.2.10 Temuan data tunggal di STAI Nurul Hikmah.....	199
4.2.11 Temuan data tunggal di STAI K. H. Agus Salim.....	202
4.2.12 Temuan data tunggal di As Sidiqiyah.....	205
4.2.13 Temuan data tunggal di STAI KH. E.Z. Muttaqin.....	208
4.2.14 Temuan data tunggal di STAI Riyadul Jannah.....	211
4.2.15 Temuan data tunggal di STAIS Dharma.....	214
4.2.16 Temuan data tunggal di STAIK Cirebon.....	217
4.2.17 Temuan data tunggal di FKIS UNSIA Kuningan.....	220

C. Implementasi Kebijakan Penerapan SKPI.....	29
1. Kebijakan Pengembangan Pendidikan Tinggi.....	29
2. Kebijakan PT dalam menghadapi Era Persaingan.....	30
3. Kebijakan Penerapan SKPE memperkuat kualifikasi Iulusan Pendidikan Tinggi.....	31
4. Mempersiapkan Implementasi Kebijakan Penerapan SKPI.....	36
D. Penelitian terdahulu yang Relevan.....	40
1. Penelitian Yusuf Bachtiar Tahun 2001.....	41
2. Penelitian DIKTI Tahun 2006.....	42
3. Penelitian DIKTI Tahun 2014.....	42
4. Penelitian Wawan dan Irma Masitoh Tahun 2015.....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Desain, Metode, Sumber dan Subjek Penelitian.....	45
1. Desain penelitian.....	45
2. Metode penelitian.....	46
3. Sumber Data Penelitian.....	49
4. Subjek Data Penelitian.....	49
B. Prosedur Penelitian.....	51
1. Persiapan Penelitian.....	52
2. Pelaksanaan Penelitian.....	53
3. Tahap Pembahasan, pengolahan hasil, dan Pengambilan Kesimpulan.....	53
C. Teknik/Cara Pengumpulan Data.....	53
1. Wawancara.....	53
2. Observasi.....	56
3. Dokumentasi.....	56
D. Metode Analisis Data dan Pengolahan Data.....	56
1. Metode Analisis Data.....	58
2. Tahapan Analisis Data.....	59
3. Penarikan kesimpulan.....	63
4. Pengujian Keabsahan Data.....	65
5. Teknik Keabsahan Data.....	67
6. Penyusunan Laporan Hasil Penelitian.....	69

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>hlm</b>
3.1.01 PTKIS sebagai Sampel Penelitian.....	50
3.1.02 Kisi-kisi Penelitian.....	57
4.1.01 Data Potensi PTKIS Tahun 2018.....	72
4.1.02 Lokasi PTKIS Objek Penelitian.....	73
4.2.01 Profil FAI UNMA Tahun 2017/2018.....	75
4.2.02 Profil IAIB Tahun 2017/2018.....	75
4.2.03 Profil STAI LaTansa Mashiro Th. Ak. 2017/2018.....	76
4.2.04 Profil STAI Fatahillah Tahun 2017/2018.....	77
4.2.05 Profil STAI Al-Karimiyah Tahun 2017/2018.....	78
4.2.06 Profil FPSI-UNID Tahun Akademik 2017/2018.....	78
4.2.07 Profil IAIN Laa Roiba Bogor Tahun 2017/2018.....	79
4.2.08 Profil STAI Kharisma Tahun 2017/2018.....	80
4.2.09 Profil STAI Sukabumi Tahun 2017/2018.....	80
4.2.10 Profil STIT Nurul Hikmah Tahun 2017/2018.....	81
4.2.11 Profil STAI Haji Agus Salim Tahun 2017/2018.....	82
4.2.12 Profil STAI As Shiddiqiyah Tahun 2017/2018.....	82
4.2.13 Profil STAI KH. E.Z. Muttaqin Tahun 2017/2018.....	83
4.2.14 Profil STAI Riyadul Jannah Tahun 2017/2018.....	84
4.2.15 Profil STAIS Dharma Kusuma Tahun 2017/2018.....	84
4.2.16 Profil STAI Cirebon Tahun 2017/2018.....	85
4.2.17 Profil FKIS UNSIA, Tahun 2017/2018.....	86
4.2.18 Profil STAI Putra Galuh Tahun 2017/2018.....	86
4.2.19 Profil STAIMA Tahun 2017/2018.....	87
4.2.20 Profil STAINU Tasikmalaya Tahun 2017/2018.....	88
4.2.21 Profil IAIC Cipasung Tahun 2017/2018.....	88
4.2.22 Profil STAI Siliwangi Garut Tahun 2017/2018.....	89
4.2.23 Profil STAI Al-Falah Tahun 2017/2018.....	90
4.2.24 Profil STAI Siliwangi Cimahi Tahun 2017/2018.....	90

## Gambar 6.7.

### Bagian-bagian buku Laporan Penelitian

**b. Poster Ilmiah**

Poster merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan penelitian; “*Publish or perish*” [Nature 463, 142-143 (2010) doi:10.1038/463142a], adalah sebuah frase yang sudah tidak asing lagi dalam publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah adalah hal yang penting dilakukan oleh seorang ilmuwan atau klinisi sebagai bentuk tanggung jawab dan komunikasi dengan ilmuwan, klinisi lain, atau publik mengenai apa yang telah mereka lakukan. Berbagai media publikasi telah tersedia saat ini, salah satunya adalah melalui poster ilmiah”.

Atas dasar itu, tim peneliti “Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi kebijakan SKPI”, menempatkan poster pada bagian akhir laporan (sebagai lampiran), tampak pada gambar: 3.8, berikut:



**Gambar: 6.8. Poster Penelitian**

**c. HAKI**

Produk hasil penelitian diarahkan untuk memperoleh paten sebagai perlindungan kekayaan intelektual untuk beberapa hasil penelitian. (Disyaratkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7211 Tahun 2017). Upaya kearah paten bagi hasil penelitian Ilmu sosial menjadi satu keniscayaan, namun memerlukan kajian lebih spesipik dan mendalam, juga memerlukan waktu dan biaya. Paling tidak tim peneliti “Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi kebijakan SKPI”, menempatkan HAKI pada bagian akhir laporan, sejajar dengan poster (sebagai lampiran), tampak pada gambar: 3.9, berikut:

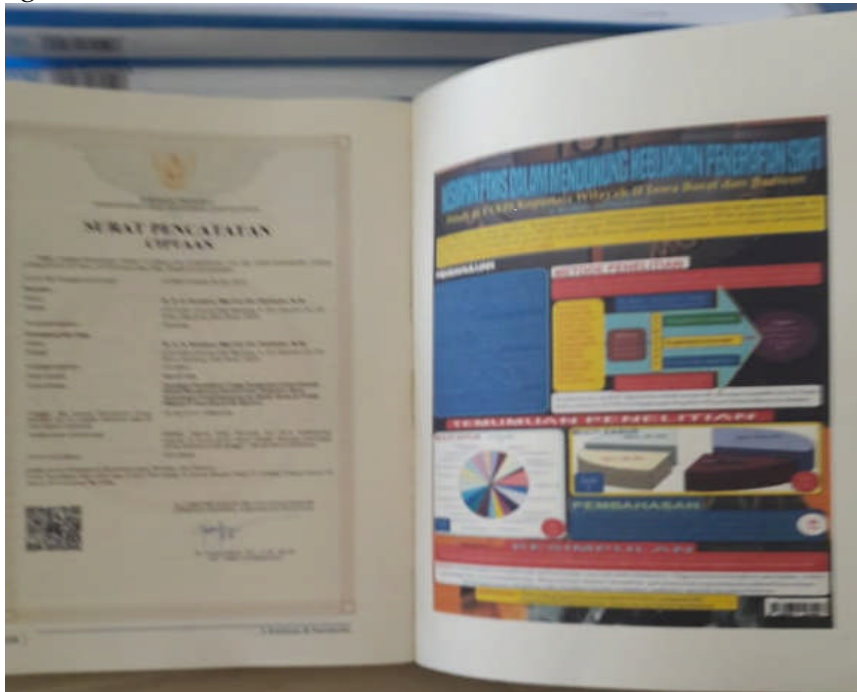


**Gambar: 6.9 HAKI Penelitian**

Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi kebijakan SKPI



Penempatan HAKI dan Poster Penelitian, tampak pada gambar 3.10, berikut:



**Gambar: 6,10. Penempatan HAKI dan Poster Penelitian**

#### **d. Buku Ajar Berbasis Penelitian**

Salah satu temuan Penelitian "Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi kebijakan SKPI: Studi di lingkungan PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten", adalah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan merupakan faktor-faktor yang harus diidentifikasi, di analisis dan diantisipasi sebelum pelaksanaan terimplementasi melalui pendekatan masalah implementasi melalui analisis lingkungan. Dengan analisis lingkungan akan diketahui secara jelas dan pasti faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan organisasi yang dapat mencakup saluran distribusi yang handal. Akan tetapi, tidak kalah pentingnya untuk dikenali secara tepat adalah berbagai kelemahan yang mungkin terdapat dalam organisasi. Kelemahan manajerial, fungsional, operasional, struktur atau bahkan yang bersifat psikologis.

Aspek penting yang paling dominan bertumpu pada sikap

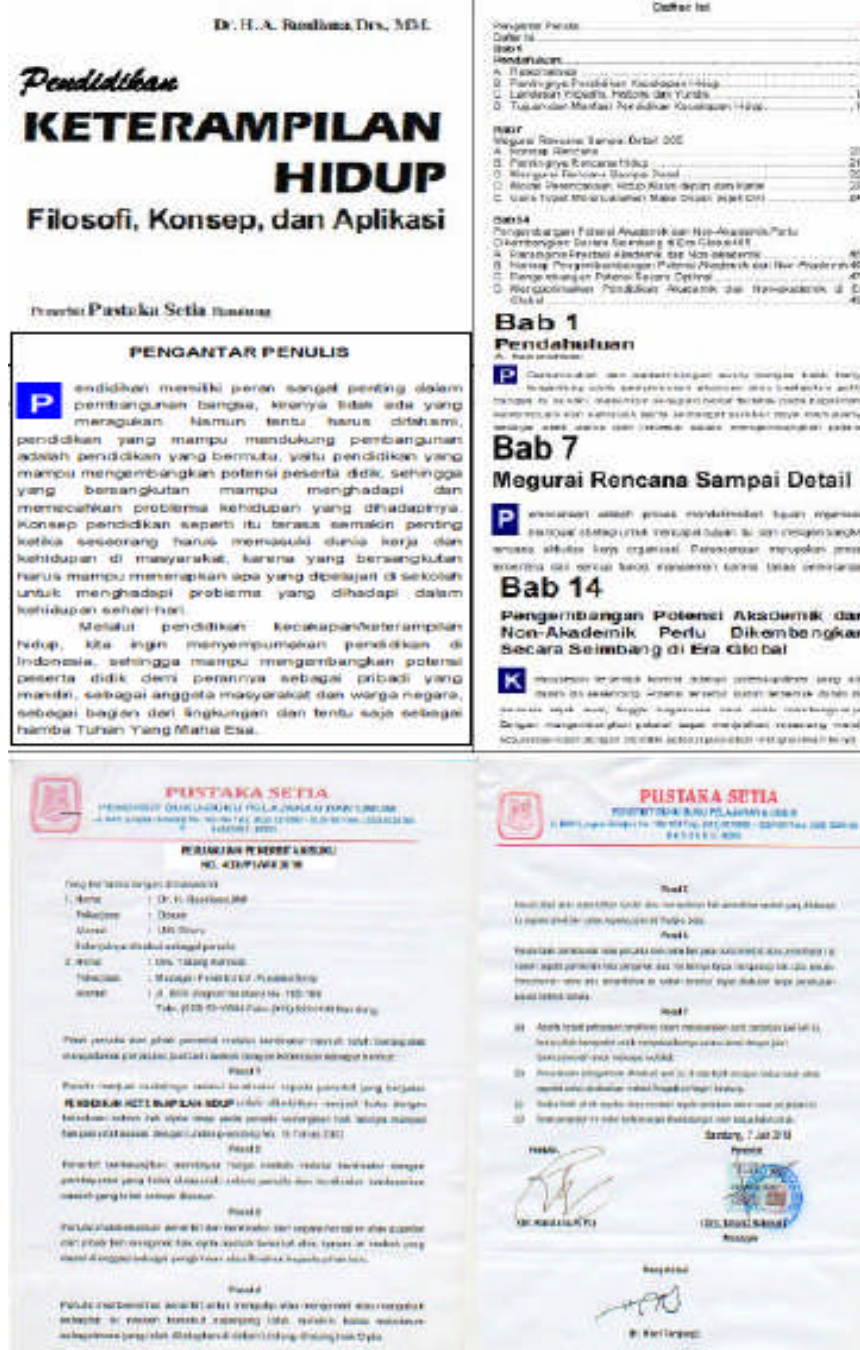
dan keterampilan *skill* SDM. Dengan kata lain, “bagaimana jadinya mereka bertugas membentuk manusia terampil, apabila memera tidak terampil”? untuk itu, penulis menganggap bahwa pendidikan keterampilan menjadi penting untuk dikembangkan di lembaga pendidikan tinggi khususnya di PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten. Dengan itu bukan saja dapat memberikan pembelajaran kepada para mahasiswanya, akan lebih penting lagi pembelajaran ini berguna bagi para penyelenggaranya. Bukan kah Nabi Muhammad mengajarkan IBDA’BINAFSIK: (Solusi Praktis Rasulullah SAW dalam Mengatasi Krisis Multi Dimensional).

Atas dasar itu, penulis meyakini bahwa pendidikan yang mendukung pembangunan adalah pendidikan yang bermutu, yaitu pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta didik, sehingga yang bersangkutan mampu menghadapi dan memecahkan problema kehidupan yang dihadapinya. Konsep pendidikan seperti itu terasa semakin penting ketika seseorang harus memasuki dunia kerja dan kehidupan di masyarakat, karena yang bersangkutan harus mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah untuk menghadapi probiema yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Didalam buku ini, penulis mengajak para pendidik/calon pendidik sebagai ujung tombak pelaksana pendidikan, untuk menciptakan kesimbangan pada pendidikan, terutama dalam mempersiapkan para anak didik tidak hanya mempunyai nilai yang tinggi didalam ujian nasional tetapi setelah mereka lulus kelak mempunyai kemampuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya, lebih bersyukur bila dia mampu mengajak orang lain lain sehingga pengangguran berkurang, tanamkan pada diri mereka bahwa mereka mempunyai nilai jual yang tinggi apabila mempunyai suatu keahlian (keterampilan).

Naska buku ini, telah disampaikan dan telah kontrak terbit dengan Penerbit Reputasi Nasional IKAPI, sejak tanggal 7 Juli

2018, tampak pada gambar 6.11, berikut:



Gambar 6.11  
Potongan Bab Buku Sampai Kontrak Terbit



#### e. Buku Panduan Teknis

Salah satu temuan lain dari Penelitian “Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi kebijakan SKPI: Studi di lingkungan PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten”, ditemukan faktor-faktor dominan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Dalam hal ini kebijakan penerapan SKPI pada PTKIS, bertumpu pada empat variabel baik langsung atau tidak langsung yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan, salah satunya yaitu: “komunikasi kebijakan yang efektif adalah para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang mereka kerjakan, hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan”; (Edwar II, 1980).

Di lapangan, peneliti tidak menemukan satu pun yang menyangkut kejelasan informasi kebijakan, dimaksudkan sejenis (pedoman, panduan, atau petunjuk teknis), apaun namanya yang jelas *guid* semacam itu menurut teori implemtasi kebijakan menjadi penting sebagai penjabaran teknis dari suatu kebijakan, terlih kebijakan penapan SKPI, khususnya bagi PTKIS.

Atas dasar itu, penulis tergerak untuk menginisiasi adanya “*Buku Panduan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)*” ini, disusun dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. Lebih spesifik untuk PTKI, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijazah, Transkrip Akademik, Dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan. Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Januari 2016.

Buku ini berisi uraian mengenai bidang kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler yang diberi nilai beserta besaran nilai per kegiatan.

Dasar pijakan dalam “*Buku Panduan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)*” ini, yaitu:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijazah, Transkrip Akademik, Dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan. Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Januari 2016.
- 7) Laporan Penelitian "Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi kebijakan SKPI: Studi di lingkungan PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten",

Didalam panduan ini, penulis mengajak para pendidik, pengelola pendidikan untuk berinteraksi dengan kebijakan menciptakan tercapainya kebijakan SKPI, Harapan kami, dari buku "*Panduan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)*" ini dapat memberikan manfaat bagi civitas akademika PTKIS. Untuk itu, penyajian buku ini terdiri atas empat bab, yang memuat:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini, memuat Latar belakang, landasan filosofi dasar pengembangan kebijakan penerapan SKPI

#### **BAB II. MODEL SISTEM PENYELENGGARAAN**

##### **KEGIATAN KEMAHASISWAAN BERBASIS SKPI**

- A. Visi Misi, Tujuan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
- B. Kebijakan dan Pola Pengembangan Kemahasiswaan
- C. Fasilitas Kegiatan Kemahasiswaan
- D. Program Kegiatan Kemahasiswaan yang relevan dengan Surat Keterangan Pendamping Ijazah

### BAB III. MANAJEMEN KEGIATAN KEMAHASISWAAN BERBASIS SKPI

- A. Perencanaan Kegiatan
- B. Pelaksanaan Kegiatan
- C. Evaluasi Hasil Kegiatan

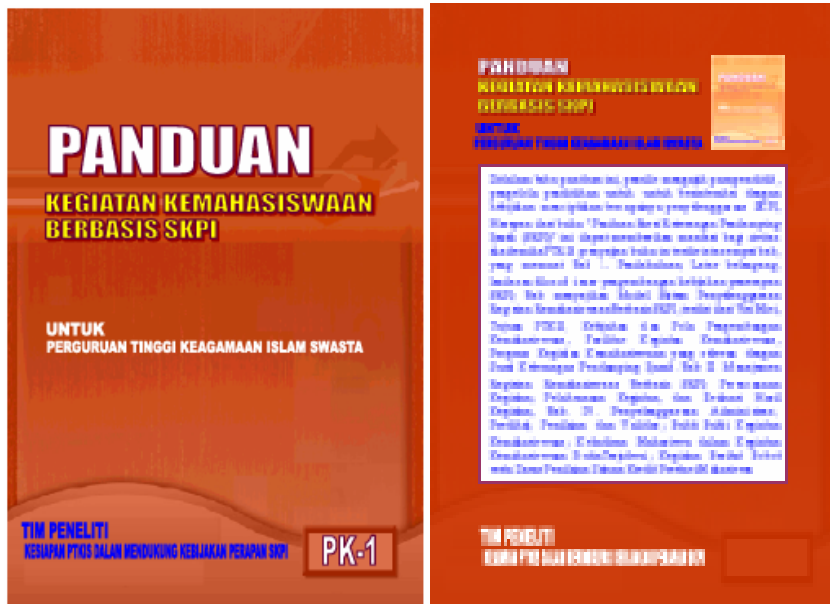
### BAB. IV. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI

- A. Predikat
- B. Penilaian dan Validasi
- C. Bukti-Bukti Kegiatan Kemahasiswaan
- D. Kehadiran Mahasiswa dalam Kegiatan Kemahasiswaan RutinTerjadwal
- E. Kegiatan Berikut Bobot serta Dasar Penilaian Satuan Kredit Prestasi Mahasiswa

### DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Lembaran Penghitungan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Lampiran
- 2. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

Sampul Buku Panduan Sistem Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan berbasis SKPI, pada gambar 6.12, berikut:



**Gambar 6.12**  
Buku Panduan Kegiatan Kemahasiswaan Berbasis SKPI

#### **4. Laporan Keuangan**

##### **a. Dasar, Tujuan, dan Ketentuan Penyusunan Laporan keuangan Penelitian**

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja lembaga/perusahaan tersebut. Laporan keuangan dalam konteks ini, adalah bagian dari proses pelaporan penelitian.

Tujuan Laporan Keuangan, Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tujuan laporan keuangan adalah Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.

Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan.

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (bahasa Inggris: *stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin melihat apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.

Atas dasar itu, Laporan keuangan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi kebijakan SKPI: Studi di lingkungan PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten", merupakan kewajiban pertanggungjawaban tim peneliti atas amanah Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor B. 061.D/ Un.05/V.2/Kp.02.3/05/2017. tanggal 19 April 2017. tentang Dosen-dosen yang mendapat pembiayaan terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi. Di tindaklajuti dengan surat perjanjian kerja Penelitian No.B 113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018, tanggal 21 Maret 2018. Dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Ketua Tim penelitian "Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi kebijakan SKPI: Studi di lingkungan PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten", tanggal 21 Maret 2018.

Ketentuan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian disesuaikan berdasarkan SBK (Standar Biaya Keluaran) dan SBM (Standar Biaya Masukan) tahun berjalan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tim penelitian "Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi kebijakan SKPI: Studi di lingkungan PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten", berdasar pada:

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018;
- 2) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7211 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018, tanggal 29 Desember 2017:
- 3) Ketentuan Perpajakan:  
Dalam hal perpajakan, pengenaan pajak dikenakan terhadap penggunaan dana yang bersumber dari APBN maupun APBD. Jenis-jenis pajak antara lain: Materai, PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN.

(a) Materai: Setiap pembelian barang/jasa sewa dibubuhi materai (PP Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Permenkeu Nomor 55/PMK.03/2009 tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Materai, dengan perincian sebagai berikut:

- Pembelian barang/jasa, sewa: < Rp 250.000,- tanpa dibubuhi Materai.
- Pembelian barang/jasa, sewa: >Rp. 250.000,-s.d. Rp. 1.000.000,-dibubuhi Materai 3.000,-
- Pembelian barang/jasa, sewa: >Rp. 1.000.000,- dibubuhi Materai 6.000,-

(b) Pajak Penghasilan (PPh 21)

Dasar pemotongan PPh Ps 21 (Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu nomor 262/PMK.03/2010, dan Perdirjen Pajak Nomor Per-57/PJ/2009). Setiap penyerahan yang berupa honorarium dipungut PPh 21 dengan rincian untuk penerima dengan kepangkatan Gol. IV sebesar 15 %, Gol. III sebesar 5%; Gol.II sebesar 0%; non PNS sebesar 5%. Pajak disetorkan ke kas Negara melalui bank/kantor pos menggunakan NPWP penerima dana bantuan. Jika bersifat kelompok, menggunakan NPWP ketua tim.

(c) Pajak Penghasilan Belanja Barang (PPh 22)

Dasar pemotongan PPh Ps 22 (Undang-undang PPh 22, Perdirjen Pajak Nomor Per-15/PJ/201 1). Belanja bahan (pembelian ATK, bahan kimia, supplies, spanduk, dll) dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (Satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta), maka tidak dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh. Psl. 22 (pajak penghasilan pasal 22).

- Untuk pembelian barang dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi mulai dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) maka hanya dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) perhitungan

$$\text{PPN DN} = (100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 10 \%$$

- Pembelian bahan dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta), maka dikenakan PPN (Pajak Pertamabahn Nilai) dan PPh. Psl. 22 (pajak penghasilan pasal 22)
- Perhitungan PPh Ps. 22 dengan NPWP Toko  $(100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 1,5 \%$
- Perhitungan PPN dengan NPWP  $(100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 10 \%$  (dilampiri SSP PPN; SSP PPh Psl. 22 dan Faktur Pajak Standar dan menggunakan NPWP toko).

#### (d)Pajak Penghasilan (PPh 21)

##### Pajak Penghasilan Pembelian Jasa/Sewa (PPh. Ps. 23)

Dasar pemotongan PPh Ps 23 (Undang-undang No. 36 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu nomor 244 / PMK. 03/ 2008).

- Setiap transaksi pembelian jasa/sewa kurang dari Rp. 1.000.000,- dikenakan PPh Ps. 23 sebesar 2%, (dilampiri SSP PPh Psl. 23 yang distempel toko).
- Setiap pembelian jasa/sewa lebih dari Rp. 1.000.000,- dikenakan PPN sebesar 10 % dari DPP dan PPh pasal 23 sebesar 2% dari DPP (dilampiri Faktur Pajak, SSP PPN; SSP PPh Psl. 23 yang distempel toko)

- Khusus pembelian Komsumsi/Jasa catering berapapun nilainya dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2% dan tidak dikenakan PPN (dilampiri SSP PPh Psl. 23 yang menggunakan NPWP toko dan distempel toko)

Contoh: perhitungan Konsumsi,

- Apabila menggunakan kuitansi atas nama rumah makan A, maka perhitungan pajaknya: (untuk konsumsi: nilai kuitansi 0–2 juta=tidak dikenai pajak, sedangkan nilai kuitansi diatas 2 juta dikenai PPH) PPh Psl. 22 NPWP rumah makan=nilai transaksi x 1,5%
- Catering, apabila menggunakan kuitansi atas nama catering A, maka perhitungan pajaknya (berapapun nilainya kena PPh pasal 23), PPh ps. 23 NPWP catering = nilai transaksi x 2 %. (Lamp. Kep Dirjen Pendis Nomor 7211 Tahun 2017).

#### **b. Pagu Pengeluaran/Penggunaan Biaya Penelitian**

Atas dasar beberapa peraturan dan ketentuan di atas, Laporan keuangan penelitian “Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi kebijakan SKPI: Studi di lingkungan PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten”, merupakan kewajiban pertanggungjawaban tim peneliti atas amanah Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor B. 061.D/ Un.05/V.2/Kp.02.3/05/2017. tanggal 19 April 2017. tentang Dosen-dosen yang mendapat pembiayaan terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi. Di tindaklajuti dengan Surat Perjanjian Kerja Penelitian No. B 113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/ 2018, tanggal 21 Maret 2018. Dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Ketua Tim penelitian “Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi kebijakan SKPI: Studi di lingkungan PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten”, tanggal 21 Maret 2018. Maka pengeluaran biaya/biaya yang harus dipertanggungjawabkan tim, mengacu pada rencana pengeluaran biaya, tampak pada tabel 3.6, berikut:



**Tabel 4.7**  
**Rencana Penggunaan Biaya Kegiatan Penelitian**

Jenis Kegiatan	Vol/Frek/Satuan			Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
	Vol	Frek	Sat		
<b>A. Pra Kegiatan</b>					
ATK	1	1	PK	503,000	503,000
Foto Copy ref &ref	1	1	PK	707,500	707,500
Konsumsi NS/Peserta	12	1	OA	45,000	540,000
Honor Narasumber Rapat	3	1	JPL	500,000	1,500,000
Uang Saku Peserta Rapat	7	1	OJ	150,000	1,050,000
<b>Sub Total A</b>					<b>4,300,500</b>
<b>B. Pelaksanaan Kegiatan</b>					
<b>1. Alat Bahan</b>					
ATK	1	1	PK	800,500	800,500
Foto Copy ref &kel adm	1	1	PK	816,500	816,500
Konsumsi NS/Peserta	12	1	OA	45,000	540,000
<b>2. Biaya Perjalanan</b>					
Uang Harian	37	2	OH	430,000	31,820,000
Tiket PP	27	2	O/P	210,000	11,340,000
Penginepan	13	2	OH	120,000	3,120,000
<b>3. Jasa Profesi</b>					
Tenaga Pembantu	7	24	OH	80,000	13,440,000
Honor Narasumber	3	1	JPL	500,000	1,500,000
Transfort Peserta Rapat	1	7	OJ	150,000	1,050,000
Pengolah Data	1	1	PK	1,500,000	1,500,000
<b>Sub Total B</b>					<b>65,927,000</b>
<b>C. Pasca Pelaksanaan</b>					
<b>1. Alat Bahan</b>					
ATK	1	1	PK	515,000	515,000
Foto Copy &kel adm	1	1	PK	867,500	867,500
Konsumsi NS/Peserta	12	1	OA	45,000	540,000
Transport Lokal	2	1	PK	150,000	300,000
<b>2. Jasa Profesi</b>					
Honor Narasumber	3	1	JPL	500,000	1,500,000
Transfort Peserta	7	1	OJ	150,000	1,050,000
<b>Sub Total C</b>					<b>4,772,500</b>
<b>TOTAL BIAYA</b>					<b>75,000,000</b>

Bandung, 22 Maret 2018  
Ketua Tim Peneliti,  
ttd,  
**Dr.H.A. Rusdiana, MM**  
NIP. 196104211986021001

### c. Realisasi Pengeluaran Biaaya Biaya Penelitian

Realisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan (KBBI Daring) adalah proses menjadikan nyata; perwujudan; wujud;kenyataan; pelaksanaan yang nyata. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:21) “realisasi adalah suatu proses untuk menjadikan sesuatu rencana menjadi perwujudan yang nyata”.

Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi adalah proses agar yang direncanakan menjadi sesuai dengan kenyataan. Dibidang akuntansi realisasi bermakna “uang” yaitu konversi dari aktiva, barang dan jasa menjadi *cash* atau piutang (receivable) yang melalui tahapan penjualan.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pengertian realisasi adalah semua tindakan atau proses untuk mewujudkan apa yang sudah direncanakan. Dimulai dari cita-cita sehingga seseorang dapat menetapkan target yang ingin dicapai dengan batas waktu tertentu, kemudian dibuat rencana untuk mewujudkannya, kemudian baru rencana tersebut direalisasikan atau dilaksanakan dalam bentuk tindakan nyata.

Setelah selesai kemudian dilakukan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai, apakah sudah sesuai dengan target atau tidak. Dalam melakukan evaluasi digunakan alat ukur baik alat ukur kualitatif maupun kuantitatif sehinggadiketahui hasil yang pasti mengenai pencapaian yang telah diraih. Dari hasil yang jelas dan terukur inilah kita dapat mengetahui seberapa berhasil realisasi dari rencana yang telah dibuat.

Realisasi pengeluaran keuangan Penelitian, merupakan tagihan atas realisasi fisik dan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian yang berhubungan dengan segala aktivitas kontruksi dan proyeksi dana keuangan di masa mendatang sesuai dengan alokasi dananya.

Target pencapaian penelitian meliputi *output* dan *outcome*. Laporan *output* dicantumkan dalam kontrak penelitian meliputi

*log book* penelitian, laporan keuangan, sertifikat HKI (Hak Kekayaan Intelektual), buku hasil penelitian, dan draft artikel/paper hasil penelitian. Laporan output dapat berupa potensi luaran lainnya, seperti bahan ajar, modul, model, TTG, poster, kebijakan, rekayasa sosial, *prototype*, dan lain-lain. Adapun laporan outcome berupa publikasi ilmiah paper hasil penelitian pada jurnal nasional atau jurnal internasional. Laporan *outcome* dapat ditingkatkan secara lebih produktif dalam bentuk buku ber-ISBN, prosiding konferensi internasional, paten dan sebagainya.

Berdasar pada Pedoman Pengelolaan Keuangan Penelitian, Pusat Penelitian dan Penerbitan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2016. Ketentuan spesialisasi pengeluaran keuangan Penelitian, direalisasikan melalui dua tahapan yaitu pelaporan antara dan pelaporan akhir.

### **1) Laporan Keuangan Antara**

Laporan antara dimaksudkan sebagai monitoring dan evaluasi untuk inventarisasi kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Reviu laporan antara berfungsi memberikan *feed back* atau saran dan rekomendasi dalam rangkaantisipasi kendala-kendala tersebut agar pelaksanaan penelitian dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Reviu laporan antara dapat dimanfaatkan untuk mengarahkan penelitian agar terlaksana secara akuntabel, transparan, rasional, objektif, efektif, efisien, tepat guna, tepat sasaran, dan tepat waktu.

#### **(a) Cash flow realisasi anggaran 60%**

Laporan keuangan berupa *cash flow* realisasi anggaran 60% sesuai standar biaya masukan (SBM) Tahun 2018. Laporan keuangan disertai dengan lampiran kelengkapan berkas, seperti Surat Izin, SPPD, nominatif, kwitansi (invoice), dan lain-lain. Sekaligus juga peneliti agar menyampaikan rancangan estimasi realisasi anggaran penelitian 40%, tampak pada tabel 3.7, berikut:

**Tabel 4.8**  
**Cash flow Realisasi Anggaran 60%**  
**Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi kebijakan SKPI**

No	MAK	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	PPH
		Diterima Dana Kegiatan	45,000,000			
<b>A</b>	<b>Pra Penelitian</b>			<b>4,390,500</b>		
1	521211	Belanja Bahan		1,840,500	40,609,500	
2	524111	Belanja Perjalanan dalam kota		-	-	
3	522151	Belanja Jasa Profesi		2,550,000	-	93,250
<b>B</b>	<b>Pelaksanaan Penelitian</b>			<b>36,844,500</b>		
1	521211	Belanja Bahan		1,910,500	3,765,000	
2	524111	Belanja Perjalanan dalam kota		-	-	
3	524114	Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota		-	-	
4	522151	Belanja Jasa Profesi		2,550,000	-	293,250
5	524111	Belanja Perjalanan dalam Negeri/Luar Kota		32,384,000	-	
<b>C</b>	<b>Pasca Pelaksanaan Penelitian</b>			<b>4,069,000</b>		
1	521211	Belanja Bahan			-	
2	524111	Belanja Perjalanan dalam kota			-	
3	522151	Belanja Jasa Profesi			-	
4	524111	Belanja Perjalanan dalam Negeri/Luar Kota			-	
		<b>Jumlah</b>	<b>45,000,000</b>	<b>41,235,000</b>	<b>3,765,000</b>	<b>586,500</b>

**Keterangan:**

Biaya berdasar SPK      **75.000.000**

Termen I 60%              **45.000.000**

Sisa Termen II 40%      **30.000.000**

Bandung, 24 Maret 2018

Ketua Tim Peneliti,

ttd.,

**Dr. H.A. Rusdiana, MM**

NIP. 196104211986021001



## (b) Rekapitulasi Pengeluaran Biaya

Pengeluaran biaya penelitian 60% (tahap I) penelitian "Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi kebijakan SKPI", mengacu pada *Cash flow* Realisasi Anggaran 60%, terdiri atas belanja bahan dan belanja profesi.

### (1) Pengeluaran Biaya Pra Penelitian/Persiapan

Kegiatan pra penelitian/persiapan dilakukan sejak tanggal 22 Maret sd 12 April 2018, dengan biaya pengeluaran tampak pada tabel 3. 8, berikut:

**Tabel 4. 9**  
**Rekapitulasi Biaya Persiapan Penelitian**

No	Tanggal	Uraian Pengeluaran Kegiatan	Volume	Jumlah (Rp)
1	22 Maret 2018	Pembelian ATK dari Toko Buku dan ATK "NURJAYA" Ujungberung	1 Pkt	503,000
2	22 Maret 2018	Penggandaan Bahan rujukan dan Pembahasan Desain dan IPD dari Foto Copy "LATANSA" Cipadung	1 Pkt	707,500
3	11 April 2018	Pembelian ATK dari Toko Buku ATK "NURJAYA" Ujungberung	1 Pkt	975,500
4	11 April 2018	Penggandaan Bahan Pembahasan Desain dan IPD dari Foto Copy "LATANSA" Cipadung	1 Pkt	305,000
5	12 April 2018	Pembelian Konsumsi Rapat Pembahasan Desain dan IPD Penelitian dari Warung Nasi "TRESNA" Cibiru-Bandung	1 Pkt	630,000
6	12 April 2018	Honorarium Pembahas Desain dan IPD Penelitian	3 Org	1,500,000
7	12 April 2018	Uang Saku Peserta Rapat Pembahas Desain dan IPD Penelitian	7 Org	1,050,000
<b>Jumlah Biaya</b>				<b>5,671,000</b>

Ket: SPJ lengkap terlampir pada Lampiran 3

### (2) Pengeluaran Biaya Pelaksanaan Penelitian

Kegiatan pelaksanaan penelitian (termasuk dalam laporan antara/60%) dilakukan sejak tanggal 19 April sd 21 Juni 2018, dengan biaya pengeluaran tampak pada tabel 3. 9, berikut:

**Tabel 4.10**  
**Rekapitulasi Biaya Persiapan Penelitian**

No	Tanggal	Uraian Pengeluaran Kegiatan	Volume		Jumlah (Rp)
1	19 April 2018	Biaya perjalanan dinas 2 orang untuk kegiatan Observasi ke 24 Lokasi Penelitian	1	Pkt	8.785,000
2	07 Mei 2018	Biaya perjalanan dinas 2 orang untuk kegiatan Penyebaran IPD ke 24 Lokasi Penelitian	1	Pkt	8.785,000
3	06 Juni 2018	Biaya perjalanan dinas 2 orang untuk kegiatan Penyebaran IPD ke 24 Lokasi Penelitian	1	Pkt	14.814.000
4	.21Juni 2018	Pembelian Konsumsi Rapat Pembahasan draft laporan antara Warung Nasi "TRESNA" Cibiru-	1	Pkt	630,000
5	21Juni 2018	Honorarium Pembahas draft laporan antara	3	Org	1,500,000
7	21Juni 2018	Uang Saku Peserta Rapat Pembahas draft laporan antara	7	Org	1,050,000
<b>Jumlah Biaya</b>					<b>35,869,000</b>

Ket: SPJ lengkap terlampir pada Lampiran 3

Total biaya pengeluaran Laporan antara (60%), tahap I , yaitu:

-Biaya Persiapan.....	Rp. 5,671,000
-Biaya Persiapan.....	Rp. 35,869,000
<b>Total</b>	<b>Rp. 41.540,000</b>

## 2) Laporan Akhir

Laporan akhir merupakan realisasi anggaran 100% dana bantuan penelitian sesuai besaran biaya penelitian di dalam kontrak, Laporan keuangan lengkap dengan *invoice* atau kwitansi/bukti pembelanjaan mencakup uraian, satuan, *volume* dan besaran biaya berdasarkan acuan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2017.

### (a) *Cash flow* Realisasi Anggaran 100%

Laporan Akhir keuangan (100%), sama halnya dengan laporan antara, namun *cash flow* realisasi anggaran 100% sesuai standar biaya masukan (SBM) Tahun 2018. Laporan keuangan disertai dengan lampiran kelengkapan berkas, seperti Surat Izin, SPPD, nominatif, kwitansi (*invoice*), dan lain-lain. *cash flow* realisasi anggaran 100%, tampak pada tabel 3.10, berikut:

**Tabel 4.11**  
**Cash flow Realisasi Anggaran 100%**  
**Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi kebijakan SKPI**

No	MAK	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	PPH
		Diterima Dana Kegiatan	75,000,000			
<b>A</b>	<b>Pra Penelitian</b>			<b>4,390,500</b>		
1	521211	Belanja Bahan		1,840,500	70,609,500	
2	524111	Belanja Perjalanan dalam kota		-		
3	522151	Belanja Jasa Profesi		2,550,000		280,500
<b>B</b>	<b>Pelaksanaan Penelitian</b>			<b>36,844,500</b>		
1	521211	Belanja Bahan		1,910,500	4,069,000	
2	524111	Belanja Perjalanan dalam kota		-		
3	524114	Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota				
4	522151	Belanja Jasa Profesi		17,140,000		335.500
5	524111	Belanja Perjalanan dalam Negeri/Luar Kota		47,140,000		
<b>C</b>	<b>Pasca Pelaksanaan Penelitian</b>			<b>4,069,000</b>		
1	521211	Belanja Bahan		1,519.000		
2	524111	Belanja Perjalanan dalam kota				
3	522151	Belanja Jasa Profesi		2,550,000		
4	524111	Belanja Perjalanan dalam Negeri/Luar Kota				280,500
	<b>Jumlah</b>		<b>75,000,000</b>	<b>75,000,000</b>	<b>-</b>	<b>916,500</b>

Bandung, 24 Maret 2018

Ketua Tim Peneliti,

ttd.,

**Dr. H.A. Rusdiana, MM**

NIP. 196104211986021001



## (b) Pengeluaran Biaya Pra Penelitian/Persiapan

Kegiatan penelitian dilaksanakan sejak tanggal 22 Maret sd 20 Agustus 2018, dengan biaya pengeluaran tampak pada tabel 3.8, berikut:

**Tabel 4.12**  
**Rekapitulasi Biaya Penelitian**

No	Tanggal	Uraian Pengeluaran Kegiatan	Volume		Jumlah (Rp)
1	2	3	4		5
<b>a. Pra Penelitian</b>					
1	22 Mar 2018	Pembelian ATK dari Toko Buku dan ATK "NURJAYA" Ujungberung	1	Pkt	503,000
2	22 Mar 2018	Penggandaan Bahan rujukan dan Pembahasan Desain dan IPD dari Foto Copy "LATANSA" Cipadung	1	Pkt	707,500
3	11 April 2018	Pembelian ATK dari Toko Buku ATK "NURJAYA" Ujungberung	1	Pkt	975,500
4	11 April 2018	Penggandaan Bahan Pembahasan Desain dan IPD dari Foto Copy "LATANSA" Cipadung	1	Pkt	305,000
5	12 April 2018	Pembelian Konsumsi Rapat Pembahasan Desain dan IPD Penelitian dari Warung Nasi "TRESNA" Cibiru-Bandung	1	Pkt	630,000
6	12 April 2018	Honorarium Pembahas Desain dan IPD Penelitian	3	Org	1,500,000
7	12 April 2018	Uang Saku Peserta Rapat Pembahas Desain dan IPD Penelitian	7	Org	1,050,000
<b>Jumlah Biaya</b>					<b>4,390,500</b>
<b>b. Pelaksanaan Penelitian</b>					
1	19 April 2018	Biaya perjalanan dinas 2 orang untuk kegiatan Observasi ke 24 Lokasi	1	Pkt	8.785,000
2	07 Mei 2018	Biaya perjalanan dinas 2 orang untuk kegiatan Penyebaran IPD ke 24 Lokasi	1	Pkt	8.785,000
3	06 Juni 2018	Biaya perjalanan dinas 2 orang untuk kegiatan Penyebaran IPD ke 24 Lokasi	1	Pkt	14.814.000
4	.21Juni 2018	Pembelian Konsumsi Rapat Pembahasan draft laporan antara Warung Nasi "TRESNA" Cibiru-	1	Pkt	630,000
5	21Juni 2018	Honorarium Pembahas laporan antara	3	Org	1,500,000
7	21Juni 2018	Uang Saku Peserta Rapat Pembahas draft laporan antara	7	Org	1,050,000
<b>Jumlah Biaya</b>					<b>35,869,000</b>

*Jumlah dipindahkan.....*

1	2	3	4	5	
		<i>Jumlah pindahan</i>		<b>35,869,000</b>	
8	19 April 2018	Biaya perjalanan dinas 2 orang untuk kegiatan Observasi ke 24 Lokasi Penelitian 1 hari	1	Pkt	8.785,000
9	07 Mei 2018	Biaya perjalanan dinas 2 orang untuk kegiatan Penyebaran IPD ke 24 Lokasi Penelitian selama 1 hari	1	Pkt	8.785,000
10	06 Juni 2018	Biaya perjalanan dinas 2 orang untuk kegiatan Penyebaran IPD ke 24 Lokasi Penelitian selama 2 hari	1	Pkt	14.814.000
11	.21Juni 2018	Pembelian Konsumsi Rapat Pembahasan draft laporan antara Warung Nasi "TRESNA" Cibiru-	1	Pkt	630,000
12	21Juni 2018	Honorarium Pembahas draft laporan antara	3	Org	1,500,000
13	21Juni 2018	Uang Saku Peserta Rapat Pembahas draft laporan antara	7	Org	1,050,000
12	5 Juli 1018	Biaya perjalanan dinas 2 orang untuk kegiatan Penyebaran IPD ke 24 Lokasi Penelitian selama 2 hari	1	Pkt	14.814.000
13	12 Juli 2018	Honorarium Pembantu lapangan	24	Org	13,440,000
	12 Juli 2018	Honor Pengolah Data	1	Org	1,500,000
<b>Jumlah Biaya Pasca Pelaksanaan Penelitian</b>					<b>66,540,500</b>
<b>b.</b>	<b>Pasca Pelaksanaan Penelitian/Penyelesaian</b>				
14	11 Agus 2018	Pembelian Konsumsi Rapat Pembahasan laporan antara Warung Nasi "TRESNA" Cibiru	1	Pkt	630,000
15	11 Agus 2018	Honorarium Pembahas laporan antara	3	Org	1,500,000
16	11 Agus 2018	Uang Saku Peserta Rapat Pembahas draft laporan antara	7	Org	1,050,000
17	15 Agus 2018	Penggadaan Laporan	1	Pkt	889,000
<b>Jumlah Biaya Pasca Pelaksanaan Penelitian</b>					<b>4,069,000</b>

Rekapitulasi biaya pengeluaran penelitian (100%), yaitu:

-Biaya Pra pelaksanaan..... Rp. 4,390,500,-

-Biaya Pra pelaksanaan..... Rp. 66,540,500,-

-Biaya Pasca Pelaksanaan..... Rp. 4,069.000,-

**Total Biaya Pengeluaran Rp. 75.000,000'-**

**Terbilang: Tujuh puluh Lima Juta Rupiah**

Intinya, realisasi adalah langkah penting dalam setiap

perencanaan. Betapa sering kita lihat rencana hebat yang tidak menghasilkan apa-apa karena tidak pernah direalisasikan. Atau walaupun direalisasikan akan tetapi tidak sesuai dengan rencana atau asal-asalan sehingga hasilnya sangat jauh dari yang diharapkan. Istilah realisasi digunakan dalam berbagai bidang seperti bisnis, akuntansi, pemasaran, dan lain sebagainya untuk mengetahui seberapa besar pencapaian yang telah diraih untuk kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditentukan.



## BAB VII

# MANAJMEN EVALUASI PROGRAM KEGIATAN PENELITIAN

**E**valuasi adalah suatu alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Sedangkan evaluasi program adalah aktivitas investigasi yang sistematis tentang sesuatu yang berharga dan bernilai dari suatu objek. Evaluasi program merupakan suatu proses. Secara eksplisit evaluasi mengacu pada pencapaian tujuan sedangkan secara implisit evaluasi harus membandingkan apa yang telah dicapai dari program dengan apa yang seharusnya dicapai berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

Dalam studi tentang evaluasi, banyak sekali dijumpai model-model evaluasi dengan format atau sistematika yang berbeda, sekalipun dalam beberapa model ada juga yang sama. Ada banyak model evaluasi program yang dikembangkan oleh para ahli yang dapat dipakai untuk mengevaluasi program. Model-model tersebut di antaranya : Discrepancy Model (Provus), CIPP Model (Daniel Stufflebeam' s), Responsive Evaluation Model (Robert Stake's), FormativeSumatif Evaluation Model (Michael Scriven's), Measurement Model (Edward L. Thorndike dan Robert L. Ebel), dan Goal-Free Evaluation Approach (Michael Scriven' s).

Kegiatan penilaian dalam evaluasi program tidak hanya

dilaksanakan pada akhir kegiatan program, tetapi sebaiknya dilakukan sejak awal, yaitu dari penyusunan rancangan program, pelaksanaan program dan hasil dari program tersebut. Berbagai model evaluasi tersebut dapat digunakan tergantung kepada tujuan evaluasi yang ditetapkan. Namun demikian, perlu juga diketahui bahwa keberhasilan suatu evaluasi program secara keseluruhan bukan hanya dipengaruhi penggunaan yang tepat pada sebuah model evaluasi melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor.

## **A. Pentingnya Evaluasi Program Penelitian**

### **1. Hakekat Penelitian**

Penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, yang dilakukan dengan metode-metode ilmiah. Penelitian adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah (Emzir, 2007: 3). Penelitian sebagai aktivitas keilmuan yang dilakukan karena ada kegunaan yang ingin dicapai, baik untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia maupun untuk mengembangkan ilmu pengetahuan (Hamidi, 2007:6). Menurut Soerjano Soekanto penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.

Menurut Suharsimi Arikunto (2004:1) evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Dalam evaluasi terdapat perbedaan yang mendasar dengan penelitian meskipun secara prinsip, antara kedua

kegiatan ini memiliki metode yang sama. Perbedaan tersebut terletak pada tujuan pelaksanaannya. Jika penelitian bertujuan untuk membuktikan sesuatu (prove) maka evaluasi bertujuan untuk mengembangkan (improve). Terkadang, penelitian dan evaluasi juga digabung menjadi satu frase, penelitian evaluasi. Sebagaimana disampaikan oleh Sudharsono (1994: 3) penelitian evaluasi mengandung makna pengumpulan informasi tentang hasil yang telah dicapai oleh sebuah program yang dilaksanakan secara sistematis dengan menggunakan metodologi ilmiah sehingga darinya dapat dihasilkan data yang akurat dan obyektif.

## 2. Pentingnya Evaluasi Program Penelitian

Pemahaman mengenai pengertian evaluasi program dapat berbeda-beda sesuai dengan pengertian evaluasi yang bervariasi oleh para pakar evaluasi. Pengertian evaluasi menurut Stufflebeam yang dikutip oleh Ansyar (1989) bahwa evaluasi adalah proses memperoleh dan menyajikan informasi yang berguna untuk mempertimbangkan alternatif-alternatif pengambilan keputusan. Selanjutnya The *joint committee on Standards For Educational Evaluation*(1994) , mendefinisikan bahwa evaluasi sebagai kegiatan investigasi yang sistematis tentang keberhasilan suatu tujuan.

Sedangkan Djaali, Mulyono dan Ramli (2000) mendefinisikan bahwa Evaluasi sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan standar objektif yang telah ditetapkan kemudian diambil keputusan atas obyek yang dievaluasi. Rutman and Mowbray 1983, mendefinisikan evaluasi adalah penggunaan metode ilmiah untuk menilai implementasi dan *outcomes* suatu program yang berguna untuk proses membuat keputusan.

Chelimsky (1989), mendefinisikan evaluasi adalah suatu metode penelitian yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi dan efektifitas suatu program. Wirawan (2006) Evaluasi adalah proses mengumpulkan dan menyajikan informasi mengenai objek evaluasi, menilainya

dengan standar evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Dari definisi evaluasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, selanjutnya menyajikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektifitas suatu program.

Evaluasi program adalah langkah awal dalam supervisi, yaitu mengumpulkan data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan pemberian pembinaan yang tepat pula. Evaluasi program sangat penting dan bermanfaat terutama bagi *pengambil keputusan*. Alasannya adalah dengan masukan hasil evaluasi program itulah para pengambil keputusan akan menentukan tindak lanjut dari program yang sedang atau telah dilaksanakan.

### **3. Alasan Dilaksanakannya Penelitian Evaluasi Program Penelitian**

Penelitian evaluasi program dilakukan karena beberapa alasan, diantaranya:

- a. Pemenuhan ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya,
- b. Mengukur efektivitas dan efisiensi program,
- c. Mengukur pengaruh, efek sampingan program,
- d. Akuntabilitas pelaksanaan program,
- e. Akreditasi program,
- f. Alat mengontrol pelaksanaan program,
- g. Alat komunikasi dengan stakeholder program,
- h. Keputusan mengenai program ;
  - 1) Diteruskan
  - 2) Dilaksanakan di tempat lain
  - 3) Dirubah
  - 4) Dihentikan



#### **4. Tujuan Penelitian Evaluasi Program Penelitian**

Setiap kegiatan yang dilaksanakan mempunyai tujuan tertentu, demikian juga dengan evaluasi. Menurut Suharsimi Arikunto (2004 : 13) ada dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-masing komponen. Implementasi program harus senantiasa di evaluasi untuk melihat sejauh mana program tersebut telah berhasil mencapai maksud pelaksanaan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Tanpa adanya evaluasi, program-program yang berjalan tidak akan dapat dilihat efektifitasnya. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan baru sehubungan dengan program itu tidak akan didukung oleh data. Karenanya, evaluasi program bertujuan untuk menyediakan data dan informasi serta rekomendasi bagi pengambil kebijakan (decision maker) untuk memutuskan apakah akan melanjutkan, memperbaiki atau menghentikan sebuah program.

Secara umum penelitian evaluasi program diperlukan untuk merancang, menyempurnakan dan menguji pelaksanaan suatu praktik program yang dilakukan oleh calon peneiti. Dalam suatu rancangan program baru, kegiatan memerlukan data hasil evaluasi program yang lalu untuk membantu perencanaan hingga proses kegiatan program yang baru.

Program atau kegiatan pendidikan adalah sesuatu yang dinamis, berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu dan tuntutan perubahan masyarakat (audience). Sehingga untuk mengetahui perubahan, kelayakan dan berjalanya program tersebut maka perlu diuji program tersebut. Melanjutkan program atau kegiatan yang tidak layak, hanya akan membuang – buang biaya, waktu dan tenaga saja.

Secara lebih rinci tujuan penelitian evaluatinsi program adalah:

- a. Membantu perencanaan untuk pelaksanaan program.
- b. Membantu dalam penentuan keputusan penyempurnaan atau perubahan program.
- c. Membantu dalam penentuan keputusan keberlanjutan atau penghentian program karena dipandang program tersebut tidak ada manfaatnya atau tidak dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan.
- d. Menemukan fakta-fakta dukungan dan penolakan terhadap program.

## **B. Metode Model-Model Evaluasi**

Pengertian metode, berasal dari bahasa Yunani yakni *methodos* yang dimaksud adalah cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya (Rosdy Ruslan,2003:24). Sutrisno Hadi (1987:3) mengungkapkan

Ada banyak model yang bisa digunakan dalam melakukan evaluasi program khususnya program pendidikan. Meskipun terdapat beberapa perbedaan antara model-model tersebut, tetapi secara umum model-model tersebut memiliki persamaan yaitu mengumpulkan data atau informasi obyek yang dievaluasi sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan. (Suharsimi Arikunto dan Cecep Safruddin Abdul Jabbar: 2004). Menurut Stephen Isaac dan Willian B. Michael (1984:7) model-model evaluasi dapat dikelompokkan menjadi enam yaitu:

### **1. Goal Oriented Evaluation**

Dalam model ini, seorang evaluator secara terus menerus melakukan pantauan terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian yang terus-menerus ini menilai kemajuan-kemajuan yang dicapai peserta program serta efektifitas temuan-temuan yang dicapai oleh sebuah program. Salah satu model yang bisa

mewakili model ini adalah discrepancy model yang dikembangkan oleh Provus. Model ini melihat lebih jauh tentang adanya kesenjangan (Discrepancy) yang ada dalam setiap komponen yakni apa yang seharusnya dan apa yang secara riil telah dicapai.

## **2. *Decision Oriented Evaluation***

Dalam model ini, evaluasi harus dapat memberikan landasan berupa informasi-informasi yang akurat dan obyektif bagi pengambil kebijakan untuk memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan program. Evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh stufflebeam merupakan salah satu contoh model evaluasi ini. Model CIPP merupakan salah satu model yang paling sering dipakai oleh evaluator. Model ini terdiri dari 4 komponen evaluasi sesuai dengan nama model itu sendiri yang merupakan singkatan dari Context, Input, Process dan Product.

Evaluasi konteks (context evaluation) merupakan dasar dari evaluasi yang bertujuan menyediakan alasan-alasan (rationale) dalam penentuan tujuan (Baline R. Worthern & James R Sanders : 1979) Karenanya upaya yang dilakukan evaluator dalam evaluasi konteks ini adalah memberikan gambaran dan rincian terhadap lingkungan, kebutuhan serta tujuan (goal).

Evaluasi input (input evaluation) merupakan evaluasi yang bertujuan menyediakan informasi untuk menentukan bagaimana menggunakan sumberdaya yang tersedia dalam mencapai tujuan program.

Evaluasi proses (process evaluation) diarahkan pada sejauh mana kegiatan yang direncanakan tersebut sudah dilaksanakan. Ketika sebuah program telah disetujui dan dimulai, maka dibutuhkanlah evaluasi proses dalam menyediakan umpan balik (feedback) bagi orang yang bertanggungjawab dalam melaksanakan program tersebut.

Evaluasi Produk (product evaluation) merupakan bagian terakhir dari model CIPP. Evaluasi ini bertujuan mengukur dan menginterpretasikan capaian-capaian program. Evaluasi produk menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi pada input. Dalam proses ini, evaluasi produk menyediakan informasi apakah program itu akan dilanjutkan, dimodifikasi kembali atau bahkan akan dihentikan.

### **3. *Transactional Evaluation***

Dalam model ini, evaluasi berusaha melukiskan proses sebuah program dan pandangan tentang nilai dari orang-orang yang terlibat dalam program tersebut.

### **4. *Evaluation Research***

Sebagaimana disebutkan diatas, penelitian evaluasi memfokuskan kegiatannya pada penjelasan dampak-dampak pendidikan serta mencari solusi-solusi terkait dengan strategi instruksional.

### **5. *Goal Free Evaluation***

Model yang dikembangkan oleh Michael Scriven ini yakni Goal Free Evaluation Model justru tidak memperhatikan apa yang menjadi tujuan program sebagaimana model goal oriented evaluation. Yang harus diperhatikan justru adalah bagaimana proses pelaksanaan program, dengan jalan mengidentifikasi kejadian-kejadian yang terjadi selama pelaksanaannya, baik hal-hal yang positif maupun hal-hal yang negatif.

### **6. *Adversary Evaluation***

Model ini didasarkan pada prosedur yang digunakan oleh lembaga hukum. Dalam prakteknya, model adversary terdiri atas empat tahapan yaitu:

- a. Mengungkapkan rentangan isu yang luas dengan cara melakukan survey berbagai kelompok yang terlibat dalam satu program untuk menentukan kepercayaan itu sebagai isu yang relevan.
- b. Mengurangi jumlah isu yang dapat diukur.

- c. Membentuk dua tim evaluasi yang berlawanan dan memberikan kepada mereka kesempatan untuk berargumen.
- d. Melakukan sebuah dengar pendapat yang formal. Tim evaluasi ini kemudian mengemukakan argument-argumen dan bukti sebelum mengambil keputusan.
- e. Memberikan sumbangan dalam pemahaman proses psikologis, sosial, politik, dalam pelaksanaan program serta faktor – faktor yang mempengaruhi program.
- f. Menyebarkan program, karena program tersebut sudah berhasil dengan baik maka sangat baik jika dilaksanakan lagi di tempat waktu yang lain.

### **C. Desain dan Prosedur Evaluasi Program Penelitian**

#### **1. Desain Evaluasi Proram Penelitian**

Desain evaluasi program yang menggunakan pendekatan kualitatif agak berbeda dengan desain penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dikenal banyak orang mempunyai ciri fleksibel dalam metode pengumpulan datanya dan pada saat proses berlangsung bias saja penelitinya mengembangkan datanya sejauh itu masih dalam konteks menggali informasi yang nantinya dapat digunakan untuk membangun teori baru. Sedangkan pada evaluasi program informasi apa yang akan dikumpulkan telah ditetapkan pada awal penentuan desain dan sedapat mungkin pada saat pengumpulan informasi tidak terjadi perluasan pencarian informasi dengan alasan mencari titik jenuh keputasan peneliti dalam mengumpulkan informasi (Royse, David et al, 2006).

Karakteristik lain yang ada pada penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif seperti posisi peneliti dalam konteks penelitian, unit informasi dan unit analisis, tipe informasi yang dikumpulkan, analisis data serta cara menyimpulkan juga digunakan dalam evaluasi program yang bersifat kualitatif.

Format rancangannya mencakup konteks atau pernyataan tentang apa yang mendasari perlunya dilakukan evaluasi terhadap suatu program, kemudian apa tujuan dilakukannya evaluasi program. Selanjutnya akan disepakati dahulu asumsi yang relevan, aturan-aturan dalam pengumpulan informasi serta cara pengumpulan informasi, pengorganisasian data, analisis data, serta verifikasi data (Creswell, John.W, 1994).

Pada pendekatan kualitatif, karakteristik yang menonjol adalah pada posisi evaluator dalam pelaksanaan evaluasi. Tujuan evaluasi adalah mengumpulkan informasi tentang suatu program, evaluator walaupun bukan bagian dari pelaku di dalam program, tetapi pada pendekatan kualitatif evaluator harus berada dalam program dan mempunyai aksesibilitas yang tinggi terhadap semua komponen program. Tujuan utama evaluasi program dengan pendekatan kualitatif adalah mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang suatu program di semua aspeknya (Royse, David et al, 2006).

Pendekatan ini menekankan pada mendapatkan pemahaman lebih luas dan cenderung membentuk perspektif yang tak berujung dari suatu fenomena atau kejadian tertentu. Tujuan utama digunakannya pendekatan ini adalah menemukan kekuatan dan kelemahan program dari berbagai sudut pandang. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif pertanyaan yang menjadi focus evaluasi tidak menggambarkan adanya variable, data yang dikumpulkan akan ditampilkan dalam bentuk narative, tidak terlalu mementingkan metode sampling, dan pengolahan data tidak selalu menggunakan uji statistika tertentu. Biasanya pada pengolahan data akan dipilih cara yang lebih banyak menyatakan kualitas interaksi antara satu data dengan data lainnya dalam konteks menggambarkan situasi dan kondisi pada saat fenomena tertentu muncul.

Kesimpulannyapun dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang berbentuk deskripsi sehingga orang dapat melihat suatu gambaran yang utuh tentang suatu program.

## 2. Prosedur Evaluasi Program Penelitian

Prosedur evaluasi program berdasarkan pendekatan kualitatif biasanya mulai dari mendesain, lalu menentukan sample, mengumpulkan data, kemudian dianalisis. Perbedaan yang mencolok antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif adalah prosedur dalam mengumpulkan data tidak mengikuti alur tertentu yang linier artinya pengumpulan data bisa maju dan mundur sesuai dengan kebutuhan informasi dan keperluan penelusuran untuk mendapatkan semua informasi yang diperlukan. Ada cara untuk mencegah evaluator kehilangan focus yaitu dengan menggunakan FQE (Focused Qualitative Evaluation).

Alat pengumpul data yang digunakan pada pendekatan ini bisa berupa catatan tentang kasus-kasus, pedoman wawancara, kuesioner, transkripsi rekaman suara, video, atau berupa foto, sosiogram, reka ulang, judicial review. Data yang terkumpul biasanya diberi kode dan diorganisasikan sedemikian rupa berdasarkan tingkat relevansinya dengan suatu fenomena atau peristiwa tertentu yang terjadi dalam program. Data tersebut nantinya akan dianalisis dengan cara mengelompokkan berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam program. Data akan disajikan dalam bentuk cerita yang rinci lengkap dengan analisis situasi dan perilaku orang-orang yang terlibat di dalamnya.

Evaluasi semacam ini biasanya diperlukan pada program-program tentative atau pilot project yang masih ingin dicari kekuatan dan kelemahannya. Hasil evaluasi nantinya akan digunakan untuk keperluan pengembangan program dengan cakupan yang lebih luas.

## 3. Tahapan dan Pendekatan Evaluasi Program Penelitian

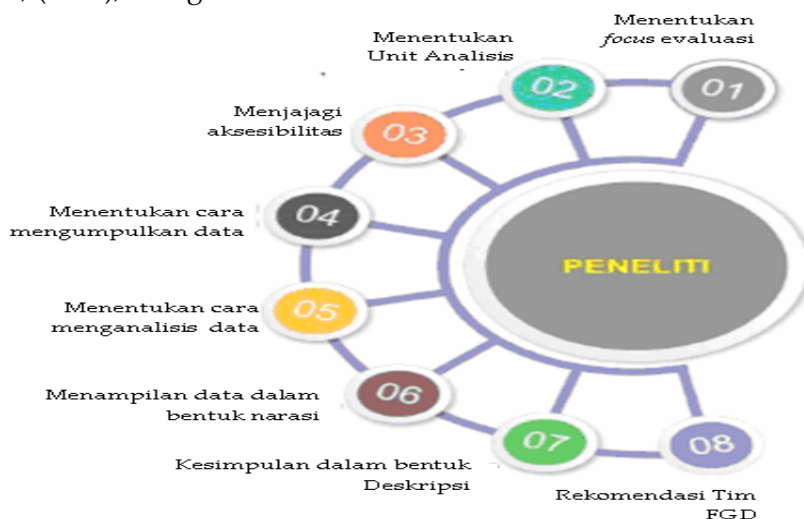
Royse, David et al, (2006), menyarankan tahap-tahap evaluasi program dengan pendekatan kualitatif secara garis besar adalah:

- a. Menentukan tujuan evaluasi, jangka waktu evaluasi, dan factor pendukung lain seperti aksesibilitas ke dalam program.
- b. Menentukan unit analisis yang merujuk kepada individu yang terlibat dalam program (panitia, peserta, penyandang

dana, pengguna output program, unsure pendukung program).

- c. Menentukan *sample*, jenis data yang akan dikumpulkan, cara menganalisis data, dan cara menyimpulkan.

Gambar 5.1, siklus prosedur evaluasi program yang menggunakan pendekatan kualitatif yang digagas Royse, David et al, (2006), sebagai berikut:



**Gambar: 7.1**  
**Siklus Prosedur Evaluasi Program Penelitian Menggunakan Pendekatan Kualitatif**

Sumber: Royse, David et al (dimodifikasi oleh penulis)

#### **D. Pelaksanaan Evaluasi Program Penelitian**

Untuk menuju akuntabilitas pelaporan penelitian Penelitian “Kesiapan PTKIS Wilayah II Jawa Barat dan Banten dalam mendukung Implementasi Kebijakan SKPI”. Kegiatan penilaian dalam evaluasi program tidak hanya dilaksanakan pada akhir kegiatan program, tetapi dilakukan sejak awal, yaitu:

##### **1. Evaluasi Penyusunan rancangan program Penelitian**

Tujuan FGD ini, dimilikinya Rekomendasi/kesepahaman dari pakar dan teman sejawat, yang memastikan Pedoman Penelitian telah valid, kredibel dan akuntabel. Dilaksanakan pada hari Kamis, 12 April 2018, gambar 5.2, berikut:



## **Notulensi Kegiatan Rapat**

### **Persiapan : Review Desain dan penyusunan IPD Penelitian**

*Kamis, 12 April 2018*

*Rapat dimulai jam 16. 30, dipimpin oleh ketua Tim peneliti Dr.H. A. Rusdiana, MM, notulis Drs. Nasihudin, M.Pd/sebagai Anggota Peneliti. Rapat ini dihadiri dua orang pembahas yaitu Dr. H. Koko Abdul Kodir, MA; Drs. H Yaya Suryana, M.Ag., dan DR. Ara Hidayat, MPd. Dan dihadiri pula oleh tujuh orang peserta undangan yaitu: Dindin Efendi, SHI; Ahmad Zaeni, S.Sos. I; Deden Ali Murtado, S.Pd.I; Zenal Mutakin; Gilang, Aditia P, ST; Muhammad Alek, S.Sos.I; Nursaadah, S.Pd.I. (daftar hadir terlampir).*

*Dalam rapat ini dibahas beberapa permasalahan Persiapan pelaksanaan: Review Desain dan penyusunan IPD Penelitian, diantaranya antara lain:*

- 1. Penentuan tanggal mulainya pengurusan izin dan survey awal ke lokasi penelitian berikut pengurusan administrasinya.*
- 2. Penentuan dan pembagian tugas siapa yang akan berangkat ke masing-masing lokasi penelitian*
- 3. Apa saja yang akan dijadikan instrumen penelitian dan bagaimana menyusunya*

*Hasil rapat merekomendasikan bahwa:*

- 1. Pengurusan izin dan survey awal ke lokasi penelitian dilaksanakan secepatnya, dan bila memungkinkan mulai besok sudah dapat kejelasan.*
- 2. Pembagian tugas yang akan berangkat ke masing-masing lokasi penelitian disesuaikan dengan kondisi kegiatan masing-masing anggota, artinya fleksibel, siapa saja yang kebetulan hari itu ada waktu, maka dia yang berangkat.*
- 3. Instrumen penelitian dibuat berdasarkan teori dan metode yang ada dan berdasarkan kepada tujuan pokok penelitian yang sudah ditentukan, sedangkan menyusun instrumen dilakukan secara berurut sesuai dengan data dan keperluan yang akan digali.*

*Pada jam 18.00. Rapat diskor selama 30 menit untuk sholat maghrib terlebih dahulu dan makan, dan setelah shalat Maghrib rapat dilanjutkan kembali. Pada jam 21.30 rapat ditutup oleh pimpinan rapat dan diakhiri dengan membaca hamdalah. Setelah itu copy break&snack.*

### **Gambar: 7.2**

#### **Notulensi Kegiatan Rapat Evaluasi Perencanaan Penelitian**

Sumber: Dokumen Peneliti

## **2. Evaluasi Program Pelaksanaan**

Tujuan FGD ini, dimilikinya Rekomendasi/kesepahaman pakar dan sejawat, yang memastikan bahwa Laporan Antara, Penelitian ini, telah valid, kredibel dan akuntabel, gambar.5.3, berikut:

**Notulensi Kegiatan Rapat  
Pembahasan Hasil Penelitian Antara**

*Kamis, 21 Juni 2018*

*Rapat dimulai jam 16. 30, dipimpin oleh ketua Tim peneliti Dr.H. A. Rusdiana, MM, notulis Drs. Nasikudin, M.Pd/sebagai Anggota Peneliti. Rapat ini dihadiri tiga orang pembahas yaitu Dr. H. Koko Abdul Kodir, MA; Drs. H Yaya Suryana, M.Ag.;Dr. Ara Hidayat, M.Pd., dan Dr.H. Syamsudin, RS, M.Ag. Dan didiri pula oleh tujuh orang peserta undangan yaitu: Dindin Efendi, SHI; Ahmad Zaeni, S.Sos. I; Deden Ali Murtado, S.Pd.I; Zenal Mutakin; Gilang, Aditia P, ST; Muhammad Alek, S.Sos.I; Nursaadah, S.Pd.I. (daftar hadir terlampir).*

*Dalam rapat ini dibahas beberapa permasalahan Penyelesaian Pelaksanaan: Pembahasan Hasil Penelitian, diantaranya antara lain :*

- 1. Penyusunan laporan penelitian: Konten penelitian secara Akademik;*
- 2. Teknik/Substansi/Sisitimatika penyusunan Laporan Penelitian;*
- 3. Administrasi, waktu penyelesaiani Laporan penelitian, Biaya dan apa saja yang harus dilaporkan berdasarkan kontrak/perjanjian penelitian*

*Hasil rapat merekomendasikan bahwa:*

- 1. Secara akademik, laporan penelitian telah dibuat berdasarkan teori dan metode, dan berdasarkan kepada tujuan pokok penelitian yang sudah ditentukan;  
-Secara teknis, sitimatiaka penyusunan laporan penelitian telah sesuai dengan manual prosesur yang dibuat oleh Pusat Penelitian dan penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung;*
- 2. Secara Administratif laporan penelitian 60 % telah diselesaikan sesuai kontrak penelitian yaitu terdiri dari:laporan antara berupa (1) Log Book Penelitian, (2) Laporan Keuangan, (3) Pendaftaran Sertifikat HKI (Hak Kekayaan Intelektual). dan (4) Draf Jurnal.*
- 3. Laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan 60 % telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.*

*Pada jam 18.00. Rapat diskor selama 30 menit untuk sholat maghrib terlebih dahulu dan makan, dan setelah shalat Maghrib rapat dilanjutkan kembali. Pada jam 21.30 rapat ditutup oleh pimpinan rapat dan diakhiri dengan membaca hamdalah. Setelah itu copy break&snack.*

**Gambar: 7.3**

**Notulensi Kegiatan Rapat Evaluasi Laporan Penelitian Antara**

Sumber: Dokumen Penelit

**3. Evaluasi pada Akhir Program Penelitian**

Tujuan FGD ini, dimilikinya: Rekomendasi/kesepahaman pakar dan sejawat, yang memastikan bahwa Laporan Peneliitian “Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat Dan Banten. Dianggap telah valid, kredibel dan dapat dipertanggung

jawabkan secara ilmiah maupun administratif. Dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2018. Gambar. 5.4, berikut:

### **Notulensi Kegiatan Rapat**

#### **Penyelaksanaan Pelaksanaan: Pembahasan Hasil Penelitian**

*Sabtu, 11 Agustus 2018*

*Rapat dimulai jam 16.30, dipimpin oleh ketua Tim peneliti Dr.H. A. Rusdiana, MM, notulis Drs. Nasikudin, M.Pd/sebagai Anggota Peneliti. Rapat ini dihadiri tiga orang pembahas yaitu Dr. H. Koko Abdul Kodir, MA; Drs. H Yaya Suryana, M.Ag.;Dr. Ara Hidayat, M.Pd., dan Dr.H. Syamsudin, RS, M.Ag. Dan didiri pula oleh tujuh orang peserta undangan yaitu: Dindin Efendi, SHI; Ahmad Zaeni, S.Sos. I; Deden Ali Murtado, S.Pd.I; Zenal Mutakin; Gilang, Aditia P, ST; Muhammad Alek, S.Sos.I; Nursaadah, S.Pd.I. (daftar hadir terlampir).*

*Dalam rapat ini dibahas beberapa permasalahan Penyelaksanaan Pelaksanaan: Pembahasan Hasil Penelitian, diantaranya antara lain :*

- 1. Penyusunan laporan penelitian: Konten penelitian secara Akademik;*
- 2. Teknik/Substansi/Sisitimatika penyusunan Laporan Penelitian;*
- 3. Administrasi, waktu penyelesaian Laporan penelitian, dan apa saja yang harus dilaporkan berdasarkan kontrak/perjanjian penelitian*

*Hasil rapat merekomendasikan bahwa:*

- 1. Secara akademik, laporan penelitian telah dibuat berdasarkan teori dan metode, dan berdasarkan kepada tujuan pokok penelitian yang sudah ditentukan;  
-Secara teknis, sitimatiaka penyusunan laporan penelitian telah sesuai dengan manual prosesur yang dibuat oleh Pusat Penelitian dan penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung;*
- 2. Secara Administratif laporan penelitian telah diselesaikan sesuai kontrak penelitian yaitu terdiri dari: (1) Laporan penelitian format A-4 terdiri dari 226 halaman pokok (dan dilengkapi dengan lampiran, sebanyak 20 halaman); (2) executive summary (uk. B-5), sebanyak 28 halaman pokok; (3) Dummy Buku (B5), terdiri dari 223 halaman pokok.*
- 3. Laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.*

*Pada jam 18.00. Rapat diskor selama 30 menit untuk sholat maghrib terlebih dahulu dan makan, dan setelah shalat Maghrib rapat dilanjutkan kembali. Pada jam 21.30 rapat ditutup oleh pimpinan rapat dan diakhiri dengan membaca hamdalah. Setelah itu copy break&snack.*

### **Gambar: 7.4**

#### **Notulensi Kegiatan Rapat Evaluasi Laporan Penelitian Antara**

Sumber: Dokumen Penelit

Kegiatan penilaian dalam evaluasi program tidak hanya dilaksanakan pada akhir kegiatan program, tetapi sebaiknya dilakukan sejak awal, yaitu dari penyusunan rancangan program, pelaksanaan program dan hasil dari program tersebut. Penilaian hasil program tidak cukup hanya pada hasil jangka

pendek (output) tetapi dapat menjangkau hasil dalam jangka panjang (outcome and impact program). Berbagai model evaluasi tersebut dapat digunakan tergantung kepada tujuan evaluasi yang ditetapkan. Namun demikian, perlu juga diketahui bahwa keberhasilan suatu evaluasi program secara keseluruhan bukan hanya dipengaruhi penggunaan yang tepat pada sebuah model evaluasi melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor.

## **BAB VIII**

### **LAPORAN**

### **PERTANGUNGJAWABAN PENELITIAN**

**L**aporan Pertanggung Jawaban (LPJ) adalah salah satu kegiatan pelaporan seluruh kegiatan yang telah terlaksana mulai dari awal hingga selesainya kegiatan. hal hal yang biasanya dilaporkan mulai dari kendala, cara mengatasi hingga dana anggaran yang telah digunakan. terkadang didalam organisasi LPJ dijadikan ajang perdebatan, argumen pro dengan kontra yang saling berselisih sehingga tak jarang LPJ yang dilaporkan harus diterima secara Bersyarat.

Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) adalah puncak kesuksesan. Suatu kegiatan yang terlaksana dikatakan sukses jika telah melewati proses LPJ, bukan semerta-merta selesainya kegiatan dikatakan sukses. Selain LPJ suksesnya kegiatan dilihat dari selesainya semua kendala, tidak adanya panitia yang saling cekcok, pinjam uang yang belum dibayar.

Pembuatan LPJ juga harus segera dibuat oleh penerima mandat/pelaksana setelah kegiatan kerana masih panasnya kegiatan yang terlaksana. Laporan pertanggung-jawaban atau laporan kegiatan atau adalah suatu ikhtisar tentang hal ikhwal pelaksana suatu kegiatan yang harus disampaikan oleh penerima mandat kepada pihak yang memberi tugas sebagai pertanggungjawaban kegiatan yang berlangsung. Selain itu, laporan pertanggungjawaban juga memiliki definisi sebagai suatu dokumen tertulis yang disusun dengan tujuan memberikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan dari suatu unit organisasi kepada unit organisasi yang lebih tinggi derajatnya. Hal demikian, dalam konteks ekonomi disebut akuntansi pertanggungjawaban.

## **A. Konsep Dasar Laporan Pertanggungjawaban**

### **1. Memahami Esensi makna Laporan dan Pelaporan**

#### **a. Makna Laporan**

Laporan merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban atas suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan. Berikut ini merupakan pengertian laporan yang disampaikan oleh beberapa ahli. Menurut Keraf (2001: 284), laporan adalah suatu cara komunikasi di mana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

Menurut Mulyadi (2008: 5), menuliskan, laporan adalah keluaran sistem informasi akuntansi dan berbentuk hasil cetak komputer dan tayangan pada layar monitor komputer. Menurut Rama dan Jones (2008: 250), berpendapat, laporan adalah presentasi data yang telah terformat dan terorganisasi dengan baik.

Dapat disimpulkan bahwa laporan adalah dokumen yang terbentuk dari data yang ada pada database yang telah terformat dan terorganisir dengan baik sehingga dapat digunakan untuk mendapatkan informasi.

#### **b. Makna Pelaporan**

Adapun makna “pelaporan” memiliki satu (1) arti. Pelaporan berasal dari kata dasar lapor. Pelaporan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pelaporan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. (KBI, 2008). Arti, “pelaporan” berarti proses, cara, perbuatan melaporkan. *reporting* (pelaporan) menurut Luther M. Gullick dalam bukunya *Papers on the Science of Administration*, merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi. baik secara lisan maupun tertulis

sehingga dalam penerimaan laporan dapat memperoleh gambaran bagaimana pelaksanaan tugas orang yang member laporan. Selain itu, pelaporan merupakan catatan yg memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu (Siagian, 2003: 77).

### **c. Perbedaan antara Makna Laporan dan Pelaporan**

Perbedaan laporan dan pelaporan, dapat dibedakan antara pengertian, Contoh; “Pelaporan keuangan” (bahasa Inggris: financial reporting) dan “laporan keuangan” (bahasa Inggris: financial reports). Pelaporan Keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat (misalnya penyusunan standar, badan pengawas dari pemerintah atau pasar modal, organisasi profesi, dan entitas pelapor), peraturan yang berlaku termasuk PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum atau Generally Accepted Accounting Principles/GAAP).Laporan keuangan hanyalah salah satu medium dalam penyampaian informasi. Bahkan seharusnya harus dibedakan pula antara statemen (bahasa Inggris: statement) dan laporan (bahasa Inggris: report). (Wikipedia).

Substansi, perbedaan contoh laporan keuangan dan pelaporan keuangan, antara lain:

- 1) Laporan Keuangan mencatat informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari pelaporan keuangan.
- 2) Pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan.

Adapun, laporan dibuat oleh semua personal yang mendapat tugas dari atasan. Laporan bukan merupakan monopoli para atasan saja. Karena atasan harus membuat laporan kepada atasannya lagi. Laporan yang disampaikan

kepada atasan tidak harus berupa uraian lengkap seperti memorandum akhir jabatan, atau tidak juga seperti laporan penelitian yang wujudnya tebal dengan sistematika baku, tetapi dapat disusun mulai dari bentuk yang paling sederhana sampai yang paling lengkap.

#### **d. Penegasan Makna Pelaporan**

Ada, beberapa hal yang dapat difahami dari substansi, pelaporan, yaitu:

- 1) Pelaporan, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bawahan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu.
- 2) Pelaporan dilakukan kepada atasan kepada siapa bawahan tersebut bertanggung jawab. Pelaporan adalah aktivitas yang berlawanan arah dari pengawasan, Jika pengawasan dilakukan oleh pihak atasan untuk mengetahui semua hal yang menyangkut pelaksanaan kerja bawahan, maka pelaporan merupakan jawaban dari kegiatan pengawasan tersebut.
- 3) Pelaporan tidak dibawa langsung oleh atasan pada waktu mengadakan pengawasan, tetapi "diantar" oleh bawahan baik dibawa sendiri maupun dikirim.

Dalam konteks ini, tidaklah berlebihan jika penulis menempatkan laporan keuangan penelitian merupakan bagian dari kinerja pelaporan penelitian. Itulah kemudian buku ini diberi judul "Akuntabilitas Kinerja Pelaporan Penelitian".

#### **e. Pencatatan Sebagai Pertanggungjawaban**

Pelaporan tidak lepas dari pencatatan sebab sebelum diadakannya pelaporan dari bawahan kepada atasannya atau dari suatu instansi daerah ke instansi pusat haruslah dilakukan pencatatan mengenai hal yang akan dilaporkan kemudian dilakukan perekapan kemudian dilaporkan. Apabila, dalam dunia kesehatan khususnya kesehatan masyarakat pencatatan (recording) dan pelaporan (reporting) berpedoman pada sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas (SP2TP). Dalam dunia penelitian dikenal dengan *Log Book*.

Beberapa definisi pencatatan dan pelaporan, menurut



beberapa ahli antara lain: Menurut Kron dan Gray (1987:332), Pencatatan dan pelaporan adalah mengkomunikasikan secara tertulis kepada tim kesehatan lain yang memerlukan data kesehatan atau data epidemiologi secara teratur. Menurut Koziar dan Glenora ERB, (2010:112), pencatatan dan pelaporan adalah dokumen formal dan legal yang dibuat secara tertulis tentang data-data kesehatan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencatatan dan pelaporan dalam kesehatan merupakan:

- 1) Suatu kegiatan mencatat dengan berbagai alat/media tentang data kesehatan yang diperlukan sehingga terwujud tulisan yang bisa dibaca dan dipahami isinya.
- 2) Salah satu kegiatan administrasi kesehatan yang harus dikerjakan dan dipertanggungjawabkan oleh petugas kesehatan (khususnya Epidemiolog).
- 3) Kumpulan informasi kegiatan upaya pelayanan kesehatan yang berfungsi sebagai alat/sarana komunikasi yang penting antar petugas kesehatan.

Tujuan Pencatatan dan Pelaporan menurut Potter dan Perry (Sutomo, 2010; 175-80) adalah:

- 1) Komunikasi; Bertujuan sebagai alat komunikasi yang efektif antar petugas kesehatan sehingga kesinambungan informasi dan upaya pelayanan kesehatan dapat tercapai.
- 2) Pendidikan; Bertujuan sebagai informasi tentang gambaran penyakit atau masalah kesehatan dan pemecahannya.
- 3) Pengalokasian dana; Dapat digunakan untuk merencanakan tindakan dan kegiatan yang tepat dengan dana yang tersedia.
- 4) Evaluasi; Sebagai dasar untuk melakukan evaluasi terhadap hasil intervensi yang diberikan.
- 5) Dokumen yang sah; Bertujuan sebagai bukti nyata dan legal yang dapat digunakan bila didapatkan adanya penyimpangan serta bila diperlukan untuk keperluan pengadilan.
- 6) Jaminan mutu; Bertujuan agar dapat memberikan jaminan

kepada masyarakat terhadap mutu layanan kesehatan yang diberikan.

- 7) Penelitian; Bertujuan sebagai sumber data yang sangat bermanfaat untuk kepentingan penelitian atau riset.
- 8) Analisis; Bertujuan sebagai dasar analisis masalah kesehatan pada individu, keluarga maupun masyarakat.
- 9) *Feed back*; Dapat digunakan sebagai umpan balik dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Manfaat pencatatan sebagai dasar untuk pelaporan adalah sebagai berikut (Manullang, 2006: 77):

- 1) Memberi informasi tentang keadaan masalah/kegiatan.
- 2) Sebagai bukti dari suatu kegiatan/peristiwa.
- 3) Bahan proses belajar dan bahan penelitian.
- 4) Sebagai pertanggung jawaban.
- 5) Bahan pembuatan laporan.
- 6) Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
- 7) Bukti hukum.
- 8) Alat komunikasi dalam penyampaian pesan serta meningkatkan kegiatan peristiwa khusus.

## **2. Laporan Pertanggungjawaban**

### **a. Esensi Makna Laporan pertanggung jawaban**

Laporan merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban atas suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan. Pengertian laporan yang disampaikan oleh beberapa ahli, diantaranya Keraf (2001: 284), mendefinisikan "laporan" adalah suatu cara komunikasi di mana penulis/pelapor menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggungjawab yang dibebankan kepadanya.

Menurut, Soegito (Wardani, 2008: 109), Laporan berisi informasi yang didukung oleh data yang lengkap sesuai dengan fakta yang ditemukan. Data disusun sedemikian rupa sehingga akurasi informasi yang kita berikan dapat dipercaya dan mudah dipahami Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan adalah suatu bentuk penyampaian informasi yang didukung oleh data yang lengkap sesuai dengan fakta sehingga informasi yang diberikan dapat dipercaya serta mudah dipahami. Dalam penyampaiannya, laporan dapat bersifat lisan

maupun tertulis, itulah kebuidian disebut pertanggungjawaban.

#### **b. Kebijakan Laporan pertanggung jawaban**

Dalam konteks Pemerintahan, pertanggungjawaban, meupakan salah satu upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-undang No.17 tahun 2003, tentang keuangan daerah yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja Negara/anggaran pendapatan belanja daerah (APBN/APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan standard akuntansi pemerintah yang ditetapkan oleh pemerintah.

Penerbitan pedoman standar akuntansi pemerintahan (PSAP) merupakan awal masing-masing pihak untuk bersama-sama mewujudkan *good governance* melalui penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD oleh semua instansi pemerintah penggunaan anggaran baik dipusat maupun di daerah. Selama ini terdapat beberapa peraturan yang digunakan sebaga rujukan pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan.

Ketidakeragaman ini akan membuat perbedaan dalam penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah. Kondisi demikian membuat laporan keuangan pemerintah daerah tidak akan dapat memenuhi keterbandingan baik secara internal maupun eksternal. Padahal karakteristik kualitatif laporan keunangan seperti yang disampaikan kepada kerangka konseptual akuntansi pemerintah yang baru ini adalah dapat dibandingkan.

Pasal 32 ayat (1) UU 17 tahun 2003 menyatakan bahwa

bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Sedangkan pasal 184 ayat (2) dan (3) UU 32 tahun 2004 intinya menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Dari dua pasal tersebut diatas maka jelaslah pentingnya diterapkan standar akuntansi pemerintahan dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintahan daerah. Hal ini direspon pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan.

### **c. Jenis dan Unsur-unsur Laporan Pertanggungjawaban**

#### **1) Laporan formal**

Laporan Formal (Ilmiah) adalah laporan yang disusun melalui tahapan berdasarkan teoritertentu dan menggunakan metode ilmiah yang sudah disepakati oleh para ilmuwan (E.Zaenal Arifin,1993).

Dan menurut Nafron Hasjim & Amran Tasai (1992) Karangan ilmiah/ Penelitian Ilmiah, adalah tulisan yang mengandung kebenaran secara obyektif karena didukung oleh data yang benar dan disajikan dengan penalaran serta analisis yang berdasarkan metode ilmiah.

Laporan formal terdiri dari:

#### **Bagian Pendahuluan**

- Halaman judul
- Halaman pengesahan (jika perlu)
- Halaman motto / semboyan (jika perlu)
- Halaman persembahan (jika perlu)
- Kata pengantar
- Daftar isi
- Daftar tabel (jika ada)

- Daftara gambar (jika ada)
- Daftar grafik (jika ada)
- Abstrak

### **Bagian Isi**

Bab I : Pendahuluan

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Identifikasi masalah
- 1.3 Pembatasan masalah / ruang lingkup penelitian
- 1.4 Rumusan masalah
- 1.5 Tujuan dan manfaat

Bab II : Kajian pustaka

Bab III : Metode penelitian

Bab IV : Pembahasan

Bab V : Penutup

### **Bagian Penutup**

- Daftar pustaka
- Daftar lampiran
- Indeks atau daftar istilah

## **2) Laporan Non formal**

Laporan Informal adalah laporan yang ditulis secara populer, yaitu menggunakan kata-kata sederhana, kadang-kadang diselengi dengan kalimat humor/lucu, yaitu laporan yang tidak memenuhi beberapa unsur formal. Laporan ini bersifat pribadi yang disesuaikan dengan kepentingan penulisannya.

Unsur-unsur Laporan Nonformal, terdiri atas:

### **(a) Laporan kunjungan**

Laporan kunjungan, berisi:

- Judul laporan
- Tujuan
- Waktu pelaksanaan
- Hasil yang diperoleh

### **(b) Laporan percobaan**

Laporan percobaan, berisi:

- Judul percobaan

- Pelaksanaan
- Urusan kerja
- Data yang diperoleh
- Kesimpulan

### **Laporan diskusi**

Laporan diskusi, berisi:

- Topik
- Moderator
- Penyaji
- Jumlah peserta
- Masalah yang dibicarakan
- Pemecahan masalah
- Kesimpulan

## **B. Laporan Pertanggungjawaban**

### **1. Memahami Laporan Pertanggungjawaban**

Laporan pertanggungjawaban atau sering di singkat dengan LPJ adalah bagian wajib bagi organisasi baik di dalam kampus, maupun luar kampus ketika selesai menjalankan program ataupun event. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) di buat sebagai bentuk pertanggung jawaban legal dan tertulis oleh atas pelaksanaan kegiatan. Di mana di dalamnya terdapat beberapa pokok laporan seperti arus keluar masuk keuangan, agenda yang di laksanakan dan pencapaian dari kegiatan tersebut. Hal demikian dalam bahasa ekomi disebut juga akuntansi pertanggungjawaban (Mulyadi 2001: 218).

Akuntansi pertanggungjawaban didasarkan pada pemikiran bahwa seorang manajer harus dibebani tanggung jawab atas kinerjanya sendiri dan kinerja bawahannya. Konsep akuntansi pertanggungjawaban menjadi pedoman departemen akuntansi untuk mengumpulkan, mengukur dan melaporkan kinerja sesungguhnya, kinerja yang diharapkan dan selisih yang timbul dalam setiap pertanggungjawaban. Akuntansi Pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi, dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggungjawab atas penyimpangan biaya dan pendapatan yang dianggarkan

Mulyadi (2001: 218). Definisi tersebut mengatakan bahwa akuntansi pertanggungjawaban mengelompokkan organisasi atas pusat-pusat pertanggungjawaban, sehingga apabila terjadi penyimpangan atas anggaran, maka pihak manajemen dapat mencari orang yang bertanggungjawab atas penyimpangan yang terjadi.

Akuntansi pertanggungjawaban muncul sebagai akibat dari adanya pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang adalah pemberian wewenang oleh manajer lebih atas kepada manajer yang lebih rendah untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan otoritas secara eksplisit dari manajer pemberi wewenang pada waktu wewenang tersebut akan dilaksanakan. Menurut Trisnawati (2006: 5), ada tiga alasan mengapa manajer mendelegasikan wewenangnya, yaitu: (1) banyaknya pekerjaan seorang manajer sehingga tidak mungkin dikerjakan oleh manajer tersebut; (2) mengikutsertakan bawahan serta memberikan kesempatan dalam menunjukkan prestasinya di perusahaan; dan (3) perlunya orang-orang untuk menggantikannya apabila manajer tidak berada dalam perusahaan.

## **2. Tujuan Laporan Pertanggungjawaban**

Dari beberapa pendapat di atas dapat memberi pembelajaran bahwa pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan oleh para dosen UIN SGD Bandung merupakan wujud pendelegasian wewenang Rektor UIN SGD, melalui Surat Keputusan Nomor B. 061.D/Un.05/V.2/ Kp.02.3/05/2017, tanggal 19 April 2017. tentang Dosen-dosen yang mendapat pembiayaan terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi. Ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Kerja Penelitian No. B 113/Un.05/V.2/ PP.00.9/03/2018, tanggal 21 Maret 2018.

Atas dasar beberapa peraturan dan ketentuan di atas, Laporan pertanggungjawaban kegiatan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi kebijakan SKPI: Studi di lingkungan PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten", merupakan kewajiban pertanggungjawaban tim peneliti atas amanah Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor B. 061.D/ Un.05/V.2/Kp.02.3/05/2017. tanggal 19

April 2017. tentang Dosen-dosen yang mendapat pembiayaan terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi. Di tindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Kerja Penelitian No. B 113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018, tanggal 21 Maret 2018. Dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Ketua Tim penelitian "Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi kebijakan SKPI: Studi di lingkungan PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten", tanggal 21 Maret 2018.

### **3. Dasar pertanggungjawaban Penelitian**

Pertanggungjawabab kegiatan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi kebijakan SKPI: Studi di lingkungan PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten", berpijak pada ketentuan dan Dasar Hukum yang ditetapkan, Puslit, sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2018 tentang Perubahan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7211 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018;
- c. Keputusan Senat UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor
- d. Un.05/Snp./Kp.07.6/018 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Publikasi Ilmiah;
- e. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor 004/Un.05./V.2/Kp.02.3/01/2017 tentang Pedoman Penelitian dan Publikasi Ilmiah;
- f. Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor B. 061.D/ Un.05/V.2/Kp.02.3/05/2017. tanggal 19 April 2017. tentang Dosen-dosen yang mendapat pembiayaan terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi;
- g. Surat Perjanjian Kerja Penelitian No. B 113/ Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018, tanggal 21 Maret 2018.

### **4. Waktu Pertanggungjawaban Penelitian**

Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan



Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018; Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7211 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018.

#### **5. Saknsi Pertanggung Jawaban Penelitian**

Baedaras pada Surat Perjanjian Kerja Penelitian No. B 113/Un.05/V.2/PP.00.9/ 03/2018, tanggal 21 Maret **Pasal 15: INGKAR JANJI (WANPRESTASI)**, ditentukan sbb:

1. PIHAK KEDUA yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan maka akan dinyatakan gugur oleh PIHAK PERTAMA dalam pengusulan pendanaan penelitian;
2. Apabila PIHAK KEDUA ingkar janji (*wanprestasi*) menyangkut keterlambatan penyerahan laporan *output* penelitian setelah batas akhir masa kontrak yang telah ditetapkan, maka PIHAK PERTAMA mengenakan sanksi bahwa peneliti atau kelompok peneliti tidak boleh mengajukan pendanaan penelitian pada kegiatan penelitian tahun berikutnya;
3. PIHAK KEDUA yang telah ditetapkan sebagai penerima dana penelitian yang tidak menyerahkan laporan *output* penelitian sebagian atau seluruh satuan laporan *output* penelitian melampaui tahun anggaran berjalan maka harus mengembalikan dana penelitian yang diberikan dan tidak dapat mengakses dana penelitian tahun selanjutnya;
4. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaporkan tagihan *outcome* publikasi paper hasil penelitian pada masa waktu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya masa kontrak, maka PIHAK PERTAMA mengunci peneliti atau kelompok peneliti yang bersangkutan tidak dapat mengakses sistem pendanaan penelitian selama 5 (lima) tahun berturut-turut sampai dipenuhinya tagihan *outcome* penelitian tersebut yang berupa publikasi hasil penelitian sesuai sasaran jurnal yang ditetapkan dalam pedoman penelitian dan publikasi ilmiah

yang dikeluarkan oleh LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

### **C. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban**

#### **1. Pengenalan Dasar Penyusunan LPJ**

Akhir dari suatu kegiatan bukan berarti akhir dari kerja atau tanggung jawab panitia/tim pelaksana kegiatan tersebut. Dengan pemikiran bahwa berakhirnya kegiatan berarti berakhir pula semua beban bagi panitia/Tim, adalah pemikiran yang tidak profesional dan tidak bertanggung jawab. Langkah ideal yang seharusnya dilakukan panitia/tim pelaksana setelah berakhirnya suatu kegiatan adalah melakukan evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan tersebut telah mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan serta mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada. Kemudian hasil evaluasi ini dituangkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kegiatan.

Laporan pertanggungjawaban merupakan laporan-laporan yang menerangkan hasil dari aplikasi konsep akuntansi pertanggung jawaban. Laporan pertanggungjawaban berguna sebagai bahan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil yang dapat dicapai dari kegiatan tersebut, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perbaikan-perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang.

Di dalam pengumpulan atau pelaporan pendapatan atau biaya, tiap bidang pertanggungjawaban harus dipisahkan antara pendapatan/biaya terkendali dan pendapatan/biaya tidak terkendali. Maka dari itu Laporan Pertanggungjawaban Penelitian menjadi kewajiban Tim Peneliti., Sebagaimana ketentuan pada Surat Perjanjian Kerja Penelitian No. B 113/ Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018, tanggal 21 Maret Pasal 14 Pertanggungjawaban, ayat (1) Segala jenis laporan penelitian, baik laporan substansi akademik maupun laporan non-akademik administrasi penggunaan biaya penelitian merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA. Kemudian ayat (2) Jika di kemudian hari dilakukan pemeriksaan dan audit terhadap laporan penelitian oleh lembaga yang berwenang baik pemeriksa internal maupun

pemeriksa eksternal dan terdapat temuan yang tidak wajar, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

## **2. Tujuan dan Isi Penyusunan**

Secara umum, tujuan dari laporan pertanggungjawaban adalah untuk memberikan informasi kepada para pemimpin tentang hasil-hasil pelaksanaan sesuai pekerjaan yang beradadalam lingkup tanggung jawabnya dan memberikan motivasi kepada manajer untuk mengambil suatu tindakan dalam upaya meningkatkan hasil.

Secara khusus tujuan dari penyusunan pembuatan LPJ ini adalah:

- a. Sebagai pengukur kemampuan serta untuk mempertanggung jawabkan hasil kerja pelaksana;
- b. Menjelaskan secara rinci kronologis kegiatan, pra kegiatan, saat pelaksanaan dan akhir pelaksanaan;
- c. Mengetahui kendala-kendala serta kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh pelaksana;
- d. Menjadi masukan atau saran untuk pelaksana kegiatan berikutnya agar dapat meningkatkan kualitas kegiatan serta tidak mengulangi kesalahan, kekurangan yang pernah dilakukan;
- e. Mempertanggung jawabkan keuangan kegiatan sehingga dana masuk dan keluar dapat diketahui secara rinci.
- f. Sebagai bukti bahwa Kegiatan penelitian ini dianggap akuntabel.

Adapun isi laporan pertanggungjawaban harus sesuai dengan tingkatan manajemen yang akan menerimanya. Laporan pertanggungjawaban harus mencantumkan semua pendapatan/biaya yang sesungguhnya diterima disertai dengan jumlah pendapatan/biaya yang di anggarkan. Selisih anggaran dapat menguntungkan ataupun merugikan. Namun tidak semua selisih yang merugikan harus diperhatikan karena waktu yang dimiliki terbatas.

Agar tujuan pertanggungjawaban tercapai, maka harus diperhatikan lima prinsip dasar membuat laporan, menurut Wilson dan Campbell (2007:550) diterjemahkan oleh Tjintin F. Tjandra, adalah sebagai berikut: (a) harus diterapkan konsep “pertanggungjawaban” (b) sedapat mungkin harus diterapkan

prinsip-prinsip “pengecualian” (c) secara umum angka-angka harus dapat dipertimbangkan; (d) sejauh yang dilaksanakan, data harus semakin ringkas untuk jenjang pemimpin yang semakin tinggi; (e) laporan-laporan pada umumnya harus mencakup komentar-komentar interpretatif atau jelas dengan sendirinya.

Kelima prinsip diatas merupakan suatu sistem pelaporan yang baik. Selain itu ada berbagai faktor lain yang dapat membantu untuk membuat tanggapan dan pembaca laporan lebih baik menurut Wilson dan Campbell (2007:550), menyaran, bahwa: (a) laporan harus tepat waktu; (b) laporan harus sederhana dan jelas; (c) laporan harus dinyatakan dalam bahasa dan istilah yang dikenal oleh pimpinan yang akan memakainya; (d) informasi harus disajikan dalam urutan yang logis; (e) laporan harus akurat; (f) bentuk penyajian harus disesuaikan dengan pimpinan yang akan menggunakannya; (g) selalu distandarisasikan, apabila mungkin; (h) rancangan laporan harus mencerminkan sudut pandang pimpinan; (i) laporan harus berguna; (j) biaya penyiapan laporan harus dipertimbangkan; dan (k) perhatian yang diberikan untuk penyiapan laporan harus sebanding dengan manfaatnya.

### **3. Substansi Laporan Pertanggung Jawaban Penelitian**

Secara teknis pertanggungjawaban penelitian Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi kebijakan SKPI: Studi di lingkungan PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten”, diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Penelitian No. B 113/Un.05/V.2/ PP.00.9/03/2018, tanggal 21 Maret 2018. Pasal 14, tentang PERTANGGUNGJAWABAN. , pada ayat 1 dan 2.

Ayat: 1 “Segala jenis laporan penelitian, baik laporan substansi akademik maupun laporan non-akademik administrasi penggunaan biaya penelitian merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA.”

Ayat: 2 “Jika di kemudian hari dilakukan pemeriksaan dan audit terhadap laporan penelitian oleh lembaga yang berwenang baik pemeriksa internal maupun pemeriksa eksternal dan terdapat temuan yang tidak wajar, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA”.

Bersarkan ayat 1 di atas, bahwa pertanggungjawaban

kegiatan penelitian terdiri atas “laporan substansi akademik maupun laporan non-akademik administrasi penggunaan biaya penelitian” Dengan demikian jenis pertanggungjawaban penelitian

#### **a. Laporan Substansi Akademik**

Yang dimaksud Laporan Substansi Akademik, yaitu Laporan Ilmiah adalah laporan yang disusun melalui tahapan berdasarkan teori tertentu dan menggunakan metode ilmiah yang sudah disepakati oleh para ilmuwan (E.Zaenal Arifin,1993). Dan menurut Nafron Hasjim & Amran Tasai (1992) Karangan ilmiah adalah tulisan yang mengandung kebenaran secara obyektif karena didukung oleh data yang benar dan disajikan dengan penalaran serta analisis yang berdasarkan metode ilmiah.

Penyusunan laporan akademik penelitian ditentukan berdasar pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7211 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018.

#### **b. Laporan Non Akademik/administrasi penggunaan biaya penelitian**

Yang dimaksud Laporan non akademik, yaitu “Laporan Teknis”. Laporan tentang hal teknis penyelenggaraan kegiatan suatu badan atau instansi. Laporan teknis mengandung data obyektif tentang sesuatu.data obyektif dalam laporan teknis itu juga mengandung sifat ilmiah, tetapi segi kepraktisannya lebih menonjol.sehingga yang dimaksud dengan laporan teknis adalah suatu pemberitahuan tentang tanggung jawab yang dipercayakan,dari si pelapor (perseorangan, tim, badan, atau instansi) kepada si penerima laporan tentang teknis penyelenggaraan suatu kegiatan (E.Zaenal Arifin,1993). Dan menurut Muljanto Sumardi (1982) Dalam laporan teknik

manusia menggunakan bahasa tulis untuk mengkomunikasikan gagasan, paham, serta hasil pemikiran dan penelitian.

Kewajiban pertanggungjawaban kinerja peneliti “Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi kebijakan SKPI: Studi di lingkungan PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten”, ditentukan pada Surat Perjanjian Kerja Penelitian No. B 113/Un.05/V.2/ PP.00.9/03/2018, tanggal 21 Maret 2018. pasal 7, ayat (1) Seluruh laporan terkait pelaksanaan pekerjaan penelitian wajib dilaporkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk: (a) Laporan Antara; dan (b) Laporan Akhir;

#### **4. Bentuk Laporan Pertanggung Jawaban Penelitian**

##### **a. Laporan Pertanggungjawaban antara**

Laporan antara dimaksudkan sebagai monitoring dan evaluasi untuk inventarisasi kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Reviu laporan antara berfungsi memberikan feed back atau saran dan rekomendasi dalam rangkaantisipasi kendala-kendala tersebut agar pelaksanaan penelitian dapat mencapai target yang telah ditetapkan. *Reviu* laporan antara dapat dimanfaatkan untuk mengarahkan penelitian agar terlaksana secara akuntabel, tranparan, rasional, objektif, efektif, efisien, tepat guna, tepat sasaran, dan tepat waktu.

##### **(a) Tujuan Laporan antara**

Tujuan Laporan antara, ditentukan sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi serta rekomendasi pelaksanaan penelitian;
2. Penilaian laporan kemajuan (progress) pelaksanaan penelitian;
3. Pengendalian dan audit mutu kinerja penelitian.

##### **(b) Berkas Pertanggungjawabab Laporan antara**

Bekas laporan antara berupa dokumen ukuran kertas A4

atau Legal tidak boleh dijilid cukup dijepit menggunakan Paper Fastener dengan terlebih dahulu dibolongi memakai *Perforator* untuk kemudian terakhir dihimpun ke dalam *Ordner*. Berkas laporan antara penelitian ditentukan dalam (Juknis Laporan Antara Penelitian 2018), sebagai berikut:

### **(1) Log Book Penelitian**

*Log book* penelitian merupakan catatan harian penelitian secara komprehensif dan terintegrasi yang menggambarkan (a) jadwal kegiatan penelitian, (b) pelaksanaan penelitian lapangan dan (c) realisasi anggaran penelitian. Format *log book* penelitian menampilkan (a) waktu pelaksanaan, (b) kegiatan yang dilaksanakan, (c) kemajuan yang dicapai, dan (d) kedala-kedala yang terjadi di lapangan. Untuk fungsi penunjang administrasi, *log book* penelitian disertai dengan lampiran kelengkapan berkas hasil tahapan penelitian, seperti *progress* akademik, *release* kegiatan, dokumentasi, dan sebagainya. *Log book* penelitian ditandatangani oleh ketua dan anggota peneliti. Tata cara penyusunan *log book*

### **(2) Laporan Keuangan**

Laporan keuangan berupa *cash flow* realisasi anggaran 60% sesuai standar biaya masukan (SBM) Tahun 2018. Laporan keuangan disertai dengan lampiran kelengkapan berkas, seperti Surat Izin, SPPD, nominatif, kwitansi (*invoice*), dan lain-lain. Sekaligus juga peneliti agar menyampaikan rancangan estimasi realisasi anggaran penelitian 40%. Format penyusunan laporan keuangan lihat Pedoman Pengelolaan Keuangan Penelitian LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung

### **(3) Sertifikat HKI**

Permohonan sertifikat HKI (Hak Kekayaan Intelektual) diajukan ke Puslitpen LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk diusulkan ke Dirjen KI Kemenkumham RI. Laporan HKI dibuktikan dengan sertifikat yang secara resmi dikeluarkan oleh Kemenkumham RI. Pengusulan Sertifikat HKI .

Adapun, Laporan penggunaan anggaran sebesar 70% dan sisanya rencana realisasi keuangan sebesar 30%.

**(c) Waktu, tempat Penyerahan dan Reviu Pertanggungjawab**

**Laporan antara**

- Waktu dan Tempat Penyerahan Laporan Antara
- Laporan Antara pada poin diserahkan pada tanggal 26 Juni 2018;
- *Reviu* laporan antara dilaksanakan pada hari Selasa 26 Juni 2018 Pukul 08.00-17.00 WIB. bertempat di Aula Mini LP2M Gedung *Lecture Hall* Lantai 1 UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

**b. Laporan Pertanggungjawaban Akhir**

Dimaksudkan laporan akhir kegiatan penelitian, tahap II (akhir), setelah melalui laporan antara 60% (tahap I), pada tahap ini merupakan tahap akhir dari proses penelitian dimana peneliti menyampaikan dan mengkomunikasikan kepada audiens hasil akhir risetnya melalui tulisan. Dengan pengertian ini, dapat diketahui bahwa penulisan laporan penelitian merupakan bagian penting dari rangkaian penelitian itu sendiri. Laporan penelitian ada berbagai macam bentuk sesuai dengan untuk tujuan apa laporan itu dibuat. Meskipun terdiri dari beberapa bentuk, laporan penelitian memiliki sifat tetap yaitu ilmiah. Laporan penelitian selalu bisa disebut juga karya ilmiah, namun tidak semua karya ilmiah bisa disebut laporan penelitian.

Intruksi kerja Laporan Akhir dalam penelitian ini berupa: Berkas laporan akhir berupa dokumen ukuran kertas A4 atau Legal tidak boleh dijilid cukup dijepit menggunakan Paper Fastener dengan terlebih dahulu dibolongi memakai *Perforator* untuk kemudian terakhir dihimpun ke dalam *Ordner*. Berkas laporan akhir penelitian ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerja Penelitian No. B 113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018, tanggal 21 Maret 2018. Pasal 7 PELAPORAN dan (Intruksi kerja Laporan Akhir Penelitian 2018), sebagai berikut:



## **1) Laporan Buku Hasil Penelitian**

Yang dimaksud Laporan Buku Hasil Penelitian Penyusunan laporan akademik penelitian ditentukan berdasar pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7211 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018. Dengan sistematika *dummy* buku sebagai berikut:

### **Daftar Isi**

#### **BAB I Pendahuluan**

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
  - 1. Identifikasi Permasalahan
  - 2. Batasan Permasalahan
  - 3. Rumusan Permasalahan
- C. Tujuan
- D. Signifikansi
- E. Sistematika Penulisan

#### **BAB II Teori\*\*)**

- A. Kajian Teori
- B. Penelitian Terdahulu

#### **BAB III Metode**

- A. Jenis Penelitian
- B. Pendekatan Penelitian
- C. Teknik Penetapan Responden
- D. Teknik Analisa Data

#### **BAB IV Hasil\*\*)**

- A. Hasil Penelitian
- B. Diskusi Data/Temuan Penelitian

#### **BAB V Penutup**

- A. Kesimpulan
- B. Penutup

#### **DAFTAR REFERENSI**

#### **DAFTAR ISTILAH/GLOSARIUM/INDEKS**

## **2) Laporan Draft Paper Hasil Penelitian;**

Laporan Draft Paper Hasil Penelitian; diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7211 Tahun 2017 dimaksudkan Laporan *executive summary* diformat dalam bentuk artikel/paper yang siap dikirim ke jurnal. Adapun sistematika sebagai berikut:

- Judul penelitian;
- Nama penulis, alamat email dan jabatan/pekerjaan saat ini;
- Abstraksi dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab;
- Kata kunci;
- Isi tulisan dengan sistematika berikut:
  - Pendahuluan
  - Pembahasan
  - Kesimpulan
  - Daftar Referensi

## **3) Laporan Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI);**

Permohonan sertifikat HKI (Hak Kekayaan Intelektual) diajukan ke Puslitpen LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk diusulkan ke Dirjen KI Kemenkumham RI. Laporan HKI dibuktikan dengan sertifikat yang secara resmi dikeluarkan oleh Kemenkumham RI. Pengusulan Sertifikat HKI .

## **4) Laporan Log Book Penelitian final lengkap beserta bundel lampirannya**

*Log book* penelitian merupakan catatan harian penelitian secara komprehensif dan terintegrasi yang menggambarkan (a) jadwal kegiatan penelitian, (b) pelaksanaan penelitian lapangan dan (c) realisasi anggaran penelitian. Format *log book* penelitian menampilkan (a) waktu pelaksanaan, (b) kegiatan yang dilaksanakan, (c) kemajuan yang dicapai, dan (d) kedala-kedala yang terjadi di lapangan. Untuk fungsi penunjang administrasi, *log book* penelitian disertai dengan lampiran kelengkapan berkas hasil tahapan penelitian, seperti *progress* akademik, *release* kegiatan, dokumentasi, dan sebagainya. *Log book* penelitian ditandatangani oleh ketua dan anggota peneliti. Tata cara penyusunan *log book*

### **5) Laporan potensi keluaran lainnya berupa:**

Status paper hasil penelitian (*submitted, revised, accepted, published*);

- Modul;
- Buku Teks;
- Poster;
- Teknologi Tepat Guna (TTG);
- Kebijakan;
- Rekayasa sosial (partisipasi masyarakat);
- Dan lain-lain;

### **6) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan**

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan 100% lengkap dengan *invoice* atau kwitansi dan dokumen pendukung lainnya. Laporan keuangan berupa *cash flow* realisasi anggaran 100 % sesuai standar biaya masukan (SBM) Tahun 2018. Laporan keuangan disertai dengan lampiran kelengkapan berkas, seperti Surat Izin, SPPD, nominatif, kwitansi (*invoice*), dan lain-lain.

Adapun, waktu penyerahan Laporan Akhir diserahkan pada tanggal 20 Agustus 2018;

## **D. Komponen Laporan Pertanggung Jawaban Penelitian**

### **LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENELITIAN**

#### **Kesiapan PTKIS Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan**

#### **Surat Keterangan Pendamping Ijazah: Studi di Lingkungan**

#### **PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten**

### **PENAHULUAN**

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Kegiatan Penelitian ini, disusun sebagai tanda untuk mengakhiri kegiatan Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi tahun 2018, dengan judul: "Kesiapan PTKIS Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah", dan oleh karena itu perlu dibuat laporan pertanggungjawaban tim kepada Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

## DASAR PENYUSUNAN LPJ

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, ini disusun berdasarkan, beberapa peraturan dan ketentuan berikut:

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2951 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana BOPTN (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri) Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017 tentang Pencegahan *Plagiarism* di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7211 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 7242 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Program

Penerbitan Publikasi Ilmiah Tahun 2018;

9. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 004/Un.05/V.2/Kp.02.3/01/2017 tentang Pedoman Penelitian dan Publikasi Ilmiah;
10. Surat Perjanjian Kerja: SPK-No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018, Tanggal 21 Maret 2018. tentang Penelitian Kesiapan PTKIS Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah.

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud**

Laporan ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas dan kewajiban Tim peneliti Kesiapan PTKIS Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, dalam memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang telah diberikan sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja SPK No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018, Tanggal 21 Maret 2018.

### **2. Tujuan**

Laporan pertanggungjawaban ini bertujuan sebagai bahan evaluasi dan kajian atas pelaksanaan tugas-tugas yang telah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan sehingga akan berguna untuk penyempurnaan tugas-tugas dimasa yang akan datang.

## **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup laporan ini meliputi pelaksanaan tugas pada bidang-bidang meliputi:

### **1. Pra Pelaksanaan**

Kegiatan dimulai sejak tanggal 13 Maret sampai 17 April 2018, pelaksanaan kegiatan yang meliputi penyiapan administrasi, dan keuangan (rencana penggunaan biaya), pekondisi tim/panitia, kekuatan yang dimiliki, hambatan yang dihadapi, survey dan lain-lain, diakhiri dengan rapat evaluasi perencanaan.

### **2. Saat Pelaksanaan**

Kegiatan ini, meliputi yaitu: (a) Observasi lokasai ke 24 PTKIS dimulai sejak tanggal 21 April sd., tanggal 12 Mei 2018;

(b) penyebaran instrumen pengumpulan data dilakukan di 24 PTKIS, mulai tanggal 15 Mei sampai tanggal 5 Juni 2018; (c) melaksanakan wawancara di 24 PTKIS, mulai tanggal 25 Juni sampai 10 Juli 2018. (d) Menyiapkan laporan antara 6 Juni sampai 19 Juni 2018, pada tanggal 11 Juni dilaksanakan rapat evaluasi pelaporan antara, tanggal 20 Juni penyampaian Laporan antara, kemudian tanggal 26 melaksanakan *preview* di Puslit. (e) melaksanakan validasi data di 24 PTKIS mulai tanggal 16 Juli sampai 4 Agustus 2018.

### **3. Akhir Pelaksanaan**

Kegiatan akhir diisi dengan kegiatan (a) editing data hasil validasi dimulai 6 Agustus sampai 10 Agustus 2018; (b) tanggal 11 Agustus melakukan Rapat evaluasi kegiatan akhir penelitian (h) 13-19 Agustus pengandaian Laporan akhir, penyiapan Jurnal dsj. (i) tanggal 20 Penayarahan Laporan Akhir ke Puslit.

### **4. Evaluasi Kegiatan**

Ada beberapa faktor-faktor pendukung dan penghambat kegiatan, diantaranya 24 PTKIS pada umumnya mendukung dan membantu pada kegiatan ini. Adapun yang menjadi hambatan yaitu terlalu banyak mengambil lokasi sehingga mendapat kesulitan dalam pengaturan waktu, tenaga dan biaya. Dari pembelajaran itu, untuk kedepan dalam merencanakan Lokasi lebih disederhakan dalam pengerian lebih efektif dan efisien.

### **PENUTUP/ KESIMPULAN DAN SARAN**

Kami tim peneliti Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi tahun 2018 “Kesiapan PTKIS Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah” menyampaikan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung terlaknanya kegiatan ini, dan memohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan dalam melaksanakan amanah ini. Terakhir, kami serahkan seluruh daya dan upaya kami kepada Zat Yang Maha Mengatur segalanya, Allah swt.

## **LAMPIRAN**

### **Dokumen Pertanggungjawaban Akademik**

Log Book

Buku Laporan Penelitian

Jurnal

Haki

### **Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan**

Pra Penelitian

Pelaksanaan Penelitian

Pasca Penelitian

(disajikan Pada Bab 9)





## BAB IX

### MODEL LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENELITIAN

**S**alah satu indikator kinerja ditandai oleh sebuah laporan pertanggungjawaban kegiatan dari seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, mulai dari awal hingga selesainya kegiatan. Hal ini menjadi kewajiban tim sebagai penerima mandat. Laporan pertanggungjawaban penelitian, merupakan puncak kesuksesan kegiatan penelitian. Suatu kegiatan yang terlaksana dikatakan sukses jika telah melewati proses LPJ, bukan semata-merta selesainya kegiatan dikatakan sukses. Selain LPJ suksesnya kegiatan dilihat dari selesainya semua kendala, tidak adanya permasalahan, antara yang diberi mandat dan penerima mandat. Kesemuanya telah diatur dalam kontrak kerja penelitian, dan bahkan penerima mandat dalam hal ini tim peneliti, sejak penerimaan kontrak kerja ia telah membuat dan menandatangani fakta integritas dalam bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Maka dari itu Tim peneliti segera menyampaikan Laporan pertanggungjawaban penelitian.

Kewajiban Laporan pertanggungjawaban penelitian UIN SGD Bandung berdasarkan Kep.Dirjrn Pendis no. 7211 tahun 2017, dalam bentuk Laporan *output* (keluaran) berupa naskah akademik beserta lampiran *log book* (catatan harian), sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI), buku hasil penelitian, artikel ilmiah dan laporan keuangan. Peneliti juga diarahkan untuk menghasilkan output tambahan berupa poster, Teknologi Tepat Guna (TTG), model dan rekayasa sosial. Selain laporan *output*, peneliti dituntut menghasilkan *outcome* berupa publikasi ilmiah di jurnal nasional dan internasional.

Tagihan *outcome* dilaporkan setelah berakhirnya kontrak penelitian. Tagihan kluster reguler berupa publikasi paper di jurnal index Kementerian Agama (Moraref). Tagihan kluster lintas program studi berupa publikasi paper di jurnal index Moraref dan DOAJ (regional). Tagihan kluster lintas fakultas

(integrasi keilmuan) berupa publikasi paper di jurnal terakreditasi nasional. Tagihan kluster unggulan berupa publikasi paper di jurnal internasional bereputasi global. Apabila tidak terpenuhi maka minimal buku ber-ISBN (International Standard Book Number) pada penerbit berskala lokal, nasional, regional atau internasional.

#### **A. Ketentuan Laporan Pertanggungjawaban Penelitian**

Bagian ini secara khusus menyajikan ketentuan penelitian “Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi kebijakan SKPI: Studi di lingkungan PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten”.

##### **1. Identitas Penelitian**

###### **- Jenis dan Judul Penelitian**

Berdasarkan klusternya, penelitian ini adalah; Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi.

Judul Penelitian: Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi kebijakan SKPI: Studi di lingkungan PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten.

###### **- Kontrak Kerja Penelitian**

Surat Perjanjian Kerja Penelitian No. B 113/ Un.05/V.2/ PP.00.9/03/2018, tanggal 21 Maret 2018.

##### **2. Pelaksana/Tim Penelitian**

Ketua : Dr. H. A. Rusdianan, MM/ID 20171020150557

Anggota: Drs. Nasihudin, MPd./ID 20200620108000

Alamat : Jl. A.H. Nasution 105 Bandung Tlp. 022. 7800525

##### **3. Kewajiban Tim Penelitian**

Kewajiban pertanggungjawaban kinerja peneliti “Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi kebijakan SKPI: Studi di lingkungan PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten”, ditentukan pada Surat Perjanjian Kerja Penelitian No. B 113/ Un.05/V.2/ PP.00.9/03/2018, tanggal 21 Maret 2018. pasal 7, ayat (1) Seluruh laporan terkait pelaksanaan pekerjaan penelitian wajib dilaporkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk: (a) Laporan Antara; dan (b) Laporan Akhir;

Secara rinci ketentuan pada Surat Perjanjian Kerja Penelitian No. B 113/ Un.05/V.2/ PP.00.9/03/2018, tanggal 21 Maret 2018. pasal 7, sebagai berikut:

#### **a. Laporan Antara**

Laporan Antara, berupa:

- 1) Laporan *log book* penelitian lengkap dengan berkas lampirannya; dan
- 2) Laporan penggunaan anggaran keuangan sebesar 60% lengkap dengan *foto copy* dokumen pendukungnya mencakup invoice atau kwitansi dan sekaligus laporan rencana realisasi anggaran keuangan sisanya sebesar 40%.

#### **b. Laporan Akhir**

Laporan Akhir, berupa:

1. Laporan buku hasil penelitian;
2. Laporan draft paper hasil penelitian bahan publikasi ilmiah pada jurnal;
3. Laporan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
4. Laporan *log book* penelitian secara lengkap dengan berkas lampirannya yang menggambarkan proses pelaksanaan pekerjaan penelitian dari awal hingga akhir kontrak; dan
5. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran keuangan 100% lengkap dengan dokumen asli yang meliputi invoice atau kwitansi dan dokumen pendukung lainnya.

#### **c. Laporan Laporan potensi keluaran (output) lainnya**

Laporan potensi keluaran (output) lainnya berupa:

1. Status paper hasil penelitian (submitted, revised, accepted, published);
2. Modul;
3. Buku Teks;
4. Poster;
5. Teknologi Tepat Guna (TTG);
6. Kebijakan;
7. Rekayasa sosial (partisipasi masyarakat);
8. Dan lain-lain;

#### **4. Penyampaian Laporan**

Kewajiban Tim menyampaikan Laporan Penelitian yaitu:

- a. Laporan Antara pada poin (2) diserahkan pada tanggal 26 Juni 2018;
- b. Laporan Akhir pada poin (3) diserahkan pada tanggal 20


Agustus 2018;

- c. Laporan potensi keluaran (output) lainnya pada poin (4) merupakan anjuran yang tidak mengikat tetapi berpengaruh terhadap penilaian kinerja produktivitas output penelitian.

## B. Model Laporan Antara

Bagian ini secara khusus menyajikan Laporan Antara, Penelitian “Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi kebijakan SKPI: Studi di lingkungan PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten”.

## Cover Laporan Antara

	
<b>LAPORAN ANTARA</b>	
<b>PENELITIAN TERAPAN DAN PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI</b>	
Judul Penelitian:	
<b>KESIAPAN PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI (Studi di PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat Dan Banten)</b>	
Dasar Kegiatan	: SPK- No.B-1 13/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018 Tanggal 21 Maret 2018.
Pelaksanaan	: 6 bulan
Waktu	: 21 Maret - 20 Agustus 2018
Kelompok Peneliti	
Ketua :	
Dr. H. A. Rusdiana, MM : ID 20171030150557	
Anggota:	
Des. Nasihudin, MPd. : ID 20200620109000	
<b>PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG TAHUN 2018</b>	

## Bukti Penerimaan

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

**BUKTI PENRIMAAN DOKUMEN LAPORAN ANTARA**

**Judul** : Kesiapan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi di PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat Dan Banten.  
**Kluster** : Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi  
**Ketua** : Dr. H. A. Rusdiana, M.M  
**Anggota** : Drs. Nasibudin, M. Pd.  
**Biaya** : Rp. 75.000.000.

No	Uraian	Keterangan
1.	Identitas Peneliti (email Institusi, ID Litap, cm GS-Sinta&kinerjanya)	√
2.	Log Book Penelitian	√
3.	Laporan Keuangan (SPJ)	√
4.	Submit/Draf Jurnal.	√
5.	Bab I sd. Bab III	√
6.	Pendaftaran Sertifikat HKI	√

Yang Menyeraikan,



Drs. Nasibudin, M.Pd.



## Dokumen Laporan Antara

**LAMPIRAN:**


**LAPORAN PENELITIAN ANTARA**

1. Identitas Peneliti (pentingnya Akun dan Kinerjanya)- (RP-1)
2. Pedoman Penelitian (RP-2)
3. Log Book
4. Laporan Keuangan (RP-4)
  - Rencana Realisasi
  - Rekapitulasi Penggunaan Dana
  - SPJ
5. Lap Akademik Bab I-II-III (Coper Pengantar Daftar Isi) (ml-RP-5)
6. Draf Jurnal (RP-5-5)
  - Bukti SUBMIT ke-
7. Draf BUKU Sudah di Pustaka Setia (RP-5-6)

## LAMPIRAN: I

IDENTITAS PENELITI		Anggota	
<b>Ketua Tim</b>			
Nama	: DR. H. A. Rusdiana, Drs., MEd	Nama	: Drs. Nasihudin, M. Pd.
NIP/NIDN	: 196104211985021001/2021046101	NIP	: 196209201991031001
ID Litspedimas	: 2017-10-20 15:05:57	NIDNI	: 2020096203
Pangkat/Gol.	: Pembina Tingkat I IV/b	ID Litspedimas	: ID. 20200620108000
Jab. Fungsional	: Lektor Kepala	Jab. Fungsional	: Lektor Kepala
Bidang Keahlian	: Manajemen Pendidikan	Bidang Keahlian	: Evaluasi Pendidikan
e-mail	: rusdiana@uisngd.ac.id	e-mail	: nasihudin@uisngd.ac.id

**AHMAD RUSDIANA** (Drs. MEd., Doktor)




**Nama**  
Jurnal Nasional, Orasi 3-10  
Jurnal Nasional, Terseleksi ISI  
SIP  
Jurnal Internasional Open Access  
Jurnal Internasional Skripsi/tesis

**Index**  
Kotak Sains  
Max. 1000 (kepercayaan)  
Partisipasi dalam Kegiatan  
Kampus/Instansi

**Referensi**  
2023046701  
Asosiasi Profesor (Lak)

**Osita** Author



**3371** 57  
6072425

**18** 100% 100% 100% 100%  
100% 100% 100% 100%  
100% 100% 100% 100%

**Top Authors**

1. Dini Saedah, Dini	4456
2. Siti Retna Wulan, Siti	3276
3. Rusdiana, Rusdiana	3109
4. Susanti, Muhammad	1850
5. Nurahman Sperti, Nurahman	1082
6. Adi Winanti, Sora	985
7. Darmadikson, Wahyudi	565
8. Ajid Thoha, Ajid	558
9. Purwati Salari, Indra	493
10. Prasetya, Budi	445

## LAMPIRAN: II



**PEDOMAN**  
PENELITIAN TERAPAN DAN PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI

Judul Penelitian:  
**KESIAPAN PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAM ISLAM  
DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI**  
(Studi di PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat Dan Banten)

Dasar Kegiatan : SPK- No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018  
Tanggal 21 Maret 2018.

Pelaksanaan : 6 bulan  
Waktu : 21 Maret - 20 Agustus 2018

**Kelompok Peneliti**

Ketua :  
Dr. H. A. Rusdiana, MM : ID 2017102015057

Anggota :  
Drs. Nasihudin, MPd. : ID 20200620108000

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG  
TAHUN 2018

Daftar Isi

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
A. Pendahuluan .....	1
B. Konsep Dasar Kesiapan Ptkis Dalam Dalam Implementasi Kebijakan SKPI .....	3
1. Kesiapan PTKIS dalam dalam implementasi Kebijakan SKPI .....	3
2. Kebijakan Penerapan SKPI untuk memperkuat kualitas lulusan Pendidikan tinggi .....	4
3. Kemangka Pemikiran Penelitian .....	6
C. Metode dan Lokasi Penelitian .....	7
1. Metode Penelitian .....	7
2. Lokasi Penelitian .....	8
3. Jadwal Penelitian Penelitian .....	9
D. Hasil Yang Diharapkan .....	1
1. Pemahaman PTKIS terhadap Penerapan SKPI .....	1
2. Penafsiran atau intepretasi kebijakan penerapan SKPI di lingkungan PTKIS: 1 .....	11
3. Pengorganisasian penerapan kebijakan SKPI di PTKIS: .....	11
4. Strategi Penerapan Kebijakan SKPI di PTKIS: .....	11
5. Kendala yang dihadapi, dan Solusi dalam mengimplmentasi Kebijakan SKPI di lingkungan PTKIS: .....	11
E. Kisi-Kisi Penelitian .....	12
F. Instrumen Pengumpulan Data (IPD) .....	13
Lembar IPD I: Observasi .....	13
Lembar IPD II: Pedoman Wawancara (gambaran umum) .....	14
Lembar IPD II: 1 Wawancara dengan Pimpinan PTKIS .....	15
Lembar IPD II: 2 Wawancara dengan UPT kebijakan SKPI (Kajar/Kaprod) .....	17
Lembar IPD II: 3 Wawancara dengan Dosen PTKIS .....	19
Lembar IPD II: 4 Wawancara dengan Mahasiswa PTKIS .....	21
Lembar IPD III: Pedoman Pengambilan Dokumen Data .....	23
Lembar IPD III: 1 Instrumen Pengambilan Dokumen Data .....	24

## Lokasi Penelitian

### PTKIS sebagai Sampel Penelitian

No	Nama PTKIS	Kualifikasi PT	Kab/Kota/Propinsi
1	2	3	5
25.	FAI Universitas Mathlauul Anwar	Univ	Kab. Pandeglang-Banten
26.	IAIB Serang	Ins	Kota Serang-Banten
27.	STAI Latansa Mashiro	ST	Kab. Lebak -Banten
28.	STAI Fatahilah	ST	Kota Tanggeran-Banten
29.	STAI Al-Karimiyah	ST	Kota Depok- Jawa Barat
30.	FAI Univ Juanda	Univ	Kota Bogor-Jawa Barat
31.	IAIN Laroiba	Ins	Kab. Bogor-Jawa Barat
32.	STAI Karisma	ST	Kab. Sukabumi-Jawa Barat
33.	STAI Sukabumi	ST	Kota Sukabumi-Jawa Barat
34.	STAI Nurul Hikmah	ST	Kab. Cianjur-Jawa Barat
35.	STAI Agus Salim	ST	Kota Bekasi-Jawa Barat
36.	STAI As Sidiqiyah	ST	Kab. Karawang-Jawa Barat
37.	STAI DR. KHE. Z Muttaqin	ST	Kab. Purwakarta-Jawa Barat
38.	STAI Riyaduljannah	ST	Kab. Subang-Jawa Barat
39.	STAIS Dharma	ST	Kab Indramayu-Jawa Barat
40.	STAI Cirebon	ST	Kota Cirebon-Jawa Barat
41.	FKIS UNSIA	Univ	Kab. Kuningan-Jawa Barat
42.	STAI Miftahul Huda Al Azhar	ST	Kota Banjar -Jawa Barat
43.	STAI Putra Galuh	ST	Kab. Ciamis-Jawa Barat
44.	STAINU Tasikmaya	ST	Kota Tasikmalaya-Jawa Barat
45.	IAIC Cipasung	Ins	Kab. Tasikmalaya-Jawa Barat
46.	STAI Siliwangi Garut	ST	Kab. Garut-Jawa Barat
47.	STAI Al-Falah	ST	Kab.Bandung-Jawa Barat
48.	STAI Siliwangi	ST	Kota Cimahi-Jawa Barat

## Jadwal Kegiatan Penelitian

Dasar: Surat Perjanjian Kerja No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018. tanggal 21 Maret 2018. Waktu pelaksanaan selama 6 bulan, mulai tanggal 21 Maret sampai 20 Agustus 2018.

No	Kegiatan	Bulan Minggu	Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				Ket.	
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1.	Perencanaan		√																									
2.	Penyusunan TOR Penelitian			√	√	√	√																					
3.	Reveiw Ped/Instumen dg pakar						√																					
5.	Studi pendahuluan/observasi							√	√	√	√																	
6.	Penyebaran, Instrumen										√																	
7.	Penyusunan Bab I-II-III													√	√	√												
8.	Pengumpulan data										√	√	√	√	√	√												
9.	Pengolahan/analisis data													√	√	√	√											
10.	Laporan Kegiatan 60% Termin.I															√1												
11.	Validasi data ke lokasi																√	√										
12.	Penyusunan Laporan																	√	√	√	√							
13.	Seminar Hasil Penelitian																					√						
14.	Editing/Proses HAKI/Publikasi JI																				√	√	√					
15.	Laporan 100% T.II (dg SPJB)																				√	√2						

Ket: √1=Waktu Penyerahan Laporan Antara  
 √2=Waktu Penyerahan Laporan Antara



## LAMPIRAN II



# BUKU CATATAN KEGIATAN PENELITIAN ( LOG BOOK )

---

### Judul Penelitian

**KESIAPAN PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAM ISLAM  
DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI**  
(Studi di PTKIS Kopertais Wilayah Ii Jawa Barat Dan Banten)

### LAPORAN ANTARA

Dasar Kegiatan:

SPK- No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018 Tanggal 21 Maret 2018 .

Pelaksanaan : 6 bulan

Waktu : 21 Maret - 20 Agustus 2018

### Kelompok Peneliti

**Ketua Peneliti : Dr. H. A. Rusdianan, MM/ID 20171020150557**

**Anggota) : Drs. Nasihudin, MPd./ID 20200620108000**

**Alamat / Telp. : Jl. A.H. Nasution 105 Bandung Tlp. 022. 7800525**

Mengetahui:

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



**Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag**  
NIP. 1971082719980310007

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG  
TAHUN 2018**

## **IDENTITAS**

**Ketua Tim** : Dr. H. A. Rusdianan, MM  
**NIP** : 1961042119860201001  
**Fakultas/Prodi.** : Tarbiyah dan Keguruan/MPI  
**Anggota** : Drs. Nasihudin, MPd.  
**NIP** : 196209201991031001  
**Fakultas / Prodi.** : Tarbiyah dan Keguruan/PGMI  
**Judul Penelitian** :  
**Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI:  
Studi PTKIS Kopertais Wilayah Ii Jawa Barat Dan Banten.**  
**Lokasi Penelitian** : PTKIS Wilayah II Jawa Barat dan Banten  
**Mitra Penelitian** : 24 PTKIS  
**Waktu Penelitian** : 6 bulan (21 Maret s/d 20 Agustus 2018  
**Total Dana Penelitian** : Rp. 75.000.000,-  
**-Tahap I** : Rp. 45.000.000,-  
**-Tahap II** : Rp. 30.000.000,-  
**Sumber Dana** : DIPA RM UIN SGD Tahun 2018

## KATA PENGANTAR

Buku Catatan Kegiatan (Log Book) Penelitian, menjadi kewajiban Tim peneliti, bukan hanya itu Log Book, dijadikan salah satu produk output dalam pertanggungjawaban penelitian. Atas dasar itu, dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian, Tim Penelitian: “Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi Kebijakan penerapan SKPI: Studi pada PTKIS dilingkungan Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten” menyusun Log Book ini.

Sudah selayaknya tim peneliti, merekam atau mencatat setiap kegiatan Penelitian dalam Buku Catatan Kegiatan Penelitian (Log Book).

Buku catatan kegiatan (Log Book), diisi dengan baik, akan memberikan manfaat yang banyak, antara lain:

- a. Sebagai bahan bukti untuk mengajukan permintaan hak patent;
- b. Sebagai bahan pembuatan makalah ilmiah dan laporan kegiatan;
- c. Sebagai alat untuk memudahkan pemantauan, baik oleh peneliti ataupun oleh tim monitoring dan evaluasi.

Oleh karena itu, setiap Peneliti harus mencatat semua kegiatan Penelitian yang dilakukan. Agar buku catatan kegiatan ini dapat memberikan informasi yang baik, teratur dan kronologis, maka tidak dibenarkan untuk merobek atau merusak sesuatu halaman yang ada di dalamnya. Jangan dihapus bila ada kesalahan, tetapi cukup dicoret dan diberi paraf peneliti.

Buku catatan kegiatan ini bersifat terbatas dan menjadi milik Tim Penelitian: “Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi Kebijakan penerapan SKPI: Studi pada PTKIS dilingkungan Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten” dan Puslitpen UIN SGD dan di dalam pelaksanaan pengisiannya menjadi tanggung jawab Tim Peneliti.

Tim Peneliti,

## PETUNJUK PENGISIAN

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan berbagai skim Penelitian lalu, dirasa perlu untuk meningkatkan sistem pencatatan kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti, baik yang bekerja di laboratorium maupun di lapangan, sekaligus menyeragamkan format catatan kegiatan yang dilakukan. Keseragaman format ini penting agar Peneliti dapat dilakukan secara efisien, terarah dan terperinci sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Begitu juga akan sangat memudahkan pemantauan kegiatan Penelitian oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Buku ini akan digunakan untuk menilai kemajuan Penelitian: "Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi Kebijakan penerapan SKPI: Studi pada PTKIS dilingkungan Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten. Dengan tidak bermaksud mengurangi kewenangan yang ada pada Pusat Penelitian tentang keseragaman format catatan kegiatan, maka buku catatan kegiatan ini dibuat oleh tim peneliti.

Setiap peneliti yang melakukan kegiatan Penelitian/Pengabdian harus mencatat semua kegiatan (termasuk penggunaan dana) dan data yang diperoleh secara singkat dan jelas sehingga tergambar dalam buku catatan ini;

- a. Nonor Urut
- b. Waktu pelaksanaan terdiri dari Hari, tanggal (hari, tanggal pencatatan);
- c. Kegiatan yang dilakukan terdiri dari Nama kegiatan/sub kegiatan (sesuai jadwal pelaksanaan);
- d. Tujuan dari kegiatan/sub kegiatan (sesuai proposal);
- e. Uraian kegiatan (harus menggambarkan urutan kegiatan yang dilakukan harian atau mingguan, berupa deSTAI eksperimen serta analisa yang dilakukan berikut penggunaan waktu, orang bahan, alat mesin dan lain-lain);
- f. Hasil yang diperoleh harian atau mingguan (cantumkan juga hari/tanggal dan tempat/lokasi pengukuran/pencatatan/analisa);
- g. Hambatan (jelaskan hambatan-hambatan yang dialami, jika ada);
- h. Kesimpulan dan saran (kesimpulan dan saran masing-masing kegiatan);
- i. Rencana kegiatan selanjutnya sesuai kesimpulan dan proposal;
- j. Tanda tangan peneliti di dalam Buku Peneliti setiap kali pencatatan kegiatan.



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung IMPLEMENTASI Kebijakan SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

**RINGKASAN CATATAN HARIAN (LB) PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN**

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan Penelitian	Output/Catatan Kemajuan	Kendala	Pelaksana
1	2	3	4	5	6
1.	Rabu 21 Maret 2018	- Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja B-113/Un.05/V.2/ PP.00.9/03/2018. Tgl. 21/3/018	Dimilikinya dasar legalitas formal untuk operasional kegiatan penelitian	Lancar	Ketua dan anggota Tim
		- Penyusunan jadwal operasional Kegiatan sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor: B-113/Un.05/V.2/P.00.9/03/2018. Tgl. 21/3/018	Dimilikinya jadwal operasional kegiatan penelitian berdasar pada Surat Perjanjian Kerja Nomor: 113/Un.05/V.2/PP.00.9/ 03/2018. Tgl. 21/3/018	Lancar	Ketua Tim, bersama Anggota Tim
2.	Kamis 22 Maret 2018	- Pengadaan perlengkapan administrasi kantor - Review Desain Penelitian, disesuaikan dengan kontrak	- Dimilikinya perlengkapan adm kantor - Dimilikinya Desain penelitian sesuai dengan ketentuan SPK	Lancar	Ketua dan Anggota tim dibantu oleh staf,
3.	Sabtu 24 Maret 2018	Penyusunan Kelengkapan perangkat sistem/administrasi penelitian - Permohonan Izin Lokasi ke Koord Kopertais - Permohonan Izin Lokasi 24 PTKIS	Dimilikinya Sistem penelitian, untuk kepentingan penelitian Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat Dan Banten	Lancar	Ketua dan Anggota tim dibantu oleh staf,
4.	Selasa, 27 Maret 2018	- Penyusunan Alokasi Waktu dan Biaya (Pengembangan jadwal dan RAB).	Dimilikinya: Alokasi Waktu dan Biaya kususnya untuk keg di Lokasi/Perjalanan Dinas untuk: (1) Observasi/izin lokasi; (2) penyebaran IPD III; (3) Wawancara & pengambilan Isian IPD III; (4) Validasi data.	Lancar	Ketua dan Anggota tim dibantu oleh staf,
5.	Rabu, 28 Maret 2018	- Penyiapan Rancangan Pedoman Operasional Penelitian	Dimilikinya: Rancangan/Sistematika Pedoman Operasional Penelitian, berisi: pendahuluan, Konsep, metode, Kerangka. Jadwal Kisi-kisi, IPD	Lancar	Ketua dan Anggota tim dibantu oleh staf,



**LOG BOOK**

**KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Koper-tais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)**

1	2	3	4	5	6
6.	Kamis, 29 Maret 2018	- Penyusunan Pendahuluan, Konsep, metode, Kerangka. Jadwal Penelitian	Dimilikinya: Pendahuluan, Konsep, metode, Kerangka. Jadwal Penelitian, berdasarkan kaidah ilmiah dan SPK. (bagian dari pedoman)	Lancar	Ketua dan Anggota tim dibantu oleh staf,
7.	Sabtu, 31 Maret 2018	- Penyusunan Kisi-kisi, penelitian (bagian dari PO Penelitian)	Dimilikinya: Kisi-kisi, penelitian Penelitian berisi: Masalah Penelitian Dan Sub Masalah, Hubungan Konsep/Indikator, Sumber Data, dan Teknik Pengumpul Data (TPD)	Lancar	Ketua dan Anggota tim dibantu oleh staf,
8.	Selasa, 3 April 2018	- Penyusunan Pedoman Observasi (IPD-I) Kelenkapan PO penelitian.	Dimilikinya: Pedoman Observasi (IPD-I) Kelenkapan PO penelitian. Berisi: Ketentuan Observasi, dan substansi/materi observasi	Lancar	Ketua dan Anggota tim dibantu oleh staf,
9.	Rabu, 4 April 2018	- Penyusunan Pedoman Wawancara (IPD-II) Kelenkapan PO Penelitian.	Dimilikinya: Pedoman Wawancara (IPD-II) Kelenkapan PO penelitian. Berisi: Ketentuan Wawancara, dan substansi/materi Wawancara.	Lancar	Ketua dan Anggota tim dibantu oleh staf,
10.	Kamis, 5 April 2018	- Penyusunan Pedoman Studi Dokumentasi (IPD-III) Kelenkapan PO Penelitian.	Dimilikinya: Pedoman Studi Dokumentasi (IPD-III) Berisi: Ketentuan STD, dan substansi/materi STD.	Lancar	Ketua dan Anggota tim dibantu oleh staf,
11.	Sabtu, 7 April 2018	- Kompilasi Pedoman Operasional Penelitian	Dimilikinya: Kompilasi Pedoman Operasional Penelitian. Berisi: pendahuluan, Konsep, metode, Kerangka. Jadwal Kisi-kisi, IPD-I, II, dan III.	Lancar	Ketua dan Anggota tim dibantu oleh staf,
12.	Selasa, 10 April 2018	- Penyiapan Rapat: Review Pedoman dan Instrumen Penelitian	Dimilikinya: Kesiapan Rapat Review Pedoman dan Instrumen Penelitian. Untuk kepentingan penelitian	Lancar	Ketua dan Anggota tim dibantu oleh staf,
13.	Kamis, 12 April 2018	- Pelaksanaan Rapat: Review Pedoman dan Instrumen Penelitian	Dimilikinya: Rekomendasi/kesepahaman dari pakar dan teman sejawat, yang memastikan Pedoman Penelitian telah valid, kredibel dan akuntabel.	Lancar	Ketua dan Anggota tim dibantu oleh staf,



**LOG BOOK**

**KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
14.	Selasa, 17 April 2018	Persiapan: Rencana Observasi Lokasi Penelitian di 24 PTKIS	Dimilikinya: Kesiapan Administrasi, biaya dan kelengkapan Observasi Lokasi Penelitian	Lancar	Ketua dan Anggota tim dibantu oleh staf.
15.	Sabtu 21 April 2018	Observasi di PTKIS Lokasi Penelitian UNMA, IAIB, STAI Fatahilah dan STAI Al-Karimiah	Dimilikinya: Data hasil Observasi dari UNMA, IAIB, STAI Fatahilah dan STAI Al-Karimiah	Lancar	- Nasihudin: - A. Rusdiana
16.	Selasa 24 April 2018	Lanjutan Observasi di STAI Latansa, IAIN Lroiba, Univ Juanda, dan STAI Kharisma.	Dimilikinya: Data hasil Observasi dari STAI Latansa, IAIN Lroiba, Univ Juanda, dan STAI Kharisma.	Lancar	- Nasihudin: - A. Rusdiana
17.	Kamis 26 April 2018	Lanjutan Observasi di STAI Sukabumi, Nurul Hikmah Cianjur, STAI Agus Salim, Bekasi dan STAI As-Sidqiyah Karawang.	Dimilikinya: Data hasil Observasi dari STAI Sukabumi, Nurul Hikmah Cianjur, STAI Agus Salim, Bekasi dan STAI As-Sidqiyah Karawang.	Lancar	- Nasihudin: - A. Rusdiana
18.	Sabtu 28 April 2018	Lanjutan Observasi di STAI EZ Muttaqin, Riyadul Jannah; STAIS Dharma, dan STAIC Cirebon.	Dimilikinya: Data hasil Observasi dari STAI EZ Muttaqin, Riyadul Jannah; STAIS Dharma, dan STAIC Cirebon.	Lancar	- Nasihudin: - A. Rusdiana
19.	Rabu 2 Mei 2018	Lanjutan Observasi di UNSIA, STAI Putra Galuh, STAI Mif Huda AAz dan STAINU Tasik	Dimilikinya: Data hasil Observasi UNSIA, STAI Putra Galuh, STAI MH Al Azhar dan STAINU.	Lancar	- Nasihudin: - A. Rusdiana
20.	Sabtu 5 Mei 2018	Lanjutan Observasi di IAIC Tasik, STAI Siliwangi Garut	Dimilikinya: Data hasil Observasi dari IAIC Tasik, STAI Siliwangi Garut.	Lancar	- Nasihudin:
21.	Selasa 8 Mei 2018	Lanjutan Observasi di STAI Al-Falah Cicalengka	Dimilikinya: Data hasil Observasi dari STAI Al-Falah Cicalengka	Lancar	- A. Rusdiana
22.	Rabu 9 Mei 2018	Lanjutan Observasi di STAI Siliwangi Cimahi	Dimilikinya: Data hasil Observasi dari STAI Siliwangi Cimahi	Lancar	- A. Rusdiana



**LOG BOOK**

**KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)**

1	2	3	4	5	6
23.	Sabtu 12 Mei 2018	- Formulasi hasil Observasi dari 24 PTKIS Lokasi Penelitian. - Penyiapan Penyebaran IPD III Studi Dok Penelitian	Dimilikinya: Data hasil Observasi dari 24 PKIS, yang sudah tersusun dan terpilah. Dan siapnya Adm dan keengkapan Penyebaran IPD Studi Dok Penelitian	Lancar	Ketua dan Anggota tim dibantu oleh staf,
24.	Selasa 15 Mei 2018	Penyebaran IPD III Dokumen/Data Kesiapan Implementasi SKPI ke: UNMA, IAIB, STAI Fatahilah dan STAI Al-Karimiah	Sampai/diterimanya: IPD III Dokumen/Data Kesiapan Implementasi SKPI oleh pihak: UNMA, IAIB, STAI Fatahilah dan STAI Al-Karimiah.	Lancar	- Nasihudin: - A. Rusdiana
25.	Sabtu 19 Mei 2018	Lanjutan Penyebaran IPD III Kesiapan Implementasi SKPI ke: STAI Latansa, IAIN La-Roiba STAI, UNIDA dan STAI Kharisma	Sampai/diterimanya: IPD III Dokumen/Data Kesiapan Implementasi SKPI ke: STAI Latansa, IAIN La-Roiba STAI, UNIDA dan STAI Kharisma.	Lancar	- Nasihudin: - A. Rusdiana
26.	Selasa 22 Mei 2018	Lanjutan Penyebaran IPD III Kesiapan Implementasi SKPI ke: STAI Sukabumi, Nurul Hikmah STAI Agus Salim, dan STAI As-Sidqiyah	Sampai/diterimanya: IPD III Dokumen/Data Kesiapan Implementasi SKPI oleh pihak: STAI Sukabumi, Nurul Hikmah Cianjur, STAI Agus Salim, Bekasi dan STAI As-Sidqiyah	Lancar	- Nasihudin: - A. Rusdiana
27.	Sabtu 26 Mei 2018	Lanjutan Penyebaran IPD III Kesiapan Implementasi SKPI ke: STAI EZ Muttaqin, Riyadul Jannah; STAIS Dharma, dan STAIC Cirebon	Sampai/diterimanya: IPD III Dokumen/Data Kesiapan Implementasi SKPI oleh pihak: STAI EZ Muttaqin, Riyadul Jannah; STAIS Dharma, dan STAIC Cirebon	Lancar	- Nasihudin: - A. Rusdiana
28.	Rabu 30 Mei 2018	Lanjutan Penyebaran IPD III Kesiapan Implementasi SKPI ke: UNSIA, STAI Putra Galuh, STAI Mif Huda AAz dan STAINU Tasik,	Sampai/diterimanya: IPD III Dokumen/Data Kesiapan Implementasi SKPI oleh pihak UNSIA, STAI Putra Galuh, STAI Mif Huda Al Azhar dan STAINU Tasik,	Lancar	- Nasihudin: - A. Rusdiana
29.	Sabtu 2 Juni 2018	Lanjutan Penyebaran IPD III Kesiapan Implementasi SKPI ke: IAIC Tasik, STAI Siliwangi Garut, dan STAI Al-Falah Cicalengka	Sampai/diterimanya: IPD III Dokumen/Data Kesiapan Implementasi SKPI oleh pihak IAIC Tasik, STAI Siliwangi Garut, dan STAI Al-Falah Cicalengka	Lancar	- A. Rusdiana





**LOG BOOK**

**KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)**

1	2	3	4	5	6
30.	Selasa 5 Juni 2018	Lanjutan Penyebaran IPD III Kesiapan Implementasi SKPI ke: STAI Siliwangi Cimahi..	Sampai/diterimanya: IPD III Dokumen/Data Kesiapan Implementasi SKPI ke STAI Siliwangi Cimahi..	Lancar	- A. Rusdiana
31.	Rabu 6 Juni 2018	Penyiapan Laporan Progres Penelitian 60%: Penyusunan Bab I	Tersusun dan Dimilikinya: Bab I Penelitian. Untuk memenuhi Laporan 60 % progres penelitian.	Lancar	Ketua dan Anggota tim dibantu oleh staf,
32.	Kamis 7 Juni 2018	Penyiapan Laporan Progres Penelitian 60%: Lanjutan Bab II, Sub-Bab A-B	Tersusun dan dimilikinya Bab II Penelitian meliputi: Bab II Tinjauan Pustaka Sub A-Konsep Dasar Kesiapan Implementasi Kebijakan, dan B Teori Implementasi Kebijakan.	Lancar	Ketua dan Anggota tim dibantu oleh staf,
33.	Jum'at 8 Juni 2018	Penyiapan Laporan Progres Penelitian 60%: Lanjutan Bab II Sub-Bab C-D	Tersusun dan dimilikinya Bab II Sub-Bab: C, Penerapan SKPI Sebagai Kebijakan Pendidikan Tinggi menghadapi era Persaingan, dan Sub D. Penelitian terdahulu	Lancar	Ketua dan Anggota tim dibantu oleh staf,
34.	Sabtu 9 Juni 2018	Penyiapan Laporan Progres Penelitian 60%: Lanjutan Bab III	Tersusun dan dimilikinya sampai Bab III Untuk memenuhi Laporan 60 % progres penelitian	Lancar	Ketua dan Anggota tim dibantu oleh staf,
35.	Kamis 21 Juni 2018	Penyampaian Laporan Kegiatan Penelitian Tahap I 60%	Dimilikinya: Bukti Penerimaan dari LPPM, tentang penyerahan dokumen progres penelitian: Bab I - BAB II& BAB III Log Book Bulan Ke III (60%) SPJ 60%	Lancar	Ketua dan Anggota tim dibantu oleh staf,
36.	Sabtu/ 23 Juni 2018	Penyiapan Administrasi kelengkapan Wawancara IPD II dan pengumpulan dokumen/data IPD III, di 24 PTKIS	Dimilinya kesiapan Administrasi kelengkapan Wawancara IPD II dan pengumpulan dokumen/data IPD III, di 24 PTKIS, diharapkan dapat mendukung lancarnya kegiatan penelitian.	Lancar	Ketua dan Anggota tim dibantu oleh staf,

Keterangan:

Log book ini, disajikan atas kepentingan laporan antara (60%) kegiatan penelitian.





**BUKU CATATAN KEGIATAN PENELITIAN  
( LOG BOOK )**

---

---

**Judul Penelitian**

**KESIAPAN PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAM ISLAM  
DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI  
(Studi di PTKIS Kopertais Wilayah Ii Jawa Barat Dan Banten)**

**Dasar Kegiatan:**

SPK- No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018 Tanggal 21 Maret 2018.

Pelaksanaan : 6 bulan

Waktu : 21 Maret - 20 Agustus 2018

**Kelompok Peneliti**

**Ketua Peneliti : Dr. H. A. Rusdianan, MM/ID 20171020150557**

**Anggota) : Drs. Nasihudin, MPd./ID 20200620108000**

**Alamat / Telp. : Jl. A.H. Nasution 105 Bandung Tlp. 022. 7800525**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG  
TAHUN 2018**



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018, Tgl 21 Maret 2018, Keg. 6 bulan sampai Tgl, 20 Agustus 2018

Lembar ..... dari .....

1.	Tanggal/Bulan/Tahun	Pabu, 21 Maret 2018.
2.	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Persiapan dan Perencanaan Kegiatan.
3.	Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	- Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja. - Penyusunan rancangan jadwal operasional kegiatan.
4.	Catatan kemajuan: (Hasil yang diperoleh)	- Dimilikinya dasar legalitas formal untuk operasional kegiatan penelitian. - Dimilikinya jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian berdasarkan Rd Surat Perjanjian Kerja No. B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018 tgl. 21 Maret 2018 (jadwal terlampir) dengan alokasi waktu yg di gunakan untuk penelitian hari Selasa, Rabu, Kamis dan Sabtu. (Senin dan Jumat Mengajar Penuh)
5.	Kendala	- linear.
6.	Kesimpulan dan saran	- Dengan dimilikinya dasar legalitas formal untuk operasional kegiatan penelitian maka pelaksanaan penelitian, hukumnya menjadi jelas, memiliki pinakan yg kuat - Dengan dimilikinya rencana jadwal operasional kegiatan penelitian berdasarkan Rd Surat Perjanjian Kerja Nomor B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018 tgl. 21 Maret 2018, maka pelaksanaan akan lebih terarah - Sebaiknya Kontrak di lengkapi dengan Panduan/Rekruitur teknis kegiatan, menjadi satu paket.
7.	Rencana kegiatan selanjutnya	Penyiapan / Pengadaan acim Perlengkapan dan Review Re STAIN Penelitian.

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP: 1962042419860201001

Bandung, 21. Maret. 2018  
Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP: 196209201991031001

Catatan:

- Bila kolom yg tersedia tidak cukup harap ditambahkan pada halaman berikutnya;
- Bila hasil berupa tabel/gambar ditempatkan, pada halaman belakang.

Catatan Monev:

an Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,

Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP: 1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN FTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI  
(Studi pada FTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018, Tgl 21 Maret 2018, Kpg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar ... dari ...

1.	Tanggal/Bulan/Tahun	Kamis, 22 Maret 2018.
2.	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	- Pengadaan perlengkapan admin Kantor. - Review Proposal Ke-Desain. Penelitian.
3.	Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	- Tersedianya perlengkapan admin Kantor. - Tersusunya Desain penelitian (pengemb proposal) sesuai dengan ketentuan SPK Nomor: B.113/40.05/V.03/PP.00.9/03/2018 tanggal 21 Maret, 2018.
4.	Catatan kemajuan (hasil yang diperoleh)	- Dimilikinya perlengkapan Admin Kantor - Dimilikinya Desain penelitian sesuai dengan Kardak Ilmiah dan Ketentuan. Ketentuan SPK Nomor: B.113/40.05/V.2/PP.00.9/03/2018 tanggal 21 Maret, 2018.
5.	Kendala	- Tidak ada.
6.	Kesimpulan dan saran	- Dengan dimilikinya perlengkapan admin penelitian sesuai dengan kardak ilmiah dan ketentuan ketentuan SPK di harapkan dapat menunjang kelancaran lannya pelaksanaan penelitian. - Sebaiknya ada standar format yg baku untuk pengurusan
7.	Rencana kegiatan selanjutnya	

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Musliana, MM  
NIP: 1961042119860201001


Catatan:

- Bila kolom yg tersedia tidak cukup hasil ditambahkan pada halaman berikutnya.
- Bila hasil berupa tabel/gambar ditambahkan, pada halaman belakang.

Bandung, 23 Maret, 2018.  
Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP: 196206201981031001

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Dermalaksana, M.Ag  
NIP: 1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung IMPLEMENTASI Kebijakan SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK/ No. B.11/2016.04/VI.2/PP.00.003/2018, Tgl 21 Maret 2018, Keg. 4 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar .... dari ....

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Sabtu, 24 Maret, 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Penyusunan Kelengkapan Perangkat Administrasi pada Permohonan lain lokasi Penelitian ke Kopertais. - Permohonan lain lokasi Penelitian ke 24 PTKIS
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (tessal program)	Tersusunnya Permohonan lain lokasi penelitian, untuk 24 lokasi penelitian /PTKIS di Kopertais Wilayah II Jawa Barat, berdasarkan SPK Nomor B 113/440.05/VI.2/PP.00.9103/2018 tanggal 21 Maret, 2018.
4. Catatan kemajuan (hasil yang di peroleh)	Dimilikinya Surat permohonan lain lokasi penelitian. Untuk: - Rek. koord. Kopertais wilayah II Jawa Barat. - 3 Rektor UIN, 3 Rektori AI dan Ketua STAI (24 PTKIS), sebagai lokasi penelitian * kesiapan PTKIS dalam mendukung implementasi Kebijakan SKPI Subs PTKIS Kopertais wilayah II Jawa Barat dan Banten
5. kendala	- Tidak ada.
6. Kesimpulan dan saran	Pegawai dimilikinya Permohonan lain lokasi penelitian Rek. Koordinator Kopertais II, dan 24 PTKIS, diharapkan dapat menunjang kelancaran, kelengkapan pelaksanaan penelitian.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Penyusunan Alokasi Waktu dan Biaya (pengembangan lokasi dan RAB)

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP. 1963002119908031001

Catatan:

- Bila telah yg tersedia maka cukup hanya ditambahkan pada halaman berikutnya
- Bila hasil berupa tabel/gambar dimasukkan, pada halaman belakang.

Bandung, 24 Maret 2018.  
Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP.196309201991081001

Petahan Kelenteng  
a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan.

Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI

(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Un.03/V.2/PP.00.9/03/2018, Tgl 21 Maret 2018. Keg. 6 bulan sampai Tgl. 30 Agustus 2018

Lembar .... dari ....

1. Tanggal/Walau/Tahun	Selasa, 27. Maret. 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Penyusunan Alokasi Waktu dan Biaya (Pengembangan Jadwal dan RAB)
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Tersusunnya: Alokasi Waktu dan Biaya (Pengembangan RAB), Rencana Perjalanan Dinas untuk: (1) observasi/tema lokasi; (2) penyebaran IPP; (3) wawancara dan pengambilan IPP; (4) validasi data, berdasarkan SPK: B.113/Un.03/V.2/PP.00.9/03/2018 tanggal 21 Maret. 2018.
4. Catatan Kemi Juanc (Hal-hal yang dipelajari)	Dimulainya Alokasi Waktu dan Biaya (Pengembangan RAB) Rencana Perjalanan Dinas untuk: (1) observasi/tema lokasi; (2) penyebaran IPP; (3) wawancara dan pengambilan IPP; (4) validasi data, untuk Kesiapan Penelitian Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah Jawa Barat dan Banten (Alokasi Waktu dan Biaya); terlampir
5. Kendala	- linear.
6. Kesimpulan dan saran	Dengan dimulainya Alokasi Waktu dan Biaya (Pengembangan RAB) Rencana Perjalanan Dinas untuk (1) observasi/tema lokasi; (2) penyebaran IPP; (3) wawancara dan pengambilan IPP; (4) validasi data diharapkan dapat menunjang kelancaran terhadap pelaksanaan penelitian.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Pengiapan Mendukung Pedoman Operasional Penelitian.

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Penelitian,

Drs. H. A. Rusdiana, MM  
NIP: 1962080119900201001

Captain:

- bila kolom ya tersedia tidak cukup harus ditambahkan pada halaman berikutnya;
- bila hasil berupa tabel/gambar ditempatkan pada halaman belakang.

Bandung, 27. Maret. 2018.  
Anggota peneliti,

Drs. Nacihudin, MPd.  
NIP: 196208031991031001

Cetakan Resmi  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,

Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP: 1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI  
(Studi pada PTKIS Kepertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Uh.05/V.2/Pf.00.010/2018, Tgl 21 Maret 2018, Kep. 6 bulan sampai Tgl. 30 Agustus 2018

Lembar .... dari ....

1. Tanggal/Gulan/Tahun	Rabu, 28 Maret 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Penyusunan Rancangan pedoman operasional Penelitian (Pengembangan DeSTAIN Penelitian)
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Tersusunnya ; Rancangan /sistematika. Pedoman operasional penelitian, berisi: pendahuluan, Konsep, Metode, Kerangka, Jadwal Kisi-kisi, IPD.
4. Catatan kemajuan: (hasil yang diperoleh)	Dimitikinya ; Rancangan pedoman operasional Penelitian, berisi: pendahuluan, Konsep, Metode, Kerangka, Kisi-kisi, IPD berdasarkan Kaidah Ilmiah dan SPK Untuk kepentingan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI; Studi pd PTKIS Kepertais wit II Jawa Barat dan Banten.
5. Kendala	- lancar
6. Kesimpulan dan saran	Dengan dimilikinya pedoman operasional penelitian berisi, Pendahuluan, Konsep Metode, Kerangka, Jadwal kisi-kisi, IPD, yang tepat, berdasarkan Kaidah Ilmiah, di harapkan dapat Memunjang Kelancaran Terhadap pelaksanaan penelitian
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Penyusunan Pendahuluan, Konsep, Metode, Kerangka Jadwal penelitian.

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP. 1961042119760201001


Catatan:

- Lembar yg sudah diisi cukup terse ditambahkan pada laporan berikutnya
- Bila hasil berupa revisi/gambar ditampikan, pada halaman belakang.

Bandung, 28 Maret 2018.  
Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP.196209201951031001

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007





LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung IMPLEMENTASI Kebijakan SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertals Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Ua.05/V.2/PP.00.903/2018, Tgl 21 Maret 2018, Kag. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar ... dari ...

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Kamis, 29, Maret, 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Penyusunan Pendahuluan, Konsep, Metode, Kerangka, Jadwal Penelitian.
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Tersusunnya; Penyusunan Pendahuluan, konsep Metode, Kerangka, Jadwal Penelitian.
4. Catatan kemajuan: (hal yang diuraikan)	Dimilikinya; Pendahuluan, Konsep, Metode, Kerangka jadwal penelitian, berdasarkan Kaidah Ilmiah dan SPK. Untuk Kepentingan Penelitian " Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI; Studi pada PTKIS Kopertals Wilayah II Jawa Barat dan Banten,
5. Kendala	- Lancar.
6. Kesimpulan dan saran	Pengan, dimilikinya Pendahuluan, Konsep, Metode, Kerangka, Jadwal Penelitian, yang Tepat, berdas- Sarkan Kaidah Ilmiah, diharapkan dapat Menunjang Kelancaran terhadap pelaksanaan Penelitian.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Penyusunan Kisi-kisi Penelitian (bagian dari PO Penelitian)

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Nasidiana, MEd  
NIP. 196209201991001001

- Catatan:
- Bila dalam 10 hari tidak dapat diisi harus dibuktikan pada halaman berikutnya.
  - Bila hasil berupa tabel/gambar ditempatkan pada halaman tersendiri.

Bandung, 29, Maret, 2018.  
Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP.196209201991001001

Catatan Monev:  
Kepala LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,

Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI

(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-1/13/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018, Tgl 21 Maret 2018, Kag. 6 bulan sampai Tgl. 30 Agustus 2018

Lembar ... dari ...

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Sabtu, 31 Maret 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Penyusunan Kisi-kisi, Penelitian ( bagian dari PO penelitian )
3. Tujuan Kegiatan/Sub kegiatan (sesuai program)	Tersusunnya Kisi-kisi, Penelitian. Penelitian berbasis Masalah penelitian dan Sub Masalah, Hubungan Konsep Indikator, Sumber Bata dan Teknik Pengumpulan Bata (TPD)
4. Catatan kemajuan: (Hasil yang diperoleh)	Dimilikinya; kisi-kisi, Penelitian Untuk Ke-Pentingan penelitian " Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten .
5. Kendala	- lancar
6. Kesimpulan dan saran	Dengan Dimilikinya Kisi-kisi, Penelitian, diharapkan dapat menunjang kelancaran terhap pelaksanaan penelitian " Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI " Studi PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten "
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Penyusunan Instrumen Penelitian; IPP-1 penelitian Observasi

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MEd  
NIP. 1961042119860201001

Catatan:

- Sila dalam yg tertera tidak boleh PMSO diwujudkan pada halaman berikutnya;
- Sila hasil berupa tabel/gambar ditempatkan pada halaman belakang

Bandung, 31 Maret 2018.  
Anggota peneliti,

Dr. Nasihudin, M.Pd.  
NIP. 196206201961031001

Catatan Filemew:  
a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,

Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung IMPLEMENTASI Kebijakan SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Un.05/V.2/PF.00.9/03/2018, Tgl 21 Maret 2018, Kag. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar ... dari ...

1.	Tanggal/Bulan/Tahun	Selasa, 3 April 2018.
2.	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Penyusunan Pedoman Observasi (IPP-1) Kelengkapan PD Penelitian.
3.	Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Tersusunnya; Pedoman Observasi (IPP-1) Kelengkapan PD penelitian, Berisi; Ketentuan observasi, dan Substansi / Materi observasi.
4.	Catatan kemajuan: (Hasil yang di peroleh)	Dimilikinya pedoman observasi (IPP-1) untuk kepentingan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI" Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten.
5.	Kendala	- Linear.
6.	Kesimpulan dan saran	Dengan, dimilikinya pedoman observasi (IPP-1) diharapkan dapat menunjang kelancaran terhadap pelaksanaan penelitian; "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten."
7.	Rencana kegiatan selanjutnya	Penyusunan Instrumen Penelitian; IPP-II Pedoman wawancara.

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H.A. Rusdiana, MEd  
NIP. 206104217985021001

Catatan:

- Bila sudah selesai tidak cukup hanya diuraikan pada halaman berikut ini;
- Bila hasil berupa tabel/gambar dimasukkan pada halaman belakang.

Bandung, 3 April, 2018.  
Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP.196208201991031001

Catatan Manerik  
a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP.1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung IMPLEMENTASI Kebijakan SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.3-11/2/Un.051/V.2/PP.00.003/2018. Tgl 21 Maret 2018. Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar ... dari ...

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Rabu, 4 April 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Penyusunan pedoman wawancara (IPD-II) Kelengkapan PO Penelitian.
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Tersusunnya; Pedoman wawancara (IPD-II) Kelengkapan PO penelitian, Berisi Kelengkapan wawancara, dan Substansi /materi wawancara.
4. Catatan kemajuan: (hasil yang direseksi)	Dimilikinya; Pedoman wawancara (IPD-II) untuk kepentingan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi Pada PTKIS Kopertais wilayah II Jawa Barat Dan Banten.
5. Kendala	- Linear.
6. Kesimpulan dan saran	Dengan dimilikinya pedoman wawancara (IPD-II) diharapkan dapat menunjang kelancaran Terjadinya pelaksanaan penelitian; Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI; studi PTKIS Kopertais wilayah II Jawa Barat Dan Banten.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Penyusunan Instrumen Penelitian; IPD. III Studi Dokumentasi.

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Masduki, MM  
NIP. 1963042119803201001

Catatan:

- Bila lembar yg tersedia tidak cukup harus ditambahkan pada halaman berikutnya.
- Bila hasil berupa tabel/gambar ditorehkan pada halaman belakang.

Bandung, 4 April 2018.  
Anggota peneliti,

Dr. Nasihudin, M.Pd.  
NIP. 196206201991031001

Catatan Money:

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,

Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung IMPLEMENTASI Kebijakan SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Uu.05/V.2/PP.00.9/03/2018. Tgl 21 Maret 2018. Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar ... dari ...

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Kamis, 5 April 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Penyusunan Pedoman Studi Dokumentasi (IPD III) Kelengkapan PO Penelitian.
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Tersusunnya; Pedoman Studi Dokumentasi (IPD III) Kelengkapan PO Penelitian, Berisi; Ketentuan Studi Dokumentasi, dan Substansi Materi Studi Dokumentasi.
4. Catatan kemajuan (hasil yang diperoleh)	Dimilikinya; Pedoman Studi Dokumentasi (IPD III) untuk kepentingan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung implementasi Kebijakan SKPI" Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten.
5. Kendala	- lancar.
6. Kesimpulan dan saran	Dengan dimilikinya pedoman Studi Dokumentasi (IPD III) di harapkan dapat menunjang kelancaran terhadap pelaksanaan penelitian: Kesiapan PTKIS dalam mendukung implementasi Kebijakan SKPI: Studi PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten"
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Kompilasi Pedoman Operasional Penelitian.

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusliana, MEd  
NIP.1961041119690101001

Capitan:

- file dalam yg tersedia tidak cukup harus ditambahkan pada halaman berikutnya
- file hasil berupa tabel/gambar ditempatkan pada halaman selang.

Bandung, 5 April 2018.

Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP.196209201991031001

Catatan Maney:

an. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,

Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP.1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.9-113/Uh.05/V.2/PP.08.903/2018, Tgl 21 Maret 2018, Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar ... dari ...

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Selasa, 10, April, 2018 -
2. Nama Kegiatan/Sub kegiatan	Penyusunan Rapat: Review Pedoman dan Instrumen Penelitian.
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	1. Tersusunnya; Penyusunan Rapat Review pedoman dan Instrumen Penelitian. - Undangan Rapat (Waktu, Tempat, Materi) - Bahan Kelengkapan dan materi Rapat. 2. Sampaiya Undangan dan bahan rapat kepada narasumber akan peserta rapat (buku ekspedisi)
4. Catatan kemajuan: (hasil yang di peroleh)	Diturunkanya; Mesiapan Rapat Review Pedoman dan Instrumen Penelitian, Untuk Keperitingan penelitian "Mesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Skpi; Studi pada PTKIS kopertais wilayah II Jawa Barat Dan Banten".
5. Kendala	- lancar.
6. Kesimpulan dan saran	Dengan diturunkanya Mesiapan Rapat Review Pedoman dan Instrumen Penelitian, diharapkan dapat menunjang ketahanan Terhadap pelaksanaan Penelitian " Mesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Skpi; Studi PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat Dan Banten. Yang Valid, Kredibel dan akuntabel.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MEd  
NIP: 19610211981001001

Catatan:

- Bila kolom yg tersedia tidak cukup dapat ditambahkan pada halaman berikutnya.
- Bila hasil berupa tabel/gambar ditunjukkan, pada halaman belakang.

Bandung, 10 April, 2018.  
Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP: 196209201991031001

Catatan Monev:

an. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP: 1971082719980310007





LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung IMPLEMENTASI KEBLIJAKAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)  
SPK: No.B-113/Un.05/V.2/PP.09.9/03/2018, Tgl 21 Maret 2018, Keg. 4 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar .... dari ....

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Sabtu, 7 April 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Kompilasi pedoman operasional Penelitian.
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Tersusunnya; Kompilasi pedoman operasional Penelitian. Berisi: pedoman operasional penelitian berisi: pendahuluan, konsep, Metode, Kerangka, Jadwal Kisi-Kisi, IPR. I, II dan III.
4. Catatan kemajuan: (Hal yang di peroleh)	Dimilikinya: Kompilasi pedoman operasional penelitian. Berisi: pedoman operasional penelitian, berisi: Pendahuluan, Konsep, Metode, Kerangka, Jadwal, Kisi-Kisi, IPR. I, II dan III untuk kepentingan Penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI; studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat Dan Banten.
5. Kendala	- lancar
6. Kesimpulan dan saran	Dengan dimilikinya Kompilasi pedoman operasional penelitian. Di harapkan dapat menunjang kelancaran Terhadap pelaksanaan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI; studi PTKIS Kopertais wilayah II. Jawa Barat Dan Banten.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Penyajian Rapor: Review Pedoman dan Instrumen Penelitian

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Ruzdiana, MIM  
NIP. 1962042135000101001

Catatan:

- Bila kolom yg tersedia tidak cukup dapat ditambahkan pada halaman berikutnya.
- Dite-tulis berupa tabel/gambar dicomplexkan pada halaman belakang.

Bandung, 7 April 2018.  
Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP. 196209201991031001

Catatan Money:

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,

Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Ua.05/V.2/P79.00.0/03/2018, Tgl 21 Maret 2018, Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar ... dari ...

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Maret, 12 April 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Pelaksanaan Rapat : Rewew pedoman dan instrumen Penelitian.
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	untuk Memastikan pedoman penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten" telah sesuai dengan ketentuan Uniaah dan Tujuan Kontrak Penelitian.
4. Catatan kemajuan: (Hal yang diarahkan)	Dimilikinya Rekomendasi / Kesepahaman Pakar dan Teman Sejawat, yang Memastikan Pedoman penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten" dianggap telah valid, kredibel dan dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah maupun administratif ( bukti .Berita Acara rapat, Terlampir)
5. Kendala	- lancar -
6. Kesimpulan dan saran	Dengan dimilikinya Pedoman dan instrumen penelitian, Valid, Kredibel, diharapkan dapat Menunjang Kelancaran terhadap pelaksanaan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi PTKIS Kopertis wilayah II Jawa Barat dan Banten" yang Valid, Kredibel dan akuntabel.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Persiapan; Rencana observasi lokal Penelitian.

Mengesahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP. 1960042119880201001

Catatan:

- Bila kolom yg tersedia tidak cukup harus ditambahkan pada halaman berikutnya;
- Bila hasil berupa tabel/gambar dicantumkan pada halaman belakang.

Bandung, 12 April, 2018.  
Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP. 196209201991031001

Catatan Minori:  
Kepala LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,

Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007





LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung IMPLEMENTASI Kebijakan SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Lj.05/V.2/PP.00.003/2018, Tgl 21 Maret 2018. Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar ... dari ...

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Selasa, 17 April 2018
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Pertiapan: Rencana observasi lokasi penelitian.
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Tersusunnya; Kesiapan Rencana observasi lokasi penelitian, meliputi: - Surat tugas dan spps penelitian. - Pedoman dan instrumen observasi. - Biaya observasi
4. Catatan kemajuan (hasil yang diperoleh)	Dimiliki: Kesiapan Rencana observasi lokasi penelitian untuk kepentingan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertais wilayah II Jawa Barat dan Banten.
5. Kendala	- Tidak
6. Kesimpulan dan saran	Dengan dimilikinya Kesiapan Rencana observasi lokasi penelitian, diharapkan dapat menunjang kelancaran terhadap pelaksanaan penelitian; "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi PTKIS Kopertais wilayah II Jawa Barat dan Banten" yang valid, kredibel dan Akuntabel.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Pelaksanaan: Observasi lokasi penelitian di 24 PTKAIS Kopertais Wilayah II Jabar Banten

Mengetahui dan menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rudianna, MM  
NIP. 198104211996001401

Catatan:

- Bila kolom yg tersedia tidak cukup harap dimajukan pada halaman berikutnya;
- foto hasil berupa tabel/gambar ditempatkan pada halaman belakang.

Bandung, 17 April 2018.  
Anggota peneliti,

Drs. Nashudin, MPd.  
NIP. 19820601991031001

Cetakan Minireu:  
a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,

Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.903/2018, Tgl 21 Maret 2018, Krg. 6 bulan sampai Tgl. 29 Agustus 2018

Lembar ... dari ...

1. Tanggal/Waktu/Tahun	Sabtu 21 April 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Observasi di empat PTKIS lokasi penelitian. - UNMA padedjlang dan IAIB Serang/Nasihudin SPPD. 19/4/18 - STAI Fatahillah Tangerang dan STAI Al-Karimiyah Depok/ A. Kusdiana, ST dan SPPD 19/4/2018.
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Diperolehnya: Data hasil observasi dari 4 PTKIS LINMA, IAIB, STAI Fatahillah dan STAI Al-Kharimiyah. Meliputi: - Latar Alamiyah lokasi 4 PTKIS. - Kondisi Kelembagaan 4 PTKIS - Sistem/pola pengembangan PT. 4 PTKIS. - Program pengembangan Akademik 4 PTKIS.
4. Catatan kemasukan: (Hasil yang diperoleh)	Dimilikinya: Data hasil observasi dari 4 PTKIS: LINMA, IAIB, STAI Fatahillah dan STAI Al-Kharimiyah untuk kepentingan penyusunan laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten.
5. Kendala	- Lancar.
6. Kesimpulan dan saran	Dengan dimilikinya data hasil observasi lokasi penelitian dari: UNMA, IAIB STAI Fatahillah dan STAI Al-Karimiyah, diharapkan dapat menunjang kelancaran penyusunan laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dlm Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi PTKIS Kopertais Wil II Jabar Dan Banten" yg Valid Kredibel dan Akuntabel.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Pelaksanaan: observasi lokasi penelitian STAI Latansa IAIN Laoreiba, UINU Jember, STAI Kharisma

Mengetahui dan menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MPA  
NIP. 1961042119860801001

Catatan:

- Bila halaman yg tersedia tidak cukup harus ditambahkan pada halaman berikutnya.
- Bila hasil berupa tabel/lampiran ditunjukkan pada halaman belakang.

Bandung, 21 April 2018.

Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP. 196209201991031001

Catatan Monev:  
a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,

Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI

(Studi pada PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/UJr.05/V.2/PP.00.W03/2018, Tgl 21 Maret 2018, Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar .... dari ....

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Selasa, 24 April 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	observasi di empat PTKIS lokasi penelitian: - STAI LATANSA dan IAIN LAARIBA /Kusnudin, ST, dan PPP.19/v/18 - UINWA Begera dan Kharisma Sukabumi/A.Rusdiana, PT
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Diperolehnya : Data hasil observasi dari 4 PTKIS : STAI LATANSA, IAIN LAARIBA, UINW Juanda, dan STAI Kharisma. Meliputi : - Latar belakang lokasi 4 PTKIS. - Kondisi kelembagaan 4 PTKIS. - Sistem pola pengembangan PT. 4 PTKIS. - Program pengembangan Akademik 4 PTKIS.
4. Catatan kemajuan (hasil yang diperoleh)	Diperolehnya : Data hasil observasi dari 4 PTKIS : STAI LATANSA, IAIN LAARIBA, UINW Juanda, dan STAI Kharisma untuk kepentingan penyusunan Laporan penelitian " Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI : Studi Pada PTKIS Kopertis wilayah II Jawa Barat dan Banten.
5. Kendala	- lancar.
6. Kesimpulan dan saran	Dengan dimilikinya data hasil observasi lokasi penelitian dari : STAI Latansa, IAIN LAARIBA, UINW Juanda dan STAI Kharisma, di harapkan dapat menunjang kelancaran penyusunan laporan penelitian : " Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI : Studi PTKIS Kopertis wilayah II Jawa Barat dan Banten " yg Valid Kredibel dan Akuntabel.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Pelaksanaan observasi lokasi penelitian STAI Sukabumi Nurul Hikmah Clamuk, STAI Agus Salim Bekasi, STAI AS-Bekdiklat Jaki Karawang

Mengetahui/ Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP. 1961042119860201001

Catatan:

- Bila kolom yg tersedia tidak cukup harus ditambahkan pada halaman berikutnya;
- Bila hasil berupa tabel/gambar ditempelkan pada halaman berikutnya.

Bandung, 24 April 2018 -  
Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP. 196209201991031001

Catatan Moner:  
a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007



**KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung IMPLEMENTASI Kebijakan SKPI**  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018, Tgl 21 Maret 2018, Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar .... dari ....

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Kamis 26 April 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Observasi di Empat PTKIS (loasi) penelitian: STAI Sukabumi, Aluruc Hikmah Cianjur, Siti Aminah ST dan STAI Agus Sa'im Bekasi, As-Siddiqiyah, A. Rusdiana dan 19/4/18.
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Diperolehnya: Data hasil observasi dari 4 PTKIS. STAI Sukabumi, Aluruc Hikmah Cianjur, Siti Agus Sa'im Bekasi dan STAI As-Siddiqiyah Karawang. Melalui: - Latar akademik lokasi 4 PTKIS. - Kondisi kelembagaan 4 PTKIS. - Sistem/pola pengembangan PT 4 PTKIS. - Program Pengembangan Akademik 4 PTKIS.
4. Catatan kemajuan (hasil yang diperoleh)	Diusulkannya: Data hasil observasi dari 4 PTKIS: STAI Sukabumi, Aluruc Hikmah Cianjur, Siti Agus Sa'im Bekasi dan STAI As-Siddiqiyah Karawang, untuk kepentingan penyusunan Laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten".
5. Kendala	- Lanjut.
6. Keunggulan dan saran	Dengan dimilikinya data hasil observasi lokasi penelitian dari STAI Sukabumi, Aluruc Hikmah Cianjur, Siti Agus Sa'im Bekasi, dan STAI As-Siddiqiyah Karawang diharapkan dapat menunjang kelancaran penyusunan Laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten" yang valid, kredibel dan akurat.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Pelaksanaan: observasi lokasi penelitian STAI, E.2. murtadin Purwokerto, Riyadhu Jamah, STAI Darma STAI

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP. 1962042110860001001

Catatan:

- Bila kolom yg tersedia tidak cukup harap diuliskan pada halaman berikutnya.
- Bila hasil teraca tabel/gambar di lampirkan, pada halaman belakang.

Bandung, 26 April 2018.  
Anggota peneliti,

Dr. Nasihudin, MPd.  
NIP. 196208201991031001

Catatan Monev:

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung IMPLEMENTASI Kebijakan SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.W03/2018, Tgl 21 Maret 2018, Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar ... dari ...

1. Tanggal/bulan/tahun	Sabtu, 28 April 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Observasi di Empat PTKIS Lokasi Penelitian - STAI Ea. Muttra'in, Pak. Riyadhul Jannah, Nasihudin/St. SPPD 19/4/18 - STAIS Dharma, dan STAI Cirebon. Rusdiana /st. SPPD 19/04/18.
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Diperolehnya : Data hasil observasi dari 4 PTKIS STAI, Ea. MUTTRA'in, Riyadhul Jannah, STAIS Dharma dan STAI Cirebon. meliputi : - Latar alamiah lokasi 4 PTKIS. - Kondisi Kelembagaan 4 PTKIS. - Sistem / Pola Pengembangan PT. 4 PTKIS - Program Pengembangan Akademik 4 PTKIS
4. Catatan kemajuan: (poin yang diperoleh)	Dimilikinya : Data hasil observasi dari 4 PTKIS: STAI Ea. Muttra'in, Riyadhul Jannah, STAIS Dharma dan STAI Cirebon, untuk Keperluan Penyusunan Laporan Penelitian " Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi Pola PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten .
5. Kendala	- lancar .
6. Kesimpulan dan saran	Dengan dimilikinya data hasil observasi Lokasi Penelitian dari : STAI Ea. Muttra'in, Riyadhul Jannah, STAIS Dharma, dan STAI Cirebon, di karapkan dapat Menunjang Kelancaran Penyusunan Laporan Penelitian " Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten " yg Valid Kredibel dan Akuntabel .
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Pelaksanaan : Observasi Lokasi Penelitian LANSIA, STAI PUTRA Galuh, STAI. M.H. Al- Azhar, dan STAI NU.

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP. 1961042119950201001

Catatan:

- Bila dalam yg terdapat tidak cukup temp ditambahkan pada halaman berikutnya;
- Bila hasil berupa tabel/gambar disempatkan pada halaman belakang.

Bandung, 28 April 2018,  
Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP. 196203201991031001

Catatan Menaw:

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,

Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007





LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)  
SPK: No.B-113/Uh.05/V.2/PP.00.9/03/2018, Tgl 21 Maret 2018, Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar .... dari ....

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Rabu 2 Mei 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Observasi di Empat PTKIS lokasi penelitian. - UINSA Kuningan dan STAI PUTRA GALUH Nasihudin /ST/SPP. 13/4 - STAI MH AL-Ashar Banjar dan STAINU Tasikmalaya Rusdiana /ST dan SPP 13/4/2018.
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Diperolehnya: Data hasil observasi dari 4 PTKIS ; UINSA, STAI PUTRA GALUH, STAI MITAHUL HUDA BANJAR, STAINU TASIKMALAYA. Melalui : - Latar belakang lokasi 4 PTKIS. - Kondisi Kelembagaan 4 PTKIS - Sistem/pola pengembangan ST 4 PTKIS. - Program pengembangan Akademik 4 PTKIS.
4. Catatan kemajuan (Hal yang diperoleh)	Dimilikinya: Data hasil observasi dari 4 PTKIS; UINSA STAI PUTRA GALUH, STAI MH AL-Ashar dan STAINU. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Penelitian. "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten".
5. Kendala	- lancar.
6. Kesimpulan dan saran	Dengan dimilikinya data hasil observasi lokasi penelitian dari: UINSA, STAI PUTRA GALUH, STAI MH AL- Ashar dan STAINU, diharapkan dapat menunjang kelancaran penyusunan Laporan Penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten yg valid, kredibel dan akademik".
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Pelaksanaan observasi lokasi penelitian LAIC, TASIKMALAYA STAI, SILUWANGI GARUT.

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP. 1961042119880201001

- Catatan:
- Bila lembar yg tertera tidak cukup harus ditambahkan pada halaman berikutnya;
  - Bila terdapat tabel/gambar ditambahkan pada halaman belakang.

Bandung, 2 Mei 2018.  
Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP. 196206201991031001

Catatan Menonjol:  
a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,

Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBLIAKAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Ua.02/V.2/PP.00.003/2018, Tgl 21 Maret 2018, Kpg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lambar ... dari ...

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Sabtu, 5 Mei 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Observasi di empat PTKIS lokasi penelitian, -IAIE Tosikmalaga dan STAI Sitiwangi Garut Nasihudin IST/SPPD 19/4/2018.
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (mencakup program)	Diperolehnya: Data hasil observasi dari 2 PTKIS Penelitian IAIE Tosik, STAI Sitiwangi Garut meliputi: - Latar alamiah lokasi 2 PTKIS. - Kondisi ketembagaan 2 PTKIS. - Sistem/pola pengembangan PT 2 PTKIS. - Program pengembangan Akademik 2 PTKIS.
4. Catatan kemajuan: (hasil yang di peroleh)	Dimilikinya: Data hasil observasi dari 2 PTKIS Penelitian IAIE Tosik, STAI Sitiwangi Garut untuk kepentingan penyusunan laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten".
5. Kendala	- lancar
6. Kesimpulan dan saran	Dengan dimilikinya data hasil observasi lokasi penelitian dari: penelitian IAIE Tosik, STAI Sitiwangi Garut, diharapkan dapat menunjang kelancaran penyusunan laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam mendukung implementasi Kebijakan SKPI: Studi PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten" yang valid, kredibel
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Pelaksanaan observasi lokasi penelitian STAI Al-Fatih Ci Balengka Bandung.

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rudianto, MM  
NIP: 19610401198002001001

Catatan:

- Bila kolom yg tersedia tidak cukup bisa ditambahkan pada halaman berikutnya.
- Bila hasil berupa tabel/gambar ditempelkan pada halaman belakang.

Bandung, 5 Mei 2018.

Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP: 196200201991001001

Catatan Money:  
a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,

Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP: 1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: Na.B-113/Lh.05/V.2/PP.00.903/2018. Tgl 21 Maret 2018. Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar ... dari ....

1.	Tanggal/Bulan/Tahun	Selasa, 8 Mei 2018.
2.	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Observasi di satu PTKIS lokasi penelitian. - STAI AL-Falah Cicalengka kab Bandung A. Rusdiana /ST/ SPPP 19/4/2018
3.	Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Diperoleh: Data hasil observasi dari STAI AL-Falah Cicalengka kabupaten Bandung Meliputi: - Latar alamiah lokasi PTKIS. - Kondisi kelembagaan PTKIS. - Sistem pola pengembangan PT. PTKIS. - Program pengembangan Akademik PTKIS.
4.	Catatan kemajuan (hasil yang diperoleh)	Dimilikinya: Data hasil observasi dari STAI AL-Falah Cicalengka kab. Bandung. Untuk kepentingan penyusunan laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI; Studi Pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat Dan Banten.
5.	Kendala	- lancar.
6.	Kesimpulan dan saran	Dengan dimilikinya data hasil observasi lokasi penelitian dari: STAI AL-Falah Cicalengka kab Bandung, di harapkan dapat Menunjang kelancaran penyusunan laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi PTKIS Wilayah II Jawa Barat Dan Banten" yg valid, kredibel dan akurat tabel.
7.	Rencana kegiatan selanjutnya	Pelaksanaan: observasi lokasi penelitian, STAI Siliwangi Cimahi.

Mengotahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Riset

Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP: 1961022119860201001

Catatan:  
- Bila kolom yg tersedia tidak cukup harap diembesakan pada halaman berikutnya.  
- Bila hasil berupa tabel/gambar ditampikan, pada halaman belakang.

Bandung, 8 Mei 2018.  
Anggota peneliti

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP:196209201991031001

Catatan Monev:  
an. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP:1971082719980310007





LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung IMPLEMENTASI Kebijakan SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPE: No.B-113/Ux.05/V.2/PP.05.9/03/2018, Tgl 21 Maret 2018, Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lambar .... dari ....

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Rabu 9 Mei 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Observasi ke satu PTKIS lokasi penelitian. - STAI Siliwangi Cimahi. Rusdiana/ST/SPPD/19-4-B.
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Diperoleh: Data hasil observasi dari STAI Siliwangi Cimahi meliputi: - Latar alamiah lokasi PTKIS. - Kondisi Kelembagaan PTKIS. - Sistem pola pengembangan PTKIS. - Program Pengembangan Akademik PTKIS.
4. Catatan Remaja/asi (hasil yang diperoleh)	Dimilikinya: Data hasil observasi dari STAI Siliwangi Cimahi. Untuk kepentingan penyusunan laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dlm mendukung implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten.
5. Kendala	- lancar.
6. Keimanan dan saran	Dengan dimilikinya data hasil observasi lokasi penelitian dari: STAI Siliwangi Cimahi; diharapkan dapat menunjang kelancaran penyusunan laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam mendukung implementasi Kebijakan SKPI: Studi PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten" yg valid, kredibel dan akuntabel.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Formulasi hasil observasi dari 24 PTKIS lokasi penelitian. dan penyiapan penyebaran IPP penelitian.

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP. 196209211998031001

Catatan:

- Bila kolom yg tersedia tidak cukup harap ditambahkan pada halaman berikutnya;
- Bila hasil berupa tabel/gambar ditempelkan pada halaman belakang.

Bandung, 9 Mei 2018.  
Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP.1962092019981031001

Catatan Monev:  
a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung IMPLEMENTASI Kebijakan SKPI

(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No B-113/Un.05/V.2PP.00.9/03/2018, Tgl 21 Maret 2018, Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar ... dari ...

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Sabtu, 12 Mei 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	- Formulasi hasil observasi dari 24 PTKIS lokasi penelitian - Penyiapan penyebaran IPP Studi Dok penelitian.
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	1. Tersusun dan Terpilihnya: Data hasil observasi dari 24 PTKIS lokasi penelitian meliputi: - Latar belakang lokasi PTKIS. - Kondisi kelembagaan PTKIS. - Sistem/pola pengembangan PTKIS. - Program Pengembangan Akademik PTKIS. 2. Guna/kegunaan Administrasi dan banyunya penyebaran IPP penelitian untuk 24 PTKIS lokasi penelitian.
4. Catatan kemajuan: (hasil yang diperoleh)	Dimilikinya: Data hasil observasi dari 24 PTKIS yang sudah tersusun dan terpilih, untuk kepentingan pengisian laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten."
5. Kendala	- Lancar.
6. Kesimpulan dan saran	Dengan dimilikinya Data hasil observasi dari 24 PTKIS yang sudah tersusun dan terpilih, diharapkan dapat menunjang kelancaran penyusunan laporan penelitian: "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung implementasi Kebijakan SKPI: Studi PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten" yang valid, kredibel dan akuntabel.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Pelaksanaan Penyebaran IPP II Studi Dokumen/data Kesiapan implementasi SKPI.

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP: 196104211960201001

Catatan:

- Hal lain yg tersedia tidak cukup harus ditambahkan pada halaman berikutnya.
- Hal hasil berupa tabel/penulisan diampikan, pada halaman berikut.

Bandung, 12 Mei 2018.

Anggota peneliti,

Dr. Nasihudin, MPd.  
NIP: 196209201991031001

Catatan Moniev:

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP: 1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI (Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Un.05/V.2/PP.90/903/2018, Tgl 21 Maret 2018, Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar ... dari ...

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Selasa, 15 Mei 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Penyebaran IPD II Dokumen/Data Kesiapan Implementasi SKPI UNMA Pandeglang dan IAIN Serang/Masihudin, ST PPP, F/15/18. STAI Fatahillah, Tangerang dan Al-Karimiyyah Depok. Roudiana F/15/18
3. Tujuan kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Tersedianya IPD III. Dokumen/Data Kesiapan Implementasi SKPI ke 4 PTKIS : UNMA, IAIN, STAI Fatahillah dan STAI Al-Karimiyyah, meliputi dokumen/data : - Penetapan atau Interpretasi Kebijakan penerapan SKPI - Pengorganisasian Penerapan Kebijakan SKPI. - Strategi Penerapan Kebijakan SKPI - Mendata dan Solusi dari Implementasi Kebijakan SKPI
4. Catatan kemajuan: (Hasil yang diperoleh)	Sampainya IPD III Dokumen/Data Kesiapan Implementasi SKPI ke 4 PTKIS : UNMA, IAIN, STAI, Fatahillah dan STAI Al-Karimiyyah. Untuk kepentingan penyusunan dokumen/data penulisan: "Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi Pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten".
5. Kendala	Lancar.
6. Kesimpulan dan saran	Dengan Tersebar dan Sempainya IPD III Dokumen/Data Kesiapan Implementasi SKPI ke : UNMA, IAIN, STAI Fatahillah dan STAI Al-Karimiyyah, diharapkan dapat menunjang kelancaran pengisian data/dokumen penulisan "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi PTKIS, Kopertais wilayah II Jawa Barat dan Banten" yg Valid, Kredibel dan akuntabel.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Pelaksanaan: Penyebaran IPD II ke STAI. Latansa IAIN, LAA Raha, UINU Juanda, dan STAI Khanisma.

Mengakhiri/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,  
  
Dr. H. A. Roudiana, MM  
NIP: 1962042119900201001

Bandung, 15 Mei 2018.  
Anggota peneliti,  
  
Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP: 196209011991031001

- Catatan
- Sila laman yg tersedia tidak cukup lengkap ditambahkan pada halaman berikutnya.
  - Sila hasil berupa tabel/gambar ditampikan pada halaman berikut.

Catatan Monev:  
a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,  
  
Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP: 1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Up.25/V.2/PP.08.903/2018, Tgl: 21 Maret 2018, Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar ... dari ...

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Sabtu, 19 Mei 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Penyebaran IPD III Dokumen /Data Kesiapan Implementasi SKPI. STAI Latansa dan IAIN LAARIBA / Nasihudin ST dan SPPD 17/5/18 - UINIBB Bogor dan STAI Kharisma Sub/A Kusuma, ST. SPPD. 17/5/18.
3. Tujuan kegiatan/Sub Kegiatan (tujuan program)	Tersebarannya IPD III Dokumen /Data Kesiapan Implementasi SKPI ke 4 PTKIS : STAI Latansa, IAIN LAARIBA, UINU Juanda, dan STAI Kharisma, meliputi dokumen / data : - Penafsiran atau Interpretasi Kebijakan penerapan SKPI. - Pengorganisasian penerapan Kebijakan SKPI. - Strategi penerapan Kebijakan SKPI. - Kendala dan solusi dalam implementasi Kebijakan SKPI.
4. Catatan kemajuan (hasil yang dicapai)	Sampainya IPD III Dokumen /Data Kesiapan Implementasi SKPI ke : STAI Latansa, IAIN LAARIBA, UINU Juanda dan STAI Kharisma. Untuk kepentingan Pengurusan Dokumen /Data penerapan "Kesiapan PTKIS dalam mendukung implementasi Kebijakan SKPI Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten".
5. kendala	- Lancar.
6. Kesimpulan dan saran	Dengan tersebar dan Sampaainya IPD III Dokumen /Data Kesiapan Implementasi SKPI ke : STAI LATANSA, IAIN LAARIBA, UINU Juanda, dan STAI Kharisma, diharapkan dapat menunjang kelancaran penerapan data /dokumen penerapan "Kesiapan PTKIS dalam mendukung implementasi Kebijakan SKPI: Studi PTKIS Kopertais wilayah II Jawa Barat dan Banten" yang valid, kredibel dan akurat.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Pelaksanaan : Penyebaran IPD III ke STAI Sukabumi, NUR HIKMAH OTOMOR, STAI AGUS SALIM Bekasi dan STAI As-Solihiyah, Karawang

Mengelaborasi/Menyetujui:

Ketua Tim Panel

Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP. 1961042119860001001

Catatan:

- Sila hapus ng tanda fisik yang bisa dibubarkan pada halaman berikutnya.
- Sila hapus cetak langsung oleh peneliti pada halaman selanjutnya.

Bandung, 19 Mei 2018,  
Anggota Tim Panel

Drs. Nasibudin, MPd.  
NIP. 196200201991031001

Catatan Manev:

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007





LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018, Tgl 21 Maret 2018, Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar ... dari ...

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Selasa 22 Mei 2018
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Penyebaran IPD III Dokumen /Data Kesiapan Implementasi SKPI ke STAI Sukabumi, Nurul Hikmah Cianjur, STAI Agus Salim dan STAI As-Siddiqiyah. Rusdiana. SPID. 7/5/18
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Tersebaranya IPD III Dokumen /Data Kesiapan Implementasi SKPI ke 4 PTKIS : STAI Sukabumi, Nurul Hikmah Cianjur, STAI Agus Salim dan STAI As-Siddiqiyah meliputi Dokumen/da - Penafsiran atau interpretasi kebijakan penerapan SKPI - Pengorganisasian penerapan kebijakan SKPI. - Strategi penerapan kebijakan SKPI : - Kendala dan Solusi dan Implementasi Kebijakan SKPI.
4. Catatan kemajuan (Hasil yang di peroleh)	Sampainya IPD III Dokumen /Data Kesiapan Implementasi SKPI ke STAI Sukabumi, Nurul Hikmah Cianjur, STAI Agus Salim Bekasi dan STAI As-Siddiqiyah Karawang Unsur kepentingan penyusunan Dokumen /Data Penelitian & Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI : Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten.
5. Kendala	- linear.
6. Kesimpulan dan saran	Dengan Tersebar-nya Sampaainya IPD III Dokumen /Data Kesiapan Implementasi SKPI ke STAI Sukabumi, Nurul Hikmah Cianjur, STAI Agus Salim Bekasi STAI As-Siddiqiyah diharapkan dapat menunjang kelancaran pengisian data /dokumen penelitian ; Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI : Studi PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten yang valid, kredibel dan akuntabel.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Pelaksanaan : Penyebaran IPD III ke STAI EL MUTTAHIN Riqadatul Jannah ; STAI Dharma, dan STAI Cibeon

Mengetahui/Menyetujui:

Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MM

NIP: 1961042119980001001

Catatan:

- Bila kolom yg tertera tidak cukup harap ditambahkan pada halaman berikutnya
- Sila hasil berupa tabel/gambar diterserikan pada halaman belakang.

Bandung,

Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.

NIP: 196209201991001001

Catatan Monev:

a.n. Ketua LP2M,

Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag

NIP: 1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018, Tgl. 21 Maret 2018, Kag. 6 bulan sampai Tgl. 30 Agustus 2018

lembar ..... dari .....

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Sabtu, 26 Mei 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Penyebaran IPP III Dokumen /data Kesiapan Implementasi SKPI ke STAI EA MUTTAQIN pwk, Riyadhu Jannah, Nasihudin SPPD.7/5/18; - STAI DHARMA dan STAI Cirebon Rusdiana ST/SPPD.7/5/18.
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sewal program)	Tersebarannya IPP III Dokumen /data Kesiapan Implementasi SKPI ke 4 PTKIS : STAI EA MUTTAQIN, Riyadhu Jannah, STAI DHARMA, dan STAI Cirebon, meliputi Dok /data : - Denafiran atau Interpretasi Kebijakan Penerapan SKPI - Pengorganisasian penerapan Kebijakan SKPI - Strategi Penerapan Kebijakan SKPI. - Mendaftar dan Socusi dalam Implementasi Kebijakan SKPI.
4. Catatan kemajuan (hasil yang diperoleh)	Bampainya IPP III Dokumen /data Kesiapan Implementasi SKPI ke STAI EA MUTTAQIN, Riyadhu Jannah; STAI DHARMA, dan STAI Cirebon. Untuk kepentingan penyusunan Dok /data penelitian " Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI; Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten.
5. Kendala	- Lantar.
6. Kesimpulan dan cara	Dengan tersebar dan Bampainya IPP III Dokumen /data Kesiapan Implementasi SKPI ke STAI EA MUTTAQIN, Riyadhu Jannah; STAI DHARMA, dan STAI Cirebon diharapkan dapat menunjang kelancaran penyusunan dokumen /data penelitian " Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten " yang Valid Kredibel dan akuntabel.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Pelebaran: Penyebaran IPP III ke-UMISA, STAI PUTRA BAWA, STAI MH AL ADHAR dan STAINU.

Mengetahui/Memotivasi:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdjana, MM  
NIP. 1960042119860201001

Bandung, 26 Mei 2018  
Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, M.Pd.  
NIP. 1962092019804021001

Catatan:  
- Bila kolom yg tersedia tidak cukup harap diembeskan pada halaman berikutnya.  
- Bila hasil berupa tabel/gambar di tempelkan pada halaman belakang.

Catatan Monev:

o. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,

Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007





LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBLIKIAN SKPI

(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Uh.05/V.2/PP.00.9/03/2018, Tgl 21 Maret 2018, Keg. 6 bulan sampai Tgl 20 Agustus 2018

Lembar ... dari ...

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Sabtu, 2 Juni 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Pengembangan IPP III Dokumen/Data Kesiapan Implementasi SKPI AIE Tasikmalaya dan STAI Siuwangi Garut Nasihudin /SPP. 9/S STAI Al-Falah Cicalengka Kab. Bandung Rusdiana /SI/SPP. 7/S/11
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Tersebar nya IPP III Dokumen/Data Kesiapan Implementasi SKPI ke 2 PTKIS ; Penelitian AIE Tasik, STAI Siuwangi Garut dan STAI Al-Falah Cicalengka Melalui Dok/data: - Penafsiran atau Interpretasi Kebijakan Penerapan SKPI - Pengorganisasian penerapan Kebijakan SKPI. - Strategi Penerapan Kebijakan SKPI. - kendala dan solusi dalam implementasi Kebijakan SKPI
4. Catatan kemajuan: (hasil yang diperoleh)	Sampainya IPP III Dokumen/Data Kesiapan Implementasi SKPI ke : Keresmasik, STAI Siuwangi Garut, dan STAI Al-Falah Cicalengka untuk kepentingan penyusunan Dokumen/data Kesiapan PTKIS dalam Mendukung implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten.
5. Kendala	- Lantar.
6. Kesimpulan dan saran	Jangan Tersebar dan Sempainya IPP III Dokumen /Data Kesiapan Implementasi SKPI ke : Penelitian AIE Tasik, STAI Siuwangi Garut dan STAI Al-Falah Cicalengka, diharapkan dapat menunjang kelancaran penyusunan dokumen /data Kesiapan PTKIS dalam Mendukung implementasi Kebijakan SKPI: Studi PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten" yang valid, kredibel dan akuntabel.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Dilaksanakan, Penyebaran ke STAI Siuwangi Cimahi.

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Benceliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP: 1962042319810010001

Catatan:

- Bila kolom yg tersedia tidak cukup harap ditambahkan pada halaman berikutnya
- Bila hasil berupa tabel/gambar dimasukkan pada halaman belakang.

Bandung, 2 Juni 2018  
Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP: 196206201991031001

Catatan Monev:

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP: 1971082719980310007





LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Lt.05/V.2/PP.00.9/03/2018. Tgl 21 Maret 2018. Kag. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar ... dari ...

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Selasa 5 Juni 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Penyusunan IPD III Dokumen /Data Kesiapan Implementasi SKPI - SMA Siliwangi Cimahi. Rusdiana /st/sppd 7/5/2018.
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Tersebarannya IPD III Dokumen /Data Kesiapan Implementasi SKPI ke SMA Siliwangi Cimahi, meliputi dok /data: - Penafsiran atau Interpretasi Kebijakan Penerapan SKPI. - Pengorganisasian Penerapan Kebijakan SKPI. - Strategi Penerapan Kebijakan SKPI. - Kendala dan Solusi dalam Implementasi Kebijakan SKPI.
4. Catatan kemajuan (Hal yang diperoleh)	Dimilikinya: Data hasil observasi dari SMA Siliwangi Cimahi: untuk kepentingan penyusunan dok /data. Penemuan: * Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten.
5. Kendala	- Lancar.
6. Kesimpulan dan saran	- Dengan Tersebar dan Sampaiannya IPD III Dokumen /Data Kesiapan Implementasi SKPI ke SMA Siliwangi Cimahi: diharapkan dapat menunjang kelancaran penyusunan dok/data penelitian; * Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten " yang valid kredibel dan akuntabel.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Pengiapan laporan Progres penelitian 60 %.

Mengesahul/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP. 195004211980001001

Catatan:

- Bila akan di terasda tidak cukup maka ditamhakan pada halaman berikutnya.
- Bila hari bersisa maka gambar ditampikan pada halaman belakang.

Bandung, 5 Juni 2018  
Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP. 196209201991031001

Catatan Monerv:  
a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.003/2018. Tgl 21 Maret 2018. Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar ... dari ...

1.	Tanggal/Bulan/Tahun	Rabu 6 Juni 2018 .
2.	Nama Kegiatan/Sub kegiatan	Penyiapan laporan progres penelitian 60% Penyusunan Bab I
3.	Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Tersusunnya Bab I penelitian meliputi: Pendahuluan. - latar belakang masalah, - Perumusan masalah, - Tujuan penelitian dan - Signipikansi penelitian .
4.	Catatan kemajuan (hasil yang diperoleh)	Dimilikinya ; bab I penelitian . Untuk memenuhi laporan 60% Progres penelitian " Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI Studi Pada PTKIS Kopertais wilayah II Jawa Barat Dan Banten .
5.	Kendala	- linear .
6.	Kesimpulan dan saran	Dengan dimilikinya Bab I penelitian, diharapkan dapat memenuhi laporan 60% Progres penelitian " Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat Dan Banten " yang Valid Kredibel dan akuntabel .
7.	Rencana kegiatan selanjutnya	Penyiapan laporan Progres Penelitian 60% Penyusunan Bab II Sub A dan B .

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP: 1961042119860201001

Catatan:

- Bila belum ada tanda tangan cukup foto ditandatangani pada halaman berikutnya;
- Bila hasil berupa tabel/gambar ditandatangani pada halaman belakang.

Bandung, 6 Juni 2018  
Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP:196205201991031001

Catatan Monev:

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP:1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung IMPLEMENTASI Kebijakan SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018, Tgl 21 Maret 2018, Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar .... dari ....

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Kamis. 7 Juni 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Penyiapan Laporan Progres penelitian 60% Penyusunan Bab II
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Tersusunnya Bab II penelitian meliputi: Bab II Tinjauan pustaka (A-B) A. Konsep Dasar Kesiapan Implementasi Kebijakan B. Konsep dan teori Implementasi Kebijakan C. Penerapan SKPI sebagai kebijakan pendidikan tinggi menghadapi era persaingan. D. Penelitian Terdahulu.
4. Catatan kemajuan: (hasil yang diperoleh)	Dimilikinya : Bab II penelitian, untuk memenuhi laporan 60% Progres penelitian, * Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI : Studi pada PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten
5. Kendala	- lancar
6. Kesimpulan dan saran	Dengan dimilikinya Bab II penelitian, diharapkan dapat memenuhi laporan 60% Progres penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI : Studi PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten" yang valid, kredibel dan akuntabel.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Penyiapan Laporan Progres penelitian 60% Penyusunan Bab II Lanjutan Sub C dan D.

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP. 19621041119903201001

Catatan:

- Sila kalore yg tertera tidak cukup harus diperjelas pada halaman berikutnya;
- Sila hasil berupa tabel/gambar ditempatkan pada halaman belakang.

Bandung,  
Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP. 196209201991091001

Catatan Monev:

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Un.05/V.2/P.00.9/03/2018, Tgl 21 Maret 2018. Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar .... dari ....

1.	Tanggal/Bulan/Tahun	Jumat 8 Juni 2018.
2.	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Penyusunan Laporan Progres Penelitian 60% Pengusunan Bab III Metode Penelitian.
3.	Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Tersusunnya Bab III penelitian meliputi: Bab III Metode penelitian. A. Desain penelitian B. Prosedur penelitian C. Teknik /cara pengumpulan data. D. Metode Analisis Data dan pengolahan data.
4.	Catatan kemajuan: (hasil yang diperoleh)	Dimulainya: Bab III penelitian. Untuk Memenuhi laporan 60% progres penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten.
5.	S kendala	- Lancar.
6.	Kesimpulan dan saran	Dengan dimulainya Bab III penelitian, diharapkan dapat memenuhi laporan 60% progres penelitian: Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi PTKIS Kopertais wilayah II Jawa Barat dan Banten " yang valid, kredibel dan akuntabel.
7.	Rencana kegiatan selanjutnya	Laporan progres penelitian 60% Bab I-II dan III (setelah Cuti bersama dan libur Idul Fitri 11-19/6/18)

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. A. A. Rusdiana, MM  
NIP. 19620401199602101001

Catatan:

- Dokumen yg tersedia diaki cetak harus ditambahkan pada halaman berikutnya;
- foto hasil berupa tabel/gambar diampikan pada halaman belakang.

Bandung,  
Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP.196206201991031001

Catatan Monev:

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP.1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung IMPLEMENTASI Kebijakan SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertals Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Uu.05/V.2/PP.00.9/03/2018, Tgl 21 Maret 2018, Kag. 6 bulan sampai Tgl 20 Agustus 2018

Lambar .... dari ....

1.	Tanggal/Bulan/Tahun	Rabu 20 Juni 2018 .
2.	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Penyampaian Laporan Kegiatan penelitian Tahap I 60%.
2.	Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Pengerahan Laporan penelitian 60% ke pusat Penelitian dan penerbitan LPPM, berdasarkan Spk No. B-113/Uu.05/V.2/PP.00.9/03/2018:(21/3/18) berisi . 1 Bab I- Bab II dan Bab. III 2 Log Book bulan ke III (60%) 3 Spj 60%
4.	Catatan kemajuan: (Hasil yang diperoleh)	Dimilikinya : Bukti Penerimaan dari pusat Penelitian dan penerbitan Lppm tentang penyerahan dokumen progres penelitian . 1. Bab. I- Bab II dan Bab III 2. Log Book Bulan ke III (60%) 3. Spj 60% Bukti Terlampir .
5.	Kendala	- Lancar .
6.	Keimpulan dan saran	Dengan Dimilikinya : Bukti penerimaan dari Pusat Penelitian dan penerbitan Lppm , Tentang Penyerahan dokumen progres penelitian : Bab I- Bab II dan Bab III Log Book Bin ke III (60% dan Spj 60% di harapkan dapat Memenuhi Ketentuan dan Kewajiban Tim Peneliti berdasarkan kaidah Ilmiah dan Ketentuan ketentuan spk penelitian "Kesiapan PTKIS Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI:
7.	Rencana kegiatan selanjutnya	Pelaksanaan : Wawancara dan Pengumpulan data dan Ippm Studi Dokumen /data Kesiapan Implementasi: Spk Di 14 PTKIS Kopertals

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Susilana, MM  
NIP. 196102219850210001

Catatan:

- bila kolom yg tersedia tidak cukup harap ditambahkan pada halaman berikutnya;
- bila hasil berupa tabel/gambar ditempelkan pada halaman belakang.

Bandung, 20 Juni 2018 .  
Anggota Tim Peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP. 196209201991031001

Catatan Monev:

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007

Keterangan:

Log Book ini, disajikan atas kepentingan Laporan Antara (60%) dari kegiatan penelitian.





LAMPIRAN IV  
Laporan Keuangan Tahap I (60%)



**LAPORAN KEUANGAN**  
PENELITIAN TERAPAN DAN PENGEMBANGAN  
PERGURUAN TINGGI

---

**Judul Penelitian**

**KESIAPAN PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAM ISLAM  
DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI**  
(Studi di PTKIS Kopertais Wilayah Ii Jawa Barat Dan Banten)

**Dasar Kegiatan:**

SPK- No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018 Tanggal 21 Maret 2018.

Pelaksanaan : 6 bulan

Waktu : 21 Maret - 20 Agustus 2018

**Kelompok Peneliti**

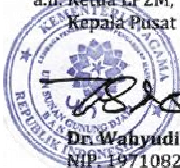
**Ketua Peneliti : Dr. H. A. Rusdianan, MM/ID 20171020150557**

**Anggota : Drs. Nasihudin, MPd./ID 20200620108000**

**Alamat / Telp. : Jl. A.H. Nasution 105 Bandung Tlp. 022. 7800525**

**Mengetahui:**

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



**Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag**  
NIP. 1971082719980310007

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG  
TAHUN 2018**

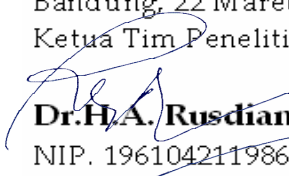
## Rencana Penggunaan Biaya Kegiatan Penelitian

Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi Kebijakan penerapan SKPI

Jenis Kegiatan	Vol/Frek/Satuan			Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
	Vol	Frek	Sat		
<b>A. Pra Kegiatan</b>					
ATK	1	1	PK	503,000	503,000
Foto Copy ref &ref	1	1	PK	707,500	707,500
Konsumsi NS/Peserta	12	1	OA	45,000	540,000
Honor Narasumber Rapat	3	1	JPL	500,000	1,500,000
Uang Saku Peserta Rapat	7	1	OJ	150,000	1,050,000
<b>Sub Total A</b>					<b>4,300,500</b>
<b>B. Pelaksanaan Kegiatan</b>					
<b>1. Alat Bahan</b>					
ATK	1	1	PK	800,500	800,500
Foto Copy ref &kel adm	1	1	PK	816,500	816,500
Konsumsi NS/Peserta	12	1	OA	45,000	540,000
<b>2. Biaya Perjalanan</b>					
Uang Harian	37	2	OH	430,000	31,820,000
Tiket PP	27	2	O/P	210,000	11,340,000
Penginepan	13	2	OH	120,000	3,120,000
<b>3. Jasa Profesi</b>					
Tenaga Pembantu	7	24	OH	80,000	13,440,000
Honor Narasumber	3	1	JPL	500,000	1,500,000
Transfort Peserta Rapat	1	7	OJ	150,000	1,050,000
Pengolah Data	1	1	PK	1,500,000	1,500,000
<b>Sub Total B</b>					<b>65,927,000</b>
<b>C. Pasca Pelaksanaan</b>					
<b>1. Alat Bahan</b>					
ATK	1	1	PK	515,000	515,000
Foto Copy &kel adm	1	1	PK	867,500	867,500
Konsumsi NS/Peserta	12	1	OA	45,000	540,000
Transport Lokal	2	1	PK	150,000	300,000
<b>2. Jasa Profesi</b>					
Honor Narasumber	3	1	JPL	500,000	1,500,000
Transfort Peserta	7	1	OJ	150,000	1,050,000
<b>Sub Total C</b>					<b>4,772,500</b>
<b>TOTAL BIAYA</b>					<b>75,000,000</b>

Bandung, 22 Maret 2018

Ketua Tim Peneliti,

  
**Dr. H.A. Rusdiana, MM**  
 NIP. 196104211986021001





**REKAPITULASI PENGELUARAN BIAYA PERSIAPAN/PRA PENELITIAN  
PENELITIAN TERAPAN DAN PENEGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI**

Judul Penelitian: Kesiapan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Swasta dalam mendukung Kelengkapan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Studi di PTKIS Wilayah II Jawa Barat dan Banten  
 Sumber Dana: BOPTN/DIPA-RM LIS SGD BANDUNG TAHUN 2018  
 Kegiatan: Persiapan Persiapan Penelitian

No.	Tanggal	Uraian Kegiatan	Volume	Jumlah (Rp.)
1.	22 Maret 2018	Pembelian ATK dari Toko Buku dan Alat Tulis "SURJAYA" Cijangberang-Bandung	1 Paket	503.000
2.	22 Maret 2018	Penggunaan Bahan rujukan dan Pembelian Desain dan IPD dari Foto Copy "LATANSA" Cijadung-Bandung	1 Paket	707.500
Jumlah				1.210.500

Terbilang: *Satu Juta Duaratus Sepuluh ribu Lima ratus Rupiah*

Bandung, 31 Maret 2018

Ketua Tim

**Dr. H.A. Rusdiana, MM**

NIP. 196104211986021001

No. \_\_\_\_\_  
 Telah terima dari TIM PENELITI UIN SGD BANDUNG  
 Uang sejumlah Lima ratus tiga ribu rupiah  
 Untuk pembayaran biaya tulis kantor penelitian persiapan pimpinan PTEIS  
dalam mendukung kegiatan SKPI (CPTKIS KOPWIT II  
Jabar Banten).

No.01

Rp. 503.000



**TOKO BUKU**  
**\* NUR JAYA \***  
 Ps. UJUNGBERUNG LANTAI ATAS  
 Bandung 22 Maret 2018  
 Pin Pent C  
 UIN SGD

NOTA NO. 13 B 9 -

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
5 Rim	Kertas HVS 70gram A4	37.500	75.000
1 Rim	Kertas HVS 70 gram F4	38.000	38.000
3 Tube	Paper Tinta Printer	155.000	135.000
2 pak	Selfstain	39.000	68.000
2 Per	Fluoridax	59.000	198.000
1 pak	map folio	23.000	23.000

Jumlah Rp. 503.000

Tanda Terima



No. \_\_\_\_\_  
 Telah terima dari Tim Peneliti UIN SGD Bandung  
 Uang sejumlah Tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah  
 Untuk pembayaran  fotocopy bahan rujukan penelitian persiapan  
pimpinan PTEIS dalam mendukung kegiatan SKPI (CPTKIS  
KOPWIT II Jabar Banten).

No.02

Rp. 707.500



**LATANSA COPY CENTER**  
 Menerima : Photo copy, Penjiplakan, laminating  
 Jual Alat-alat Tulis dll  
 Jl. A.H. Nasution No 475 Bandung  
 Hp: 081220908089

Kepada : Tim Peneliti Tgl. 22-3-2018

Banyak	Nams Barang	Harga	Jumlah
283hl	Fotocopy	250	707.500

Barang-barang yang sudah dibeli  
 tidak bisa dikembalikan

Jumlah Rp. 707.500  
 Uang Muka  
 Sisa

Tanda Terima \_\_\_\_\_ Hormat Kami



**REKAPITULASI PENGELUARAN BIAYA PERSIAPAN/PRA PENELITIAN  
PENELITIAN TERAPAN DAN PENEGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI**

Judul Penelitian: Kesiapan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Swasta dalam mendukung Kebijakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Studi di PTKIS Wilayah II Jawa Barat dan Banten  
 Sumber Dana: BOPTN/DPPIA-RM UIN SGD BANDUNG TAHUN 2018  
 Kegiatan: Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

No.	Tanggal	Uraian Kegiatan	Volume	Jumlah (Rp.)
1	11 April 2018	Pembelian ATK dari Toko Buku dan Alat Tulis "SURIJAYA" Ujungberung-Bandung	1 Pkt	975,500
2	11 April 2018	Penggunaan Bahan Pembahasan Desain dan IPD dari Foto Copy "LATANSA" Cipadung-Bandung	1 Pkt	305,000
3	12 April 2018	Pembelian Konsumsi Rapat Pembahasan Desain dan IPD Penelitian dari Catering "IRESSA" Cibiru-Bandung	1 Pkt	630,000
4	12 April 2018	Honorarium Pembahas Desain dan IPD Penelitian	3 Org	1,500,000
5	12 April 2018	Uang Saku Peserta Rapat Pembahas Desain dan IPD Penelitian	7 Or/i	1,050,000
6	19 April 2018	Biaya Perjalanan Dinas bulan April 2 orang: An.Drs Nasihudin, M.Pd., dan Dr.H.A. Rusdiana, MM. Kegiatan Observasi Lokasi	13 Or/i	8,785,000
			<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 13.245,500</b>

Terbilang: *Tiga belas juta duaratus Empat puluh lima ribu Limaratus Rupiah*

Bandung, 30 April 2018

Ketua Tim

**Dr. H.A. Rusdiana, MM**

NIP: 196104211986021001







**DAFTAR PENGELUARAN BIAYA  
UANG SAKU PEMBAHASAN DESAIN DAN IPD PENELITIAN**

**No.05**

Judul Penelitian : Kesiapan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Sivitas dalam merumuskan Kebijakan Surat Keterangan Perantangan Jajaz (SKPJ) Studi di PT IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
 Sumber Dana : DIPA-RM1 IN SGD BANDUNG TAHUN 2018  
 Program : Penelitian terapan dan pengembangan Perguruan Tinggi  
 Kegiatan : Pembahas Desain dan IPD Penelitian

No.	Nama	Volume	Jml Kotor	PPH.21	Jumlah Bersih	Tandatangan
1	Dinda Cleudi, S.H	1 hari x Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 22.500	Rp. 127.500	<i>[Signature]</i>
1	Ahmad Zaen, S.Sos.I	1 hari x Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 7.500	Rp. 142.500	<i>[Signature]</i>
1	Ukesh Ali Murtado, S.Pd.I	1 hari x Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 7.500	Rp. 142.500	<i>[Signature]</i>
1	Zenal Munakim	1 hari x Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 4.500	Rp. 145.500	<i>[Signature]</i>
5	Gulung, Aditya Parba, SI	1 hari x Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 4.500	Rp. 145.500	<i>[Signature]</i>
6	Alex, Muhammad Mustofa, S.Sos.I	1 hari x Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 4.500	Rp. 145.500	<i>[Signature]</i>
7	Nursaidah, S.Pd.I	1 hari x Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 4.500	Rp. 145.500	<i>[Signature]</i>
<b>Total</b>			<b>Rp. 1.050.000</b>	<b>Rp. 55.500</b>	<b>Rp. 994.500</b>	

Bandung, 12 April 2018  
Ketua Tim Peneliti,

*[Signature]*  
**Dr. H.A. Rusdiana, MM**  
NIP. 196104211986021001

PT POS INDONESIA (PERSERO)  
Kantor APC, UJUNG BERANG DAH 40299A1  
TAMBAH JEDDAH  
Setoran Pajak (PPH 21/33%)

**843961793**

Tanggal : 2018-07-03 08:42:50  
No. Resi : 40299A1-01/2018/809285 Pelugas : 97032850

Tanggal Buku : 03-07-2018  
Kode Cabang Pos : 940000

Kode Billing : 01807820179216  
Kode Billing : 000140218429000  
Kode : UJUNG BERANG BUNUNG GATI  
Alamat : JL. AH. HASELUTION TID. 105, CIBADUNG, KOTA BANDUNG  
Arah : 411121  
Jenis Setoran : 100  
Kode Pajak : 04040018  
No. SK : 0000000000000000  
HOP :  
Jumlah Setoran : Rp. 55.500 Nota Uang : IDR

Terbilang : Lima puluh lima ribu lima ratus rupiah

**KANTOR POS**  
POS INDONESIA

Lamp No.4-5 (notula dan daftar hadir rapat)

**Notulensi Kegiatan Rapat**

**Persiapan : Review Desain dan penyusunan IPD Penelitian**

Kamis, 12 April 2018

Rapat dimulai jam 16.30, dipimpin oleh ketua Tim peneliti Dr.H. A. Rusdiana, MM, notulis Drs. Nasihudin, M.Pd/sebagai Anggota Peneliti. Rapat ini dihadiri dua orang pembahas yaitu Dr. H. Koko Abdul Kodir, MA; Drs. H. Yaya Suryana, M.Ag., dan DR. Ara Hidayat, MPd. Dan dihadiri pula oleh tujuh orang peserta undangan yaitu: Dindin Efendi, SHI; Ahmad Zaeni, S.Sos. I; Deden Ali Murtado, S.Pd.I; Zenal Mutakin; Gilang, Aditia P, ST; Muhammad Alek, S.Sos.I; Nursaadah, S.Pd.I. (daftar hadir terlampir).

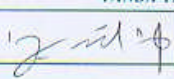
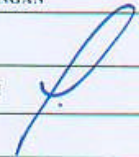

Dalam rapat ini dibahas beberapa permasalahan Persiapan pelaksanaan: Review Desain dan penyusunan IPD Penelitian, diantaranya antara lain:

1. Penentuan tanggal mulainya pengurusan izin dan survey awal ke lokasi penelitian berikut pengurusan administrasinya.
2. Penentuan dan pembagian tugas siapa yang akan berangkat ke masing-masing lokasi penelitian
3. Apa saja yang akan dijadikan instrumen penelitian dan bagaimana menyusunnya Dst.

**DAFTAR HADIR RAPAT**

Persiapan pelaksanaan: Review Desain dan penyusunan IPD Penelitian






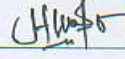



Kamis, 12 April 2018

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. H. Abdul Kodir, M. Ag.	Pembahas-1	
2	Drs. H. Yaya Suryana, M. Ag.	Pembahas-2	2 
3	Dr. Ara Hidayat, M. Pd	Pembahas-1	3 

**DAFTAR HADIR RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN DAN PENYUSUNAN INSTRUMEN PENELITIAN**

Persiapan pelaksanaan: Review Desain dan penyusunan IPD Penelitian

Kamis, 12 April 2018

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DR. H. A. Rusdiana, MM	Ketua Peneliti	1 
2	Drs. Nasihudin, M.Pd.	Anggota Peneliti	2 
3	Dindin Efendi, SHI	Peserta/Undangan	3 
4	Ahmad Zaeni, S.Sos. I	Peserta/Undangan	4 
5	Deden Ali Murtado, S.Pd.I	Peserta/Undangan	5 
6	Zenal Mutakin	Peserta/Undangan	6 
7	Gilang, Aditya Purba, ST	Peserta/Undangan	7 
8	Alex. Muhammad mastofa, S.Sos.I	Peserta/Undangan	8 
9	Nursaadah, S.Pd.I	Peserta/Undangan	9 

Bandung, 12 April 2018  
Ketua Peneliti

  
**DR. H. A. Rusdiana, MM**  
NIP. 196106211986021001





Lampiran No.06.1

<b>DAFTAR BELANJA PERJALANAN DINAS</b> <b>PENELITIAN TERAPAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI</b>											
Judul Penelitian		Kesiapan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Swasta dalam mendukung Kebijakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Studi di PTK-IS Wilayah II Jawa Barat dan Banten									
Sumber Dana Kegiatan		DIPA/RM UIN SGD BANDUNG TAHUN 2018 SPPD Bulan April 2018									
No	Tanggal SPPD	No. SPPD	Nama yang Berangkat	Tanggal Berangkat	Kota/Tempat yang Dituju	Jml Hari	Uang harian	Tiket	Hotel	Jumlah	
1	10 April 2018	B-210/2018	Drs. Nasihudin, M.Pd	21 April 2018	Pantegiang dan Serang	1	430.000	208.000	-	638.000	
2	10 April 2018	B-211/2018	Dr. H.A. Rusdiana, MM	21 April 2018	Tangerang dan Depok	1	430.000	313.000	-	743.000	
3	10 April 2018	B-212/2018	Drs. Nasihudin, M.Pd	24 April 2018	RB-Letak dan Bogor	1	430.000	208.000	-	638.000	
4	10 April 2018	B-213/2018	Dr. H.A. Rusdiana, MM	24 April 2018	Bogor dan Sukabumi	1	430.000	285.000	-	715.000	
5	10 April 2018	B-214/2018	Drs. Nasihudin, M.Pd	26 April 2018	Sukabumi dan Cianjur	1	430.000	228.000	-	658.000	
6	10 April 2018	B-210/2018	Dr. H.A. Rusdiana, MM	28 April 2018	Bekasi dan Karawang	1	430.000	265.000	-	695.000	
7	10 April 2018	B-216/2018	Drs. Nasihudin, M.Pd	28 April 2018	Puncakerta dan Subang	1	430.000	218.000	-	648.000	
8	10 April 2018	B-217/2018	Dr. H.A. Rusdiana, MM	28 April 2018	Inoramaya dan Cirebon	1	430.000	270.000	-	700.000	
9	10 April 2018	B-218/2018	Drs. Nasihudin, M.Pd	2 Mei 2018	Kutegan dan Cirebon	1	430.000	270.000	-	700.000	
10	10 April 2018	B-219/2018	Dr. H.A. Rusdiana, MM	2 Mei 2018	Banjar dan Tasikmalaya	1	430.000	283.000	-	713.000	
11	10 April 2018	B-220/2018	Drs. Nasihudin, M.Pd	5 Mei 2018	Tasikmalaya dan Canal	1	430.000	283.000	-	713.000	
12	10 April 2018	B-221/2018	Dr. H.A. Rusdiana, MM	8 Mei 2018	Ciuransuka	1	430.000	183.000	-	613.000	
13	10 April 2018	B-222/2018	Dr. H.A. Rusdiana, MM	9 Mei 2018	Cimahi	1	430.000	183.000	-	613.000	
						<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>3.440.000</b>	<b>1.993.000</b>	<b>-</b>	<b>8.785.000</b>

Catatan:  
Lampiran No.06 ini, dilengkapi dengan SPPD dan kelengkapannya

Bandung, 30 April 2017  
Ketua Tim Peneliti  
  
Dr. H.A. Rusdiana, MM  
N.P. 1967042119863001

# Lampiran No.06.2 Dokumen kelengkapan SPPD(12 dok)

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

LAMPIRAN 1  
PERATURAN MENTERI KEAGAMAAN REPUBLIK INDONESIA  
MOMOR 60/PK/2016  
TANGGAL  
PERATURAN MENTERI KEAGAMAAN REPUBLIK INDONESIA  
MOMOR 60/PK/2016  
TANGGAL

Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung Kode Pos 40134 Telp. 022-7800323 Fax. 022-7800328 Web: www.uin-sung.ac.id

**RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

Lampiran SPD Nomor : B-211 /2017  
Tanggal : 19 April 2018

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Liang Hirtih	Rp 430.000	1 (satu) Hari
2.	Transport Bus/Kereta Bandung ke Tangrang dan Depok	Rp 313.000	PP
Jumlah		Rp 743.000	
Terbilang :		tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah	

Telah dibayar sejumlah Rp 743.000  
Ketua PPK/PPK

Bandung, 19 April 2018  
Telah menandatangani sebagai  
Rp 743.000  
Yang Mengajukan

Dr. H. A. Rusdiana, MM,  
NIP. 196104211986021001

Dr. H. A. Rusdiana, MM,  
NIP. 196104211986021001

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

LAMPIRAN 2  
PERATURAN MENTERI KEAGAMAAN REPUBLIK INDONESIA  
MOMOR 60/PK/2016  
TANGGAL  
PERATURAN MENTERI KEAGAMAAN REPUBLIK INDONESIA  
MOMOR 60/PK/2016  
TANGGAL

Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung Kode Pos 40134 Telp. 022-7800323 Fax. 022-7800328 Web: www.uin-sung.ac.id

**DAFTAR PENGELUARAN RIL**

Yang bertanggung di bawah ini :  
Nama : Dr. H. A. Rusdiana, MM,  
NIP : 196104211986021001  
Jabatan : Lektor Kepala

berdasarkan Surat Perencanaan Dinas (SPD) Nomor 211 tanggal 19 April 2018 dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bener transport dan penginjauan pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Transport Bus/Kereta Bandung ke Tangrang dan Depok	Rp 313.000
Jumlah		Rp 313.000

2. Jumlah uang tersebut pada angka 3 diatas benar-benar diukur untuk pelaksanaan Perencanaan Dinas dimaksud dan apabila dikembalikan hari tersebut kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/ Menyetujui  
Ketua PPK/PPK

Bandung, 19 April 2018  
Pelaksana SPD:

Dr. H. A. Rusdiana, MM,  
NIP. 196104211986021001

Dr. H. A. Rusdiana, MM,  
NIP. 196104211986021001

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Bandung 40134 Telp. 022-7800323 Fax. 022-7800328  
Web: www.uin-sung.ac.id email: info@uin-sung.ac.id

**LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS**

Tanggal Berangkat : 21 April 2018  
Kota Tujuan : Tanggerang -Depok

Tanggal Tujuan : 21 April 2018  
Maksud/Kegiatan : melaksanakan observasi lokasi dan penelitian di STAI Al-Karimiah Depok

Tanggal Kembali : 21 April 2018

**Uraian Kegiatan Perjalanan Dinas:**

I. Dasar Kegiatan  
1. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tentang Dosen-Dosen yang Mendapat Pembayaran Penelitian Terapan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2018. Nomor: B-06/DK/05/V/2016/02/305/2018 Tanggal 19 Maret 2018.  
2. Surat tugas Nomor B-211/HA/05/V/2016/01/104/2016 Tanggal 19 April 2016. Tentang Observasi Lokasi dan pengurusan izin Penelitian di STAI Fatmahan Tanggerang dan STAI Al-Karimiah Depok.

II. Pelaksanaan  
Dr. H. A. Rusdiana, MM, terkait dengan kegiatan penelitian "Kecerdasan PPK/PPK Dalam menubuhkan Implementasi Kebijakan SPK/ SPPD di PTK/TK Koperasi Wilayah II Jawa Barat dan Banten"

III. Kegiatan  
1. Berangkat dari Bandung tanggal 21 April 2018. Jam 03.00. tiba di Tanggerang jam 06.00 melaksanakan observasi lokasi dan izin Penelitian di STAI Fatmahan Tanggerang mulai jam 07.00 sd 10.30. Selanjutnya menuju STAI Al-Karimiah Depok  
2. Tiba di STAI Al-Karimiah Depok jam 11.30. istirahat sholat Dhuhur sd jam 12.30. melaksanakan observasi lokasi dan izin Penelitian di STAI Al-Karimiah Depok mulai jam 12.30 sd 15.30. istirahat sholat Ashar sd jam 16.00. Selanjutnya pulang menuju Bandung  
3. Tiba di Bandung jam 20.00

IV. Hasil Kegiatan Perjalanan Dinas  
1. Tindak lanjut observasi lokasi dan izin Penelitian di STAI Fatmahan Tanggerang dan STAI Al-Karimiah Depok  
2. Diinformasikan data hasil observasi lokasi dan izin Penelitian di STAI Fatmahan Tanggerang dan STAI Al-Karimiah Depok

V. Lain-lain  
Sebagai penutup, mengadakan pertemuan dengan pihak kampus STAI Fatmahan Tanggerang dan STAI Al-Karimiah Depok untuk penjabaran penelitian selanjutnya, ucapan terimakasih dan pamitan

Bandung, 21 April 2018  
Yang Mengajukan

Dr. H. A. Rusdiana, MM,  
NIP. 196104211986021001

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Bandung 40134 Telp. 022-7800323 Fax. 022-7800328  
Web: www.uin-sung.ac.id email: info@uin-sung.ac.id

**SURAT TUGAS**  
B-211/HA/05/V/2016/01/104/2017

Menimbang Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tentang Dosen-Dosen yang Mendapat Pembayaran Penelitian Terapan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi Nomor B-06/DK/05/V/2016/02/305/2017 Tanggal 19 April 2018

Dasar  
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 84).  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4201).  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336).  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan.

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019

**MEMBERI TUGAS**

Kepada Nama : Dr. H. A. Rusdiana, MM,  
NIP : 196104211986021001  
Fungsional/ Gol Ruang : Pembina Tk. I / IV/b  
NPWP : 68483046423000  
Jabatan : Lektor Kepala

Untuk Melaksanakan observasi awal penelitian tanggal 21 April 2018 di STAI Fatmahan dan STAI Al-Karimiah Tanggerang dan Depok.

Bandung, 19 April 2018  
Ketua LPDM

Dr. H. Munir, MA  
NIP. 19650802196031002

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung 40134  
Telp. 022-7800323 Fax. 022-7800328  
Web: www.uin-sung.ac.id  
email: info@uin-sung.ac.id

PERATURAN MENTERI KEAGAMAAN REPUBLIK INDONESIA  
MOMOR 60/PK/2016  
TANGGAL  
PERATURAN MENTERI KEAGAMAAN REPUBLIK INDONESIA  
MOMOR 60/PK/2016  
TANGGAL

Lampiran Ke : 1  
Kode No : UIN/SP/2/AF.01.106/2017  
Nomor : B / 2017

**SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)**

1. Tujuan/Pembuat Komitmen	a. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
2. Nama/NIK Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas	b. Dr. H. A. Rusdiana, MM, NIP. 196104211986021001	
3. a. Pangkat dan Golongan	a. Pembina Tk. I / Gol. IV/b	
b. Jabatan / Instansi	b. Lektor Kepala	
c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	c. Lektor Kepala	
4. Maksud Perjalanan Dinas	Melaksanakan Wawancara dan Pengumpulan Data di Prodi PAI di-Authority Kabupaten Cempur	
5. Alat Angkut yang dipergunakan	Bus/Kereta Api	
6. a. Tempat Berangkat	a. Kota Bandung	
b. Tempat Tujuan	b. Kabupaten Cempur	
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas	a. 1 (satu) hari	
b. Tanggal Berangkat	b. 11 September 2017	
c. Tanggal harus kembali	c. 11 September 2017	
8. Penulis : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
1.		
2.		
3.		
4.		
9. Pembebanan Anggaran	a. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, DIPA-025.04.2.4352/2017	
b. Akun	b.	
10. Keterangan Lain-lain		

Diketahui dan disetujui  
Tanggal : 08 September 2017  
Maksud/Kegiatan

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung 40134  
Telp. 022-7800323 Fax. 022-7800328  
Web: www.uin-sung.ac.id  
email: info@uin-sung.ac.id

PERATURAN MENTERI KEAGAMAAN REPUBLIK INDONESIA  
MOMOR 60/PK/2016  
TANGGAL  
PERATURAN MENTERI KEAGAMAAN REPUBLIK INDONESIA  
MOMOR 60/PK/2016  
TANGGAL

Lampiran Ke : 1  
Kode No : UIN/SP/2/AF.01.106/2017  
Nomor : B / 2017

**SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)**

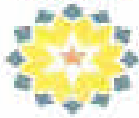
1. Tujuan/Pembuat Komitmen	a. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
2. Nama/NIK Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas	b. Dr. H. A. Rusdiana, MM, NIP. 196104211986021001	
3. a. Pangkat dan Golongan	a. Pembina Tk. I / Gol. IV/b	
b. Jabatan / Instansi	b. Lektor Kepala	
c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	c. Lektor Kepala	
4. Maksud Perjalanan Dinas	Melaksanakan Wawancara dan Pengumpulan Data di Prodi PAI di-Authority Kabupaten Cempur	
5. Alat Angkut yang dipergunakan	Bus/Kereta Api	
6. a. Tempat Berangkat	a. Kota Bandung	
b. Tempat Tujuan	b. Kabupaten Cempur	
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas	a. 1 (satu) hari	
b. Tanggal Berangkat	b. 11 September 2017	
c. Tanggal harus kembali	c. 11 September 2017	
8. Penulis : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
1.		
2.		
3.		
4.		
9. Pembebanan Anggaran	a. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, DIPA-025.04.2.4352/2017	
b. Akun	b.	
10. Keterangan Lain-lain		

Diketahui dan disetujui  
Tanggal : 08 September 2017  
Maksud/Kegiatan



# LAMPIRAN V

## 1. Naskah Akademik Laporan Penelitian (bab I, II, dan bab III)

<p><b>KEMAJUAN PENELITIAN TINGKAT PASCASARJANA DALAM SWASTA (PTPS) DALAM MENINGKATKAN KEBERHASILAN BUNTAI PERTANAKAN PEMERIKSAAN LAJUR GABUNG (Studi Kasus PTPTN)</b></p> <p><b>LAPORAN PENELITIAN</b> Penelitian tesaqun dan pampangan Penelitian Tesaqun Kategori Penelitian (Studi Kasus) dan Penelitian Tesaqun Kategori Penelitian (Studi Kasus) dan Penelitian Tesaqun (Studi Kasus PTPTN)</p>  <p><b>PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (PTPTN) UIN ALAU PASIRKUNDAK BUNTAI MANGROVE SABANG BUNTAI BANYU WANGI (PTPTN)</b> (2019)</p> <p><b>Penulis: H. Rusdiana, M.Ag</b> NIP. 19621990319007</p>	<p><b>Buku Frekuensi</b></p> <p><b>1. Deskripsi Penelitian</b></p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan buntai pertanian di PTPTN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi.</p> <p>Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian, khususnya dalam meningkatkan keberhasilan buntai pertanian di PTPTN.</p> <p><b>Penulis: H. Rusdiana, M.Ag</b> NIP. 19621990319007</p>
<p><b>DAFTAR ISI</b></p> <p><b>Buku Frekuensi</b></p> <p><b>1. Deskripsi Penelitian</b></p> <p><b>2. Tujuan Penelitian</b></p> <p><b>3. Manfaat Penelitian</b></p> <p><b>4. Ruang Lingkup Penelitian</b></p> <p><b>5. Metode Penelitian</b></p> <p><b>6. Sistematika Penulisan</b></p> <p><b>7. Daftar Pustaka</b></p>	<p><b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b></p> <p><b>1.1 Latar Belakang</b></p> <p>Keberhasilan buntai pertanian sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor teknis, faktor manajerial, dan faktor sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari faktor-faktor tersebut terhadap keberhasilan buntai pertanian di PTPTN.</p> <p><b>1.2 Rumusan Masalah</b></p> <p>Penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pengaruh faktor teknis terhadap keberhasilan buntai pertanian di PTPTN?</li> <li>2. Bagaimana pengaruh faktor manajerial terhadap keberhasilan buntai pertanian di PTPTN?</li> <li>3. Bagaimana pengaruh faktor sosial terhadap keberhasilan buntai pertanian di PTPTN?</li> </ol> <p><b>1.3 Tujuan Penelitian</b></p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui pengaruh faktor teknis terhadap keberhasilan buntai pertanian di PTPTN.</li> <li>2. Mengetahui pengaruh faktor manajerial terhadap keberhasilan buntai pertanian di PTPTN.</li> <li>3. Mengetahui pengaruh faktor sosial terhadap keberhasilan buntai pertanian di PTPTN.</li> </ol> <p><b>1.4 Manfaat Penelitian</b></p> <p>Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian, khususnya dalam meningkatkan keberhasilan buntai pertanian di PTPTN.</p> <p><b>BAB II</b> <b>METODE PENELITIAN</b></p> <p><b>2.1 Jenis Penelitian</b></p> <p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.</p> <p><b>2.2 Lokasi Penelitian</b></p> <p>Penelitian ini dilakukan di PTPTN, UIN Alau Pasirkundak Buntai Mangrove Sabang Buntai Banyuwangi.</p> <p><b>2.3 Waktu Penelitian</b></p> <p>Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu dari bulan Januari hingga Maret 2019.</p> <p><b>2.4 Sampel Penelitian</b></p> <p>Penelitian ini menggunakan sampel purposive, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan tujuan penelitian.</p> <p><b>2.5 Teknik Pengumpulan Data</b></p> <p>Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.</p> <p><b>2.6 Teknik Analisis Data</b></p> <p>Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu analisis isi.</p>



### 3. HAKI

  
REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu, pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201816588, 29 Juni 2018

**Pencipta**

Nama : Dr. H. A. Rusdiana, MM. Dan Drs. Nasihudin, M.Pd.  
Alamat : UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No.105 Cibiru, Bandung, Jawa Barat, 40614  
Kewarganegaraan : Indonesia

**Pemegang Hak Cipta**

Nama : Dr. H. A. Rusdiana, MM. Dan Drs. Nasihudin, M.Pd.  
Alamat : UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No.105 Cibiru, Bandung, Jawa Barat, 40614  
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Karya Tulis  
Judul Ciptaan : Kesiapan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) (Studi Di PTKIS Wilayah II Jawa Barat Dan Banten)

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 29 Juni 2018, di Bandung

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000110808

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.


a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

  
Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.  
NIP. 196611181994031001



## LAMPIRAN IV

### 1. Berita Acara Reviewer

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
Jl. Raya A.H. Nasution No.105 Bandung 40134 Telp. (022) 7800525 Fax: (022) 7800536  
web: <https://lp2m.uinsgd.ac.id/> e-mail: [lp2m@uinsgd.ac.id](mailto:lp2m@uinsgd.ac.id)

---

**BERITA ACARA LAPORAN ANTARA**

Pada Hari ini ..... Tanggal 3 Bulan juli ..... Tahun 2018,  
bertempat di Ruslirpon Cipt Bandung  
telah dilaksanakan Reviu Laporan Antara Penelitian atas nama peneliti/kelompok  
penelitian:  
Nama Ketua/Peneliti : Dr. H. A. Rusdiana, M.M  
Anggota : 1. Dr. Nasukudin, M.Pd  
2. ....  
3. ....

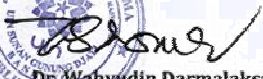
Kluster Penelitian A.5  
dengan Judul Penelitian Kesiapan PTKI swasta terhadap (Rb) -  
Tahap Surat Penerimaan Pendamping Hasil (SKPI)  
(Studi di PTKIS wilayah 4 Jawa Barat dan Banten.

Adapun berkas laporan antara berupa:


- 1) Log Book Penelitian; ✓
- 2) Laporan Keuangan; dan ✓
- 3) Sertifikat HKI (Hak Kekayaan Intelektual); ✓

Berkas laporan antara tersebut telah telah diterima, diperiksa dan diberikan penilaian.  
Berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,

  
**Dr. Wahyudin Dermalaksana, M.Ag**  
NIP. 1971082719980310007

Reviewer, 3 Juli 2018

  
**Dr. Chachul Rochman, M.Pd**  
NIP. 196307141900111001



## 2. Bukti Penilaian dan Rekomendasi Reviewer

**PENILAIAN LAPORAN ANTARA PENELITIAN**

Judul : *Kesiapan PTKI swasta terhadap kebijakan surat ijin ekspor Pendampingan Izin (SKI) Lurah K1 PT RIS Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten*

Kluster : *Penelitian Tindakan dan Pengembangan Pansusutan Tinggi*

Ketua : *Dr. H. A. Rusdiana, M.M*

Anggota : *Dr. Nasihudin, M.Pd*

Anggaran Biaya : *75.000.000*

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Skor	Nilai
<b>Komitment Penelitian</b>				
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki email institusi</li> <li>Memiliki akun GS</li> <li>Memiliki akun Sinta</li> </ul>	0.05	5	0,25
<b>Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan</b>				
2.	Agenda atau jadwal penelitian: <ul style="list-style-type: none"> <li>Organizing/coding</li> <li>Reducing</li> <li>Displaying</li> <li>Analyzing</li> <li>Concluding</li> </ul>	0.45	4	1,8
3.	Rencana & realisasi anggaran <ul style="list-style-type: none"> <li>Efektivitas anggaran (fokus ke output penelitian)</li> <li>Sesuai Standar Biaya Masukan (SBM)</li> </ul>	0.20	5	1
<b>Kelayakan Data dan Publikasi Penelitian</b>				
4.	Kelayakan publikasi jurnal ilmiah sesuai kluster penelitian dalam <i>extended abstract</i>	0.15	4	0,6
5.	Jenis dan tahapan publikasi penelitian <ul style="list-style-type: none"> <li>Konferensi atau jurnal reguler</li> <li>Tahap submit/review/publish</li> </ul>	0.15	5	0,75
<b>Nilai Total</b>				<i>4,4</i>

Skor: 1 (buruk), 2 (kurang), 3 (cukup), 4 (baik), 5 (sangat baik)  
 Nilai = Skor x Bobot.

**Rekomendasi Reviewer untuk Pencaliran Sisa Dana (40%):**

Ditunda (Nilai ≤ 2.5)	Dipertimbangkan (2.5 ≤ Nilai ≤ 3)	Dicairkan (Nilai ≥ 3) <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	-----------------------------------	---

**Komentar Reviewer:**

.....

.....

.....

a.n. Ketua LP2M,  
 Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,

*[Signature]*  
**Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag**  
 NIP. 1971082719980310007

Bandung, *3* Juli 2018  
 Reviewer,

*[Signature]*  
**Dr. Chaeul Rochima, M.Pd**  
 NIP. 19630714198011001



### C. Model Laporan Akhir

Bagian ini secara khusus menyajikan Laporan Akhir, Penelitian “Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi kebijakan SKPI: Studi di lingkungan PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten”.

#### Coper Laporan Akhir



## LAPORAN AKHIR

### PENELITIAN TERAPAN DAN PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI

Judul Penelitian:

#### **KESIAPAN PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAM ISLAM DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI (Studi di PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat Dan Banten)**

Dasar Kegiatan : SPK- No.B-1 13/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018  
Tanggal 21 Maret 2018.  
Pelaksanaan : 6 bulan  
Waktu : 21 Maret - 20 Agustus 2018

Kelompok Peneliti

Ketua :

Dr. H. A. Rusliaman, MM : ID 3017030150557

Anggota:

Drs. Nashrudin, MPd : ID 20200620109000

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG  
TAHUN 2018**

### Bukti Penerimaan

Akuntabilitas Kinerja Penelitian



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT  
**UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**  
Jl. AH. Nasution No. 105 Bandung

## TANDA TERIMA

### A. Identitas

Telah terima Berkas Laporan Pembiayaan BOPTN Tahun  
Anggaran 2018 atas nama:

Ketua : DR. H. A. Rusdiana, MM

Kluster : Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi

### B. Berkas Laporan

- Logbook
- Buku
- HKI
- Artikel
- Laporan Keuangan

Luaran Lain:

- Teknologi Tepat Guna
- Poster
- Buku Logbook dan  
Laporan Keuangan
- Buku Pendidikan Kejurangan dan Pedoman SKR



### Catatan:

- ✓ A Diisi oleh peneliti
- ✓ B Ceklis oleh petugas LP2M
- ✓ Peneliti agar mengirim file document buku dan artikel secara elektronik pada aplikasi puslitpen

## Dokumen Laporan Akhir

### 1. Laboran Akdemik

- Buku hasil penelitian;
- Draft Jurnal;
- HAKI);

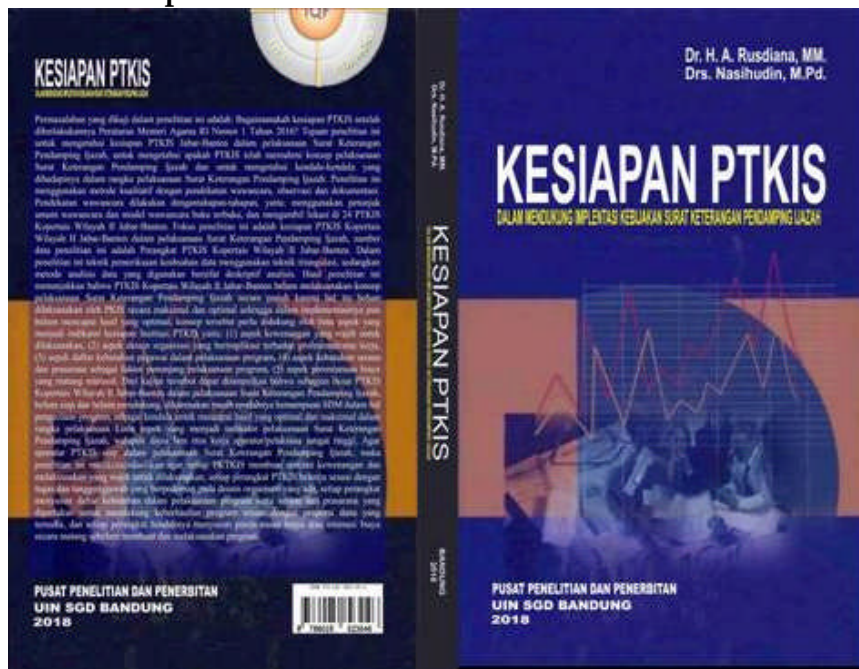
### 2. Laboran Administratif dan Keuangan

- *Log book* 100%
- Laporan pertanggungjawaban Keuangan 100%

### 3. Laporan Potensi keluaran (output) lainnya

# I . LAPORAN AKADEMIK

## 1. Buku Laporan Penelitian ber ISBN



Coper ISBN

Ceter

<p style="text-align: right;">Dr. H. A. Rusdiana, MM Drs. Nashudin, M.Pd.</p> <p style="text-align: center;"><b>KESIAPAN PTKIS</b> DALAM Mendukung Implementasi Kebijakan SURAT Keterangan Pendamping Ijazah</p> <p style="text-align: center;">PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN UIN SGD BANDUNG 2018</p>	<p><b>KESIAPAN PTKIS</b> DALAM Mendukung Implementasi Kebijakan SURAT Keterangan Pendamping Ijazah</p> <p>ISBN: 978 - 602 - 5823 - 04 - 6 Cetakan Pertama, Agustus 2018 16 cm x 24 cm 316 hlm +(i - xii)</p> <p>Penulis: Dr. H. A. Rusdiana, MM Drs. Nashudin, M.Pd.</p> <p>Editor: Mr. Muhardi, Ss, M.Pd.</p> <p>Desain Cover dan Tata letak: M. Zaky Nurzaman</p> <p>Diterbitkan oleh: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jl. H.A. Nasution No.105 Bandung</p> <p>Hak Cipta dilindungi UU RI No 19/Th. 2002 Dilarang memperbanyak dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa seizin penerbit.</p>
--	--

Testimoni/Apresiasi dari Koordinator Kopertai Wil II Jawa Barat dan Banten

## Kata Pengantar

Penerapan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) merupakan suatu keniscayaan. Mendesak dari segi keharusan regulasi dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Dari segi regulasi, karena UU Nomor 12 mengharuskan setiap perguruan tinggi memberikan sertifikat kompetensi bagi setiap lulusannya sebagai keterangan resmi tentang kompetensi mereka sekaligus bisa digunakan untuk mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Dengan demikian, UU Nomor 12 tahun 2012 secara tegas mengarahkan agar setiap lulusan perguruan tinggi bisa memasuki pasar kerja. Dan untuk itu, setiap lulusan pendidikan tinggi, harus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Pada kenyataannya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) khususnya pada perguruan tinggi swasta di Jawa Barat dan Banten belum mendukung secara optimal, baik dalam aspek penafsiran kebijakan SKPI, secara normatif maupun pengorganisasian Kebijakan SKPI, strategi operasional penerapan SKPI, dan menanggulangi faktor-faktor kesiapan dalam mendukung kebijakan SKPI.

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Jawa Barat dan Banten dari jumlah 117 tahun 2017-2018 sebagian besar penyelenggaranya adalah berbasis Yayasan Pendidikan Islam atau pesantren. Pimpinan PTKIS umumnya belum tentu berbasis keilmuan tentang kurikulum baik magister atau program doktor. Terlepas dari basis keilmuan atau keahlian personal pimpinan, peran pimpinan dalam optimalisasi kurikulum pada sebuah lembaga pendidikan adalah sebuah kepastian.

Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI

| i

Hasil Penelitian tentang Kesiapan PTKIS dalam mendukung implementasi Kebijakan SKPI, yang dilaksanakan oleh Rusdiana dan Nasihudin pada dua puluh empat PTKIS: Studi PAI di Wilayah II Jawa Barat dan Banten berhasil mengidentifikasi aspek-aspek peran yang masih memerlukan pembenahan agar penerapan SKPI berjalan optimal. Peran dalam makna ilmu sosial sebagai "sekumpulan hak dan kewajiban yang melekat pada individu dan lembaga sesuai dengan statusnya sebagai penyalenggara PT". Aspek-aspek hasil penelitian tersebut menjadi penting terkait duahal: *pertama*: aspek-aspek yang masih menjadi kendala optimalnya peran individu dan lembaga; *kedua*: isyarat yang harus menjadi kesadaran bersama mengenai soslusu penerapannya.

Sesederhana apapun penelitian yang telah dilakukan, dan sekecil apapun sampelnya, Hasil penelitian ini menjadi sumbangan yang sangat bermakna untuk dua hal tersebut. Kesadaran dan inspirasi untuk solusi adalah bagian dari rekomendasi untuk pengembangan selanjutnya. Semoga.

Bandung, 17 Agustus 2018  
An. Tim Pembimbing,

Drs. H. Yaya Suryana, M.Ag.

## Pengantar Penulis

### Pengantar Penulis

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) merupakan amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. Permendikbud sendiri merupakan turunan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Dalam Pasal 44 ayat 1 sampai ayat 3, UU Nomor 12 mengharuskan setiap perguruan tinggi memberikan sertifikat kompetensi bagi setiap lulusannya sebagai keterangan resmi tentang kompetensi mereka sekaligus bisa digunakan untuk mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Dengan demikian, UU Nomor 12 tahun 2012 secara tegas mengarahkan agar setiap lulusan perguruan tinggi bisa memasuki pasar kerja. Dan untuk itu, setiap lulusan pendidikan tinggi, harus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah setiap program studi termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS), harus mampu memperjelas kompetensi yang diperoleh para mahasiswanya saat mereka lulus menjadi sarjana yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Nantinya, sertifikat ini bisa mereka gunakan untuk memasuki pasar kerja.

Untuk merespon kebijakan pemerintah tersebut, maka Kemenag RI, meluncurkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijazah, Transkrip Akademik, Dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan. Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Januari 2016.

Persoalannya adalah mengapa PTKIS di lingkungan Kopertais Wilayah II Jawa Barat belum mampu mengimplementasikan kebijakan tersebut?

Atas dasar itu, kami meneliti "Kesiapan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan penerapan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI): Studi di duapuluhempat PTKIS Wilayah II Jawa Barat dan Banten. Dengan tujuan untuk mengidentifikasi; penafsiran kebijakan SKPI, pengorganisasian Kebijakan SKPI, strategi operasional penerapan SKPI, dan faktor-faktor kesiapan dalam mengimplementasikan kebijakan SKPI.

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap model kesiapan implementasi kebijakan penerapan SKPI di PTKIS, khususnya pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten.

Bandung, 17 Agustus 2018  
Tim Penulis,

## Daftar Isi

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar Pembimbing Ahli.....	i
Pengantar Penulis.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan masalah.....	9
1. Identifikasi Permasalahan.....	9
2. Batasan Permasalahan.....	10
B. Tujuan Penelitian.....	11
1. Tujuan Umum.....	11
2. Tujuan Khusus.....	11
C. Signifikansi Penelitian.....	11
1. Kegunaan bagi ilmu pengetahuan.....	11
2. Kegunaan bagi institusi.....	12
3. Kegunaan bagi masyarakat.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Dasar Kesiapan.....	13
1. Definisi Kesiapan.....	13
2. Prinsip, dan Aspek Kesiapan.....	13
3. Makna, Ciri, dan Faktor Kesiapan kerja.....	15
4. Esensi Kesiapan Implementasi Kebijakan SKPI.....	20
B. Konsep dan Teori Implementasi Kebijakan.....	23
1. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	23
2. Operasi Penyiapan Implementasi Kebijakan.....	24
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi.....	25
4. Variabel yang memengaruhi Implementasi Kebijakan.....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	71
1. Profil Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten.....	71
2. Profil 24 PTKIS Kop. Wilayah II Jawa Barat dan Banten.....	72
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	90
1. Data Informasi Penelitian.....	90
2. Temuan Penelitian.....	170
C. Pembahasan.....	271
1. Analisis Data Kesiapan 24 PTKIS dalam Mendukung Kebijakan SKPI.....	271
2. Interpretasi Data Temuan Penelitian.....	280
3. Analisis Dampak Ketidaksiapan PTKIS dalam Mendukung penerapan Implementasi Kebijakan SKPI.....	287
4. Langkah Antisipatif Penyiapan Implementasi Kebijakan.....	296
<b>BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI</b>	
A. Kesimpulan.....	305
B. Implikasi.....	306
C. Rekomendasi.....	309
DAFTAR PUSTAKA.....	311
PROFIL PENULIS.....	315

## DAFTAR GAMBAR

Gambar.....	hlm
2.1.01 Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Edward III.....	29
2.1.02 Diagram Persentase Keberhasilan Kebijakan.....	38
3.1.01 Proses analisis data Model Miles and Huberman.....	59
4.1.01 Peta Propinsi Jawa Barat dan Banten.....	71
4.2.01 Temuan data tunggal di FAI UNMA.....	172
4.2.02 Temuan data tunggal di IAIB Serang.....	175
4.2.03 Temuan data tunggal di STAI Latansa Mashiro.....	178
4.2.04 Temuan data tunggal di STAI Fatahillah.....	181
4.2.05 Temuan data tunggal di STAI Kharisma.....	184
4.2.06 Temuan data tunggal di FPSI-UNIDA.....	187
4.2.07 Temuan data tunggal di IAIN Laroiba.....	190
4.2.08 Temuan data tunggal di STAI Kharisma.....	193
4.2.09 Temuan data tunggal di STAI Sukabumi.....	196
4.2.10 Temuan data tunggal di STAI Nurul Hikmah.....	199
4.2.11 Temuan data tunggal di STAI K. H. Agus Salim.....	202
4.2.12 Temuan data tunggal di As Siddiqiyah.....	205
4.2.13 Temuan data tunggal di STAI KH. E.Z. Muttaqin.....	208
4.2.14 Temuan data tunggal di STAI Riyadul Jannah.....	211
4.2.15 Temuan data tunggal di STAIS Dharma.....	214
4.2.16 Temuan data tunggal di STAI K. Cirebon.....	217
4.2.17 Temuan data tunggal di FKIS UNSIA Kuningan.....	220

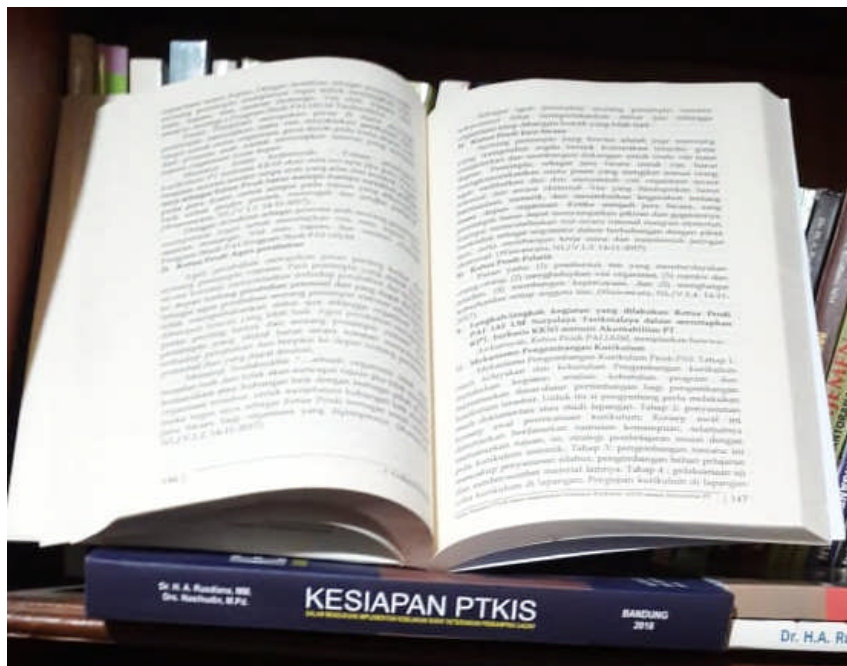
C. Implementasi Kebijakan Penerapan SKPI.....	29
1. Kebijakan Pengembangan Pendidikan Tinggi.....	29
2. Kebijakan PT dalam menghadapi Era Persaingan.....	30
3. Kebijakan Penerapan SKPE memperkuat kualifikasi Iulusan Pendidikan Tinggi.....	31
4. Mempersiapkan Implementasi Kebijakan Penerapan SKPI.....	36
D. Penelitian terdahulu yang Relevan.....	40
1. Penelitian Yusuf Bachtiar Tahun 2001.....	41
2. Penelitian DIKTI Tahun 2006.....	42
3. Penelitian DIKTI Tahun 2014.....	42
4. Penelitian Wawan dan Irma Masitoh Tahun 2015.....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Desain, Metode, Sumber dan Subjek Penelitian.....	45
1. Desain penelitian.....	45
2. Metode penelitian.....	46
3. Sumber Data Penelitian.....	49
4. Subjek Data Penelitian.....	49
B. Prosedur Penelitian.....	51
1. Persiapan Penelitian.....	52
2. Pelaksanaan Penelitian.....	53
3. Tahap Pembahasan, pengolahan hasil, dan Pengambilan Kesimpulan.....	53
C. Teknik/Cara Pengumpulan Data.....	53
1. Wawancara.....	53
2. Observasi.....	56
3. Dokumentasi.....	56
D. Metode Analisis Data dan Pengolahan Data.....	56
1. Metode Analisis Data.....	58
2. Tahapan Analisis Data.....	59
3. Penarikan kesimpulan.....	63
4. Pengujian Keabsahan Data.....	65
5. Teknik Keabsahan Data.....	67
6. Penyusunan Laporan Hasil Penelitian.....	69

## DAFTAR TABEL

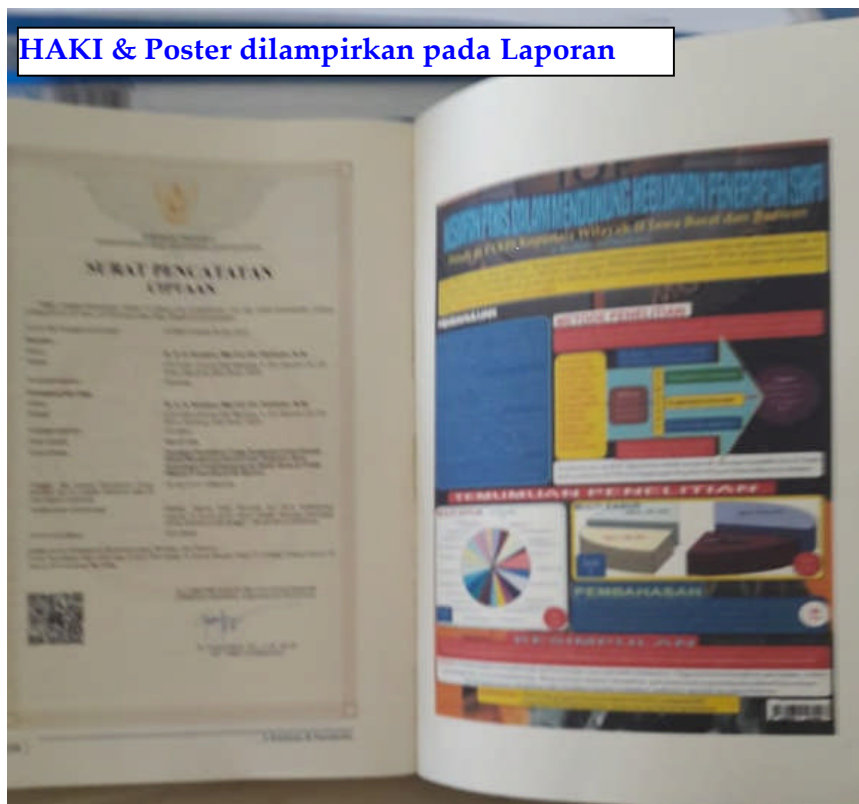
Tabel.....	hlm
3.1.01 PTKIS sebagai Sampel Penelitian.....	50
3.1.02 Kisi-kisi Penelitian.....	57
4.1.01 Data Potensi PTKIS Tahun 2018.....	72
4.1.02 Lokasi PTKIS Objek Penelitian.....	73
4.2.01 Profil FAI UNMA Tahun 2017/2018.....	75
4.2.02 Profil IAIB Tahun 2017/2018.....	75
4.2.03 Profil STAI LaTansa Mashiro Th. Ak. 2017/2018.....	76
4.2.04 Profil STAI Fatahillah Tahun 2017/2018.....	77
4.2.05 Profil STAI Al-Karimiyah Tahun 2017/2018.....	78
4.2.06 Profil FPSI-UNID Tahun Akademik 2017/2018.....	78
4.2.07 Profil IAIN Laa Roiba Bogor Tahun 2017/2018.....	79
4.2.08 Profil STAI Kharisma Tahun 2017/2018.....	80
4.2.09 Profil STAI Sukabumi Tahun 2017/2018.....	80
4.2.10 Profil STIT Nurul Hikmah Tahun 2017/2018.....	81
4.2.11 Profil STAI Haji Agus Salim Tahun 2017/2018.....	82
4.2.12 Profil STAI As Shiddiqiyah Tahun 2017/2018.....	82
4.2.13 Profil STAI KH. E.Z. Muttaqin Tahun 2017/2018.....	83
4.2.14 Profil STAI Riyadul Jannah Tahun 2017/2018.....	84
4.2.15 Profil STAIS Dharma Kusuma Tahun 2017/2018.....	84
4.2.16 Profil STAI Cirebon Tahun 2017/2018.....	85
4.2.17 Profil FKIS UNSIA, Tahun 2017/2018.....	86
4.2.18 Profil STAI Putra Galuh Tahun 2017/2018.....	86
4.2.19 Profil STAIMA Tahun 2017/2018.....	87
4.2.20 Profil STAINU Tasikmalaya Tahun 2017/2018.....	88
4.2.21 Profil IAIC Cipasung Tahun 2017/2018.....	88
4.2.22 Profil STAI Siliwangi Garut Tahun 2017/2018.....	89
4.2.23 Profil STAI Al-Falah Tahun 2017/2018.....	90
4.2.24 Profil STAI Siliwangi Cimahi Tahun 2017/2018.....	90

## Bagian-bagian buku Laporan Penelitian





**HAKI & Poster dilampirkan pada Laporan**



## II . LAPORAN ADMINISTRATIF DAN KEUANGAN

### 1. Log Book



## BUKU CATATAN KEGIATAN PENELITIAN ( LOG BOOK )

---

---

### Judul Penelitian

**KESIAPAN PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAM ISLAM  
DALAM Mendukung IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI  
(Studi di PTKIS Kopertais Wilayah Ii Jawa Barat Dan Banten)**

### LAPORAN AKHIR

Dasar Kegiatan:

SPK- No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018 Tanggal 21 Maret 2018.

Pelaksanaan : 6 bulan

Waktu : 21 Maret - 20 Agustus 2018

### Kelompok Peneliti

**Ketua Peneliti : Dr. H. A. Rusdianan, MM/ID 20171020150557**

**Anggota) : Drs. Nasihudin, MPd./ID 20200620108000**

**Alamat / Telp. : Jl. A.H. Nasution 105 Bandung Tlp. 022. 7800525**

Mengetahui:

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



**Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag**  
NIP. 1971082719980310007

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG  
TAHUN 2018**

## IDENTITAS

Ketua Tim : Dr. H. A. Rusdianan, MM  
NIP : 1961042119860201001  
Fakultas/Prodi. : Tarbiyah dan Keguruan/MPI  
Anggota : Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP : 196209201991031001  
Fakultas / Prodi. : Tarbiyah dan Keguruan/PGMI  
Judul Penelitian :  
Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI:  
Studi PTKIS Kopertais Wilayah Ii Jawa Barat Dan Banten.  
Lokasi Penelitian : PTKIS Wilayah II Jawa Barat dan Banten  
Mitra Penelitian : 24 PTKIS  
Waktu Penelitian : 6 bulan (21 Maret s/d 20 Agustus 2018  
Total Dana Penelitian : Rp. 75.000.000,-  
-Tahap I : Rp. 45.000.000,-  
-Tahap II : Rp. 30.000.000,-  
Sumber Dana : DIPA RM UIN SGD Tahun 2018



## KATA PENGANTAR

Buku Catatan Kegiatan (Log Book) Penelitian, menjadi kewajiban Tim peneliti, bukan hanya itu Log Book, dijadikan salah satu produk output dalam pertanggungjawaban penelitian. Atas dasar itu, dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian, Tim Penelitian: “Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi Kebijakan penerapan SKPI: Studi pada PTKIS dilingkungan Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten” menyusun Log Book ini.

Sudah selayaknya tim peneliti, merekam atau mencatat setiap kegiatan Penelitian dalam Buku Catatan Kegiatan Penelitian (Log Book).

Buku catatan kegiatan (Log Book), diisi dengan baik, akan memberikan manfaat yang banyak, antara lain:

- d. Sebagai bahan bukti untuk mengajukan permintaan hak patent;
- e. Sebagai bahan pembuatan makalah ilmiah dan laporan kegiatan;
- f. Sebagai alat untuk memudahkan pemantauan, baik oleh peneliti ataupun oleh tim monitoring dan evaluasi.

Oleh karena itu, setiap Peneliti harus mencatat semua kegiatan Penelitian yang dilakukan. Agar buku catatan kegiatan ini dapat memberikan informasi yang baik, teratur dan kronologis, maka tidak dibenarkan untuk merobek atau merusak sesuatu halaman yang ada di dalamnya. Jangan dihapus bila ada kesalahan, tetapi cukup dicoret dan diberi paraf peneliti.

Buku catatan kegiatan ini bersifat terbatas dan menjadi milik Tim Penelitian: “Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi Kebijakan penerapan SKPI: Studi pada PTKIS dilingkungan Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten” dan Puslitpen UIN SGD dan di dalam pelaksanaan pengisiannya menjadi tanggung jawab Tim Peneliti.

Tim Peneliti,

## PETUNJUK PENGISIAN

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan berbagai skim Penelitian lalu, dirasa perlu untuk meningkatkan sistem pencatatan kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti, baik yang bekerja di laboratorium maupun di lapangan, sekaligus menyeragamkan format catatan kegiatan yang dilakukan. Keseragaman format ini penting agar Peneliti dapat dilakukan secara efisien, terarah dan terperinci sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Begitu juga akan sangat memudahkan pemantauan kegiatan Penelitian oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Buku ini akan digunakan untuk menilai kemajuan Penelitian: "Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi Kebijakan penerapan SKPI: Studi pada PTKIS dilingkungan Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten. Dengan tidak bermaksud mengurangi kewenangan yang ada pada Pusat Penelitian tentang keseragaman format catatan kegiatan, maka buku catatan kegiatan ini dibuat oleh tim peneliti.

Setiap peneliti yang melakukan kegiatan Penelitian/Pengabdian harus mencatat semua kegiatan (termasuk penggunaan dana) dan data yang diperoleh secara singkat dan jelas sehingga tergambar dalam buku catatan ini;

- k. Nonor Urut
- l. Waktu pelaksanaan terdiri dari Hari, tanggal (hari, tanggal pencatatan);
- m. Kegiatan yang dilakukan terdiri dari Nama kegiatan/sub kegiatan (sesuai jadwal pelaksanaan);
- n. Tujuan dari kegiatan/sub kegiatan (sesuai proposal);
- o. Uraian kegiatan (harus menggambarkan urutan kegiatan yang dilakukan harian atau mingguan, berupa deSTAI eksperimen serta analisa yang dilakukan berikut penggunaan waktu, orang bahan, alat mesin dan lain-lain);
- p. Hasil yang diperoleh harian atau mingguan (cantumkan juga hari/tanggal dan tempat/lokasi pengukuran/pencatatan/analisa);
- q. Hambatan (jelaskan hambatan-hambatan yang dialami, jika ada);
- r. Kesimpulan dan saran (kesimpulan dan saran masing-masing kegiatan);
- s. Rencana kegiatan selanjutnya sesuai kesimpulan dan proposal;
- t. Tanda tangan peneliti di dalam Buku Peneliti setiap kali pencatatan kegiatan.



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung IMPLEMENTASI Kebijakan SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

**RINGKASAN CATATAN HARIAN (LB) PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN**

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan Penelitian	Output/Catatan Kemajuan	Kendala	Pelaksana
1	2	3	4	5	6
1.	Rabu 21 Maret 2018	- Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja B-113/Un.05/V.2/ PP.00.9/03/2018. Tgl. 21/3/018	Dimilikinya dasar legalitas formal untuk operasional kegiatan penelitian	Lancar	Ketua dan anggota Tim
		- Penyusunan jadwal operasional Kegiatan sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor: B-113/Un.05/V.2/P.00.9/03/2018. Tgl. 21/3/018	Dimilikinya jadwal operasional kegiatan penelitian berdasar pada Surat Perjanjian Kerja Nomor: 113/Un.05/V.2/PP.00.9/ 03/2018. Tgl. 21/3/018	Lancar	Ketua Tim, bersama Anggota Tim
2.	Kamis 22 Maret 2018	- Pengadaan perlengkapan administrasi kantor - Review Desain Penelitian, disesuaikan dengan kontrak	- Dimilikinya perlengkapan adm kantor - Dimilikinya Desain penelitian sesuai dengan ketentuan SPK	Lancar	Ketua dan Anggota tim dibantu oleh staf,
3.	Sabtu 24 Maret 2018	Penyusunan Kelengkapan perangkat sistem/administrasi penelitian - Permohonan Izin Lokasi ke Koord Kopertais - Permohonan Izin Lokasi 24 PTKIS	Dimilikinya Sistem penelitian, untuk kepentingan penelitian Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat Dan Banten	Lancar	Ketua dan Anggota tim dibantu oleh staf,
4.	Selasa, 27 Maret 2018	- Penyusunan Alokasi Waktu dan Biaya (Pengembangan jadwal dan RAB).	Dimilikinya: Alokasi Waktu dan Biaya kususnya untuk keg di Lokasi/Perjalanan Dinas untuk: (1) Observasi/izin lokasi; (2) penyebaran IPD III; (3) Wawancara & pengambilan Isian IPD III; (4) Validasi data.	Lancar	Ketua dan Anggota tim dibantu oleh staf,
5.	Rabu, 28 Maret 2018	- Penyiapan Rancangan Pedoman Operasional Penelitian	Dimilikinya: Rancangan/Sistematika Pedoman Operasional Penelitian, berisi: pendahuluan, Konsep, metode, Kerangka. Jadwal Kisi-kisi, IPD	Lancar	Ketua dan Anggota tim dibantu oleh staf,



**LOG BOOK**

**KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Koperatis Wilayah II Jawa Barat dan Banten)**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
6.	Kamis, 29 Maret 2018	- Penyusunan Pendahuluan, Konsep, metode, Kerangka. Jadwal Penelitian	Dimilikinya: Pendahuluan, Konsep, metode, Kerangka. Jadwal Penelitian, berdasarkan kaidah ilmiah dan SPK. (bagian dari pedoman)	Lancar	Ketua dan Anggota tim dibantu oleh staf,
7.	Sabtu, 31 Maret 2018	- Penyusunan Kisi-kisi, penelitian (bagian dari PO Penelitian)	Dimilikinya: Kisi-kisi, penelitian Penelitian berisi: Masalah Penelitian Dan Sub Masalah, Hubungan Konsep/Indikator, Sumber Data, dan Teknik Pengumpul Data (TPD)	Lancar	Ketua dan Anggota tim dibantu oleh staf,
8.	Selasa, 3 April 2018	- Penyusunan Pedoman Observasi (IPD-I) Kelenkapan PO penelitian.	Dimilikinya: Pedoman Observasi (IPD-I) Kelenkapan PO penelitian. Berisi: Ketentuan Observasi, dan substansi/materi observasi	Lancar	Ketua dan Anggota tim dibantu oleh staf,
9.	Rabu, 4 April 2018	- Penyusunan Pedoman Wawancara (IPD-II) Kelenkapan PO Penelitian.	Dimilikinya: Pedoman Wawancara (IPD-II) Kelenkapan PO penelitian. Berisi: Ketentuan Wawancara, dan substansi/materi Wawancara.	Lancar	Ketua dan Anggota tim dibantu oleh staf,
10.	Kamis, 5 April 2018	- Penyusunan Pedoman Studi Dokumentasi (IPD-III) Kelenkapan PO Penelitian.	Dimilikinya: Pedoman Studi Dokumentasi (IPD-III) Berisi: Ketentuan STD, dan substansi/materi STD.	Lancar	Ketua dan Anggota tim dibantu oleh staf,
11.	Sabtu, 7 April 2018	- Kompilasi Pedoman Operasional Penelitian	Dimilikinya: Kompilasi Pedoman Operasional Penelitian. Berisi: pendahuluan, Konsep, metode, Kerangka. Jadwal Kisi-kisi, IPD-I, II, dan III.	Lancar	Ketua dan Anggota tim dibantu oleh staf,
12.	Selasa, 10 April 2018	- Penyiapan Rapat: Review Pedoman dan Instrumen Penelitian	Dimilikinya: Kesiapan Rapat Review Pedoman dan Instrumen Penelitian. Untuk kepentingan penelitian	Lancar	Ketua dan Anggota tim dibantu oleh staf,
13.	Kamis, 12 April 2018	- Pelaksanaan Rapat: Review Pedoman dan Instrumen Penelitian	Dimilikinya: Rekomendasi/kesepahaman dari pakar dan teman sejawat, yang memastikan Pedoman Penelitian telah valid, kredibel dan akuntabel.	Lancar	Ketua dan Anggota tim dibantu oleh staf,



**LOG BOOK**

**KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)**

1	2	3	4	5	6
14.	Selasa, 17 April 2018	Persiapan: Rencana Observasi Lokasi Penelitian di 24 PTKIS	Dimilikinya: Kesiapan Administrasi, biaya dan kelengkapan Observasi Lokasi Penelitian	Lancar	Ketua dan Anggota tim dibantu oleh staf.
15.	Sabtu 21 April 2018	Observasi di PTKIS Lokasi Penelitian UNMA, IAIB, STAI Fatahilah dan STAI Al-Karimiah	Dimilikinya: Data hasil Observasi dari UNMA, IAIB, STAI Fatahilah dan STAI Al-Karimiah	Lancar	- Nasihudin: - A. Rusdiana
16.	Selasa 24 April 2018	Lanjutan Observasi di STAI Latansa, IAIN Lroiba, Univ Juanda, dan STAI Kharisma.	Dimilikinya: Data hasil Observasi dari STAI Latansa, IAIN Lroiba, Univ Juanda, dan STAI Kharisma.	Lancar	- Nasihudin: - A. Rusdiana
17.	Kamis 26 April 2018	Lanjutan Observasi di STAI Sukabumi, Nurul Hikmah Cianjur, STAI Agus Salim, Bekasi dan STAI As-Sidqiyah Karawang.	Dimilikinya: Data hasil Observasi dari STAI Sukabumi, Nurul Hikmah Cianjur, STAI Agus Salim, Bekasi dan STAI As-Sidqiyah Karawang.	Lancar	- Nasihudin: - A. Rusdiana
18.	Sabtu 28 April 2018	Lanjutan Observasi di STAI EZ Muttaqin, Riyadul Jannah; STAIS Dharma, dan STAIC Cirebon.	Dimilikinya: Data hasil Observasi dari STAI EZ Muttaqin, Riyadul Jannah; STAIS Dharma, dan STAIC Cirebon.	Lancar	- Nasihudin: - A. Rusdiana
19.	Rabu 2 Mei 2018	Lanjutan Observasi di UNSIA, STAI Putra Galuh, STAI Mif Huda AAz dan STAINU Tasik	Dimilikinya: Data hasil Observasi UNSIA, STAI Putra Galuh, STAI MH Al Azhar dan STAINU.	Lancar	- Nasihudin: - A. Rusdiana
20.	Sabtu 5 Mei 2018	Lanjutan Observasi di IAIC Tasik, STAI Siliwangi Garut	Dimilikinya: Data hasil Observasi dari IAIC Tasik, STAI Siliwangi Garut.	Lancar	- Nasihudin:
21.	Selasa 8 Mei 2018	Lanjutan Observasi di STAI Al-Falah Cicalengka	Dimilikinya: Data hasil Observasi dari STAI Al-Falah Cicalengka	Lancar	- A. Rusdiana
22.	Rabu 9 Mei 2018	Lanjutan Observasi di STAI Siliwangi Cimahi	Dimilikinya: Data hasil Observasi dari STAI Siliwangi Cimahi	Lancar	- A. Rusdiana



**LOG BOOK**

**KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)**

1	2	3	4	5	6
23.	Sabtu 12 Mei 2018	- Formulasi hasil Observasi dari 24 PTKIS Lokasi Penelitian. - Penyiapan Penyebaran IPD III Studi Dok Penelitian	Dimilikinya: Data hasil Observasi dari 24 PKIS, yang sudah tersusun dan terpilah. Dan siapnya Adm dan keengkapan Penyebaran IPD Studi Dok Penelitian	Lancar	Ketua dan Anggota tim dibantu oleh staf,
24.	Selasa 15 Mei 2018	Penyebaran IPD III Dokumen/Data Kesiapan Implementasi SKPI ke: UNMA, IAIB, STAI Fatahilah dan STAI Al-Karimiah	Sampai/diterimanya: IPD III Dokumen/Data Kesiapan Implementasi SKPI oleh pihak: UNMA, IAIB, STAI Fatahilah dan STAI Al-Karimiah.	Lancar	- Nasihudin: - A. Rusdiana
25.	Sabtu 19 Mei 2018	Lanjutan Penyebaran IPD III Kesiapan Implementasi SKPI ke: STAI Latansa, IAIN La-Roiba STAI, UNIDA dan STAI Kharisma	Sampai/diterimanya: IPD III Dokumen/Data Kesiapan Implementasi SKPI ke: STAI Latansa, IAIN La-Roiba STAI, UNIDA dan STAI Kharisma.	Lancar	- Nasihudin: - A. Rusdiana
26.	Selasa 22 Mei 2018	Lanjutan Penyebaran IPD III Kesiapan Implementasi SKPI ke: STAI Sukabumi, Nurul Hikmah STAI Agus Salim, dan STAI As-Sidqiyah	Sampai/diterimanya: IPD III Dokumen/Data Kesiapan Implementasi SKPI oleh pihak: STAI Sukabumi, Nurul Hikmah Cianjur, STAI Agus Salim, Bekasi dan STAI As-Sidqiyah	Lancar	- Nasihudin: - A. Rusdiana
27.	Sabtu 26 Mei 2018	Lanjutan Penyebaran IPD III Kesiapan Implementasi SKPI ke: STAI EZ Muttaqin, Riyadul Jannah; STAIS Dharma, dan STAIC Cirebon	Sampai/diterimanya: IPD III Dokumen/Data Kesiapan Implementasi SKPI oleh pihak: STAI EZ Muttaqin, Riyadul Jannah; STAIS Dharma, dan STAIC Cirebon	Lancar	- Nasihudin: - A. Rusdiana
28.	Rabu 30 Mei 2018	Lanjutan Penyebaran IPD III Kesiapan Implementasi SKPI ke: UNSIA, STAI Putra Galuh, STAI Mif Huda AAz dan STAINU Tasik,	Sampai/diterimanya: IPD III Dokumen/Data Kesiapan Implementasi SKPI oleh pihak UNSIA, STAI Putra Galuh, STAI Mif Huda Al Azhar dan STAINU Tasik,	Lancar	- Nasihudin: - A. Rusdiana
29.	Sabtu 2 Juni 2018	Lanjutan Penyebaran IPD III Kesiapan Implementasi SKPI ke: IAIC Tasik, STAI Siliwangi Garut, dan STAI Al-Falah Cicalengka	Sampai/diterimanya: IPD III Dokumen/Data Kesiapan Implementasi SKPI oleh pihak IAIC Tasik, STAI Siliwangi Garut, dan STAI Al-Falah Cicalengka	Lancar	- A. Rusdiana





LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

1	2	3	4	5	6
30.	Selasa 5 Juni 2018	Lanjutan Penyebaran IPD III Kesiapan Implementasi SKPI ke: STAI Siliwangi Cimahi..	Sampai/diterimanya: IPD III Dokumen/Data Kesiapan Implementasi SKPI ke STAI Siliwangi Cimahi..	Lancar	- A. Rusdiana
31.	Rabu 6 Juni 2018	Penyiapan Laporan Progres Penelitian 60%: Penyusunan Bab I	Tersusun dan Dimilikinya: Bab I Penelitian. Untuk memenuhi Laporan 60 % progres penelitian.	Lancar	Ketua dan Anggota tim dibantu oleh staf,
32.	Kamis 7 Juni 2018	Penyiapan Laporan Progres Penelitian 60%: Lanjutan Bab II, Sub-Bab A-B	Tersusun dan dimilikinya Bab II Penelitian meliputi: Bab II Tinjauan Pustaka Sub A-Konsep Dasar Kesiapan Implementasi Kebijakan, dan B Teori Implementasi Kebijakan.	Lancar	Ketua dan Anggota tim dibantu oleh staf,
33.	Jum'at 8 Juni 2018	Penyiapan Laporan Progres Penelitian 60%: Lanjutan Bab II Sub-Bab C-D	Tersusun dan dimilikinya Bab II Sub-Bab: C, Penerapan SKPI Sebagai Kebijakan Pendidikan Tinggi menghadapi era Persaingan, dan Sub D. Penelitian terdahulu	Lancar	Ketua dan Anggota tim dibantu oleh staf,
34.	Sabtu 9 Juni 2018	Penyiapan Laporan Progres Penelitian 60%: Lanjutan Bab III	Tersusun dan dimilikinya sampai Bab III Untuk memenuhi Laporan 60 % progres penelitian	Lancar	Ketua dan Anggota tim dibantu oleh staf,
35.	Kamis 21 Juni 2018	Penyampaian Laporan Kegiatan Penelitian Tahap I 60%	Dimilikinya: Bukti Penerimaan dari LPPM, tentang penyerahan dokumen progres penelitian: Bab I - BAB II& BAB III Log Book Bulan Ke III (60%) SPJ 60%	Lancar	Ketua dan Anggota tim dibantu oleh staf,
36.	Sabtu/ 23 Juni 2018	Penyiapan Administrasi kelengkapan Wawancara IPD II dan pengumpulan dokumen/data IPD III, di 24 PTKIS	Dimilinya kesiapan Administrasi kelengkapan Wawancara IPD II dan pengumpulan dokumen/data IPD III, di 24 PTKIS, diharapkan dapat mendukung lancarnya kegiatan penelitian.	Lancar	Ketua dan Anggota tim dibantu oleh staf,

Keterangan:

Log book sd. No 35, sudah disajikan pada kepentingan laporan antara (60%) kegiatan penelitian.



**LOG BOOK**

**KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
37.	Senin 25 Juni 2018	Wawancara IPD II dan pengumpulan dokumen/data IPD III, di: UNMA Pandeglan dan STAI Fatahilah Tangerang	Terlaksanya: Wawancara, dan terkumpulnya data isian IPD III Dokumen/Data Kesiapan Implementasi SKPI dari: UNMA, dan STAI Fatahilah:	Lancar	- Nasihudin: - A. Rusdiana
38.	Selasa 26 Juni 2018	Lanjutan Wawancara IPD II dan pengumpulan dokumen/data IPD III, di IAIB Serang, dan STAI Al-Karimiah Depok	Terlaksanya: Wawancara, dan terkumpulnya data isian IPD III Dokumen/Data Kesiapan Implementasi SKPI dari: IAIB Serang, dan STAI Al-Karimiah Depok	Lancar	- Nasihudin: - A. Rusdiana
39.	Jum'at 29 Juni 2018	Lanjutan Wawancara IPD II dan pengumpulan dokumen/data IPD III, di STAI Latansa, dan Univ Juanda.	Terlaksanya: Wawancara, dan terkumpulnya data isian IPD III Dokumen/Data Kesiapan Implementasi SKPI dari: STAI Latansa, dan Univ Juanda.	Lancar	- Nasihudin: - A. Rusdiana
40.	Sabtu 30 Juni 2018	Lanjutan Wawancara IPD II dan pengumpulan dokumen/data IPD III, di IAIN Lroiba, dan STAI Kharisma.	Terlaksanya: Wawancara, dan terkumpulnya data isian IPD III Dokumen/Data Kesiapan Implementasi SKPI dari: IAIN Lroiba, dan STAI Kharisma.	Lancar	- Nasihudin: - A. Rusdiana
41.	Senin 2 Juli 2018	Lanjutan Wawancara IPD II dan pengumpulan dokumen/data IPD III, di STAI Sukabumi, STAI Agus Salim, Bekasi.	Terlaksanya: Wawancara, dan terkumpulnya data isian IPD III Dokumen/Data Kesiapan Implementasi SKPI dari: STAI Sukabumi, STAI Agus Salim, Bekasi.	Lancar	- Nasihudin: - A. Rusdiana
42.	Selasa 3 Juli 2018	Lanjutan Wawancara IPD II dan pengumpulan dokumen/data IPD III, di STAI Nurul Hikmah Cianjur, dan STAI As-Sidqiyah Karawang	Terlaksanya: Wawancara, dan terkumpulnya data isian IPD III Dokumen/Data Kesiapan Implementasi SKPI dari: STAI Nurul Hikmah Cianjur, dan STAI As-Sidqiyah Karawang	Lancar	- Nasihudin: - A. Rusdiana





**LOG BOOK**

**KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)**

1	2	3	4	5	6
43.	Jum'at 6 Juli 2018	Lanjutan Wawancara IPD II dan pengumpulan dokumen/data IPD III, di STAI EZ Muttaqin, dan STAIS Dharma	Terlaksana: Wawancara, dan terkumpulnya data isian IPD III Dokumen/Data Kesiapan Implementasi SKPI dari: STAI EZ Muttaqin, dan STAIS Dharma	Lancar	- Nasihudin: - A. Rusdiana
44.	Sabtu 7 Juli 2018	Lanjutan Wawancara IPD II dan pengumpulan dokumen/data IPD III, di Riyadul Jannah; dan STAIC Cirebon	Terlaksana: Wawancara, dan terkumpulnya data isian IPD III Dokumen/Data Kesiapan Implementasi SKPI dari: Riyadul Jannah; dan STAIC Cirebon	Lancar	- Nasihudin: - A. Rusdiana
45.	Senin 9 Juli 2018	Lanjutan Wawancara IPD II dan pengumpulan dokumen/data IPD III, di UNSIA, dan STAI Mif Huda Al Azhar.	Terlaksana: Wawancara, dan terkumpulnya data isian IPD III Dokumen/Data Kesiapan Implementasi SKPI dari: UNSIA, dan STAI Mif Huda Al Azhar.	Lancar	- Nasihudin: - A. Rusdiana
46.	Selasa 10 Juli 2018	Lanjutan Wawancara IPD II dan pengumpulan dokumen/data IPD III, di STAI Putra Galuh, dan STAINU Tasik.	Terlaksana: Wawancara, dan terkumpulnya data isian IPD III Dokumen/Data Kesiapan Implementasi SKPI dari: STAI Putra Galuh, dan STAINU Tasik.	Lancar	- Nasihudin: - A. Rusdiana
47.	Rabu 11 Juli 2018	Lanjutan Wawancara IPD II dan pengumpulan dokumen/data IPD III, di IAIC Tasik, dan STAI Al-Falah Cicalengka	Terlaksana: Wawancara, dan terkumpulnya data isian IPD III Dokumen/Data Kesiapan Implementasi SKPI dari: IAIC Tasik, dan STAI Al-Falah Cicalengka	Lancar	- Nasihudin: - A. Rusdiana
48.	Kamis 12 Juli 2018	Lanjutan Wawancara IPD II dan pengumpulan dokumen/data IPD III, di STAI Siliwangi Garut, dan STAI Siliwangi Cimahi	Terlaksana: Wawancara, dan terkumpulnya data isian IPD III Dokumen/Data Kesiapan Implementasi SKPI dari: STAI Siliwangi Garut, dan STAI Siliwangi Cimahi	Lancar	- Nasihudin: - A. Rusdiana



**LOG BOOK**

**KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)**

1	2	3	4	5	6
49.	Jum'at, 13 Juli 2018	Pengolahan Data IPD I-IPD-II&IPD III dari: UNMA, IAIB Serang, STAI Fatahilah, STAI Al-Karimiah Depok, STA La-Tansa, IAIN Laroiba, UNIDA Bogor dan STAI Kharisma	Dimilikinya data penelitian hasil pengolahan dari: UNMA, IAIB Serang, STAI Fatahilah, STAI Al-Karimiah, STA La-Tansa, IAIN Laroiba, UNIDA dan STAI Kharisma yang valid, kredibel dan akuntabel..	Lancar	Staf, pengolah data Dikoordinasikan oleh Anggota Tim Monitoring Ketua Tim
50.	Sabtu, 14 Juli 2018	Lanjutan: Pengolahan Data IPD I-IPD-II&IPDIII dari: STAI Sukabumi, Nurul Hikmah; Agus Salim, As-Sidqiyah, EZ Muttaqin Riyadul Jannah; STAIS Dharma, dan STAIC	Dimilikinya data penelitian hasil pengolahan dari: STAI Sukabumi, Nurul Hikmah; Agus Salim, As-Sidqiyah, EZ Muttaqin Riyadul Jannah; STAIS Dharma, dan STAIC yang valid, kredibel dan akuntabel..	Lancar	- sda
51.	Minggu, 15 Juli 2018	1. Lanjutan: Pengolahan Data IPD I-IPD-II&IPD III dari: UNSIA, STAI Putra Galuh, STAI MH Al Azhar, STAINU; IAIC Tasik, STAI Siliwangi Garut STAI Al-Falah, dan STAI Siliwagi Cimahi. 2. Persiapan Validasi/Membercheck data ke 24 PTKIS	1. Dimilikinya data penelitian hasil pengolahan dari: UNSIA, STAI Putra Galuh, STAI MH Al Azhar, STAINU; IAIC Tasik, STAI Siliwangi Garut STAI Al-Falah, dan STAI Siliwagi Cimahi, yang valid, kredibel dan akuntabel. 2. Siapnya administrasi kelengkapan dan biaya untuk kegiatan Validasi/Membercheck data ke 24 PTKIS	Lancar	- sda
52.	Senin 16 Juli 2018	Validasi/Membercheck data dengan Nara sumber: UNMA, dan STAI Fatahilah.	Dimilikinya: kesepakatan/persetujuan yang memastikan data telah sesuai dengan apa yang diberikan oleh pihak UNMA, dan STAI Fatahilah, selanjutnya data dinyatakan valid.	Lancar	- Nasihudin: - A. Rusdiana
53.	Selasa 17 Juli 2018	Lanjutan Validasi/Membercheck data dengan Nara sumber: IAIB, dan STAI Al-Karimiah,	Dimilikinya: kesepakatan/persetujuan yang memastikan data telah sesuai dengan apa yang diberikan oleh pihak IAIB, dan STAI Al-Karimiah, selanjutnya data dinyatakan valid.	Lancar	- Nasihudin: - A. Rusdiana



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

1	2	3	4	5	6
54.	Jum'at 20 Juli 2018	Lanjutan Validasi/ <i>Membercheck</i> data dengan Nara sumber: STAI Latansa, dan Univ Juanda,	Dimilikinya: kesepakatan/persetujuan yang memastikan data telah sesuai dengan apa yang diberikan oleh pihak STAI Latansa, dan Univ Juanda, selanjutnya data dinyatakan valid.	Lancar	- Nasihudin: - A. Rusdiana
55.	Sabtu 21 Juli 2018	Lanjutan Validasi/ <i>Membercheck</i> data dengan Nara sumber: IAIN Lroiba, dan STAI Kharisma,	Dimilikinya: kesepakatan/persetujuan yang memastikan data telah sesuai dengan apa yang diberikan oleh pihak IAIN Lroiba, dan STAI Kharisma, selanjutnya data dinyatakan valid.	Lancar	- Nasihudin: - A. Rusdiana
56.	Senin 23 Juli 2018	Lanjutan Validasi/ <i>Membercheck</i> data dengan Nara sumber: STAI Sukabumi, dan STAI Agus Salim.	Dimilikinya: kesepakatan/persetujuan yang memastikan data telah sesuai dengan apa yang diberikan oleh STAI Sukabumi, dan STAI Agus Salim, selanjutnya data dinyatakan valid.	Lancar	- Nasihudin: - A. Rusdiana
57.	Selasa 24 Juli 2018	Lanjutan Validasi/ <i>Membercheck</i> data dengan Nara sumber: STAI Nurul Hikmah Cianjur, dan STAI As-Sidqiyah Karawang.	Dimilikinya: kesepakatan/persetujuan yang memastikan data telah sesuai dengan apa yang diberikan oleh STAI Nurul Hikmah Cianjur, dan STAI As-Sidqiyah Karawang, selanjutnya data dinyatakan valid.	Lancar	- Nasihudin: - A. Rusdiana
58.	Jum'at 27 Juli 2018	Lanjutan Validasi/ <i>Membercheck</i> data dengan Nara sumber: STAI EZ Muttaqin, dan STAIS Dharma.	Dimilikinya: kesepakatan/persetujuan yang memastikan data telah sesuai dengan apa yang diberikan oleh pihak STAI EZ Muttaqin, dan STAIS Dharma, selanjutnya data dinyatakan valid.	Lancar	- Nasihudin: - A. Rusdiana
59.	Sabtu 28 Juli 2018	Lanjutan Validasi/ <i>Membercheck</i> data dengan Nara sumber: STAI Riyadul Jannah dan STAIC Cirebon.	Dimilikinya: kesepakatan/persetujuan yang memastikan data telah sesuai dengan apa yang diberikan oleh pihak STAI Riyadul Jannah dan STAIC Cirebon, selanjutnya data dinyatakan valid.	Lancar	- Nasihudin: - A. Rusdiana



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopermais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

1	2	3	4	5	6
60.	Senin 30 Juli 2018	Lanjutan Validasi/Membercheck data dengan Nara sumber: UNSIA dan STAI Mif Huda Al Azhar.	Dimilikinya: kesepakatan/persetujuan yang memastikan data telah sesuai dengan apa yang diberikan oleh UNSIA dan STAI Mif Huda Al Azhar, selanjutnya data dinyatakan valid.	Lancar	- Nasihudin: - A. Rusdiana
61.	Selasa 31 Juli 2018	Lanjutan Validasi/Membercheck data dengan Nara sumber: STAI Putra Galuh, dan STAINU Tasik,	Dimilikinya: kesepakatan/persetujuan yang memastikan data telah sesuai dengan apa yang diberikan oleh STAI Putra Galuh, dan STAINU Tasik, selanjutnya data dinyatakan valid.	Lancar	- Nasihudin: - A. Rusdiana
62.	Jum'at, 3 Agust 2018	Lanjutan Validasi/Membercheck data dengan Nara sumber: oleh IAIC Tasik, dan STAI Al-Falah.	Dimilikinya: kesepakatan/persetujuan yang memastikan data telah sesuai dengan apa yang diberikan oleh pihak oleh IAIC Tasik, dan STAI Al-Falah, selanjutnya data dinyatakan valid.	Lancar	- Nasihudin: - A. Rusdiana
63.	Sabtu , 4 Agust 2018	Lanjutan Validasi/Membercheck data dengan Nara sumber: STAI Siliwangi Garut, dan STAI Siliwangi Cimahi.	Dimilikinya: kesepakatan/persetujuan yang memastikan data telah sesuai dengan apa yang diberikan oleh pihak STAI Siliwangi Garut, dan STAI Siliwangi Cimahi, selanjutnya data dinyatakan valid.	Lancar	- Nasihudin: - A. Rusdiana
64.	Senin, 6 Agust 2018	Editing data hasil Validasi/Membercheck dengan PTKIS Sumber	Dimilikinya data penelitian Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: yang valid, kredibel dan dapat dipercaya secara ilmiah.	Lancar	Staf, pengolah data Dikoordinasikan oleh Anggota Tim Monitoring Ketua Tim
65.	Selasa, 7 Agust 2018	Lanjutan: Editing data hasil Validasi/Membercheck dengan PTKIS Sum	Dimilikinya data penelitian Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: yang valid, kredibel dan dapat dipercaya secara ilmiah.	Lancar	Staf, pengolah data Dikoordinasikan oleh Anggota Tim Monitoring Ketua Tim



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

1	2	3	4	5	6
66.	Rabu, 8 Agust 2018	Lanjutan: Editing data hasil Validasi/ <i>Membercheck</i> dengan PTKIS Sum	Dimilikinya data penelitian Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: yang valid, kredibel dan dapat dipercaya secara ilmiah.	Lancar	Staf, pengolah data Dikoordinasikan oleh Anggota Tim Monitoring Ketua Tim
67.	Kamis, 9 Agust 2018	Finalisasi Laporan Penelitian Bahan Rapat Evaluasi akhir dengan pakar dan sejawat	Dimilikinya Laporan penelitian “Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat Dan Banten. Sesuai dengan tuntutan ilmiah dan kontrak penelitian;	Lancar	Staf, pengolah data Dikoordinasikan oleh Anggota Tim Monitoring Ketua Tim
68.	Jum’at, 10 Agust 2018	Finalisasi Laporan Penelitian dan Persiapan Rapat Evaluasi akhir dengan pakar dan sejawat	1. Dimilikinya Laporan penelitian “Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat Dan Banten. Sesuai dengan tuntutan ilmiah dan kontrak penelitian; 2. Sampainya/expedisi kesiapan rapat (pakar dan sejawat), siapnya bahan kelengkapan rapat, daf hadir, dan nominasi.	Lancar	Staf, pengolah data Dikoordinasikan oleh Anggota Tim Monitoring Ketua Tim
69.	Sabtu, 11 Agust 2018	Rapat Evaluasi akhir dg pakar dan sejawat	Dimilikinya: Rekomendasi/kesepahaman pakar dan sejawat, yang memastikan bahwa Laporan Peneliitian “Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat Dan Banten. Dianggap telah valid, kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun administratif.	Lancar	Pakar, sejawat Staf, pengolah data Dikoordinasikan oleh Anggota Tim Atas tanggungjawab Ketua Tim





**LOG BOOK**

**KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
70.	Senin 13 Agust 2018	Editing/Seting Laporan Akhir Penelitian	Dimiliknnya Laporan Penelitian “Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat Dan Banten. Dalam bentuk: Format Laporan Penelitian A-4; Format Laporan Penelitian B-5 (dummy buku); Format Jurnal.dan Laporan SPJ dan Log Book	Lancar	Staf, pengolah data Dikoordinasikan oleh Anggota Tim Monitoring Ketua Tim
71.	Selasa 14 Agust 2018	Penggandaan Laporan	Dimiliknnya Laporan Penelitian “Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat Dan Banten. Dalam bentuk: A-4- 5 eks; B-5 5 eks; SPJ dan Log Book masing-masing 2 eks;	Lancar	Tk Ffoto Copy Sae, Staf, pengolah data Dikoordinasikan oleh Anggota Tim Monitoring Ketua Tim
72.	Rabu 15 Agust 2018	Lanjutan Penggandaan Laporan	Dimiliknnya Laporan Penelitian “Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Dalam bentuk: A-4- 5 eks; B- 5 5 eks; SPJ dan Log Book masing-masing 2 eks;	Lancar	Tk Ffoto Copy Sae, Staf, pengolah data Dikoordinasikan oleh Anggota Tim Monitoring Ketua Tim
73.	Kamis 16 Agust 2018	Penyiapan Usulan/Pendaftaran HAKI	Dimiliknnya Bukti Terdaftar: Laporan Penelitian Dari Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (resi terlampir) Untuk kepentingan Laporan Dokumen Penelitian ke LPPM.	Lancar	Staf, pengolah data Dikoordinasikan oleh Anggota Tim Monitoring Ketua Tim



LOG BOOK

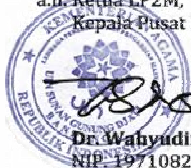
KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

1	2	3	4	5	6
74.	Senin 20 Agust 2018	Penyerahan Dokumen Laporan dan SPJ Penelitian	Dimilikinya: Bukti penerimaan dari Admin LPPM, yang memastikan: Laporan Penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat Dan Banten. Dalam bentuk: A-4-B-5 SPJ dan Log Book, Daft Jurnal dan bukti daftar HAKI. Telah memenuhi ketentuan yang berlaku. (Bukti penerimaan terkampir)		Ketua dan anggota Tim

Mengetahui:

a.n. Ketua LP2M,

Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007

Bandung, 20 Agustus 2018

Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP. 1961042119860201001

**Analisis:**

Kontrak 6 bulan x 20 Hk = 120 Hk. 100 %

Waktu digunakan peneliti = 74 Hk. 62 %

Waktu untuk Tupoksi = 46 Hk. 38 %







**BUKU CATATAN KEGIATAN PENELITIAN  
( LOG BOOK )**

---

---

**Judul Penelitian**

**KESIAPAN PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAM ISLAM  
DALAM Mendukung IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI  
(Studi di PTKIS Kopertais Wilayah Ii Jawa Barat Dan Banten)**

Dasar Kegiatan:

SPK- No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018 Tanggal 21 Maret 2018 .

Pelaksanaan : 6 bulan

Waktu : 21 Maret - 20 Agustus 2018

**Kelompok Peneliti**

**Ketua Peneliti : Dr. H. A. Rusdianan, MM/ID 20171020150557**

**Anggota) : Drs. Nasihudin, MPd./ID 20200620108000**

**Alamat / Telp. : Jl. A.H. Nasution 105 Bandung Tlp. 022. 7800525**

a.n. Ketua LP2M,

Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



**Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag**

**NIP. 1971082719980310007**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG  
TAHUN 2018**

## IDENTITAS

**Ketua Tim** : Dr. H. A. Rusdianan, MM  
**NIP** : 1961042119860201001  
**Fakultas/Prodi.** : Tarbiyah dan Keguruan/MPI  
**Anggota** : Drs. Nasihudin, MPd.  
**NIP** : 196209201991031001  
**Fakultas / Prodi.** : Tarbiyah dan Keguruan/PGMI  
**Judul Penelitian** :  
**Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI:  
Studi PTKIS Kopertais Wilayah Ii Jawa Barat Dan Banten.**  
**Lokasi Penelitian** : PTKIS Wilayah II Jawa Barat dan Banten  
**Mitra Penelitian** : 24 PTKIS  
**Waktu Penelitian** : 6 bulan (21 Maret s/d 20 Agustus 2018  
**Total Dana Penelitian** : Rp. 75.000.000,-  
**-Tahap I** : Rp. 45.000.000,-  
**-Tahap II** : Rp. 30.000.000,-  
**Sumber Dana** : DIPA RM UIN SGD Tahun 2018

## KATA PENGANTAR

Buku Catatan Kegiatan (Log Book) Penelitian, menjadi kewajiban Tim peneliti, bukan hanya itu Log Book, dijadikan salah satu produk output dalam pertanggungjawaban penelitian. Atas dasar itu, dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian, Tim Penelitian: “Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi Kebijakan penerapan SKPI: Studi pada PTKIS dilingkungan Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten” menyusun Log Book ini.

Sudah selayaknya tim peneliti, merekam atau mencatat setiap kegiatan Penelitian dalam Buku Catatan Kegiatan Penelitian (Log Book).

Buku catatan kegiatan (Log Book), diisi dengan baik, akan memberikan manfaat yang banyak, antara lain:

- a. Sebagai bahan bukti untuk mengajukan permintaan hak patent;
- b. Sebagai bahan pembuatan makalah ilmiah dan laporan kegiatan;
- c. Sebagai alat untuk memudahkan pemantauan, baik oleh peneliti ataupun oleh tim monitoring dan evaluasi.

Oleh karena itu, setiap Peneliti harus mencatat semua kegiatan Penelitian yang dilakukan. Agar buku catatan kegiatan ini dapat memberikan informasi yang baik, teratur dan kronologis, maka tidak dibenarkan untuk merobek atau merusak sesuatu halaman yang ada di dalamnya. Jangan dihapus bila ada kesalahan, tetapi cukup dicoret dan diberi paraf peneliti.

Buku catatan kegiatan ini bersifat terbatas dan menjadi milik Tim Penelitian: “Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi Kebijakan penerapan SKPI: Studi pada PTKIS dilingkungan Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten” dan Puslitpen UIN SGD dan di dalam pelaksanaan pengisiannya menjadi tanggung jawab Tim Peneliti.

Tim Peneliti,

## Lokasi Penelitian

### PTKIS sebagai Sampel Penelitian

No	Nama PTKIS	Kualifikasi PT	Kab/Kota/Propinsi
1	2	3	5
49.	FAI Universitas Mathlauul Anwar	Univ	Kab. Pandeglang-Banten
50.	IAIB Serang	Ins	Kota Serang-Banten
51.	STAI Latansa Mashiro	ST	Kab. Lebak -Banten
52.	STAI Fatahilah	ST	Kota Tanggeran-Banten
53.	STAI Al-Karimiyah	ST	Kota Depok- Jawa Barat
54.	FAI Univ Juanda	Univ	Kota Bogor-Jawa Barat
55.	IAIN Laroiba	Ins	Kab. Bogor-Jawa Barat
56.	STAI Karisma	ST	Kab. Sukabumi-Jawa Barat
57.	STAI Sukabumi	ST	Kota Sukabumi-Jawa Barat
58.	STAI Nurul Hikmah	ST	Kab. Cianjur-Jawa Barat
59.	STAI Agus Salim	ST	Kota Bekasi-Jawa Barat
60.	STAI As Sidiqiyah	ST	Kab. Karawang-Jawa Barat
61.	STAI DR. KHE. Z Muttaqin	ST	Kab. Purwakarta-Jawa Barat
62.	STAI Riyaduljannah	ST	Kab. Subang-Jawa Barat
63.	STAIS Dharma	ST	Kab Indramayu-Jawa Barat
64.	STAI Cirebon	ST	Kota Cirebon-Jawa Barat
65.	FKIS UNSIA	Univ	Kab. Kuningan-Jawa Barat
66.	STAI Miftahul Huda Al Azhar	ST	Kota Banjar -Jawa Barat
67.	STAI Putra Galuh	ST	Kab. Ciamis-Jawa Barat
68.	STAINU Tasikmaya	ST	Kota Tasikmalaya-Jawa Barat
69.	IAIC Cipasung	Ins	Kab. Tasikmalaya-Jawa Barat
70.	STAI Siliwangi Garut	ST	Kab. Garut-Jawa Barat
71.	STAI Al-Falah	ST	Kab.Bandung-Jawa Barat
72.	STAI Siliwangi	ST	Kota Cimahi-Jawa Barat

## Jadwal Kegiatan Penelitian

Dasar: Surat Perjanjian Kerja No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018. tanggal 21 Maret 2018. Waktu pelaksanaan selama 6 bulan, mulai tanggal 21 Maret sampai 20 Agustus 2018.

No	Kegiatan	Bulan Minggu	Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				Ket.
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Perencanaan		√																								
2.	Penyusunan TOR Penelitian			√	√	√	√																				
3.	Reveg Ped/Instumen dg pakar							√																			
5.	Studi pendahuluan/observasi								√	√	√	√															
6.	Penyebaran, Instrumen											√															
7.	Penyusunan Bab I-II-III														√	√	√										
8.	Pengumpulan data												√	√	√	√	√										
9.	Pengolahan/analisis data															√	√	√	√								
10.	Laporan Kegiatan 60% Termin.I																√1										
11.	Validasi data ke lokasi																	√	√								
12.	Penyusunan Laporan																		√	√	√	√					
13.	Seminar Hasil Penelitian																						√				
14.	Editing/Proses HAKI/Publikasi JI																			√	√	√					
15.	Laporan 100% T.II (dg SPJB)																					√	√2				

Ket: √1=Waktu Penyerahan Laporan Antara  
 √2=Waktu Penyerahan Laporan Antara





LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018, Tgl 21 Maret 2018, Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar ..... dari .....

1.	Tanggal/Bulan/Tahun	Rabu, 21 Maret 2018.
2.	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Persiapan dan Perencanaan Kegiatan.
3.	Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	- Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja. - Penyusunan rancangan jadwal operasional kegiatan.
4.	Catatan kemajuan: (Hasil yang diperoleh)	- Dimilikinya dasar legalitas formal untuk operasional kegiatan penelitian. - Dimilikinya jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian berdasarkan Rd Surat Perjanjian Kerja No. B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018 tgl. 21 Maret 2018 (jadwal terlampir) dengan alokasi waktu yg di gunakan untuk penelitian hari Selasa, Rabu, Kamis dan Sabtu. (Senin dan Jumat Mengajar Penuh)
5.	Kendala	- linear.
6.	Kesimpulan dan saran	- Dengan dimilikinya dasar legalitas formal untuk operasional kegiatan penelitian maka pelaksanaan penelitian, hukumnya menjadi jelas, memiliki pinakan yg kuat. - Dengan dimilikinya rencana jadwal operasional kegiatan penelitian berdasarkan Rd Surat Perjanjian Kerja Nomor B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018 tgl. 21 Maret 2018, maka pelaksanaan akan lebih terarah. - Sebaiknya kontrak di lengkapi dengan Panduan/Reunjuk teknis kegiatan, menjadi satu paket.
7.	Rencana kegiatan selanjutnya	Penyiapan / Pengadaan adm perlengkapan dan Review Re STAIN Penelitian.

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP: 1962042119860201001

Catatan:

- Bila kalam yg tersedia tidak cukup harap ditambahkan pada halaman berikutnya;
- Bila hasil berupa tabel/gambar ditempelkan, pada halaman belakang.

Bandung, 21. Maret 2018  
Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP:196209201991031001

Catatan Monev:

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,

Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP: 1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN FTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI  
(Studi pada FTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018, Tgl 21 Maret 2018, Kpg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar ... dari ...

2.	Tanggal/Bulan/Tahun	Kamis, 22 Maret 2018.
2.	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	- Pengadaan perlengkapan admin Kantor. - Review Proposal Ke-Desain. Penelitian.
3.	Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	- Tersedianya perlengkapan admin Kantor. - Tersusunya Desain penelitian (pengemb proposal) sesuai dengan ketentuan SPK Nomor: B.113/40.05/V.03/PP.00.9/03/2018 tanggal 21 Maret, 2018.
4.	Catatan kemajuan (hasil yang diperoleh)	- Dimilikinya perlengkapan Admin Kantor - Dimilikinya Desain penelitian sesuai dengan Kardak Ilmiah dan Ketentuan. Ketentuan SPK Nomor: B.113/40.05/V.2/PP.00.9/03/2018 tanggal 21 Maret, 2018.
5.	Kendala	- Tidak ada.
6.	Kesimpulan dan saran	- Dengan dimilikinya perlengkapan admin penelitian sesuai dengan kardak ilmiah dan ketentuan ketentuan SPK di harapkan dapat menunjang kelancaran lannya pelaksanaan penelitian. - Sebaiknya ada standar format yg baku untuk pengurusan
7.	Rencana kegiatan selanjutnya	

Mengetahui/Menyetujui:

Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MM

NIP: 1961042119860201001

Catatan:

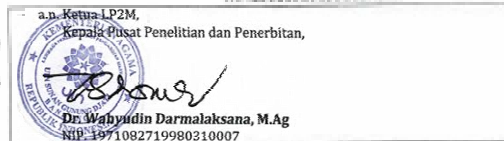
- Bila kolom yg tersedia tidak cukup harap ditambahkan pada halaman berikutnya.
- Bila hasil berupa tabel/gambar ditambahkan, pada halaman belakang.

Bandung, 29 Maret, 2018.

Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.

NIP: 196206201990101001







LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung IMPLEMENTASI Kebijakan SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK/ No. B.11/2016.04/VI.2/PP.00.003/2018, Tgl 21 Maret 2018, Keg. 4 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar .... dari ....

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Sabtu, 24 Maret, 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Penyusunan Kelengkapan Perangkat Administrasi pada: - Permohonan lain lokasi Penelitian ke Kopertais. - Permohonan lain lokasi Penelitian ke 24 PTKIS
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (tujuan program)	Tersusunnya Permohonan lain lokasi Penelitian, Untuk 24 lokasi Penelitian /PTKIS di Kopertais Wilayah II Jabar Banten, berdasarkan SPK Nomor B 113/440.05/VI.2/PP.00.9103/2018 tanggal 21 Maret, 2018.
4. Catatan kemajuan (hasil yang di peroleh)	Dimilikinya Surat permohonan lain lokasi Penelitian. Untuk: - Rek. koord. Kopertais wilayah II Jabar - Banten. - 3 Rektor UIN, 3 Rektori AI dan Ketua STAI (24 PTKIS), sebagai lokasi penelitian * kesiapan PTKIS dalam mendukung implementasi Kebijakan SKPI Subsidi PTKIS Kopertais wilayah II Jawa Barat dan Banten
5. kendala	- Tidak ada.
6. Kesimpulan dan saran	Pegawai dimilikinya Permohonan lain lokasi Penelitian Rek. Koordinator Kopertais II, dan 24 PTKIS, diharapkan dapat menunjang kelancaran, kelengkapan pelaksanaan penelitian.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Penyusunan Alokasi Waktu dan Biaya (pengembangan lokasi dan RAB)

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Ruddyana, MM  
NIP. 19630021199080301001

Catatan:

- Bila telah yg tersedia baik cukup hanya diuploadkan pada halaman berkulitnya
- bila hasil berupa tabel/gambar diuploadkan, pada halaman belakang.

Bandung, 24 Maret 2018.  
Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP.196309201991081001

Petahan Kelenteng  
a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan.

Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP.1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung IMPLEMENTASI Kebijakan SKPI

(Studi pada PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Un.03/V.2/PP.00.9/03/2018, Tgl 21 Maret 2018. Keg. 6 bulan sampai Tgl. 30 Agustus 2018

Lembar .... dari ....

1. Tanggal/Walau/Tahun	Selasa, 27. Maret. 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Penyusunan Alokasi Waktu dan Biaya (Pengembangan Jadwal dan RAB)
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Tersusunnya: Alokasi Waktu dan Biaya (Pengembangan RAB). Rencana Perjalanan Dinas untuk: (1) observasi/tema lokasi; (2) penyebaran IPD; (3) wawancara dan pengambilan IPD; (4) validasi data, berdasarkan SPK: B.113/Un.03/V.2/PP.00.9/03/2018 tanggal 21 Maret. 2018.
4. Catatan Kemi Juanc (Hal-hal yang dipelajari)	Dimulainya Alokasi Waktu dan Biaya (Pengembangan RAB) Rencana Perjalanan Dinas untuk: (1) observasi/tema lokasi; (2) penyebaran IPD; (3) wawancara dan pengambilan IPD; (4) validasi data, untuk Keperluan Penelitian Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Imple. Mentasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertis Wilayah Jawa Barat dan Banten (Alokasi Waktu dan Biaya); terlampir
5. Kendala	- lancar.
6. Kesimpulan dan saran	Dengan dimulainya Alokasi Waktu dan Biaya (Pengembangan RAB) Rencana Perjalanan Dinas untuk (1) observasi/tema lokasi; (2) penyebaran IPD; (3) wawancara dan pengambilan IPD; (4) validasi data diharapkan dapat menunjang kelancaran terhadap pelaksanaan penelitian.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Pengiapan Mendukung Pedoman Operasional Penelitian.

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Penelitian,

Drs. H. A. Rusdiana, MM  
NIP: 196208011990310001

Captain:

- bila kolom yg tersedia tidak cukup harus ditambahkan pada halaman berikutnya;
- bila hasil berupa tabel/gambar ditempelkan pada halaman belakang.

Bandung, 27. Maret. 2018.  
Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, M.Pd.  
NIP: 196208031991031001

Cetakan Resmi  
a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,  
Drs. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP: 1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI  
(Studi pada PTKIS Kepertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Uh.05/V.2/Pf.00.010/2018. Tgl 21 Maret 2018. Kep. 6 bulan sampai Tgl. 30 Agustus 2018

Lembar .... dari ....

1. Tanggal/Gulan/Tahun	Rabu, 28 Maret 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Penyiapan Rancangan pedoman operasional Penelitian (Pengembangan DeSTAIN Penelitian)
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Tersusunnya ; Rancangan /sistematika. Pedoman operasional penelitian, berisi: pendahuluan, Konsep, Metode, Kerangka, Jadwal Kisi-kisi, IPD.
4. Catatan kemajuan: (hasil yang diperoleh)	Dimitikinya ; Rancangan pedoman operasional Penelitian, berisi: pendahuluan, Konsep, Metode, Kerangka, Kisi-kisi, IPD berdasarkan Kaidah ilmiah dan SPK Untuk kepentingan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI; Studi pd PTKIS Kepertais Wit II Jawa Barat dan Banten.
5. kendala	- lancar
6. Kesimpulan dan saran	Dengan dimilikinya pedoman operasional penelitian berisi, Pendahuluan, Konsep Metode, Kerangka, Jadwal kisi-kisi, IPD, yang tepat, berdasarkan Kaidah ilmiah, di harapkan dapat menunjang kelancaran Terhadap pelaksanaan penelitian
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Penyusunan Pendahuluan, Konsep, Metode, Kerangka Jadwal penelitian.

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Kasdiana, MM  
NIP. 1961042119760201001


Catatan:

- Lembar yg sudah diisi cukup terse ditambahkan pada laporan berikutnya
- Bila hasil berupa revisi/gambar ditampikan, pada halaman belakang.

Bandung, 28 Maret 2018.  
Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP.196209201951031001

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung IMPLEMENTASI Kebijakan SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertals Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Ua.05/V.2/PP.00.903/2018, Tgl 21 Maret 2018, Kag. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar ... dari ...

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Kamis, 29 Maret 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Penyusunan Pendahuluan, Konsep, Metode, Kerangka, Jadwal Penelitian.
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Tersusunnya; Penyusunan Pendahuluan, konsep Metode, Kerangka, Jadwal Penelitian.
4. Catatan kemajuan: (hal yang diuraikan)	Dimilikinya; Pendahuluan, Konsep, Metode, Kerangka jadwal penelitian, berdasarkan Kaidah Ilmiah dan SPK. Untuk Kepentingan Penelitian " Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI; Studi pada PTKIS Kopertals Wilayah II Jawa Barat dan Banten,
5. Kendala	- Lancar.
6. Kesimpulan dan saran	Pengan, dimilikinya Pendahuluan, Konsep, Metode, Kerangka, Jadwal Penelitian, yang Tepat, berdasar Kaidah Ilmiah, diharapkan dapat Menunjang Kelancaran terhadap pelaksanaan Penelitian.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Penyusunan Kisi-kisi Penelitian (bagian dari PO Penelitian)

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Nasidiana, M.M  
NIP. 196209201991001001

Catatan:  
- Bila dalam 10 hari tidak dapat selesai, harus dibuktikan pada halaman berikutnya.  
- Bila hasil berupa tabel/gambar ditempatkan pada halaman tersendiri.

Bandung, 29 Maret 2018.  
Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP.196209201991001001

Catatan Monev:  
Kepala LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,

Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)  
SPK: No.B-1/13/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018, Tgl 21 Maret 2018, Kag. 6 bulan sampai Tgl. 30 Agustus 2018

Lembar ... dari ...

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Sabtu, 31 Maret 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Penyusunan Kisi-kisi, Penelitian ( bagian dari PO penelitian )
3. Tujuan Kegiatan/Sub kegiatan (sesuai program)	Tersusunnya Kisi-kisi, Penelitian. Penelitian berbasis Masalah penelitian dan Sub Masalah, Hubungan Konsep Indikator, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data (TPD)
4. Catatan kemajuan: (Hasil yang diperoleh)	Dimilikinya; kisi-kisi, Penelitian Untuk Ke-Pentingan penelitian " Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten .
5. Kendala	- lancar
6. Kesimpulan dan saran	Dengan Dimilikinya Kisi-kisi, Penelitian, diharapkan dapat menunjang kelancaran terhadap pelaksanaan penelitian " Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI " Studi PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten "
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Penyusunan Instrumen Penelitian; Ipp-1 penelitian Observasi

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Husdiana, MEd  
NIP. 1961042119860201001

Catatan:

- Sila dalam yg tertera tidak boleh PMSO diwujudkan pada halaman berikutnya;
- Sila hasil berupa tabel/gambar ditempatkan pada halaman belakang

Bandung, 31 Maret 2018.  
Anggota peneliti,

Drs. Maslihudin, M.Pd.  
NIP. 196206021961031001

Catatan Filemew:  
a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,

Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Un.05/V.2/PP.06.9/03/2018, Tgl 21 Maret 2018, Kag. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar ... dari ...

1.	Tanggal/Bulan/Tahun	Selasa, 3 April 2018.
2.	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Penyusunan Pedoman Observasi (IPP-1) Kelengkapan PO Penelitian.
3.	Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Tersusunnya; Pedoman Observasi (IPP-1) Kelengkapan PO Penelitian, Berisi; Ketentuan Observasi, dan Substansi / Materi observasi.
4.	Catatan kemajuan: (Hasil yang di peroleh)	Dimilikinya Pedoman observasi (IPP-1) untuk kepentingan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI" Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten.
5.	Kendala	- Linear.
6.	Kesimpulan dan saran	Dengan, dimilikinya pedoman observasi (IPP-1) diharapkan dapat menunjang kelancaran terhadap pelaksanaan penelitian; "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten."
7.	Rencana kegiatan selanjutnya	Penyusunan Instrumen Penelitian; IPP-II Pedoman wawancara.

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H.A. Rusdiana, MEd  
NIP: 2061042120850201001

Catatan:

- Bila sudah selesai tidak cukup hanya diuraikan pada halaman berikut ini;
- Bila hasil berupa tabel/gambar dimasukkan pada halaman belakang.

Bandung, 3 April, 2018.  
Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP: 196208201991031001

Catatan Monit:  
a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,

Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP: 1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung IMPLEMENTASI Kebijakan SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.3-11/2/Un.05/IV.2/PP.00.003/2018. Tgl 21 Maret 2018. Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar ... dari ...

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Rabu, 4 April 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Penyusunan pedoman wawancara (IPD-II) Melengkapan PO Penelitian.
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Tersusunnya; Pedoman wawancara (IPD-II) Melengkapan PO penelitian, Berisi Kelengkapan wawancara, dan Substansi /materi wawancara.
4. Catatan kemajuan: (hasil yang direseksi)	Dimilikinya; Pedoman wawancara (IPD-II) untuk kepentingan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertais wilayah II Jawa Barat Dan Banten.
5. Kendala	- Linear.
6. Kesimpulan dan saran	Dengan dimilikinya pedoman wawancara (IPD-II) diharapkan dapat menunjang kelancaran Terha- dap pelaksanaan penelitian; Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI; studi PTKIS Kopertais wilayah II Jawa Barat Dan Banten.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Penyusunan Instrumen Penelitian; IPD. III Studi Dokumentasi.

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Masduki, MM  
NIP: 1963042119803201001

Catatan:

- Bila terlew yg tersedia tidak cukup harus ditersup kan pada halaman berikutnya.
- Bila hasil berupa tabel/gambar ditorekkan, pada halaman belakang.

Bandung, 4 April 2018.  
Anggota peneliti,

Dr. Nasihudin, MPd.  
NIP: 196209201991031001

Catatan Money:

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP: 1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung IMPLEMENTASI KEBLIKIAN SKPI

(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Uk.05/V.2/PP.00.9/03/2018. Tgl 21 Maret 2018. Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar ... dari ...

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Kamis, 5 April 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Penyusunan Pedoman Studi Dokumentasi (IPD III) Kelengkapan PO Penelitian.
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Tersusunnya; Pedoman Studi Dokumentasi (IPD III) Kelengkapan PO penelitian, Berisi; Ketentuan Studi Dokumentasi, dan Substansi/ materi Studi Dokumentasi.
4. Catatan kemajuan/ (Hasil yang diorotasi)	Dimilikinya; Pedoman Studi Dokumentasi (IPD III) untuk Kepinginan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI" Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten.
5. Kendala	- Tidak ada.
6. Kesimpulan dan saran	Dengan dimilikinya pedoman Studi Dokumentasi (IPD III) di harapkan dapat Menunjang Melancarkan Terhadap Pelaksanaan penelitian: "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten"
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Kompilasi Pedoman Operasional Penelitian.

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP.1961040119690201001

Catatan:

- file dalam yg tersedia tidak cukup harus ditambahkan pada halaman berikutnya
- file hasil berupa tabel/gambar ditempatkan pada halaman belakang

Sandung, 5 April 2018.

Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP.196209201991031001

Catatan Manev:

a.n. Ketua LP2M,

Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyuudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP.1971082719980310007





LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung IMPLEMENTASI Kebijakan SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.3-113/Uh.05/V.2/PP.08.903/2018, Tgl 21 Maret 2018, Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar ... dari ...

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Selasa, 10, April, 2018 -
2. Nama Kegiatan/Sub kegiatan	Penyusunan Rapat: Review pedoman dan Instrumen Penelitian.
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	1. Tersusunnya; Penyusunan Rapat Review pedoman dan Instrumen Penelitian. - Undangan Rapat (Waktu, Tempat, Materi) - Bahan Keleengkapan dan materi Rapat. 2. Sampaiya undangan dan Bahan rapat kepada narasumber atau peserta rapat (untuk ekspedisi)
4. Catatan kemajuan: (hasil yang di peroleh)	Dimulainya; Mesiapan Rapat Review Pedoman dan Instrumen Penelitian, Untuk Keperntingan Penelitian "Mesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI; Studi pada PTKIS kopertais wilayah II Jawa Barat dan Banten".
5. Kendala	- Lancar.
6. Kesimpulan dan saran	Dengan dimulainya Mesiapan Rapat Review Pedoman dan Instrumen Penelitian, diharapkan dapat menunjang kelancaran Terhadap pelaksanaan Penelitian " Mesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI; Studi PTKIS Kopertais wilayah II Jawa Barat dan Banten, yang Valid, Kredibel dan Akuntabel.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	

Mengetahui/bersetujuan:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP: 19610211998031001

- Catatan:
- Bila kolom yg tersedia tidak cukup maka ditambahkan pada halaman berikutnya.
  - Bila hasil berupa tabel/gambar ditunjukkan, pada halaman belakang.

Bandung, 10 April, 2018.  
Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP: 196209201991031001

Catatan Monev:

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP: 197108271998031007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung IMPLEMENTASI Kebijakan SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)  
SPK: No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018. Tgl 21 Maret 2018. Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar .... dari ....

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Sabtu, 7 April 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Kompilasi Pedoman operasional Penelitian.
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Tersusunnya; Kompilasi pedoman operasional Penelitian. Berisi: Pedoman operasional penelitian berisi: pendahuluan, Konsep, Metode, Kerangka, Jadwal Kisi-kisi, IPD. I, II dan III.
4. Catatan kemajuan: (Hal yang diperbaiki)	Dimilikinya: Kompilasi pedoman operasional penelitian. Berisi: Pedoman operasional penelitian, berisi: Pendahuluan, Konsep, Metode, Kerangka, Jadwal, Kisi-kisi, IPD. I, II dan III untuk kepentingan Penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten.
5. Kendala	- lancar
6. Kesimpulan dan saran	Dengan dimilikinya Kompilasi Pedoman operasional penelitian. Di harapkan dapat Menunjang Melancarkan Terhadap pelaksanaan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI; Studi PTKIS Kopertais wilayah II - Jawa Barat dan Banten.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Penyiapan Rapor: Review Pedoman dan Instrumen Penelitian

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MIM  
NIP. 1962042135900310093

Catatan:

- Bila kolom yg metode tidak cukup tulis ditambahkan pada kalimat berikutnya.
- Bila hasil berupa tabel/gambar dicomplexkan pada kalimat berikut.

Sabtu, 7 April 2018.  
Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP. 196209201991031001

Catatan Monev:  
a.n. Ketua LP2M,

Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Ua.05/V.2/P9.00.1/03/2018, Tgl 21 Maret 2018, Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar .... dari ....

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Kamis, 12 April 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Pelaksanaan Rapat : Rewew Pedoman dan Instrumen Penelitian.
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Untuk Memastikan pedoman penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten" telah sesuai dengan ketentuan Uraian dan Tujuan Kontrak Penelitian.
4. Catatan kemajuan: (Hal) yang diperoleh	Dimilikinya Rekomendasi / Kesepahaman Pakar dan Teman Sepejabat, yang memastikan pedoman penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten" dianggap telah valid, kredibel dan dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah maupun administratif (bukti. Diruta Adana rapat, Terlampir)
5. Kendala	- linear.
6. Kesimpulan dan saran	Dengan dimilikinya Pedoman dan Instrumen penelitian, Valid, Kredibel, diharapkan dapat menunjang kelancaran terhadap pelaksanaan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi PTKIS Kopertis wilayah II Jawa Barat dan Banten" yang valid, kredibel dan akuntabel.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Persiapan; Aneana observasi lokal Penelitian.

Mengesahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP. 1960042119890201001

Catatan:

- Sila kolom yg tersedia tidak cukup harus ditambahkan pada halaman berikutnya;
- Bila hasil berupa tabel/gambar ditunjukkan, pada halaman belakang.

Bandung, 12 April, 2018.  
Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP.196209201991031001

Catatan Manev:  
a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,

Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Us.05/V.2/PP.00.0/03/2018, Tgl 21 Maret 2018, Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar .... dari ....

1. Tanggal/Wulan/Tahun	Selasa, 17 April 2018
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Persiapan: Rencana Observasi lokasi penelitian.
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Tersusunnya; Kesiapan Rencana observasi lokasi Penelitian, meliputi: - Surat tugas dan sppo penelitian. - Declaman dan instrumen observasi. - Biaya observasi
4. Catatan kemajuan: (hasil yang diperoleh)	Dimiliki: Kesiapan Rencana observasi lokasi Penelitian Untuk kepentingan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Skpi: Studi pada PTKIS Kopertais wilayah II Jawa Barat dan Banten.
5. Kendala	- linear
6. Kesimpulan dan saran	Dengan dimilikinya Kesiapan Rencana observasi lokasi penelitian, diharapkan dapat menunjang kelancaran Terhadap pelaksanaan penelitian; "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Skpi: Studi PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten" yang valid, Kredibel dan Akuntabel.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Pelaksanaan: Observasi Lokasi penelitian di 24 PTKIS, Kopertais Wilayah II Jabar Banten

Mengetahui dan menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP. 1981042119960001001

Catatan:

- Bila kolom yg tersedia tidak cukup harap diambatkan pada halaman berikutnya.
- Bila hasil bekerja telah selesai dimampatkan, jadi halaman belakang.

Bandung, 17 April 2018.

Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP. 196205011991031001

Catatan Minem:  
a.n. Ketua LP2M.

Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.903/2018, Tgl 21 Maret 2018, Krg. 6 bulan sampai Tgl. 29 Agustus 2018

Lembar ... dari ...

1. Tanggal/Waktu/Tahun	Sabtu 21 April 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Observasi di empat PTKIS lokasi penelitian. - UNMA padedjlang dan IAIN Serang /Nasihudin SPPD. 19/4/18 - STAI Fatahillah Tangerang dan STAI Al-Karimiyah Depok / A. Kusdiana, ST dan SPPD 19/4/2018.
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Diperolehnya : Data hasil observasi dari 4 PTKIS LINMA, IAIN, STAI Fatahillah dan STAI Al-Kharimiyah. Meliputi : - Latar Alamiyah lokasi 4 PTKIS. - Kondisi Kelembagaan 4 PTKIS - Sistem /pola pengembangan PT. 4 PTKIS. - Program pengembangan Akademik 4 PTKIS.
4. Catatan kemasukan: (Hasil yang diperoleh)	Dimilikinya : Data hasil observasi dari 4 PTKIS : LINMA, IAIN, STAI Fatahillah dan STAI Al-Kharimiyah untuk kepentingan penyusunan laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten.
5. Kendala	- lancar.
6. Kesimpulan dan saran	Dengan dimilikinya data hasil observasi lokasi penelitian dari : UNMA, IAIN, STAI Fatahillah dan STAI Al-Karimiyah, diharapkan dapat menunjang kelancaran penyusunan laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dlm Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi PTKIS Kopertais Wil II Jabar Dan Banten" yg Valid Kredibel dan Akuntabel.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Pelaksanaan : observasi lokasi penelitian STAI Latansa IAIN Laoreiba, UINU Jopanda, STAI Kharisma

Mengetahui dan menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MPA  
NIP. 1961042119860801001

Catatan:

- Bila halam yg tertera tidak cukup foto dimudahkan pada halaman berikutnya.
- Bila hasil berupa tabel/lampiran ditunjukkan pada halaman belakang.

Bandung, 21 April 2018.

Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP.196209201991031001

Catatan Monev:  
a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,

Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP.1971082719980310007





LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI

(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/UJr.05/V.2/PP.00.W03/2018, Tgl 21 Maret 2018, Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar .... dari ....

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Selasa, 24 April 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	observasi di tempat PTKIS lokasi penelitian. - STAI LATANSA dan IAIN LAARIBA / Nasihudin, ST, dan PPP.19/v/18 - UINWA Beger dan Kharisma Sukabumi/A.Rusdiana, PT
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Diperolehnya : Data hasil observasi dari 4 PTKIS : STAI LATANSA, IAIN LAARIBA, UINW Juanda, dan STAI Kharisma. Meliputi : - Latar belakang lokasi 4 PTKIS. - Kondisi kelembagaan 4 PTKIS. - Sistem pola pengembangan PT. 4 PTKIS. - Program pengembangan Akademik 4 PTKIS.
4. Catatan kemajuan (hasil yang diperoleh)	Diperolehnya : Data hasil observasi dari 4 PTKIS : STAI LATANSA, IAIN LAARIBA, UINW Juanda, dan STAI Kharisma untuk kepentingan penyusunan laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi Pada PTKIS Kopertais wilayah II Jawa Barat dan Banten".
5. Kendala	- lancar.
6. Kesimpulan dan saran	Dengan dimilikinya data hasil observasi lokasi penelitian dari : STAI Latansa, IAIN LAARIBA, UINW Juanda dan STAI Kharisma, di harapkan dapat menunjang kelancaran penyusunan laporan penelitian : "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI : Studi PTKIS Kopertais wilayah II Jawa Barat dan Banten" yg Valid Kredibel dan Akuntabel.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Pelaksanaan observasi lokasi penelitian STAI Sukabumi Nurul Hikmah Clamuk, STAI Agus Salim Bekasi, STAI AS- Bicklaji Yah Karangwang

Mengetahui/ Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP. 1961042119860291001

Catatan:

- Bila kolom yg tersedia tidak cukup harus ditambahkan pada halaman berikutnya;
- Bila hasil berupa tabel/gambar ditempelkan pada halaman berikutnya.

Bandung, 24 April 2018 -  
Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP. 196209201991031001

Catatan Mengetahui:  
a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007



**KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung IMPLEMENTASI Kebijakan SKPI**  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.903/2018, Tgl 21 Maret 2018, Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar .... dari ....

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Kamis 26 April 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Observasi di Empat PTKIS (loasi) penelitian: STAI Sukabumi, Aluruc Hikmah Cianjur, Wahidudin ST dan STAI Agus Sa'im Bekasi, As-Siddiqiyah A. Rusdiana dan 19/4/18.
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Diperolehnya: Data hasil observasi dari 4 PTKIS. STAI Sukabumi, Aluruc Hikmah Cianjur, STAI Agus Sa'im Bekasi dan STAI As-Siddiqiyah Karawang. Melalui: - Latar akademik lokasi 4 PTKIS. - Kondisi kelembagaan 4 PTKIS. - Sistem/pola pengembangan PT 4 PTKIS. - Program Pengembangan Akademik 4 PTKIS.
4. Catatan kemajuan (hasil yang diperoleh)	Diusulkannya: Data hasil observasi dari 4 PTKIS: STAI Sukabumi, Aluruc Hikmah Cianjur, STAI Agus Sa'im Bekasi dan STAI As-Siddiqiyah Karawang, untuk kepentingan penyusunan Laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten".
5. Kendala	- Lanjut.
6. Keunggulan dan saran	Dengan dimilikinya data hasil observasi lokasi penelitian dari STAI Sukabumi, Aluruc Hikmah Cianjur, STAI Agus Sa'im Bekasi, dan STAI As-Siddiqiyah Karawang diharapkan dapat menunjang kelancaran penyusunan Laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten" yang valid, kredibel dan akurat.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Pelaksanaan: observasi lokasi penelitian STAI, E.2. murtadin Purwokerto, Riyadlul Jannah, STAI Darma STAI

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP. 1962042110860001001

Catatan:

- Bila kolom yg tersedia tidak cukup harap diuliskan pada halaman berikutnya.
- Bila hasil teraca tabel/gambar ditempelkan pada halaman belakang.

Bandung, 26 April 2018.  
Anggota peneliti,

Dr. Nasihudin, MPd.  
NIP. 196208201991031001

Catatan Monev:

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung IMPLEMENTASI Kebijakan SKPI (Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.W03/2018, Tgl 21 Maret 2018, Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar ... dari ...

1. Tanggal/bulan/tahun	Sabtu, 28 April 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Observasi di Empat PTKIS Lokasi Penelitian STAI Ea. Muttra'in, Pak. Riyadhul Jannah, Nasihudin/St. SPPD 19/4/18 - STAIS Dharma, dan STAI Cirebon. Rusdiana /st. SPPD, 19/04/18.
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Diperolehnya : Data hasil observasi dari 4 PTKIS STAI, Ea. MUTTRA'in, Riyadhul Jannah, STAIS Dharma dan STAI Cirebon. meliputi : - Latar alamiah lokasi 4 PTKIS. - Kondisi Kelembagaan 4 PTKIS. - Sistem/Pola Pengembangan PT. 4 PTKIS - Program Pengembangan Akademik 4 PTKIS
4. Catatan kemajuan: (poin yang diperoleh)	Dimilikinya : Data hasil observasi dari 4 PTKIS: STAI Ea. Muttra'in, Riyadhul Jannah, STAIS Dharma dan STAI Cirebon, untuk keperluan penyusunan Laporan Penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi Pola PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten".
5. Kendala	- lancar.
6. Kesimpulan dan saran	Dengan dimilikinya data hasil observasi Lokasi Penelitian dari : STAI Ea. Muttra'in, Riyadhul Jannah, STAIS Dharma, dan STAI Cirebon, di karapkan dapat Menunjang kelancaran Penyusunan Laporan Penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten" yg Valid Kredibel dan Akuntabel.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Pelaksanaan : Observasi Lokasi Penelitian LIAJISA, STAI PUTRA Galuh, STAI. M.H. Al-Azhar, dan STAI NU.

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP. 1961102119950201001

Catatan:

- Bila dalam yg terdapat tidak cukup temp ditambahkan pada halaman berikutnya;
- Bila hasil berupa tabel/gambar disempatkan pada halaman belakang.

Bandung, 28 April 2018,  
Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP. 196203201991031001

Catatan Monev:

an. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,

Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007





LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)  
SPK: No.B-113/Uh.05/V.2/PP.00.9/03/2018, Tgl 21 Maret 2018, Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar .... dari ....

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Rabu 2 Mei 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Observasi di Empat PTKIS lokasi penelitian. - UINSA Kuningan dan STAI PUTRA GALUH Nasihudin /ST/SPP. 13/4 - STAI MH AL-Ashar Banjar dan STAINU Tasikmalaya - Rusdiana /ST dan SPP 13/4/2018.
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Diperolehnya: Data hasil observasi dari 4 PTKIS; UINSA, STAI PUTRA GALUH, STAI MITAHUL HUDA BANJAR, STAINU TASIKMALAYA. Melalui: - Latar alamiah lokasi 4 PTKIS. - Kondisi Kelembagaan 4 PTKIS. - Sistem/pola pengembangan ST 4 PTKIS. - Program pengembangan Akademik 4 PTKIS.
4. Catatan kemajuan (Hal yang diperoleh)	Dimilikinya: Data hasil observasi dari 4 PTKIS; UINSA STAI PUTRA GALUH, STAI MH AL-Ashar dan STAINU. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Penelitian. "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten".
5. Kendala	- lancar.
6. Kesimpulan dan saran	Dengan dimilikinya data hasil observasi lokasi penelitian dari: UINSA, STAI PUTRA GALUH, STAI MH AL- Ashar dan STAINU, diharapkan dapat menunjang kelancaran penyusunan Laporan Penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten yg valid, kredibel dan akademik".
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Pelaksanaan observasi lokasi penelitian LAIN. TASIKMALAYA STAI, SILUWANGI GARUT.

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP. 1961042119880201001

- Catatan:
- Bila lembar yg tertera tidak cukup harus ditambahkan pada halaman berikutnya;
  - Bila terdapat tabel/gambar ditambahkan pada halaman belakang.

Bandung, 2 Mei 2018.  
Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP. 196206201991031001

Catatan Manewi:  
a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,  
Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBLIAKAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Ua.05/V.2/PP.00.003/2018, Tgl 21 Maret 2018, Kpg. 6 bulas sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lambar ... dari ...

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Sabtu, 5 Mei 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Observasi di empat PTKIS lokasi penelitian, -IAIE Tosikmalaga dan STAI Sitiwangi Garut Nasihudin IST/SPPD 19/4/2018.
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (jurnal program)	Diperolehnya: Data hasil observasi dari 2 PTKIS Penelitian IAIE Tosik, STAI Sitiwangi Garut meliputi: - Latar alamiah lokasi 2 PTKIS. - Kondisi ketembagaan 2 PTKIS. - Sistem/pola pengembangan PT 2 PTKIS. - Program pengembangan Akademik 2 PTKIS.
4. Catatan kemajuan: (hasil yang di peroleh)	Dimilikinya: Data hasil observasi dari 2 PTKIS Penelitian IAIE Tosik, STAI Sitiwangi Garut untuk kepentingan penyusunan laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dan Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten".
5. Kendala	- lancar
6. Kesimpulan dan saran	Dengan dimilikinya data hasil observasi lokasi penelitian dari: penelitian IAIE Tosik, STAI Sitiwangi Garut, diharapkan dapat menunjang kelancaran penyusunan laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam mendukung implementasi Kebijakan SKPI: Studi PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten" yang valid, kredibel
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Pelaksanaan observasi lokasi penelitian STAI Al-Fatih Ci Balengka Bandung.

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP: 19610401198002001001

Catatan:

- Bila kolom yg tersedia tidak cukup bisa ditambahkan pada halaman berikutnya.
- Bila hasil berupa tabel/gambar ditempelkan pada halaman belakang.

Bandung, 5 Mei 2018.

Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP: 196200201991001001

Catatan Monev:  
a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP: 1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI

(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: Na.B-113/Lh.05/V.2/PP.00.903/2018. Tgl 21 Maret 2018. Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar ... dari ...

1.	Tanggal/Bulan/Tahun	Selasa, 8 Mei 2018.
2.	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Observasi di satu PTKIS lokasi penelitian. - STAI AL-Falah Cicalengka kab Bandung A. Rusdiana /ST/ SPPP 19/4/2018
3.	Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Diperoleh: Data hasil observasi dari STAI AL-Falah Cicalengka kabupaten Bandung Meliputi: - Latar alamiah lokasi PTKIS. - Kondisi kelembagaan PTKIS. - Sistem pola pengembangan PT. PTKIS. - Program pengembangan Akademik PTKIS.
4.	Catatan kemajuan (hasil yang diperoleh)	Dimilikinya: Data hasil observasi dari STAI AL-Falah Cicalengka kab. Bandung. Untuk kepentingan penyusunan laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI; Studi Pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat Dan Banten.
5.	Kendala	- lancar.
6.	Kesimpulan dan saran	Dengan dimilikinya data hasil observasi lokasi penelitian dari: STAI AL-Falah Cicalengka kab Bandung, di harapkan dapat menunjang kelancaran penyusunan laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi PTKIS Wilayah II Jawa Barat Dan Banten" yg valid, kredibel dan akurat.
7.	Rencana kegiatan selanjutnya	Pelaksanaan: observasi lokasi penelitian, STAI Siliwangi Cimahi.

Mengotahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Riset


Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP: 1961022119860201001

Catatan:  
- Bila kolom yg tersedia tidak cukup harap diembeskan pada halaman berikutnya.  
- Bila hasil berupa tabel/gambar ditampikan, pada halaman belakang.

Bandung, 8 Mei 2018.  
Anggota Riset

Drs. Nasibuddin, MPd.  
NIP: 196209201991031001

Catatan Monev:  
an. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan.



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP: 1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung IMPLEMENTASI Kebijakan SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPE: No.B-113/Ux.05/V.2/PP.09.9/03/2018, Tgl 21 Maret 2018, Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lambar .... dari ....

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Rabu 9 Mei 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Observasi ke satu PTKIS lokasi penelitian. - STAI Siliwangi Cimahi. Rusdiana/ST/SPPD/19-4-B.
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Diperoleh: Data hasil observasi dari STAI Siliwangi Cimahi meliputi: - Latar alamiah lokasi PTKIS. - Kondisi Kelembagaan PTKIS. - Sistem pola pengembangan PTKIS. - Program Pengembangan Akademik PTKIS.
4. Catatan Remaja/asi (hasil yang diperoleh)	Dimilikinya: Data hasil observasi dari STAI Siliwangi Cimahi. Untuk kepentingan penyusunan laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dlm mendukung implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten.
5. Kendala	- lancar.
6. Keimanan dan saran	Dengan dimilikinya data hasil observasi lokasi penelitian dari: STAI Siliwangi Cimahi; diharapkan dapat menunjang kelancaran penyusunan laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam mendukung implementasi Kebijakan SKPI: Studi PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten" yg valid, kredibel dan akuntabel.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Formulasi hasil observasi dari 24 PTKIS lokasi penelitian. dan penyiapan penyebaran IPP penelitian.

Mengetahui/ Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP. 196209211991031001

Catatan:

- Bila kalam yg tersedia tidak cukup harap ditambahkan pada halaman berikutnya;
- Bila hasil berupa tabel/gambar ditunjukkan pada halaman belakang.

Bandung, 9 Mei 2018.  
Anggota Tim Peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP. 196209201991031001

Catatan Monev:

a.n. Ketua LP2M.

Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung IMPLEMENTASI Kebijakan SKPI

(Studi pada PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Un.05/V.2PP.00.9/03/2018, Tgl 21 Maret 2018, Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar ... dari ...

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Sabtu, 12 Mei 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	- Formulasi hasil observasi dari 24 PTKIS lokasi penelitian - Penyiapan penyebaran IPP Studi Dok penelitian.
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	1. Tersusun dan Terpilihnya: Data hasil observasi dari 24 PTKIS lokasi Penelitian meliputi: - Latar belakang lokasi PTKIS. - Kondisi kelembagaan PTKIS. - Sistem/pola pengembangan PTKIS. - Program Pengembangan Akademik PTKIS. 2. Guna/kegunaan Administrasi dan banyu penyebaran IPP penelitian untuk 24 PTKIS lokasi penelitian.
4. Catatan kemajuan: (hasil yang diperoleh)	Dimilikinya: Data hasil observasi dari 24 PTKIS yang sudah tersusun dan terpilih, untuk kepentingan penyusunan laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten."
5. Kendala	- Lancar.
6. Kesimpulan dan saran	Dengan dimilikinya Data hasil observasi dari 24 PTKIS yang sudah tersusun dan terpilih, diharapkan dapat menunjang kelancaran penyusunan laporan penelitian: "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung implementasi Kebijakan SKPI: Studi PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten" yang valid, kredibel dan akuntabel
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Pelaksanaan Penyebaran IPP II Studi Dokumen/data Kesiapan implementasi SKPI.

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Nasution, MM  
NIP: 196104211960201001

Catatan:

- Hal lain yg tersedia tidak cukup harus ditambahkan pada halaman berikutnya.
- Hal hasil berupa tabel/penjar diampikan, pada halaman berikut.

Bandung, 12 Mei 2018.  
Anggota peneliti,

Dr. Nasihudin, MPd.  
NIP: 196209201991031001

Catatan Moniev:

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP: 1971082719980310007





LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Un.05/V.2/PP.00/903/2018, Tgl 21 Maret 2018, Keg. 6 Jalan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar ... dari ...

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Selasa, 15 Mei 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Penyebaran IPD II Dokumen/Data Kesiapan Implementasi SKPI, Ujwa Pandeglang dan MIB Serang/Masinjudin, ST 3APP, F/15/18, STAI Fatahillah, Tangerang dan Al-Karimiyyah Depok, Roudiana 7/15/18
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Tersedianya IPD III. Dokumen/Data Kesiapan Implementasi SKPI ke 4 PTKIS: UNMA, IAIB, STAI Fatahillah dan STAI Al-Karimiyyah, meliputi dokumen/data: - Penjelasan atau Interpretasi Kebijakan penerapan SKPI - Pengorganisasian Penerapan Kebijakan SKPI. - Strategi Penerapan Kesiapan SKPI. - Mendata dan Solusi dan Implementasi Kebijakan SKPI
4. Catatan kemajuan: (hasil yang diperoleh)	Sampainya IPD III Dokumen/Data Kesiapan Implementasi SKPI ke 4 PTKIS: UNMA, IAIB, STAI, Fatahillah dan STAI Al-Karimiyyah. Untuk kepentingan penyusunan dokumen/data penelitian: "Kesiapan PTKIS dalam mendukung implementasi Kebijakan SKPI: Studi Pada PTKIS Kopertais wilayah II Jawa Barat dan Banten".
5. Kendala	Lembar.
6. Kesimpulan dan saran	Dengan tersebar dan sampainya IPD III Dokumen/Data Kesiapan Implementasi SKPI ke: UNMA, IAIB, STAI Fatahillah dan STAI Al-Karimiyyah, diharapkan dapat menunjang kelancaran pengisian data/dokumen penelitian "Kesiapan PTKIS dalam mendukung implementasi Kebijakan SKPI: Studi PTKIS, Kopertais wilayah II Jawa Barat dan Banten" yg valid, kredibel dan akuntabel.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Pelaksanaan: Penyebaran IPD II ke STAI-Latansa, IAIB, LAA Reim, Ujwa Juanda, dan STAI Kharisma.

Mengucapkan/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP: 1962041119800201001

- Catatan:
- Bila foto yg tersedia tidak cukup harap ditambahkan pada halaman berikutnya.
  - Bila hasil berupa tabel/gambar ditampikan, pada halaman belakang.

Bandung, 15 Mei 2018.  
Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP: 196205201991031001

Catatan Manev:

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyu Dharma Kusana, M.Ag  
NIP: 1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI

(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Up.95/V.2/PP.08.903/2018, Tgl 21 Maret 2018, Keg. 4 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar ... dari ...

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Sabtu, 19 Mei 2018.
2. Nama/kegiatan/Sub Kegiatan	Penyebaran IPP III Dokumen /Data Kesiapan Implementasi SKPI. STAI Latansa dan IAIN LAARIBA /Assihudin ST dan SPPD 7/5/18 - UNIBA Bogor dan STAI Kharisma Sub/A Kusadama, ST. SPPD 7/5/18.
3. Tujuan kegiatan/Sub Kegiatan (tujuan program)	Tersebarnya IPP III Dokumen /Data Kesiapan Implementasi SKPI ke y ptkis : STAI latansa, IAIN LAARIBA, UNIV Juanda, dan STAI Kharisma, meliputi dokumen /data : - Penafsiran atau interpretasi kebijakan penerapan SKPI. - Pengorganisasian penerapan Kebijakan SKPI. - Strategi penerapan Kebijakan SKPI. - Kendala dan solusi atas implementasi Kebijakan SKPI.
4. Catatan keberhasilan (hasil yang dicapai)	Sampainya IPP III Dokumen /Data Kesiapan Implementasi SKPI ke : STAI Latansa, IAIN LAARIBA, UNIV Juanda dan STAI Kharisma untuk kepentingan pengusunan Dokumen /Data penerapan "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI" Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten.
5. kendala	- Lancar -
6. Kesimpulan dan saran	Dengan tersebar dan sampainya IPP III Dokumen /Data Kesiapan Implementasi SKPI ke : STAI LATANSA, IAIN LAARIBA, UNIV Juanda, dan STAI Kharisma, diharapkan dapat menunjang kelancaran penerapan data /dokumen penerapan "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS wilayah II Jawa Barat dan Banten" yang valid, kredibel dan akurat.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Pelaksanaan : Penyebaran IPP III ke STAI Sukabumi, Nur HIKMAH STAMUR, STAI AGUS SALIM Bekasi dan STAI AS-SUBHAN, Karawang

Mengetahui /Menyetujui:

Ketua Tim Panel

Dr. H. A. Rujilana, MM  
NIP. 1961042319860201001

Catatan:

- Sila kean ng tanda fisik atau foto bila dibagikan pada wilayah terdahulu.
- Bila hasil berupa tabung/lembar diserahkan pada wilayah terdahulu.

Bandung, 19 Mei 2018,  
Anggus, 2018,

Drs. Nasibudin, M.Pd.  
NIP. 196202031951031003

Catatan Maner:

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Un.03/V.2/PP.05.9/03/2018, Tgl 21 Maret 2018, Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar ... dari ...

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Selasa 22 Mei 2018 .
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Penyebaran IPD III Dokumen /Data Kesiapan Implementasi SKPI ke STAI Sukabumi, Nurul Hikmah Cianjur dan STAI Agus Salim dan STAI As-Siddiqiyah Rusdiana SPID 7/5/18.
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Tersebaranya IPD III Dokumen /Data Kesiapan Implementasi SKPI ke 4 PTIS : STAI Sukabumi, Nurul Hikmah Cianjur, STAI Agus Salim dan STAI As-Siddiqiyah meliputi Dokumen/ data - Penafsiran atau interpretasi Kebijakan penerapan SKPI - Pengorganisasian penerapan Kebijakan SKPI - Strategi Penerapan Kebijakan SKPI - Kendala dan Solusi dari Implementasi Kebijakan SKPI .
4. Catatan kemajuan (hasil yang diperoleh)	Sampainya IPD III Dokumen /Data Kesiapan Implementasi SKPI ke : STAI Sukabumi, Nurul Hikmah Cianjur, STAI Agus Salim Bekasi dan STAI As-Siddiqiyah Karawang untuk kepentingan penyusunan Dokumen /Data Penelitian & Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI : Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten .
5. Kendala	- Lanjut .
6. Kesimpulan dan saran	Dengan Tersebar dan Sampaainya IPD III Dokumen /Data Kesiapan Implementasi SKPI ke : STAI Sukabumi, Nurul Hikmah Cianjur, STAI Agus Salim Bekasi dan STAI As-Siddiqiyah diharapkan dapat menunjang kelancaran pengisian data /dokumen penelitian ; "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI : Studi PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten " yang valid, Kredibel dan akuntabel .
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Pelaksanaan : Penyebaran IPD III ke STAI EL MUTTAHIN Rusdiah Jannah ; STAI Dharma, dan STAI Cirebon

Mengetahui/Menyetujui:

Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP. 1961042119680203001

Catatan:

- Bila telah yg tertera tidak cukup harap ditambahkan pada halaman berikutnya
- Bila hasil berupa tabel/gambar diterselak, pada halaman belakang.

Bandung,

Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP. 1962090201991051001

Catatan Monev:

a.n. Ketua LP2M,

Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007





LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

BPK: No.B-113/Un.03/V.2/PP.00.3/03/2018, Tgl. 21 Maret 2018, Kag. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

lembar .... dari ....

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Sabtu, 26 Mei 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Penyebaran IPP III Dokumen /data Kesiapan Implementasi SKPI, STAI EA MUTTAQIN pwt, Riyadhu Jannah, Nashihudin sppd. 7/5/18, STAI Dharmo dan STAI Cirebon Rusdiana ST/SPPD. 7/5/18.
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Tersebarannya IPP III Dokumen /data Kesiapan Implementasi SKPI ke 4 PTKIS : STAI EA MUTTAQIN, Riyadhu Jannah, STAI Dharmo, dan STAI Cirebon, Meupuk Dek /data : - Denah/ramah atau interpretasi kebijakan penerapan SKPI - Pengorganisasian penerapan kebijakan SKPI. - Strategi Penerapan Kebijakan SKPI. - Kendala dan solusi dalam implementasi Kebijakan SKPI.
4. Catatan kemajuan (hasil yang diperoleh)	Bampainya IPP III Dokumen /data Kesiapan Implementasi SKPI ke : STAI EA MUTTAQIN, Riyadhu Jannah; STAI Dharmo, dan STAI Cirebon. Untuk kepentingan pengumpulan Dek /data penelitian " Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI; Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten.
5. Kendala	- Lancar.
6. Kesimpulan dan cara	Dengan tersebar dan bampainya IPP III Dokumen /data Kesiapan Implementasi SKPI ke STAI EA MUTTAQIN, Riyadhu Jannah; STAI Dharmo, dan STAI Cirebon diharapkan dapat menunjang kelancaran penyusunan dokumen /data penelitian " Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI : Studi PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten " yang valid kredibel dan akuntabel.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Penyebaran : Penyebaran IPP III ke-UMISA, STAI PUTRA GAWA, STAI MH AL ADAR dan STAINU.

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Sasdjana, MM  
NIP. 1961042119880201001

Catatan:

- Sila kolon yg terdapat tidak cukup harus ditunjukkan pada halaman berikutnya.
- Sila hasil borang tabel/gambar disempilkan pada halaman belakang.

Bandung, 26 Mei 2018  
Anggota peneliti,

Des. Nashihudin, MPd.  
NIP. 1962092019804021001

Catatan Monev:

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung IMPLEMENTASI KEBLIJAKAN SKPI (Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018. Tgl 21 Maret 2018. Keg. 6 bulan sampai Tg. 20 Agustus 2018

Lembar ... dari ...

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Rabu 30 Mei 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Penyebaran IPD II Dokumen /data Kesiapan Implementasi SKPI. UNISA Kuningan dan Sri putra Galuh dan Nasihudin SPPD. STI MA AL-Azhar Banjarbaru STANU Tasik Rusdiana /ST SPPD.
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Terselenggaranya IPD II Dokumen /data Kesiapan Implementasi SKPI Ke-4 PTKIS : UNISA, STAI putra Galuh, STAI Miftahul Huda Banjar dan STANU TASIK, Melalui Dek./data : - Penafsiran atau Interpretasi Kebijakan Penerapan SKPI. - Pengorganisasian Penerapan Kebijakan SKPI. - Strategi Penerapan Kebijakan SKPI. - Kendala dan Solusi dalam Implementasi Kebijakan SKPI.
4. Catatan kemajuan: (hasil yang diperoleh)	Sampainya IPD II Dokumen /data Kesiapan Implementasi SKPI Ke : UNISA, STAI putra Galuh, STAI MA AL-Azhar dan STANU untuk kepentingan penyusunan pingjian dokumen /data Penelitian " Kesiapan PTKIS dalam Mendukung implementasi Kebijakan SKPI; Studi pada PTKIS Kopertais wilayah II Jawa Barat dan Banten
5. Kendala	- Lanar.
6. Kesimpulan dan saran	Dengan tersebar dan sampainya IPD II Dokumen /data Kesiapan Implementasi SKPI Ke: UNISA, STAI putra Galuh, STAI MA AL-Azhar dan STANU ; di harapkan dapat meninjau kelancaran penyusunan dokumen /data Penelitian " Kesiapan PTKIS dalam Mendukung implementasi Kebijakan SKPI: Studi PTKIS Kopertais wilayah II Jawa Barat dan Banten " yang valid, kredibel, dan akuntabel.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Pelaksanaan : Penyebaran IPD II Ke-1 MA TASIK, STAI BIRUANGI GARUT dan STAI AL-Falah BIRUANGKA.

Mengetahui /Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP: 1961041119860201001

Catatan:

- bila kelan yg terdapat tidak cukup harap ditambahkan pada halaman berikutnya;
- bila hasil berupa tabel/gambar ditampikan, pada halaman belakang.

Bandung, 30 Mei 2018  
Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP: 196209201980051001

Catatan Monev:

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP: 1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBLIKLAN SKPI

(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Uh.05/V.2/PP.00.9/03/2018, Tgl 21 Maret 2018, Keg. 6 bulan sampai Tgl 20 Agustus 2018

Lembar ... dari ...

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Sabtu, 2 Juni 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Penyusunan IPP III Dokumen/Data Kesiapan Implementasi SKPI Wite Tasikmalaya dan STAI Siuwangi Garut Wasiludin /SPP/ 9/3 - STAI Al-Falah Cicalengka kab. Bandung Rusdiana /S/SPP/ 7/5/11
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Tersebar nya IPP III Dokumen/Data Kesiapan Implementasi SKPI ke 2 PTKIS; Penelitian IATB Tasik, STAI Siuwangi Garut dan STAI Al-Falah Cicalengka Melalui Dok/clata: - Penafsiran atau Interpretasi Kebijakan penerapan SKPI - Pengorganisasian penerapan Kebijakan SKPI - Strategi Penerapan Kebijakan SKPI - kendala, dan solusi dalam implementasi Kebijakan SKPI
4. Catatan kemajuan: (Hal yang dicatat)	Sampainya IPP III Dokumen/Data Kesiapan Implementasi SKPI ke: Wite Tasik, STAI Siuwangi Garut, dan STAI Al-Falah Cicalengka untuk kepentingan penyusunan Dokumen/data Kesiapan PTKIS dalam Mendukung implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten.
5. Kendala	- Lantar.
6. Kesimpulan dan saran	Berikut Tersebar dan Sampainya IPP III Dokumen/Data Kesiapan Implementasi SKPI ke: Penelitian IATB Tasik, STAI Siuwangi Garut dan STAI Al-Falah Cicalengka, diharapkan dapat menunjang kelancaran penyusunan dokumen/data Kesiapan PTKIS dalam Mendukung implementasi Kebijakan SKPI: Studi PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten" yang valid, kredibel dan akuntabel.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Dilaksanakan, Penyebaran ke STAI Siuwangi Cimahi.

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Penelitian,

Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP. 196304211984001001

Catatan:

- Sila kolom yg tersedia jika data hasil ditambahkan pada halaman berikutnya
- Sila diisi berupa tabel/gambar jika diperlukan, pada halaman belakang.

Bandung, 2 Juni 2018  
Anggota peneliti,

Drs. Nasirudin, MPd,  
NIP. 196206201991031001

Catatan Manev:

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyu Dermalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Lt.05/V.2/PP.00.9/03/2018, Tgl 21 Maret 2018, Kag. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar ... dari ...

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Selasa 5 Juni 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Pengyanaan IPD II Dokumen/Data Kesiapan Implementasi SKPI - STAI Siliwangi Cimahi, Rusdiana /St/SPPD 7/6/2018.
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (teknis program)	<p>Tersebarannya IPD II Dokumen/Data Kesiapan Implementasi SKPI ke STAI Siliwangi Cimahi, meliputi data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjelasan atau Interpretasi Kebijakan Penerapan SKPI.</li> <li>- Pengorganisasian penerapan Kebijakan SKPI.</li> <li>- Strategi Penerapan Kebijakan SKPI.</li> <li>- Kendala dan Solusi dalam Implementasi Kebijakan SKPI.</li> </ul>
4. Catatan kemajuan (Hal yang diperoleh)	<p>Dimilikinya : Data hasil observasi dari STAI Siliwangi Cimahi : untuk kepentingan penyusunan data/dokumen.</p> <p>Penerikan : * Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI : Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten.</p>
5. Kendala	- Lancar.
6. Kesimpulan dan saran	- Dengan Tersebar dan Sampaiannya IPD II Dokumen/datas Kesiapan Implementasi SKPI ke STAI Siliwangi Cimahi : diharapkan dapat menunjang kelancaran penyusunan data/dokumen penelitian ; * Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI : Studi PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten " yang valid kredibel dan akuntabel.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Pengyanaan laporan progres penelitian 60 %.

Mengesahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP: 19504211980031001

Catatan:

- Sila isolon (jika tersedia) tidak cukup maka ditambahkan pada halaman berikutnya;
- Sila hasil berupa tabel/gambar ditampikan, pada halaman belakang.

Bandung, 5 Juni 2018.  
Anggota Peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP: 196209201991031001

Catatan Manev:

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP: 1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.W03/2018. Tgl 21 Maret 2018. Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lambar .... dari ....

1.	Tanggal/Bulan/Tahun	Rabu 6 Juni 2018.
2.	Nama Kegiatan/Sub kegiatan	Penyusunan laporan progres penelitian 60% Penyusunan Bab I
3.	Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Tersusunnya Bab I penelitian meliputi: Pendahuluan. - latar belakang masalah, - Perumusan masalah, - Tujuan penelitian dan - Signipikansi penelitian.
4.	Catatan kemajuan: (hasil yang diperoleh)	Dimilikinya; bab I penelitian. Untuk memenuhi laporan 60% progres penelitian. "Kesiapan PTKIS dalam mendukung implementasi Kebijakan SKPI Studi pada PTKIS Kopertis wilayah II Jawa Barat dan Banten.
5.	Kendala	- linear.
6.	Kesimpulan dan saran	Dengan dimilikinya Bab I penelitian, diharapkan dapat memenuhi laporan 60% progres penelitian "Kesiapan PTKIS dalam mendukung implementasi Kebijakan SKPI: Studi PTKIS Kopertis wilayah II Jawa Barat dan Banten" yang valid kredibel dan akuntabel.
7.	Rencana kegiatan selanjutnya	Penyusunan laporan progres penelitian 60% Penyusunan Bab II Sub A dan B.

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP: 1961042119880201001

Catatan:

- Bila kolom yg tersedia tidak cukup, foto ditambahkan pada halaman berikutnya;
- Bila hasil berupa tabel/gambar ditampal, pada halaman belakang.

Bandung, 6 Juni 2018  
Anggota peneliti,

Drs. Nashrudin, MPd.  
NIP: 196205201981031001

Catatan Monev:

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP: 1971082719980310007





LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung IMPLEMENTASI Kebijakan SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018, Tgl 21 Maret 2018, Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar .... dari ....

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Kamis, 7 Juni 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Penyiapan Laporan Progres Penelitian 60% Penyusunan Bab. II
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Tersusunnya Bab II Penelitian meliputi: Bab II Tinjauan pustaka (A-B) A. Konsep Dasar Kesiapan Implementasi Kebijakan B. Konsep dan teori Implementasi Kebijakan C. Penerapan skpi sebagai kebijakan pendidikan tinggi menghadapi era persaingan. D. Penelitian Terdahulu.
4. Catatan kemajuan: (hasil yang diperoleh)	Dimilikinya : Bab II penelitian, Untuk memenuhi laporan 60% Progres penelitian, "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI : Studi pada PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten"
5. Kendala	- lancar
6. Kesimpulan dan saran	Dengan dimilikinya Bab II penelitian, diharapkan dapat memenuhi laporan 60% Progres penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI : Studi PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten" yang valid, kredibel dan akuntabel.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Penyiapan Laporan Progres penelitian 60% Penyusunan Bab II Lanjutan Sub C dan D.

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP. 1962042711990201001

Catatan:

- Sila kirim yg tertera tidak cukup harus ditambahkan pada halaman berikutnya,
- Sila buat capura tabel/gambar diemuliskan pada halaman berikut.

Bandung,  
Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP. 196209201991031001

Catatan Monev:

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI

(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018, Tgl 21 Maret 2018. Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar .... dari ....

1.	Tanggal/Bulan/Tahun	Jumat 8 Juni 2018.
2.	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Penyusunan Laporan Progres Penelitian 60% Pengusunan Bab III Metode Penelitian.
3.	Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Tersusunnya Bab III penelitian meliputi: Bab III Metode penelitian. A. Desain penelitian B. Prosedur penelitian C. Teknik /cara pengumpulan data. D. Metode Analisis Data dan pengolahan Data.
4.	Catatan kemajuan: (hasil yang diperoleh)	Dimilikinya: Bab III penelitian. Untuk Memenuhi laporan 60% Progres penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten.
5.	Kendala	- Lancar.
6.	Kesimpulan dan saran	Dengan dimilikinya Bab III penelitian, diharapkan dapat memenuhi laporan 60% Progres Penelitian: Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi PTKIS Kopertais wilayah II Jawa Barat dan Banten yang valid, kredibel dan akuntabel.
7.	Rencana kegiatan selanjutnya	Laporan Progres penelitian 60% Bab I-II dan III (Gelas Culi bersama dan libur Idul Fitri 11-19/6/18)

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. A. A. Rusdiana, MM  
NIP.1961041719860201001

Catatan:

- Jika kolom yg tersedia tidak cukup maka ditambahkan pada halaman berikutnya;
- Jika hasil berupa tabel/pelebaran ditampikan pada halaman belakang.

Bandung,  
Anggota Peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP.196206031991031001

Catatan Monev:

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP.1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung IMPLEMENTASI Kebijakan SKPI

(Studi pada PTKIS Kopertals Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018, Tgl 21 Maret 2018, Kag. 6 bulan sampai Tgl 20 Agustus 2018

Lembar .... dari ....

1.	Tanggal/Bulan/Tahun	Rabu 20 Juni 2018 .
2.	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Pengumpulan Laporan Kegiatan penelitian Tahap I 60 % .
2.	Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Pengiriman Laporan penelitian 60% ke pusat Penelitian dan penerbitan LPPM, berdasarkan Spk No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018.(21/3/18) berisi . 1 Bab I- Bab II dan Bab. III 2 Log Book bulan ke III (60%) 3 Spj 60 %
4.	Catatan kemajuan: (hasil yang diperoleh)	Dimilikinya : Bukti Penerimaan dari pusat Penelitian dan penerbitan Lppm tentang Pengiriman dokumen progres Penelitian . 1. Bab. I- Bab II dan Bab III 2 Log Book Bulan ke III (60%) 3. Spj 60 % Bukti Terlampir .
5.	Kendala	- lancar .
6.	Kesimpulan dan saran	Dengan Dimilikinya : Bukti penerimaan dari Pusat Penelitian dan penerbitan Lppm, Tentang Pengiriman dokumen progres penelitian : Bab I- Bab II dan Bab III Log Book Bin ke III (60% dan spj 60% di harapkan dapat Memenuhi ketentuan dan Kewajiban Tim Peneliti berdasarkan kaidah ilmiah dan ketentuan ketentuan spk penelitian "Kesiapan PTKIS Dalam Mendukung implementasi Kebijakan SKPI".
7.	Rencana kegiatan selanjutnya	Pelaksanaan : Wawancara dan Pengumpulan data dan PP. III Studi Dokumen /data Kesiapan Implementasi: Spk Di 44 PTKIS Kapwil II

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,  
  
Dr. H. A. Susiana, MM  
NIP. 1961042119803101001

Bandung, 20 Juni 2018 .  
Anggota Tim,  
  
Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP. 196209201991031005

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,  
  
Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007

Catatan:  
- Bila kolom yg tersedia tidak cukup harap ditambahkan pada halaman berikutnya;  
- Bila hasil berupa tabel/gambar ditampikan, pada halaman belakang.

Keterangan:

Log book sd. No 35, sudah disajikan pada kepentingan laporan skpi (60%) kegiatan penelitian.



Lanjutan.....



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI

(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Un.05/V.2/P27.00.W05/2018. Tgl: 21 Maret 2018. Keg. 6 bulan sampai Tgl. 29 Agustus 2018

Lembar ...., dari ....

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Senin, Selasa 125-26 Juni 2018
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	wawancara IPP II dan pengumpulan dokumen/data IPP, di: UNMA Pandeglang dan IAIB Serang (Nasihudin, Sr. SPP, 7/6/18)
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (annual program)	Terlaksananya wawancara IPP II, dan terkumpulnya data isian IPP, II Dokumen /Data Kesiapan Implementasi SKPI dari UNMA dan IAIB Serang meliputi dokumen /data: - Penafsiran atau Interpretasi Kebijakan penerapan SKPI - Pengorganisasian Penerapan Kebijakan SKPI - Strategi Penerapan Kebijakan SKPI - Kendala dan Solusi dlm Implementasi Kebijakan SKPI.
4. Catatan kemajuan: (Hasil yang diperoleh)	Dimilikinya data: Hasil wawancara, dan isian IPP II Dokumen /Data Kesiapan Implementasi SKPI dari: UNMA dan IAIB Serang, untuk kepentingan penyusunan laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI; Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten".
5. Kendala	- lancar
6. Kesimpulan dan saran	Dengan dimilikinya data hasil wawancara dan isian IPP, II Dokumen /Data Kesiapan Implementasi SKPI dari: UNMA dan IAIB Serang, di harapkan dapat menunjang melancarkan penyusunan laporan penelitian Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI; Studi PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten * yg valid kredibel dan akurat.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Pelaksanaan wawancara dan pengumpulan data isian IPP, II di lokasi Rangkas bitung dan IAIB LAROMB.

Mengetahui/Menyetujui:

Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MM

NIP. 1963042119860251001

Corotan:

- Bila tidak ada tanda tangan harus dijemput pada halaman berikutnya;
- Bila hasil berupa tabel/gambar di kemdiknas, pada halaman belakang.

Bandung,

Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.

NIP. 196205201931051001

a.n. Ketua LP2M,

Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,

Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag

NIP. 1971082719980318007

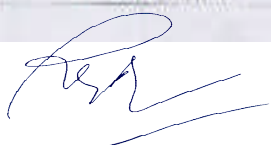
**Lampiran 1**


DR. WAHYUDIN DARMAKSA

**1. FAI/UNMA Prodeklang (I.P.DI)**

Saya Nasihudin, datang ke Kantor FAI-UNMA Prodeklang Hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2016 pukul 08.00, diterima oleh salah satu staf, setelah menunggu waktu perempunnya sedang istirahat lalu lain sekitar pukul 12.00, saya menuju ruang Dekan FAI-UNMA, kemudian saya uraian wawancara. Saya diterima dengan ramah oleh Dekan, W.D. I, W.D. II, W.D. III, dan Ketua Prodi PAI, kami berempuk berjabatan tugas dan berharap agar saya di arsitek untuk di salah satu sisi beliau. Untuk memperoleh maknanya, berikut ini wawancara dimuat:

<b>Pew</b>	Saya ingin mendapatkan informasi lebih komprehensif. Tentang siapa dan pemahaman Bapak tentang PMA no.1 tahun 2016, "peraturan SKPT", yang sebelumnya harus ditunggu sejak tanggal 17 Januari 2016?
<b>Informasi 1.1</b>	Dekan FAI "sebagaimana kami memang memantapkan dan setiap bahwa semua kebijakan yang di laksanakan seperti halnya kebijakan SKPT, yang akan ada di dalam bisa di gunakan dan pengembangan TP, menjadi pengembangan kami akan seperti di laksanakan, namun tidak itu. Lalu untuk mengantisipasi pada kebijakan yang akan ada di laksanakan seperti pada tahun ini akan ada di laksanakan juga akan. Adapun sebagai Perguruan Tinggi, dan juga sebagai lembaga Pendidikan Islam, seperti Di laksanakan Pendidikan Tinggi Islam Negeri- Di laksanakan PP/10/2016/2016, bahwa sebagai Perguruan Tinggi harus sudah melaksanakan sistem yang sudah tanggal 10 Agustus 2016, apakah akan ada kebijakan yang akan ada di laksanakan juga akan seperti itu. Itu akan berarti mengantisipasi kebijakan SKPT dan mengantisipasi yang sedang".
<b>Pew</b>	Selanjutnya, saya ingin mendapatkan informasi mengenai pengorganisasian kebijakan, untuk meneliti Kebijakan PMA no.1 tahun 2016, tentang peraturan SKPT, apakah di laksanakan?"
<b>Informasi 1.2</b>	W.D.I sebagai rektor "saya mendengar bahwa "strategi yang akan di laksanakan agar pengembangan kegiatan dapat berjalan dan mengikuti seperti ke arah samping untuk meningkatkan kualitas dalam menyelenggarakan kegiatan yang berkemajuan, mengantisipasi juga akan ada, baru akan ada kebijakan, mengantisipasi kebijakan lokal "Negeri sebagai lembaga pendidikan Islam, sebagai salah satu dan sumber daya yang akan di laksanakan".
<b>Pew</b>	Selanjutnya, saya ingin mendapatkan informasi mengenai Strategi pengorganisasian, setelah meneliti kebijakan PMA no.1 tahun 2016, SKPT, apakah di laksanakan?"
<b>Informasi 1.3</b>	Kapriul PNI "saya mendengar bahwa "strategi yang akan di laksanakan agar pengembangan kegiatan dapat berjalan dan mengikuti seperti ke arah samping untuk meningkatkan kualitas dalam menyelenggarakan kegiatan yang berkemajuan, mengantisipasi juga akan ada, baru akan ada kebijakan, mengantisipasi kebijakan lokal "Negeri sebagai lembaga pendidikan Islam, sebagai salah satu dan sumber daya yang akan di laksanakan".
<b>Pew</b>	Selanjutnya, saya ingin mendapatkan informasi mengenai faktor yang menghambat, setelah meneliti Kebijakan PMA no.1 tahun 2016, SKPT, apakah di laksanakan?"
<b>Informasi 1.4</b>	Wakil III FAI-UNMA, Pemasannya, sebagai berikut "saya mendengar bahwa "Lembaga ini akan berdirinya sejak tahun 1988, bahwa akan mengantisipasi informasi lebih di laksanakan Negeri sebagai lembaga pendidikan Islam, sebagai salah satu dan sumber daya yang akan di laksanakan juga akan seperti itu. Itu akan berarti mengantisipasi kebijakan SKPT dan mengantisipasi yang sedang".



a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,  
  
Dr. Wahyudin Darmaksa, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBLIKSIAN SKPI (Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No D-113/Un.05/V.2/PP.00.9/05/2018, Tgl 21 Maret 2018, Keg. 5 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

lembar .... dari ....

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Senin, Selasa / 25-26 Juni 2018 .
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	wawancara IPP II dan pengumpulan Dokumen /data IPP II di: STAI Fatimah Tanderang dan STAI Al- Karimiyah Depok, A. Rusdiana /SI dan SPPD 7/6/18
3. Tajuk Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Terdasarkan wawancara IPP II dan Terkumpulnya data isian IPP II Dokumen /Data Kesiapan implementasi SKPI dari STAI Fatimah dan STAI Al-Karimiyah Depok meliputi dokumen /data: - Penjelasan dan interpretasi kebijakan penerapan SKPI, - Pengorganisasian penerapan Kebijakan SKPI, - Strategi Penerapan Kebijakan SKPI, - kendala dan solusi dalam implementasi Kebijakan SKPI
4. Catatan kemajuan (hasil yang diperoleh)	Dimilikinya data: Hasil wawancara dan isian IPP II Dokumen /Data Kesiapan implementasi SKPI dari STAI Fatimah dan STAI Al- karimiyah Untuk kepentingan penyusunan laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung implementasi Kebijakan SKPI; Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten
5. Rencana	- Lanjut
6. Kesimpulan dan saran	Dengan dimilikinya data hasil wawancara, dan isian IPP II Dokumen/Data Kesiapan implementasi SKPI dari STAI Fatimah dan STAI Al- karimiyah, diharapkan dapat menunjang kelancaran penyusunan laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung implementasi Kebijakan SKPI; Studi PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten " yg valid, kredibel dan akuntabel.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Realisasikan wawancara dan pengumpulan data isian IPP II STAI Kharisma Sukabumi, dan UNW Juanda Bogor.

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. A. A. Rusdiana, MPA  
NIP. 1961042119860210001


Catatan:

- Bila kolom yg tersedia tidak cukup harap ditambahkan pada halaman berikutnya,
- Bila sudah sampai terakhir terimakasih, pada halaman belakang.

Bandung,  
Anggota peneliti,

Drs. Nashudin, MPd.  
NIP.196209201991031001

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP.1971082719980310007



## LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/UJ/da/SY.2/PP.00.9103/2018, Tgl 21 Mawi 2018, Keg. 6 balok sampai Tgl. 20 Agustus 2018

tember ... dari ...

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Rabu - Kamis / 27-28 - Juli. 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	wawancara Ipp II dan pengumpulan Dokumen / data Ipp II, di : STAI LATANSA dan IAIN LARABA, NASIHUJIN, ST dan SPK %.
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (jurnal program)	Terlaksananya wawancara Ipp II, dan terkumpulnya data isian Ipp II Dokumen / data Kesiapan implementasi SKPI dari : STAI Latansa dan IAIN LARABA, meliputi Dokumen / data : - Penafsiran atau interpretasi Kebijakan Penerapan SKPI, - Pengorganisasian Penerapan Kebijakan SKPI, - Strategi Penerapan Kebijakan SKPI, - Kendala dan Solusi dalam implementasi Kebijakan SKPI.
4. Catatan kemajuan: (Hasil yang diperoleh)	Dimilikinya data : Hasil wawancara, dan isian Ipp II Dokumen / data Kesiapan implementasi SKPI dari STAI Latansa, dan IAIN LARABA. Untuk kepentingan Penyusunan Laporan penelitian " Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten.
5. Kendala	- Lancar.
6. Kesimpulan dan saran	Dengan dimilikinya data hasil wawancara dan isian Ipp II Dokumen / data Kesiapan implementasi SKPI dari STAI LATANSA, dan IAIN LA REIBA di hampirkan dapat menunjang kelancaran penyusunan Laporan penelitian " Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten " yang Valid, Kredibel dan akurat.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Pelaksanaan wawancara dan pengumpulan data isian Ipp II, di STAI. Nurul Hikmah SMA, dan STAI, Sukabungri

Mengetahui/Menyetujui:

Ketua Tim Peneliti

Dr. H. A. Rusdiana, MEd

NIP: 196104211960010001

Catatan:

- Bila telah yg tertera tidak cukup lun, ditunjukkan pada halaman berikutnya.
- Bila hasil bisa terdapat gambar ditamok, pada halaman berikut.

Bandung,

Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.

NIP: 196209201991031001

a.n. Ketua LPZM,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,

Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag

NIP: 1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-1134/a.05/V.2/PP.00/02/2018, Tgl.21 Maret 2018, Kap. 6 folio sampai Tgl. 31 Agustus 2018

Uraian ... dan ...

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Jember - Sabtu / 29-30 Juli 2018
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Wawancara ipd II dan pengumpulan data ipd II di 05 - STAI Nurul Imanah Cianjur dan STAI Sukabumi - Ngahudin dengan Survei tugas dan SPPP 7/6/2018.
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (Guru/Program)	Tindaklanjut wawancara ipd II dan terkumpulnya data isdun ipd II Dekumen Jatah Kesiapan implementasi 10% SKPI dari STAI Nurul Imanah Cianjur, dan STAI Sukabumi, meliputi dokumen jatah - Penjelasan dan interpretasi kebijakan penerapan SKPI - Pendengaran/isi penerapan kebijakan SKPI - Strategi penerapan kebijakan SKPI - Hambatan dan Solusi 20% implementasi kebijakan
4. Catatan lapangan (Hasil pengamatan)	Dinukanya data hasil wawancara dan isdun ipd II Dekumen Jatah Kesiapan implementasi SKPI dari STAI Nurul Imanah Cianjur, dan STAI Sukabumi, untuk keperluan penyusunan laporan penelitian: Kesiapan PTKIS dalam Mendukung implementasi Kebijakan SKPI; Studi pada PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten.
5. Kondisi	- lancar
6. Kesimpulan dan saran	Dapat dinukanya data hasil wawancara dan isdun ipd II Dekumen/atah Kesiapan implementasi SKPI dari STAI Nurul Imanah dan STAI Sukabumi, dan dapat dapat menunjang kelancaran penyusunan laporan penelitian: Kesiapan PTKIS dalam Mendukung imple mentasi kebijakan SKPI; Studi pada PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten yang valid kredibel dan akurat.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Pengisian: Wawancara dan pengumpulan data isdun di STAI Ez Muqtadira Purwokerto dan STAI Al-Yaqeen Jember - Suwang

Mengetahui/Menyetujui:

Ketua Tim Penelitian

Dr. H. A. Rusdiana, MEd  
NIP. 1962041119241011001

Catatan:

- Sila ketan ng rindi rindi kudu lara
- Sila ketan ng rindi rindi kudu lara
- Sila ketan ng rindi rindi kudu lara

Bandung,

Anggota peneliti,

Dr. Nasihudin, MEd  
NIP. 196208201991001001

Catatan Manev

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,

Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007





LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBLIKATAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SKP, No. D-113/Unsw/V.2019.00-03:2019, Tgl. 21 Maret 2019, Keg. A telah sampai Tgl. 20 Agustus 2019

Lampir ... / dari ...

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Juni 2018 dan Sabtu/29, 30 Juni 2018
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Wawancara IPD II dan pengumpulan dokumen data IPD II dan SKPI Agus Saiful Bes dan SKPI As-Siddiqiyah Karawang - A Rusdiana ST dan SPD F/G/2018
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (kegiatan program)	Kertaskonfirmasi wawancara IPD II dan terkumpulnya data data IPD II Dokumen data Kesiapan implementasi SKPI dan SKPI Agus Saiful Bes dan SKPI As-Siddiqiyah Karawang, meliputi Dokumen data - Penjelasan atau interpretasi kebijakan penerapan SKPI - Pradenganisasi penerapan kebijakan SKPI - Strategi penerapan kebijakan SKPI - Monev dan Solusi dim implementasi kebijakan SKPI
4. Catatan komentar: (hasil wawancara)	Minimnya data; Hasil wawancara dan data IPD II Dokumen data Kesiapan implementasi SKPI dan SKPI Agus Saiful Bes dan SKPI As-Siddiqiyah Karawang untuk kepentingan penyusunan laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI Studi Pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten".
5. Rendita	- lancar
6. Kesimpulan dan saran	Dengan dimukanya data hasil wawancara dan data IPD II Dokumen data Kesiapan implementasi SKPI dan SKPI Agus Saiful Bes dan SKPI As-Siddiqiyah Karawang, di harapkan dapat mendukung kelancaran penyusunan laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI Studi Pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten" yang valid, kredibel dan akurat.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Penyusunan: Wawancara dan pengumpulan data IPD II di SKPI Saiful Bes dan SKPI Cirebon.

Mengetahui/Menyetujui:

Ketua Tim Peneliti,

  
Dr. H. A. Rusdiana, MPA  
NIP. 196104211980320001

Bandung,

Anggota peneliti,

  
Drs. Nasihudin, MPA  
NIP. 196206201980320001

Catatan:

- Data tidak yg tertera tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya
- Data yang berupa foto/gambar tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya

Catatan Monev:

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980318007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung IMPLEMENTASI Kebijakan SKPI

(Studi pada PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SKR: NAB-11.01.01.019.000.000.001.1, Tgl. 21 Maret 2018, Kap. 1 halaman sampai Tgl. 30 Agustus 2018

lengkap ... dari ...

1. Tanggal/Waktu/Tahun	Senin 20/03/2018
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Wawancara IPD II dan pengumpulan Dokumen/dasar IPD II di STA. E2 Nurafiqin Purwadana, ST/Asisten Kepala Kantor Sisdik, Nabanudin, ST/SPP/11/6/2018
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (mencat program)	<p>tujuannya: wawancara IPD II dan terkumpulnya data dasar IPD II Dokumen/dasar Kesiapan implementasi SKPI dari STA E2 Nurafiqin Purwadana dan STA Riyadatul Jannah</p> <p>gizi Riadatul Jannah meliputi: Dokumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rancangan dan Integritas: Kebijakan penyiapan SKPI</li> <li>- Pengorganisasian penyiapan kebijakan SKPI</li> <li>- Strategi, Perencanaan, Kesiapan SKPI</li> <li>- Monev dan Solusi: dan implementasi: Kebijakan SKPI</li> </ul>
4. Catatan kegiatan (hasil yang diperoleh)	<p>Dimilikinya data hasil wawancara, dan isian IPD II Dokumen/dasar Kesiapan implementasi SKPI dari STA E2 Nurafiqin Purwadana dan STA Riyadatul Jannah</p> <p>Linkat Kependidikan Penyusunan Laporan Penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung implementasi Kebijakan SKPI: Studi pd PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten"</p>
5. kendala	- Landa
6. Kegiatan dan saran	<p>Demikian dimungkiri dari hasil wawancara dan isian IPD II Dokumen/dasar Kesiapan implementasi SKPI dari STA E2 Nurafiqin Purwadana dan STA Riyadatul Jannah di dapatkan dapat menunjang kelancaran penyusunan laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung implementasi Kebijakan SKPI: studi PTKIS kopertis wilayah II Jawa Barat dan Banten" yang sudah selesai dan diunggah.</p>
7. Rencana kegiatan selanjutnya	<p>Penyusunan wawancara dan pengumpulan data dan IPD II di FTKI HASA KULINGGA dan STA PUTRA CIMAHI</p>

Mengotahui/Menyetujui:

Ketua Tim Peneliti

Dr. H. A. Hurdiana, MM

NP: 0961012119980201001

Catatan:

- Bila dalam yg. seperti tidak dapat tulis (dibuatkan pada halaman yg. tertera)
- Bila hasil berupa tabel/gambar (dibuatkan pada halaman tertera)

Banding,

Anggota peneliti,

Drs. Nabanudin, M.Pd.

NP: 1952090201998031001

Catatan Monev

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NP: 1971082719980310007

**LOGO BOMK**

**KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI**  
(Studi pada PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SKRIPSI No. B-123456789, 2018/01/01/0101, Tgl. 21 Maret 2018, Kap. 4 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lampiran ... dari ...

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Sekeloa, Selasa / 2-3 Juli 2018
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Wawancara IPP II dan pengisi data di Dokumen/atau IPP II di - STAS Darmo Indramayu dan STAS Cirebon A. Rusdiana - ST. SPP - 7/6/1818
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (jurnal program)	Terlaksananya wawancara IPP II dan terkumpulnya data kean IPD di Dokumen/atau Kesiapan implementasi SKPI dari STAS Darmo Indramayu dan STAS Cirebon. meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjelasan atau interpretasi kebijakan pendidikan SKPI</li> <li>- Rancangan/strategi pelaksanaan kebijakan SKPI</li> <li>- Strategi pelaksanaan kebijakan SKPI</li> <li>- Hambatan dan solusi dan implementasi kebijakan SKPI</li> </ul>
4. Catatan kemajuan: (hasil yang diperoleh)	Diperolehnya data hasil wawancara dan data IPP II Dokumen/atau Kesiapan implementasi SKPI dari STAS Darmo Indramayu dan STAS Cirebon untuk keperluan penyusunan laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten".
5. Hambatan	- lancar.
6. Kebergunaan dan saran	Dengan diadanya data hasil wawancara dan data IPP II Dokumen/atau Kesiapan implementasi SKPI dari STAS Darmo Indramayu dan STAS Cirebon diharapkan dapat menunjang penelitian yang berjudul "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten" yang valid, kredibel, dan akurat.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Penyusunan: wawancara dan pengumpulan data kean IPD II, di STASMA Bayah dan STASNU Tasik


Mengetahui/Menyetujui  
  
 Dr. H. A. Rusdiana, MM  
 NIP. 1963041119840301000

Bandung,  
 Anggota peneliti,  
  
 Drs. Nasihudin, MPd,  
 NIP. 1942090219840301001

Catatan:  
 - Bila dalam hal tertentu tidak dapat tetap dilaksanakan pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, maka harus terlebih dahulu mendapat persetujuan pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan.

Catatan 1  
 a.n. Ketua LP2M,  
 Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,  
  
 Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
 NIP. 1971082719980310007

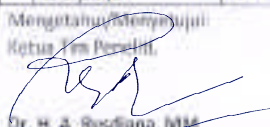


  
**LOG BOOK**  
**KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung IMPLEMENTASI KEBLIKAAN SKPI**  
 (Studi pada PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten)  
 SPK/ Ko B-115/Slr.D/V.2/PP.00.9102/18. Tgl 21 Maret 2018. Kap. 4 Bulan sampai Tgl. 30 Agustus 2018

Lembar ... dari ...

1. Tanggal/Durasi/Tahun	Jumata Sabtu /6-7 Juli 2018
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	wawancara ipdii dan pengumpulan data wawancara IPD II di: FTK UJISA Kuningan dan Siti Putri Cahli Ciamis - UJISA Kuningan Nakhudin ST/5000/7/6/2018
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (cabut program)	terlaksananya wawancara ipdii dan terkumpulnya data isian IPD II Dekwan/ data Kesiapan implementasi SKPI dari: FTK UJISA Kuningan dan Siti Putri Cahli Ciamis Dek/Dala: - Penafsiran atau interpretasi Kebijakan peraturan SKPI - Pelaksanaan peraturan Kebijakan SKPI - Struktur peraturan Kebijakan SKPI - Kendala dan Grese di implementasi Kebijakan SKPI
4. Catatan tambahan: (hasil yang diperoleh)	Ditoleknya data: Hasil wawancara dan isian ipd ii, Dokumentasi Kesiapan implementasi SKPI dari FTK UJISA Kuningan dan Siti Putri Cahli Ciamis, untuk kepentingan penyusunan laporan penelitian "Kesi- apan PTKIS dalam Mendukung implementasi Keb- ijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten.
5. Kendala	- tidak
6. Restrapul dan saran	Dengan ditoleknya data hasil wawancara dan isian ipd ii Dekwan/ data Kesiapan implementasi SKPI dari FTK UJISA Kuningan dan Siti Putri Cahli Ciamis diharapkan dapat menunjang kelancaran peny- usunan laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung implementasi Kebijakan SKPI: Studi PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten" yang Valid, Kredibel, dan akurat.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Pengisian wawancara dan pengumpulan data isian IPD II, di IAIN Ekipung, dan Siti Gunung Gacor.

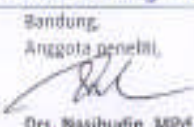
Mengetahui/ditandatangani  
Ketua Tim Penelitian



Dr. H. A. Rusdiana, MPA  
NIP. 1963042119821001001

Catatan:  
- Hal-hal yang tertera tidak harus diisi  
- dan dapat pula tidak diisi  
- Hal-hal tersebut tidak harus diisi  
- pada halaman-halaman


Sandung,  
Anggota peneliti,



Drs. Nasihudin, MPA  
NIP. 196309201993001001

Catatan Money

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung IMPLEMENTASI Kebijakan SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Un.05/V.2/PP/00.9/03/2018, Tgl 21 Maret 2018, Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar ... dari ....

1.	Tanggal/Dulan/Tahun	Senin - Sabtu / 6-7 Juli 2018.
2.	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	wawancara Ipp II dan pengumpulan Dokumen /data Ipp II, di STAIMA Banjar dan STAINU TASIK RUSDIANA. ST. 9PPD 7/6/2018.
3.	Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Terlaksananya wawancara Ipp. II dan terkumpulnya data isian Ipp. III Dokumen /data Kesiapan implementasi SKPI dari: STAIMA Banjar dan STAINU TASIK, meliputi Dokumen/Data - Penafsiran atau interpretasi Kebijakan penerapan SKPI. - Pengorganisasian penerapan Kebijakan SKPI. - Strategi Penerapan Kebijakan SKPI - Kendala dan Solusi dim implementasi Kebijakan SKPI
4.	Catatan kemajuan (Hasil yang diperoleh)	Dimilikinya data hasil wawancara, dan isian Ipp III Dokumen /Data Kesiapan Implementasi SKPI dari STAIMA Banjar dan STAINU TASIK untuk kepentingan penyusunan laporan penelitian " Kesiapan PTKIS dalam mendukung implementasi Kebijakan SKPI " studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten
5.	Kendala	- Linear.
6.	Kesimpulan dan saran	Dengan dimilikinya data hasil wawancara, dan isian Ipp. III Dokumen /Data Kesiapan Implementasi SKPI dari STAIMA Banjar dan STAINU TASIK, diharapkan dapat menunjang kelancaran penyusunan laporan penelitian " Kesiapan PTKIS dalam mendukung implementasi Kebijakan SKPI: Studi PTKIS Kopertais wilayah II Jawa Barat dan Banten " yg valid kredibel dan akuntabel.
7.	Rencana kegiatan selanjutnya	Pelaksanaan wawancara dan pengumpulan data isian Ipp. III, di STAI Al-Falah Cicalengka.

Mengetahui/Menyetujui:

Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MIM  
NIP. 19810421198602101001

Bandung,

Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP. 196206201991031001

Catatan:

- Sila tulis yg tertera tidak cukup harap ditanda dari pada halaman belakangnya,
- Risa hasil tertera lebih/gambar ditambahkan, pada halaman belakang.

Catatan Monev:

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980318007



## LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung IMPLEMENTASI Kebijakan SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Uh.B5/V.2/PP.DD.9803/2018, Tgl 21 Maret 2018, Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar .... dari ....

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Senin-Selasa / 8-9 Juli 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	wawancara Ipp. II dan pengumpulan dokumen/data Ipp. II di - IAIN Tasikmalaya dan STAI Siliwangi Garut, Anasjudin, ST. SPPP. 7/8/2018
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (tujuan/program)	Tertindakannya: wawancara Ipp. II dan terkumpulnya Data Iwan Ipp. III Dokumen/data Kesiapan Implementasi Skpi dari: IAIN Tasikmalaya dan STAI Siliwangi Garut meliputi Dok/data: - Penafsiran atau interpretasi kebijakan penerapan Skpi - Pengorganisasian penerapan kebijakan Skpi. - Strategi penerapan kebijakan Skpi - Monda dan Sonda dalam implementasi Kebijakan Sk
4. Catatan kemajuan: (Hasil yang diperoleh)	Dimilikinya data: Hasil wawancara, dan isian Ipp. III Dokumen / Data Kesiapan Implementasi Skpi dari IAIN Tasikmalaya dan STAI Siliwangi Garut untuk kepentingan pengusunan laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Skpi Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten"
5. Metode	- Linear
6. Kesimpulan dan saran	Dengan dimilikinya data hasil wawancara, dan isian Ipp. II. Dokumen /data Kesiapan Implementasi Skpi IAIN Tasikmalaya dan STAI Siliwangi Garut diharapkan dapat menunjang kelancaran pengusunan laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Skpi; Studi PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten" yg valid, kredibel dan akurat.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Pengolahan Ipp I- Ipp II dan Ipp III dari 24 PTKIS.

Mengetahui/Menyetujui:

Ketua Tim Peneliti

  
Dr. H. A. Kusdiana, MEd  
NIP. 1963042119803201003

Catatan:


- Bila tidak ada tanda tangan atau cap di Lembaran pada Lembaran Kegiatan;
- Bila hasil berupa tabel/pembar ditandatangani pada halaman belakang.

Bandung,

Anggota peneliti,

  
Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP.196209221991031001

Catatan Monor:

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,  
  
Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP.1971082719980310007



## LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/U.05/V.2/PP.00.903/2018, Tgl 21 Maret 2018, Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar ... dari ...

1.	Tanggal/Bulan/Tahun	Senin / 8 Juli 2018.
2.	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Wawancara IPD II dan pengumpulan dokumen/data IPD. III, di STAH. AL-Falah Ciateangka Rusdiana, ST. SPPD. 7/6 Masjid
3.	Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Tertindakannya ; wawancara IPD II, dan terkumpulnya data isian IPD. III Dokumen /data Kesiapan Implementasi SKPI dari : Al-Falah Ciateangka, meliputi dok/data. - Penerapan dan Interpretasi Kebijakan penerapan SKPI - Pengorganisasian Penerapan Kebijakan SKPI. - Strategi Penerapan Kebijakan SKPI. - Menelaah dan Solusi di Implementasi Kebijakan SKPI
4.	Catatan kemajuan (Hal yang diperoleh)	Dimilikinya data; Hasil wawancara dan isian IPD III Dokumen /data Kesiapan Implementasi SKPI dari STAH AL-Falah Ciateangka ; untuk kepentingan penyusunan laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI; Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten
5.	Kendala	- Lancar.
6.	Kesimpulan dan saran	Dengan dimilikinya data hasil wawancara, dan isian IPD. III Dokumen /data Kesiapan Implementasi SKPI dan Al-Falah Ciateangka di harapkan dapat menunjang kelancaran penyusunan laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI; Studi PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten" yg valid, kredibel dan akurat.
7.	Rencana kegiatan selanjutnya	Pelaksanaan: Pengolahan Data IPD I-IPD. III dari 24 PTKIS

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP. 19631042119960201001

Catatan:

- Bila belum yg tertera tidak cukup harus ditambahkan pada halaman berikutnya;
- Bila hasil kelengkapan tabel/gambar dikumpulkan, pada halaman belakang.

Bandung,  
Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP. 196209201991031001

Catatan Money a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007



## LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung IMPLEMENTASI KEBERLAKUAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: Su/3-113/En/05/Y.2/PP/03/2013/2018, Tgl. 21 Maret 2018, Keg. 6 bulan sampai Tgl. 29 Agustus 2018

Lembar .... dari ....

1.	Tanggal/Bulan/Tahun	14/01/2018
2.	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	wawancara IPP III dan pengumpulan Dokumen /data IPP III di STAI Siliwangi Cimahi Rusdiana ST/SPD 9/1/2018
3.	Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Tertarikannya: wawancara IPP III dan terkumpulnya data isian IPP III Dokumen /data Kesiapan Implementasi SKPI dari STAI Siliwangi Cimahi : meliputi Dok /data. - Penafsiran atau Interpretasi Kebijakan penerapan SKPI - Pengorganisasian Penerapan Kebijakan SKPI. - Strategi penerapan Kebijakan SKPI. - Kendala dan Solusi dalam implementasi kebijakan SKPI
4.	Catatan kemajuan: (Hasil yang diperoleh)	Diperolehnya data: Hasil wawancara dan isian IPP III Dokumen /data Kesiapan Implementasi SKPI dari STAI Siliwangi Cimahi untuk kepentingan penyusunan laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI" Studi PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten.
5.	Kendala	- Lancar .
6.	Kesimpulan dan saran	Dengan dimilikinya data hasil wawancara dan isian IPP III Dokumen /data Kesiapan Implementasi SKPI dari STAI Siliwangi Cimahi di harapkan dapat menunjang kelancaran penyusunan laporan penelitian Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI : Studi PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten " yg valid, kredibel dan akuntabel .
7.	Rencana kegiatan selanjutnya	Pelaksanaan : Pengolahan DATA IPP III dan III dari 24 PTKI

Mengetahui /Menyetujui:

Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MEd

NP. 1961042119880201001

Catatan:

- Bila kolom yg tertera tidak diisi harus ditambahkan pada halaman berturut-turut.
- Bila hasil berupa tabel/gambar di lampirkan pada halaman belakang.

Bandung,

Anggota Peneliti,

Drs. Nasibudin, MEd.

NP. 19620901199103001

Catatan Monev:

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NP. 1971082719980310007





LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.9.03/2018, Tgl 21 Maret 2018, Keg. 6 bulan sampai Tgl. 30 Agustus 2018

Lembar ... dari ...

1.	Tanggal/Bulan/Tahun	Juni 13 Juli, 2018.
2.	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Pengolahan Data IPR I-IPR II dan IPR III dari: UINMA Pandelwang, IAIN Serang, STAI Fatahullah Tangerang, STAI Al-Karimiyyah, STAI La-Tansa, IAIN LA-Riba, UINMA Bangor, dan STAI Kharisma
3.	Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Tiertranskrip, Terpilis, dan Terlekas-kannya data Primer dan Sekunder yang valid dari: UINMA, IAIN Serang, STAI Fatahullah, Al-Karimiyyah, STAI La-Tansa, IAIN LA-Riba, UINMA dan STAI Kharisma, meliputi Dokumen /Data, - Penyiapan atau Interpretasi Kebijakan Penerapan Skpi - Pengorganisasian Penerapan Kebijakan Skpi. - Strategi Penerapan Kebijakan Skpi - Mendaia dan Solusi dalam Implementasi Kebijakan Skpi
4.	Catatan kemajuan (Hasil yang diperoleh)	Dimulainya data penelitian hasil pengolahan yg valid dari: UINMA, IAIN Serang, STAI Fatahullah, STAI Al-Karimiyyah, STAI La-Tansa, IAIN LA-Riba, UINMA dan STAI Kharisma untuk kepentingan penyajian data laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Skpi; Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten.
5.	Kendala	- Lancar
6.	Kesimpulan dan saran	Dengan dimulainya hasil pengolahan data Primer dan Sekunder yang valid dari: UINMA, IAIN Serang, STAI Fatahullah, STAI Al-Karimiyyah, STAI La-Tansa, IAIN LA-Riba, UINMA dan STAI Kharisma, di harapkan dapat mengah-sinkan laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Skpi " Studi PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten " yang valid, kredibel dan akuntabel.
7.	Rencana kegiatan selanjutnya	Pengolahan Data IPR I-IPR II dan IPR III dari STAI Surabaya, STAI Nurul Ikhmah, STAI Agus Salim, STAI Al-Siddiqiyah, STAI. EL MUTABIA, STAI Ruyudhuri Jombang, STAI Shanna, STAI

Mengakhiri/Menyekuti:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MIM  
NIP: 196104211980001000

Catatan:

- Bila bobot yg terdapat telah cukup harap dilampirkan pada halaman berikutnya.
- Bila hasil berupa tabel/gambar ditampikan, pada halaman berikut.

Bandung, 13 Juli 2018.  
Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPA.  
NIP: 196208201991031001

Catatan Man... an Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP: 1971082719980310007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung IMPLEMENTASI Kebijakan SKPI  
(Studi pada PTKIS Keperfas Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Uh.65/V.2/PP.00.9/03/2018. Tgl. 21 Maret 2018. Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar .... dari ....

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Sabtu, 14 Juli 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Pengolahan data IPP1-IPP4 dan IPP11 dari: STAI Sukabumi, STAI Nurul Hikmah, STAI Agus Salim, STAI As-Siddiqiyah, STAI E. MUTTAHIN, STAI Riyadul Jannah, STAI Dharma, dan STAI Cirebon.
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (suaial program)	Transkrip, Terjika, dan Terakapikannya data Primer dan Sekunder yang valid dari: STAI Sukabumi, STAI Nurul Hikmah, STAI Agus Salim, STAI As-Siddiqiyah, STAI E. MUTTAHIN, STAI Riyadul Jannah, STAI Dharma, dan STAI Cirebon, meliputi: Dokumen / data. - Penafsiran atau interpretasi Kebijakan penerapan SKPI - Pengorganisasian Penerapan Kebijakan SKPI - Strategi Penerapan Kebijakan SKPI - Rencana atau Sistem dalam implementasi Kebijakan SKPI.
4. Catatan kemajuan (hasil yang direncanakan)	Dimulainya data penelitian hasil pengolahan yg Valid, dari: STAI Sukabumi, STAI Nurul Hikmah, STAI Agus Salim, STAI As-Siddiqiyah, STAI E. MUTTAHIN, STAI Riyadul Jannah, STAI Dharma, dan STAI Cirebon untuk kepentingan Penyajian dan laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi Pada PTKIS Keperfas Wilayah II Jawa Barat dan Banten".
5. Kendala	- Lanjut.
6. Kesimpulan dan saran	Dengan dimulainya hasil pengolahan data Primer dan Sekunder yang valid, dari: STAI Sukabumi, STAI Nurul Hikmah, STAI Agus Salim, STAI As-Siddiqiyah, STAI E. MUTTAHIN, STAI Riyadul Jannah, STAI Dharma dan STAI Cirebon, diharapkan dapat menghasilkan laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi PTKIS Keperfas Wil. Jawa Barat dan Banten" yang valid, kredibel dan akuntabel.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Pengolahan data IPP1-IPP4 dan IPP11 dan UNISA, STAI Purwa Geduh, STAI M. Al-Azhar dan STAINU IRIE TARK, STAI Biliwangi, STAI Anshari dan STAI Al-Falah Cigugur, STAI Siliwangi Cijah.

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP. 1961042119860001000

Catatan:

- Bila kolom yg tersedia tidak cukup harap ditambahkan pada halaman berikutnya;
- Bila hasil berupa tabel/gambar ditampulkan, pada halaman berikutnya.

Dandure, 14 Juli 2018.  
Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP. 196209201992001003

Catatan Money:

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wanyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 197108271998031007



LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Ule.c5/V.2/PP.80.905/2018, Tgl 21 Maret 2018, Kag. 6 bulan sampai Tgl. 30 Agustus 2018

tentang ... dari ...

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Minggu, 16 Juli 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	1. Pengolahan Data IPI-SPPT dan IPI II dari: UNISA, STAI PUTRA GARUH, STAI SUWANGI GARUH, STAI MA. AL-FAHAR, STAI AL-FALAH, STAI SUWANGI CIMAHU, STAI SUWANGI UMAHI / Membedah data ke 24 PTKIS
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (mencapai program)	1. Terapan Skrip, Terpuh, dan Terlokasinya data primer dan sekunder yang valid; dari: UNISA, STAI PUTRA GARUH, STAI MA. AL-FAHAR, STAI AL-FALAH, STAI SUWANGI GARUH, STAI SUWANGI CIMAHU, STAI SUWANGI UMAHI. 2. Mendapat dan solusi dari implementasi kebijakan SKPI 3. Berhibah validasi / membedah data ke 24 PTKIS
4. Catatan kemajuan (hasil yang diperoleh)	1. Dimulainya dalam penelitian hasil pengolahan yg valid dari: UNISA, STAI PUTRA GARUH, STAI MA. AL-FAHAR, STAI AL-FALAH, STAI SUWANGI GARUH, STAI SUWANGI CIMAHU, STAI SUWANGI UMAHI. 2. Untuk kepentingan pengajian dan laporan penelitian. 3. Kesiapan PTKIS dalam mendukung implementasi Kebijakan SKPI studi pada PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten. 4. Kesiapan kelengkapan adm dan biaya untuk kegiatan validasi / membedah data ke 24 PTKIS.
5. Kendala	-Lancar
6. Kesimpulan dan saran	Dengan dimulainya hasil pengolahan data primer dan sekunder yang valid, dari: UNISA, STAI PUTRA GARUH, STAI MA. AL-FAHAR, STAI AL-FALAH, STAI SUWANGI GARUH, STAI SUWANGI CIMAHU, STAI SUWANGI UMAHI dapat menghasilkan laporan penelitian valid, dan siapnya kelengkapan adm dan biaya untuk kegiatan validasi / membedah data ke 24 PTKIS, menjadi lancar.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Peaksanaan: Validasi data dengan 24 PTKIS kop. Wilayah II Jawa Barat dan Banten.

Mengucapkan/Mengucapkan:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP: 1961042119800201003

Catatan:

- Sila kirim yg sudah tidak dapat tercapai ditandatangani pada halaman berikutnya
- Mis: hasil berupa tabel/gambar dikumpulkan, pada halaman belakang.

Bandung, 15 Juli 2018.  
Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP: 196209201991031001

Catatan Monev:

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP: 1971082719980310007





## LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBLIJAKAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-115/Uc.05/V.2/PP.00.9103/2018, Tgl 21 Maret 2018, Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

lembar \_\_\_\_ dari \_\_\_\_

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Senin /16 Juli 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Validasi/Memberecheck data dengan nama sumber: - UJMA Fondation /Nasihudin, ST dan SPPD 7/9/2018. - STAI Fatmahlillah Tangerang /A. Kusdiana, ST dan SPPD 7/9/18
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Untuk Mengetahui Seberapa jauh data yang di peroleh sesuai apa yang di berikan oleh UJMA, dan STAI Fatmahlillah, Mengenai data/informasi: - Penafsiran atau interpretasi kebijakan penerapan SKPI - Pengorganisasian penerapan kebijakan SKPI, - Strategi penerapan kebijakan SKPI, - Mendata dan sesuai dalam implementasi kebijakan SKPI.
4. Catatan kemajuan: (hasil yang diperoleh)	Dimilikinya Kesepakatan/persetujuan dari pihak UJMA dan STAI Fatmahlillah, Untuk kepentingan pengisian data laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI; Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten, Yang Valid, Kredibel dan akuntabel.
5. Kendala	- Linear
6. Kesimpulan dan saran	Dengan Dimilikinya Kesepakatan/persetujuan dari pihak UJMA dan STAI Fatmahlillah, Maka data "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI; Studi PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten" Menjadi Valid, Kredibel dan dapat di percaya secara ilmiah.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Pelaksanaan Validasi/Memberecheck ke-1A1B dan STAI AL-Karimiyyah.

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP.1961042119860201001

Catatan:

- Sila telusur yg tersedia tidak cukup harus ditambah kan pada halaman berikutnya;
- Sila hasil terusan tabel/lembar di tempelkan, pada halaman belakang.

Bandung,  
Anggota peneliti,


Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP.196208201991031001

Catatan Monev:

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP.1971082719980310007

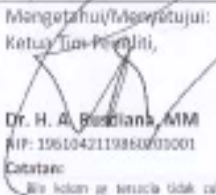
  
**LOG BOOK**

**KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI**  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)  
SPK: No.B-113/Ua.05/V.2/PP.00.903/2018, Tgl 21 Maret 2018. Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar ... dari ...

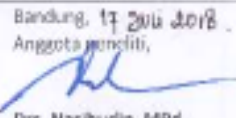
1. Tanggal/Bulan/Tahun	Selasa /17 Juli 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Validasi /Membercheck data dengan narasumber; - LAIB Serang /Nasihudin, ST dan SPPD 7/7/2018. - STAI Al-Karimiyah Depok /A. Rusdiana, ST dan SPPD 7/7/18
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sintak program)	Untuk mengetahui seberapa jauh data yg di peroleh sesuai dengan apa yang di berikan oleh LAIB, dan STAI Al-Karimiyah, mengenai data /informasi: - Penguasaan atau interpretasi Kebijakan penerapan SKPI. - Penguasaan atau Penerapan Kebijakan SKPI; - Strategi Penerapan Kebijakan SKPI; - Kendala, dan solusi dan implementasi Kebijakan SKPI.
4. Catatan kemajuan (hasil yang diperoleh)	Diusulkan kesepakatan /persetujuan dari pihak UJMA LAIB, STAI Fatahillah dan STAI Al-Karimiyah, untuk kepentingan pengisian data laporan Penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten, yang Valid, Kredibel dan akuntabel.
5. Kendala	- lancar.
6. Kesimpulan dan saran	Dengan dimulainya kesepakatan /persetujuan dari pihak: UJMA LAIB, STAI Fatahillah dan STAI Al-Karimiyah maka data "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten" menjadi Valid, Kredibel dan dapat di penuhi secara ilmiah.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Pelaksanaan: Validasi /Membercheck data ke STAI LA-TARA BINA, LA'Raiba, Univ Juanda, dan STAI Kharisma.

Mengetahui/Mengetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

  
Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP: 196104211986030001


Catatan:  
- Bila tidak ada tanda tidak boleh tetap diarsipkan pada folder berikutnya.  
- Bila hasil tidak baik/gambar tidak jelas, foto harus diulang.

Bandung, 17 Juli 2018.  
Anggota peneliti,

  
Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP: 196209031991031001

Catatan Monev:

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,

  
Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP: 1971082719980310007



## LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDEKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Ua.05/V.2/PP.00.903/2018, Tgl 21 Maret 2018, Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lebar ... dari ...

1.	Tanggal/Bulan/Tahun	Jumbe / 20 Juli 2018.
2.	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Validasi/Memberitahk data dengan narasumber: - STAI La-tansa /Nasirudin, ST, dan SPPD 7/7/2018. - UMIDA Bogor /A. Rusliana, ST, dan SPPD 7/7/2018.
3.	Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Untuk Mengetahui Seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang di berikan oleh STAI LA-TANSA dan Univ Juanda, meliputi dokumen/cetak: - penafsiran atau interpretasi kebijakan penerapan SKPI; - Pengorganisasian penerapan kebijakan SKPI; - Strategi penerapan kebijakan SKPI; - kendala dan solusi dalam implementasi kebijakan SKPI.
4.	Catatan kemojoran (hasil yang diperoleh)	Ditunjukkan: Kesepakatan /persetujuan dari pihak STAI Latansa, dan Univ Juanda, untuk kepentingan pengisian data laporan penelitian: Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI; Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten yang Valid Kredibel dan akurat.
5.	Kendala	- Lanar.
6.	Kesimpulan dan saran	Dengan Ditunjukkan Kesepakatan /persetujuan dari pihak STAI Latansa, dan Univ Juanda, maka data "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI; Studi PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten" Menjadi Valid, Kredibel dan dapat dipercaya secara ilmiah.
7.	Rencana kegiatan selanjutnya	Implementasi; Validasi/Memberitahk data ke IAIN La-rebo, dan STAI Kharisma.

Mengotabdi/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusliana, MPA  
NIP. 196209211980201001

Catatan:

Bila salah yg terdapat tidak dapat tetap dipertanggungjawabkan kebenarannya.  
Bila hasil terdapat atau jika ada ditanggapi, pada halaman belakang.

Bandung, 20 Juli 2018.  
Anggota peneliti,


Drs. Nasirudin, MPA.  
NIP. 196209201991031001

Catatan Monev:

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007

  
**LOG BOOK**

**KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI**  
 (Studi pada PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten)  
 NPM: 1416-01-0110-DIV-009-0000018, Tgl 21 Maret 2018; Exp. Abstrak sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar \_\_\_\_ dari \_\_\_\_

1. Tanggal/bulan/tahun	Sabtu / 21 Juli 2018
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Validasi / Memeriksa kembali data dengan konsumen - IAIN La. Reba / Medanida, ST dan SPP F/I/2018 - Kharisma Sukunim / A. Rusdiana, ST dan SPP F/I/2018
3. Tujuan kegiatan/Sub Kegiatan (tujuan program)	Untuk mengetahui seberapa jauh data yang di peroleh sesuai dengan apa yang di berikan oleh IAIN La Reba dan STI Kharisma, meliputi dokumen / data : - Perajaran dan interpretasi kebijakan penerapan SKPI; - Pengorganisasian penerapan kebijakan SKPI; - Strategi Penerapan Kebijakan SKPI; - Kendala, dan sejauh dalam implementasi Kebijakan SKPI.
4. Catatan kemajuan: (hasil yang diperoleh)	Dimungkinkan kesepakatan / persetujuan dan Pihak IAIN La. Reba, dan STI Kharisma, Untuk Keperluan Penyebaran data laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI" Studi pada PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten, yang Valid, Kredibel dan Akuntabel.
5. Kendala	- Tidak ada
6. Kesimpulan dan saran	Dengan dimungkinya kesepakatan / persetujuan dari Pihak IAIN La. Reba dan STI Kharisma, maka data "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI" Studi PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten "Menjadi Valid, Kredibel dan dapat di percaya Secara Timbal
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Pelaksanaan, Validasi / Memeriksa kembali data ke STAI Sukunim, Jawa Tengah dan STAI Agus Saem Bekasi, dan STAI As. Siddiqiyah Rorauwang


Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Bandung, 21 Juli 2018  
Anggota Peneliti,


Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP. 196304011986001001  
Cekatan

Drs. Nasihudin, M.Pd.  
NIP. 196208010199001001

Catatan Menyes:

a.n. Ketua LP2M,  
 Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,  
  
 Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
 NIP. 1971082719980310007



  
LOG BOOK

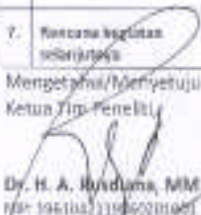
**KESIAPAN PERKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI**  
(Studi pada PERKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Un.45/2018/003/2018, Tgl 21 Maret 2018, Keg. 6 bulan resmi Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar ... dari ...


1. Tanggal/Bulan/Tahun	Senin / 23 Juli 2018.
2. Nama Regulator/Sub Kegiatan	Validasi / Memeriksa data dengan narasumber STAI Sukabumi, Nasihudin, ST dan SPPD 7-7-2018 STAI AGUS SALIM, Bekasi / Rusdiana, ST dan SPPD 7-7-18
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output/program)	Untuk mengetahui seberapa jauh data yg di peroleh sesuai dengan apa yang di berikan oleh STAI, Sukabumi dan STAI Agus salim, meliputi dokumen / data: - Pemaparan atau interpretasi kebijakan penerapan SKPI. - Pengorganisasian penerapan kebijakan SKPI. - Strategi penerapan kebijakan SKPI. - Kendala dan solusi dalam implementasi kebijakan SKPI.
4. Catatan beres-jelek: (hasil yang diharapkan)	Dimilikinya: kesepakatan / persetujuan dari pihak STAI Sukabumi dan STAI Agus salim, untuk kepon-tingan pengajian dan laporan penelitian "Kesiapan Perkis dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI Studi pada PERKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten, yang valid, kredibel dan akuntabel.
5. Kendala	- Linear.
6. Kesimpulan dan saran	Dengan Dimilikinya kesepakatan / persetujuan dari pihak: STAI Sukabumi, dan STAI Agus salim, maka data "Kesiapan perkis dalam Mendukung impleme-ntasi Kebijakan SKPI: Studi perkis Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten" menjadi valid, kredibel dan dapat di percaya secara ilmiah.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Pelaksanaan: Validasi / Memeriksa data ke STAI Nurul Ikhmah Cianjur, dan STAI AS- Siddiqiyah Karawang

Mengetahui / Menyetujui:  
Ketua Tim Penelitian

  
Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP. 1941042119800010401


Catatan:  
- Kita telah yg sudah tidak dapat tetap dilaksanakan pada pelaksanaan berikutnya.  
- Kita akan terus melakukan dan penerapan pada pelaksanaan selanjutnya.

Bandung, 23 Juli 2018.  
Anggota peneliti:

  
Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP. 196209201091011001

Catatan Manes:

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,

  
Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007



## LOG BOOK

**KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung IMPLEMENTASI Kebijakan SKPI**  
 (Studi pada PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No. II-117/UJ-05-V.3/PP.00.903/2018, Tgl 21 Maret 2018, Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar .... dari ....

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Selasa/24 Juli 2018
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	validasi /Membarehecek data dengan sumber-sumber: - Murat Hikmah Cianjur, Nasihudin, ST, dan SPPD. 7/7 Mei 2018. - Siti As-Siddiqiyah Karawang, ST, dan SPPD. 7/7/2018.
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	untuk mengetahui seberapa jauh data yg di peroleh sesuai dengan apa yang di berikan oleh Siti Nurul Hikmah dan Siti As-Siddiqiyah Karawang. Merupakan dokumen/dok. - Pengorganisasian Penerapan Kebijakan SKPI, - Strategi Penerapan Kebijakan SKPI, - Menilai data sesuai dalam implementasi Kebijakan SKPI,
4. Catatan kemajuan: (hasil yang di peroleh)	Ditunjukkan: Kesiapan /persetujuan dari pihak Siti Nurul Hikmah Cianjur, dan Siti As-Siddiqiyah Karawang untuk kepentingan pengisian laporan penelitian; "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI; Studi pada PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten, yang valid, kredibel dan akurat.
5. kendala	- Lembar
6. Kesimpulan dan saran	Dengan Ditunjukkan Kesiapan /persetujuan dari pihak Siti Nurul Hikmah Cianjur, dan Siti As-Siddiqiyah Karawang, maka data "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI; Studi PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten" menjadi valid, kredibel dan dapat di percaya sesuai ilmiah;
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Priksaan: validasi /Membarehecek data ke Siti E2 Matlakin, Ruzdhu Jannah, Siti's Pharma, dan STAD Cirebon

 Mengetahui/Menyetujui:  
 Ketua Tim Peneliti,

 Dr. H. A. Rusdiana, MM  
 NIP. 1961042119860201001

Catatan:

- Bila telah yg tertera tidak cukup maka ditunjukkan pada lembar berikutnya
- Bila hasil berupa tabel/gambar dipegakkan pada halaman belakang

 Bandung, 24 Juli 2018.  
 Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.

NIP. 196209201091031001

Catatan Monev:

 a.n. Ketua LP2M,  
 Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,

 Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
 NIP. 1971082719980310007



## LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBLIKIAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Uu.05/V.2/PP.09.9/03.2013, Tgl 21 Maret 2013, Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2013

Lembar .... dari ....

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Jumat / 27 Juli 2018
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Validasi Memberik data dengan narasumber - Sri E. Nur Hafid, Wastuwidhi, ST/SPPP/7/7/2018 - Stas Dharma, A. Ruseliana ST dan SPDP 7/7/2018
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sewa program)	untuk Mengetahui seberapa data yang di peroleh sesuai dengan apa yang di berikan oleh Sri E. Nur Hafid dan Stas Dharma melalui Dok/dana: - Penyusunan dan Interpretasi Kebijakan penerapan Skpi. - Pengorganisasian Penerapan Kebijakan Skpi. - Strategi Penerapan Kebijakan Skpi. - Hambatan dan Solusi dalam implementasi Kebijakan Skpi.
4. Catatan kemajuan (hasil yang diperoleh)	Dimilikinya Kesepakatan /Persetujuan dari pihak Sri E. Nur Hafid, dan Stas Dharma. Untuk Keparthingan penyajian dan Laporan Penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Skpi Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten Yang Valid, Kredibel dan Akuntabel.
5. Kendala	- Tidak ada
6. Kesimpulan dan saran	Dengan Dimilikinya Kesepakatan /Persetujuan dari pihak Sri E. Nur Hafid, dan Stas Dharma, maka data "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Skpi: Studi PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten" menjadi Valid, Kredibel dan dapat di percaya Sejalan Kemitah.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Pelaksanaan; Validasi/memberik data ke. UAGA Sri Putea Galuh, Sri M. Al Azhar dan Sarini.

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP: 1962042119880201001

## Catatan:

- Sila kolom yg terada tidak cukup harus ditandatangani pada halaman berikutnya.
- Sila hasil laporan tabung/gambar ditorekkan, pada halaman belakang.

Bandung, 27 Juli 2018  
Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP: 1962020011991030001

## Catatan Monev:

a.n. Ketua LP2M,

Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,

Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP: 1971082719980318007





## LOG BOOK

## KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI

(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113-Ur.45/V.2/PP.00.9493/2018, Tgl 21 Maret 2018, Keg. 6 bulan sampai Tgl. 29 Agustus 2018

Lembar .... dari ....

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Jabab / 28 Juli 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Validasi / Membercheck data dengan narasumber - STAI Riyadatul Jannah, Mahmudin, ST. SPPD 7/7/2018 - STAI Cirebon. A. Rusdiana, ST. SPPD. 7/9/2018
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Untuk Mengetahui Seberapa jauh data yang di peroleh sesuai dengan apa yg di berikan oleh STAI Riyadatul Jannah dan STAI Cirebon, meliputi Dok / Data; - Penajisan atau interpretasi Kebijakan penerapan SKPI; - Pengorganisasian Penerapan Kebijakan SKPI; - Strategi Penerapan Kebijakan SKPI; - Kemandate, dan sesuai, dan implementasi Kebijakan SKPI
4. Catatan kemajuan: (hasil yang diperoleh)	Dimilikinya Kesepakatan / Persetujuan dari STAI Riyadatul Jannah dan STAI Cirebon Untuk kepentingan penyajian data laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI; Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten yang Valid, Kredibel, dan Akuntabel.
5. Kendala	- Linear.
6. Kesimpulan dan saran	Pengon dimilikinya Kesepakatan / Persetujuan dari Pihak: STAI Riyadatul Jannah dan STAI Cirebon, maka data "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI; Studi PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten" Menjadi Valid, Kredibel, dan dapat di percaya secara ilmiah.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Pelaksanaan Validasi / Membercheck data ke LINGGA, STAI. Putra Galuh, STAI MH Al Azhar dan STAINU.

Mengetahui / Menyetujui:  
Ketua Tim PenelitianDr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP: 1961042119850210001

KAGOSAN

• Sila koden yg tersedia tidak cukup untuk memastikan pasti identitas beritanya;  
• Kita harus sempre lakukan validasi informasi, pada halaman beritanya.

Bandung, 28 Juli 2018.  
Anggota peneliti,Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP: 196209201991031001

Catatan Monev:

a.n. Ketua LP2M,

Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan.

Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP: 1971082719980310007





## LOG BOOK

**KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI**  
 (Studi pada PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-13306.05/V.2-PP.06/041/2018, Tgl 21 Maret 2018, Reg. 6 bulan tercapai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar ..... dari ....

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Senin /30 Juli 2018
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Validasi /Memberehcek data dengan narasumber UNISA Kuningan, Nasihudin ST, 9ppd 7/7/2018 Staf: MU, Al Azhar Banjar, Rusdiana ST, 9ppd. 7-7-18
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (hasil program)	Untuk Mengetahui Seberapa jauh data yg diperoleh sesuai dengan apa yg di berikan oleh UNISA dan Staf: Miftada Al Azhar Melalui Dok /peta - Penafiran dan Interpretasi Kebijakan penerapan Skp - pengorganisasian penerapan kebijakan Skpi. - Strategi Penerapan Kebijakan SKPI. - kendala dan solusi dim implementasi kebijakan SKPI.
4. Catatan kemajuan (hasil yang diperoleh)	Dimilikinya Kesepakatan /persetujuan dari pihak UNISA dan Staf: Miftada Al Azhar, untuk kepentingan pengajaran dalam taporan penelitian " kesiapan PTKIS dan Mendukung Implementasi Kebijakan Skpi studi pada PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten yang Valid, kredibel dan Akuntabel.
5. Kendala	- Linear.
6. Kesimpulan dan saran	Dengan Dimilikinya Kesepakatan /persetujuan dari Pihak: UNISA dan Staf: Miftada Al Azhar, maka data " kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Skpi; studi PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten " menjadi Valid, kredibel dan dapat di percaya secara ilmiah.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Penyusunan Validasi /Memberehcek data ke Staf: Purka Cahya, dan Staf: SUKRI TASIKMALAYA.

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Penelitian,Or. H. A. Rusdiana, MM  
NIP. 1963042119803201002


## Catatan:

- Jika tahun yg tertera tidak sesuai harap dicantumkan pada halaman berikutnya.
- Jika hasil survey tidak lengkap akan dikirimkan pada halaman berikutnya.

Bandung, 30 Juli 2018.  
Anggota peneliti,Ors. Nasihudin, MPd  
NIP. 196208201991031001

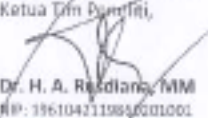
## Catatan Monev:

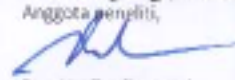
a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan.Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007

  
**LOG BOOK**  
**KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung IMPLIMENTASI KEBIJAKAN SKPI**  
 (Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)  
 SPK: No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018. Tgl 21 Maret 2018. Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018



Lembar ... dari ...

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Selasa, 31 Juli 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Validasi / Membedah data dengan narasumber STAI Putra Garut Ciamis, Nasihudin ST, SPPD. 7/7/18. STAIU Tasikmalaya. Rusdiana ST dan SPPD. 7/7/2018
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (Isi/isi program)	Untuk Mengetahui Seberapa jauh data yg di peroleh sesuai dengan apa yg di berikan oleh STAI Putra Garut dan STAIU Tasikmalaya, meliputi Dok/dokta. - Penjelasan atau Interpretasi Kebijakan penerapan SKPI - Pengorganisasian penerapan Kebijakan SKPI; - Strategi penerapan Kebijakan SKPI; - kendala dan solusi dim implementasi Kebijakan SKPI
4. Catatan kemajuan: (Hal yang diperoleh)	Dimilikinya Kesepakatan / Persetujuan dari pihak STAI putra Garut, dan STAIU TASIK, untuk kepentingan Pengajian data laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI; Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten yg valid kredibel dan Akuntabel.
5. Kendala	- Linear.
6. Kesimpulan dan saran	Dengan Dimilikinya Kesepakatan / persetujuan dari pihak; STAI putra Garut Ciamis; dan STAIU. Tasik maka data "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung implementasi Kebijakan SKPI; Studi PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten" Menjadi Valid, Kredibel dan dapat di Percaya Secara ilmiah.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Pelaksanaan; Validasi / Membedah data ke IATe TASIK, STAI Purbalingga Garut dan STAI Al Falah Cirebon

Mengetahui/Menyetujui:  
 Ketua Tim Peneliti,  
  
**Dr. H. A. Rusdiana, MIM**  
 NIP: 196104211985031001

Bandung, 31. Juli 2018.  
 Anggota peneliti,  
  
**Drs. Nasihudin, MPd.**  
 NIP: 196209031991031001

Catatan:  
 - Bila kolom yg tersedia tidak cukup harap ditambahkan pada halaman berikutnya;  
 - Bila kolom terisi tidak lengkap, harap dilengkapi pada halaman berikutnya.

Catatan Monev:  
  
**a.n. Ketua LP2M,**  
**Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,**  
  
**Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag**  
 NIP: 1971082719980310007

**LOG BOOK**

**KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI**  
 (Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)  
 BPK No.H-11A/Cin.D/S.V.3/PP.08.9005/2018. Tgl 23 Maret 2018. Kap. 5 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lampiran ... dari ...

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Jum'at, 3 Agustus 2018.
2. Nama Regionan/Sub Regionan	Ungdas/ Membreheek data di Warasumber: IAIE Tasikmalaya, Nasihudin, St. SPP 7/7/2018; STAI AL-Falah Ciemengka Rusdiana, St. SPP. 7/7-18
3. Tujuan Register/Sub Register (detail & ciptaan)	Untuk Mengetahu: Seberapa jauh data yg diperoleh sesuai dengan apa yg di berikan oleh IAIE Tasik dan STAI AL-Falah. Dok/ data; - Penafsiran atau Interpretasi kebijakan penerapan SKPI - Pengorganisasian penerapan kebijakan SKPI. - Strategi penerapan kebijakan SKPI. - Kendala dan Sumsi dalam implementasi kebijakan SKPI.
4. Catatan kesungguhan: (hasil yang diharapkan)	Dimilikinya kesepakatan/persetujuan dari pihak: IAIE Tasik dan STAI AL-Falah, Untuk kepentingan pengajuan data laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten yang valid, kredibel dan akurat
5. Kendala	- linear.
6. Kesimpulan dari survey	Dengan Dimilikinya Kesepakatan/persetujuan dari pihak: IAIE Tasik dan STAI AL-Falah, Maka Data "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten" Menjadi Valid, Kredibel dan dapat di percaya secara ilmiah.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Pelaksanaan Ungdas/ Membreheek data ke STAI Situwangi Garut, dan STAI Situwangi Bandung

Mengetahui/ Menyetujui:  
 Ketua Tim Peneliti,  
  
**Dr. H. A. Rusdiana, MM**  
 NIP: 1961042119460201001


Bandung, 3 Agustus 2018.  
 Anggota peneliti,  
  
**Dr. Nasihudin, MPd,**  
 NIP: 196209301991031811

Catatan Money: a.n. Ketua LP2M,  
 Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,  
  
**Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag**  
 NIP: 1971082719980310007

Catatan:
 

- Bila belum yg tertera, tidak perlu diisi
- Bila sudah tertera, terisi dan ditandatangani
- Bila sudah tertera, terisi dan ditandatangani pada nomor beres




  
**LOG BOOK**

**KESIAPAN PTKIS DALAM MENDEKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI**  
 (Studi pada PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten)  
 SPK: No.B-117A/16.05.V.2/PP.00.003/2018, Tgl.21 Maret 2018, Reg. 5 bulan sejak Tgl. 20 Agustus 2018

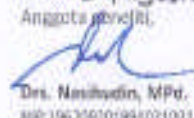
Lembar ... dari ...

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Sabtu / 4 Agustus 2018
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Validasi / Menebahi data dengan narasumber - STAI Siuwangi Garut, Nasihudin, ST, SPPD, 7-7-18 - STAI Siuwangi Cimahi, Rusdiana, ST, SPPD, 7-7-18
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	untuk mengetahui seberapa jauh data yg di peroleh sesuai dengan apa yg di berikan oleh STAI Siuwangi Garut, dan STAI Siuwangi Cimahi dok/ data; - Penafsiran atau Interpretasi Kebijakan penerapan SKPI. - Pengorganisasian penerapan kebijakan SKPI. - Strategi Penerapan Kebijakan SKPI. - Mendasar dan Subsidi dan implementasi Kebijakan SKPI
4. Catatan kerjakan (hasil yang diperoleh)	Dimilikinya; kesepakatan/persetujuan dari pihak; STAI Siuwangi Garut dan STAI Siuwangi Cimahi untuk kepentingan pengajian data laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung implementasi kebijakan SKPI; Studi pada PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten yang Valid, Kredibel dan Akuntabel.
5. Keseluruhan	- Lanjut .
6. Kesimpulan dan saran	Dengan Dimilikinya kesepakatan / persetujuan dari pihak; STAI Siuwangi Garut dan STAI Siuwangi Cimahi maka data "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung implementasi kebijakan SKPI; Studi PTKIS Kopertis Wilayah II Jawa Barat dan Banten" menjadi Valid, Kredibel, dan dapat di percaya secara ilmiah.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Edihng data hasil Validasi / Menebahi.

Mengingat/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,

  
 Dr. H. A. Rusdiana, MM  
 NIP. 1961100211980021001

Bandung, 4 Agustus 2018.  
 Anggota Peneliti,


  
 Drs. Nasihudin, MPd,  
 NIP. 1963060201991031001


Catatan:

- Edih data yg terdapat data hasil validasi
- Akuntabel dan kredibel secara ilmiah
- Edih hasil kerja pengabdian masyarakat, baik secara langsung

Catatan Monev:

a.n. Ketua LP2M,  
 Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,

  
 Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
 NIP. 1971082719980310007

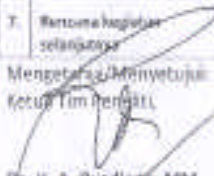
  
**LOG BOOK**

**KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung IMPLEMENTASI Kebijakan SKPI**  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)  
SPK. No. 3-113/Un.15/V.2/PP.00-935/2018. Tgl 21 Maret 2018. Kap. 6 bulan sampai Tgl. 31 Agustus 2018

Lembar ... dari ...


1. Tanggal/Bulan/Tahun	Senin / 6 Agustus 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Editing data hasil validasi/Membereheek dengan PTKIS Sumber (Ke-1)
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (visual program)	untuk menjadikan data penelitian yg valid, kredibel dan dapat di percaya Seacara ilmiah, meliputi data; - Penayiran atau interpretasi kebijakan penerapan skpi. - Pengorganisasian penerapan kebijakan skpi. - Strategi penerapan kebijakan skpi. - Kendala, dan solusi dalam implementasi kebijakan skpi
4. Catatan kemajuan: (hasil yang diraih)	Dinilikinya data penelitian yang valid, kredibel dan dapat di percaya Seacara ilmiah Untuk kepentingan pengajian data laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung implementasi Kebijakan SKPI; Studi pd PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten.
5. Kendala	- Lancar
6. Rekomendasi dan saran	Dengan dinilikinya data Penelitian yg valid, kredibel dan dapat di percaya Seacara ilmiah, diharapkan dapat menghasilkan laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung implementasi Kebijakan SKPI; Studi PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten " yang valid, kredibel dan akuntabel.
7. Bertindak sebagai selanjutnya	Editing data hasil validasi/Membereheek dengan PTKIS Sumber; Lanjut (Ke.2)

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti

  
Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP. 1961012119850201001


Catatan:  
- Hal-hal yg tertera pada lembar ini akan dikembalikan pada instansi asal.  
- Dikembalikan kepada instansi asal.


Bandung, 6 Agustus 2018.  
Anggota peneliti,

  
Drs. Nashedin, MPd.  
NIP. 196209031981041001

Catatan Monev:

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,

  
Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007

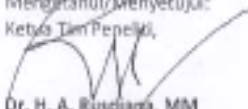
  
**LOG BOOK**

**KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI**  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)  
SPK: No.B-113/U/05/V.2/PP.00.9/03/2018, Tgl 21 Maret 2018, Kap. 6 halaman sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar ... dari ...


1.	Tanggal/Bulan/Tahun	Selasa, 7 Agustus 2018.
2.	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Lanjutan; Editing dari hasil validasi/membereheek dengan PTKIS Sumber (ke 2).
3.	Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	untuk menjadikan data penelitian yg valid, kredibel dan dapat di percaya secara ilmiah, meliputi data; - Penafsiran atau interpretasi kebijakan penerapan skpi - Pengorganisasian penerapan kebijakan skpi - Strategi penerapan kebijakan skpi. - Monda dan soussi dalam implementasi kebijakan skpi
4.	Catatan kemaajaur: (hasil yang diperoleh)	Dimilikinya data penelitian yang valid, kredibel dan dapat di percaya secara ilmiah, untuk kepentingan penyajian data laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung implementasi kebijakan skpi" studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten
5.	Kendala	- Linear.
6.	Kesimpulan dan saran	Dengan dimilikinya data penelitian yg valid, kredibel dan dapat di percaya secara ilmiah, di harapkan dapat menghasilkan laporan penelitian Kesiapan PTKIS dalam Mendukung implementasi kebijakan skpi" studi PTKIS Kopertais wilayah II Jawa Barat dan Banten "yang valid, kredibel dan Akuntabel.
7.	Rencana kegiatan selanjutnya	Editing data hasil validasi/membereheek dengan PTKIS Sumber: Lanjutkan (ke 2).

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Peneliti,


  
Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP: 1961042119860201001

Catatan:  
- Bila kolom yg tersedia tidak cukup harap ditambahkan pada halaman berikutnya;  
- Bila hasil berupa narasi/gambar ditorekkan, pada halaman belakang

Bandung, 7 Agustus 2018.  
Anggota peneliti,

  
Drs. Nasihudin, MPd.  
NIP: 196209201991073001

Catatan Monev: a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,

  
Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP: 1971082719980310007





**KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI**  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)  
SPK: No. B-113/Us/95-V/2/PP.00/B/03/2018, Tgl 21 Maret 2018, Reg. 4 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lampiran 1, KPI 1

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Rabu 8 Agustus 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Lanjutan : Editing data hasil Validasi / Memberikan hasil dengan PTKIS Sumber (Ke 3)
3. Tujuan kegiatan/Sub Kegiatan (jurnal/progres)	Untuk menjadikan data penelitian yg valid, kredibel dan dapat di percaya secara ilmiah meliputi: Data : - Penafsiran atau interpretasi Kebijakan Penerapan SKPI. - Pengorganisasian Penerapan Kebijakan SKPI. - Strategi Penerapan Kebijakan SKPI. - Kendala dan Solusi dalam implementasi Kebijakan SKPI.
4. Catatan sementara (hasil yang diharapkan)	Dimilikinya data penelitian yang valid, kredibel dan dapat di percaya secara ilmiah, untuk kepentingan penyajian data laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI : Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten"
5. Kerangka	- Lanjut.
6. Kesimpulannya dan saran	Dengan dimilikinya data penelitian yang valid, kredibel dan dapat di percaya secara ilmiah, diharapkan dapat menghasilkan Laporan Penelitian: Kesiapan PTKIS dalam Mendukung imple- mentasi Kebijakan SKPI : Studi PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten "yang valid kredibel dan akuntabel.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Finalisasi Laporan Penelitian dan persiapan Rapat Evaluasi akhir dg Pakar dan Sejabat

Mengapa?/Monyet?/jajal  
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP-1961042119890201001

Catatan:

- Sila, kosa-kata yg tersedia telah di foto hingga diarsipkan pada folder di komputer.
- Sila hasil kegiatan dilaksanakan dan diupload pada folder di komputer.

Bandung, 8 Agustus 2018.  
Anggota Peneliti,

Dr. Niswahudin, MPd.  
NIP-19620901981001001

Catatan Manev:

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP-1971082719980310007



## LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung IMPLEMENTASI Kebijakan SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-117/1a.05/V.2/PP.00.9/03/2018, Tgl 21 Maret 2018, Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar ... dari ...

1.	Tanggal/Bulan/Tahun	kamis 9 Agustus 2018.
2.	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Finalisasi Laporan Penelitian Persiapan Rapat Evaluasi akhir dengan pakar dan sejawat.
3.	Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	1. Untuk Menjadikan Laporan Penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI; Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten : Sesuai dengan Tuntunan Ilmiah dan Kontrak penelitian. 2. Siangnya undangan, bahan dan biaya untuk penyediaan penyelenggaraan rapat evaluasi akhir.
4.	Catatan kemajuan: (hasil yang diperoleh)	3. Dimilikinya Laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten Sesuai dengan tuntunan ilmiah dan Kontrak penelitian; 4. Bampainya /ekspansi kesiapan rapat (pakar dan sejawat) bahan kelengkapan rapat, daftar hadir, dan nominasi.
5.	Kondisi	- linear.
6.	Kesimpulan dan saran	Dengan Dimilikinya Laporan penelitian sesuai dengan tuntunan ilmiah dan Kontrak penelitian, dan kelengkapan rapat evaluasi, diharapkan dapat menunjang kelancaran pelaporan hasil penelitian yang valid, kredibel dan akuntabel.
7.	Rencana kegiatan selanjutnya	Lanjutan; Finalisasi Laporan Penelitian Persiapan Rapat Evaluasi akhir dengan pakar dan sejawat.

Mendetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim PTKIS,

Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP. 1961042119860201001

Catatan:

- Bila kolom yg tersedia tidak cukup harap ditambahkan pada halaman berikutnya.
- Bila hasil berupa tabel/gambar ditampikan, pada halaman belakang.

Bandung, 9 Agustus, 2018.

Anggota peneliti,

Dr. Nasihudin, MPd.

NIP. 196209201991031001

Catatan Monev:

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,

Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag

NIP. 1971082719980310007





## LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBLIKATAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018, Tgl 21 Maret 2018, Reg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar ... dari ...

1.	Tanggal/Bulan/Tahun	Jum'at, 10 Agustus 2018.
2.	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	lanjutan ; Finalisasi laporan penelitian persiapan Rapat Evaluasi akhir dengan Pakar dan Sejawat.
3.	Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	1. Untuk menjadikan laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI : Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten, Sesuai dengan Tuntutan Ilmiah dan Kontrak penelitian. 2. Siapnya undangan, bahan dan biaya untuk penyelenggaraan rapat evaluasi akhir.
4.	Catatan/kegiatan (hasil yang diperoleh)	1. Dimilikinya laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI studi pada PTKIS Kopertais wilayah II Jawa Barat dan Banten, Sesuai dengan tuntutan ilmiah dan Kontrak penelitian. 2. Sampainya / ekspedisi Kesiapan rapat (Pakar dan Sejawat) bahan kelengkapan rapat, dan hadir dan Seminas.
5.	Keefektifan	- linear.
6.	Resimpulan dan saran	Dengan dimilikinya laporan penelitian Sesuai dengan tuntutan ilmiah, dan Kontrak Penelitian, dan kelengkapan rapat evaluasi, diharapkan dapat menunjang kelancaran pelaporan hasil penelitian yang valid, kredibel dan akuntabel.
7.	Rencana kegiatan selanjutnya	Pelaksanaan: Rapat Evaluasi akhir dengan Pakar dan Sejawat.

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Tim Rencetti,

Dr. H. A. Nasihudin, MM

NIP. 1962042119880310001

Catatan:

- Bila kelengkapan terdapat maka tidak harus ditandatangani pada halaman belakangnya.
- Bila hasil temuan tabel/lampiran ditandatangani pada halaman belakang.

Bandung, 10 Agustus 2018.

Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.


NIP. 1962092019910411001

a.n. Ketua LP2M,

Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,

Catatan Monev:


Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007

  
**LOG BOOK**  
**KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung IMPLEMENTASI Kebijakan SKPI**  
 (Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)  
 NPK: No. B-113/Un/05/V.2/P/00/983/2018. Tgl. 21 Maret 2018. Kap. 6 bulan sampai Tgl. 31 Agustus 2018

Lembar ... dari ...

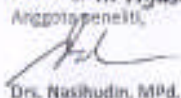
1.	Tanggal/Bulan/Tahun	Sabtu, 11 Agustus 2018.
2.	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Rapat. Evaluasi akhir dengan Pakar dan Sejawat
3.	Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Untuk Memastikan Laporan Penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten Telah Sesuai dengan Ketentuan ilmiah dan tuntutan Kontrak Penelitian.
4.	Capaian kemajuan (hasil yang diperoleh)	Dimilikinya Rekomendasi/Kecapahaman pakar dan teman sejawat yg memastikan bahwa laporan penelitian kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten, di anggap masih valid, kredibel dan dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah maupun administratif (lihat berita A rapat dan rek spi terlampir.
5.	Hereditas	Lancar.
6.	Kesimpulan dan saran	Dengan Dimilikinya Rekomendasi/Kecapahaman pakar dan teman sejawat, yg memastikan bahwa laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi pd PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten yg telah dianggap valid, kredibel dan dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah maupun administratif. Trah di harapkan dapat memperhatikan peng- rahan dokumen hasil penelitian ke PPM.
7.	Rencana kegiatan selanjutnya	Editing / Seling Laporan Akhir Penelitian.

Mengorotasi/Menyetujui:  
Ketua Tim Penelitian,

  
 Dr. H. A. Rusdiana, MAg  
 NIP. 196104219850010071


Catatan:  
 - Sila kirim yg sudah tidak akan hasil ditranskrip pada halaman berikutnya.  
 - Sila hasil hasil tabung/panor: ditranskrip pada halaman berikutnya.

Bandung, 11 Agustus 2018.  
 Anggota peneliti,

  
 Dr. Nasihudin, MPd.  
 NIP. 196209201981031001

Catatan Money:

a.n. Ketua LP2M,  
 Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,

  
 Dr. Wahyudin Darmalaksana, MAg  
 NIP. 1971082719980310007



## LOG BOOK

**KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI**  
 (Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No B-113/U n (5/V 2/PP.00.903/2013, Tgl 21 Maret 2018, Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar .... dari ....

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Semin 13 Agustus 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Editing / Seting Laporan Akhir Penelitian.
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Menjadikan laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten Dalam Bentuk: 1. Format laporan penelitian A-4; 2. Format laporan penelitian B-5 (dummy buku) 3. Format Jurnal. 4. Laporan SPJ dan Log Book.
4. Catatan kemajuan: (hasil yang diperoleh)	Dimilikinya laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten Dalam bentuk: 1. Format laporan penelitian A-4. 2. Format laporan penelitian B-5 (dummy buku) 3. Format Jurnal. 4. Laporan SPJ dan Log Book.
5. Kendala	- Lancar.
6. Kesimpulan dan saran	Dengan dimilikinya Dimilikinya laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten. Dlm bentuk; Format laporan penelitian A-4 Format laporan penelitian B-5 (dummy buku) Format jurnal. laporan SPJ dan Log Book diharapkan dapat memperjelas penyertaan dokumen hasil penelitian ke LPPM.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Penggunaan Laporan.

Mengetahui/Menyetujui:  
Kepala Tim Riset,Dr. H. A. Rusliqo, MM  
NIP. 1961042119860201001

Catatan:

- Sila cetak yg tertera tidak cukup harus ditambahkan pada halaman berikutnya.
- Sila hasil berupa tabel/piktor ditingkatkan, pada halaman berikutnya.

Bandung, 13 Agustus 2018.  
Anggota peneliti,Drs. Nashudin, MPd.  
NIP. 196209201991031001

Catatan Monor:

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan.Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007



## LOG BOOK

**KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI**  
 (Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.D-1121.003/V.2/PF.00903/2018, Tgl 21 Maret 2018, Kep. 6 bulan sampai Tgl 20 Agustus 2018

Lembar ... dari ...

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Senasa. 14 Agustus. 2018.
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Pengadaan laporan.
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai instrument)	Tergandaknya laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten. Dalam bentuk A-4-B-5 spj dan log book. Untuk Kepentingan Laporan Dokumen penelitian ke LPPM.
4. Catatan kemajuan (hasil yang diperoleh)	Dimilikinya laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertais wilayah II Jawa Barat dan Banten. Dalam bentuk : A-4-B eks: B-5 B eks. Spj dan log Book masing-masing 2 eks.
5. Kendala	- Lanar.
6. Kesimpulan dan saran	Dimilikinya Laporan Penelitian "Kesiapan PTKIS dlm Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertais wilayah II Jawa Barat dan Banten. Dalam bentuk : A-4-5 eks: B-5.5. eks: Spj dan log Book masing-masing 2 eks; Di harapkan dapat mempersiapkan Penyerahan dokumen hasil penelitian ke LPPM.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Lanjutan: Pengadaan laporan.

 Mengetahui/Menyetujui:  
 Ketua Tim Peneliti,

 Dr. H. A. Rusdiana, MM  
 NIP. 19610431980030001

## Catatan:

- Sila tidak ada tanda-tanda bahwa ditandatangani oleh mahasiswa/i
- Sila tidak terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa telah ditandatangani

 Bandung, Senasa 14 Agustus 2018  
 Anggota peneliti,

 Drs. Nasihudin, MPd.  
 NIP. 196308231991041001

Catatan Money:

 a.n. Ketua LP2M,  
 Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,

 Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
 NIP. 1971082719980310007





## LOG BOOK

KESIAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)

SPK: No.B-113/Un.05/V.2/PP.06.9/05/2018, Tgl 21 Maret 2018, Keg. 6 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lembar ... dari ...

1.	Tanggal/Bulan/Tahun	Rabu 15 Agustus 2018.
2.	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	lanjutan : Pengadaan Laporan .
3.	Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Tergandakannya laporan penelitian : kesiapan ptkis dalam mendukung implementasi kebijakan skpi; Studi pada PTKIS Kopertais wilayah II Jawa Barat dan Banten Dalam bentuk : A-4-B-5 Spj dan log Book Untuk Kepentingan Laporan Dokumen Penelitian Ke Lppm.
4.	Catatan kemajuan (hasil yang diperoleh)	Dimilikinya laporan penelitian * kesiapan PTKIS dalam mendukung implementasi kebijakan SKPI; Studi pada PTKIS Kopertais wilayah II Jawa Barat dan Banten Dalam bentuk : A-4-5, eks; B-5;5 eks; Spj dan log Book masing-masing 2 eks;
5.	Kendala	- lancar .
6.	Kesimpulan dan saran	Dengan dimilikinya laporan penelitian * kesiapan PTKIS dalam mendukung implementasi kebijakan SKPI; Studi pada PTKIS Kopertais wilayah II Jawa Barat dan Banten, Dalam bentuk : A-4-5 eks; B-5-5; Spj dan log Book masing 2 eks; Diharapkan dapat memperlancar penyerahan dokumen hasil penelitian ke Lppm.
7.	Rencana kegiatan selanjutnya	Penyiapan usulan / Pendaftaran Hak .

Mengotahui/Menyetujui:

Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rusdiana, MM

NIP. 1963042719800201001

Catatan:

- Bila dalam 10 terdapat tidak cukup tempat  
diperbolehkan pada halaman berikutnya,  
Bila hasil berupa tabel/gambar dan/atau lain,  
pada halaman belakang.

Bandung, 15 Agustus 2018 .

Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, MPd.

NIP.196309251991031001


Catatan Money:

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag

NIP.1971082719980310007

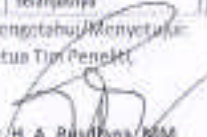
  
**LOG BOOK**

**KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung IMPLEMENTASI Kebijakan SKPI**  
(Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)  
SPK: No.B-113/Un.05/V.1-PP.03.003/2018, Tgl 23 Maret 2018, Keg. 4 bulan sampai Tgl. 20 Agustus 2018

Lanjutan ... dari ...

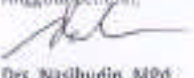
1. Tanggal/Bulan/Tahun	Rabu, 16 Agustus 2018
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Penyusunan usulan / pada forum HAKI.
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (sesuai program)	Terdapatnya laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
4. Catatan kemajuan: (hasil peng observasi)	Dimilikinya Bukti Terdaftar; laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten, Dari Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (resi Terlampir) Untuk Mepentingkan Laporan Dokumen Penelitian ke LPPM.
5. Kendala	- Lantar
6. Kesulitan dan saran	Dengan dimilikinya Bukti Terdaftar; laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI: Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten. Dari Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (resi Terlampir) di harapkan dapat mem Pertancar dokumen hasil penelitian ke LPPM.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	Penyusunan/pengiriman dokumen laporan penelitian ke LPPM.

Mengotahi Menyotahi  
Ketua Tim Peneliti,

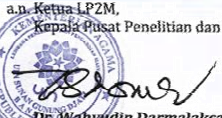
  
Dr. H. A. Rusdiana, MM  
NIP. 196111171986001001

Catatan:  
1. BUKU ini akan yg terindeks (DIT) dalam 10 hari  
2. Maksimal 1000 halaman  
3. Ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar  
4. Ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar

Bandung, 16 Agustus 2018,  
Anggota peneliti,

  
Des. Nasihudin, MPd.  
NIP. 196209101981001001

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,

  
Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP. 1971082719980310007

**Catatan Money:**



LOG BOOK

KESLAPAN PTKIS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBLIKRIAN SKPI  
(Studi pada PTKIS Kepertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten)  
SPK No.B-113/UJ.05/V.2/PP.00.003/2018, Tgl 27 Maret 2018, Reg. 6 bulan sampai Tgl 20 Agustus 2018

L09037... 0311...

1. Tanggal/Bulan/Tahun	Senin, 20 Agustus 2018
2. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Pengerahan Dokumen laporan dan SPJ Penelitian.
3. Tujuan Kegiatan/Sub Kegiatan (Aktual program)	Sampai dan diterimanya laporan penelitian "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI" Studi pada PTKIS Kepertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten. Dalam bentuk : A-4-B-5 SPJ dan log Book, Draft jurnal dan buku daftar HAKI oleh Admin LPPM.
4. Catatan kemajuan: (Hal yang dipikirkan)	Dimulainya Buku penerimaan dari Admin Lppm, yang memisahkan : laporan penelitian "Laporan penelitian "Kesiapan ptkis dalam Mendukung implementasi Kebijakan SKPI ; Studi pada PTKIS Kepertais wilayah II Jawa Barat dan Banten - Dalam bentuk : A-4-B-5 SPJ dan log Book, Draft jurnal dan buku daftar HAKI telah memenuhi ketentuan yang berlaku (Buku Penerimaan Terlambat)
5. Kendala	Lahdar.
6. Kesimpulan dan saran	Dengan dimulainya ; Buku penerimaan dari Admin Lppm yang memisahkan ; laporan penelitian " Kesiapan ptkis dalam Mendukung implementasi Kebijakan SKPI ; Studi pada PTKIS Kepertais wilayah II Jawa Barat dan Banten. Dalam bentuk : A-4-B-5 SPJ dan log Book, Draft jurnal dan buku daftar HAKI, telah memenuhi ketentuan yg berlaku. maka Selesaiah Rangkaian Kegiatan Penelitian berdasarkan Surat Perjanjian No. B-03/UN-05/V.2/PP.00.003/2018 tgl. 21 Maret 2018.
7. Rencana kegiatan selanjutnya	

Monev oleh/oleh/yatuzila:

Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. A. Rosdiana, MM

NIP-1961042119980201001

Catatan:

- Bila tidak ada tanda-tanda atau bukti diarahkan agar segera beritahu.
- Bila ada tanda-tanda yang mengarah pada adanya masalah.

Bandung, 20 Agustus 2018,

Anggota peneliti,

Drs. Nasihudin, M.Pd.

NIP-196203201991031003

Catatan Monev:

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
NIP-1971082719980310007**Analisis:**

Kontrak 6 bulan x 20 Hk = 120 Hk. 100 %

Waktu digunakan peneliti = 74 Hk. 62 %

Waktu untuk Tupoksi = 46 Hk. 38 %

2. Laporan penggunaan anggaran keuangan sebesar 100%



## LAPORAN KEUANGAN

### PENELITIAN TERAPAN DAN PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI

---

#### Judul Penelitian

**KESIAPAN PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAM ISLAM  
DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI  
(Studi di PTKIS Kopertais Wilayah Ii Jawa Barat Dan Banten)**

#### Dasar Kegiatan:

SPK- No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018 Tanggal 21 Maret 2018 .

Pelaksanaan : 6 bulan

Waktu : 21 Maret - 20 Agustus 2018

#### Kelompok Peneliti

**Ketua Peneliti : Dr. H. A. Rusdianan, MM/ID 20171020150557**

**Anggota) : Drs. Nasihudin, MPd./ID 20200620108000**

**Alamat / Telp. : Jl. A.H. Nasution 105 Bandung Tlp. 022. 7800525**

#### Mengetahui:

a.n. Ketua LP2M,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



**Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag**  
NIP. 1971082719980310007

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG  
TAHUN 2018**



## Rencana Penggunaan Biaya Kegiatan Penelitian

Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi Kebijakan penerapan SKPI

Jenis Kegiatan	Vol/Frek/Satuan			Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
	Vol	Frek	Sat		
<b>A. Pra Kegiatan</b>					
ATK	1	1	PK	503,000	503,000
Foto Copy ref &ref	1	1	PK	707,500	707,500
Konsumsi NS/Peserta	12	1	OA	45,000	540,000
Honor Narasumber Rapat	3	1	JPL	500,000	1,500,000
Uang Saku Peserta Rapat	7	1	OJ	150,000	1,050,000
<b>Sub Total A</b>					<b>4,300,500</b>
<b>B. Pelaksanaan Kegiatan</b>					
<b>1. Alat Bahan</b>					
ATK	1	1	PK	800,500	800,500
Foto Copy ref &kel adm	1	1	PK	816,500	816,500
Konsumsi NS/Peserta	12	1	OA	45,000	540,000
<b>2. Biaya Perjalanan</b>					
Uang Harian	37	2	OH	430,000	31,820,000
Tiket PP	27	2	O/P	210,000	11,340,000
Penginepan	13	2	OH	120,000	3,120,000
<b>3. Jasa Profesi</b>					
Tenaga Pembantu	7	24	OH	80,000	13,440,000
Honor Narasumber	3	1	JPL	500,000	1,500,000
Transfort Peserta Rapat	1	7	OJ	150,000	1,050,000
Pengolah Data	1	1	PK	1,500,000	1,500,000
<b>Sub Total B</b>					<b>65,927,000</b>
<b>C. Pasca Pelaksanaan</b>					
<b>1. Alat Bahan</b>					
ATK	1	1	PK	515,000	515,000
Foto Copy &kel adm	1	1	PK	867,500	867,500
Konsumsi NS/Peserta	12	1	OA	45,000	540,000
Transport Lokal	2	1	PK	150,000	300,000
<b>2. Jasa Profesi</b>					
Honor Narasumber	3	1	JPL	500,000	1,500,000
Transfort Peserta	7	1	OJ	150,000	1,050,000
<b>Sub Total C</b>					<b>4,772,500</b>
<b>TOTAL BIAYA</b>					<b>75,000,000</b>

Bandung, 22 Maret 2018

Ketua Tim Peneliti,



**Dr.H.A. Busdiana, MM**

NIP. 196104211986021001

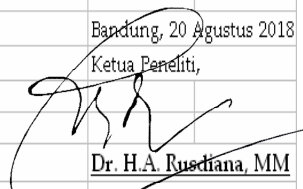
**REALISASI PENGELUARAN BIAYA PENELITIAN**  
**PENELITIAN TERAPAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI**

<b>Judul Penelitian</b>	: <i>Kesiapan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Swasta dalam mendukung Kebijakan Surat Keterangan Penganamping Ijazah (SKPI): Studi di PTKIS Wilayah II Jawa Barat dan Banten</i>
<b>Ketua Peneliti</b>	: Dr. H.A. Rusdiana, MM
<b>NIP.</b>	: 196104211986021001
<b>Pangkat/ Gol.</b>	: Lektor Kepala / IV/b
<b>Sumber Dana</b>	: BOPTN/DIPA-RM UIN SGD BANDUNG TAHUN 2018
<b>Jumlah Dana/Nilai Kontrak</b>	: Rp. 75.000.000
<b>No. Kontrak</b>	: B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018
	: Tanggal 21 Maret 2018

No.	MAK	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	PPH
		Diterima Dana Kegiatan	75,000,000			
<b>A</b>	<b>Fra Penelitian</b>			<b>4,390,500</b>	<b>70,609,500</b>	
1	521211	Belanja Bahan		1,840,500		
2	524111	Belanja Perjalanan dalam kota				
	522151	Belanja Jasa Profesi		<b>2,550,000</b>		280,500
<b>B</b>	<b>Pelaksanaan Penelitian</b>			<b>66,598,500</b>	<b>4,011,000</b>	
1	521211	Belanja Bahan		1,910,500		
	524111	Belanja Perjalanan dalam kota				
	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				
2	524114	Meeting Dalam Kota				
3	522151	Belanja Jasa Profesi		<b>17,490,000</b>		355,500
4	524111	Belanja Perjalanan dalam Negeri		<b>47,198,000</b>		
<b>C</b>	<b>Pasca Pelaksanaan Penelitian</b>			<b>4,011,000</b>	<b>-</b>	
1	521211	Belanja Bahan		1,461,000		
2	521213	Honor Output Kegiatan				
	524111	Belanja Perjalanan dalam kota				
	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				
3	524114	Meeting Dalam Kota				
4	522151	Belanja Jasa Profesi		<b>2,550,000</b>		280,500
		<b>Jumlah</b>	<b>75,000,000</b>	<b>75,000,000</b>	<b>-</b>	<b>916,500</b>

Bandung, 20 Agustus 2018

Ketua Peneliti,



**Dr. H.A. Rusdiana, MM**

NIP. 196104211986021001

**REKAPITULASI PENGELUARAN BIAYA PERSIAPAN/PRA PENELITIAN  
PENELITIAN TERAPAN DAN PENEGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI**

Judul Penelitian: Kesiapan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Swasta dalam mendukung Kelengkapan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Studi di PTKIS Wilayah II Jawa Barat dan Banten  
 Sumber Dana: BOPTN/DIPA-RM L15 SGD BANDUNG TAHUN 2018  
 Kegiatan: Persiapan Persiapan Penelitian

No.	Tanggal	Uraian Kegiatan	Volume	Jumlah (Rp.)
1.	22 Maret 2018	Pembelian ATK dari Toko Buku dan Alat Tulis "SURJAYA" Cijangberang-Bandung	1 Paket	503.000
2.	22 Maret 2018	Penggunaan Bahan rujukan dan Pembelian Desain dan IPD dari Foto Copy "LATANSA" Cijadung-Bandung	1 Paket	707.500
Jumlah				1.210.500

Terbilang: *Satu Juta Duaratus Sepuluh ribu Lima ratus Rupiah*

Bandung, 31 Maret 2018

Ketua Tim



**Dr. H.A. Rusdiana, MM**

NIP: 196104211986021001

No. \_\_\_\_\_  
 Telah terima dari TIM PENELITI UIN SGD BANDUNG  
 Uang sejumlah Lima ratus tiga ribu rupiah  
 Untuk pembayaran Alat tulis kantor penelitian persiapan pimpinan PTKIS  
dalam mendukung kegiatan SKPI (PTKIS KOPWIT II  
Jabar Banten).

No.01

Rp. 503.000



**TOKO BUKU**  
**\* NUR JAYA \***  
 Ps. UJUNGBERUNG LANTAI ATAS  
 Bandung 22 Maret 2018  
 Pin Pent C  
 UIN SGD

NOTA NO. 13 B 9 -

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
5 Rim	Kertas HVS 70gram A4	37.500	75.000
1 Rim	Kertas HVS 70 gram F4	38.000	38.000
3 Tube	Papel Tinta Printer	155.000	135.000
2 pak	Ballpoint	39.000	68.000
2 Pkt	Fluoridax	59.000	198.000
1 pak	Map Folio	23.000	23.000

Jumlah Rp. 503.000

Tanda Terima



No. \_\_\_\_\_  
 Telah terima dari Tim Peneliti UIN SGD Bandung  
 Uang sejumlah Tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah  
 Untuk pembayaran Fotocopy bahan rujukan penelitian persiapan  
Pimpinan PTKIS dalam mendukung kegiatan SKPI (PTKIS  
KOPWIT II Jabar Banten).

No.02

Rp. 707.500



**LATANSA COPY CENTER**  
 Menerima : Photo copy, Penjiplakan, laminating  
 Jual Alat-alat Tulis dll  
 Jl. A.H. Nasution No 475 Bandung  
 Hp: 081220908089

Kepada : Tim Peneliti Tgl. 22-3-2018

Banyak	Nams Barang	Harga	Jumlah
283hl	Fotocopy	250	707.500

Barang-barang yang sudah dibeli  
 tidak bisa dikembalikan

Jumlah Rp. 707.500  
 Uang Muka  
 Sisa

Tanda Terima \_\_\_\_\_ Hormat Kami



**REKAPITULASI PENGELUARAN BIAYA PERSIAPAN/PRA PENELITIAN  
PENELITIAN TERAPAN DAN PENEGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI**

Judul Penelitian: Kesiapan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Swasta dalam mendukung Kebijakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Studi di PTKIS Wilayah II Jawa Barat dan Banten  
 Sumber Dana: BOPTN/DRPA-RM UIN SGD BANDUNG TAHUN 2018  
 Kegiatan: Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

No.	Tanggal	Uraian Kegiatan	Volume	Jumlah (Rp.)
1	11 April 2018	Pembelian ATK dari Toko Buku dan Alat Tulis "SURIJAYA" Ujungberung-Bandung	1 Pkt	975,500
2	11 April 2018	Penggunaan Bahan Pembahasan Desain dan IPD dari Foto Copy "LATANSA" Cipadung-Bandung	1 Pkt	305,000
3	12 April 2018	Pembelian Konsumsi Rapat Pembahasan Desain dan IPD Penelitian dari Catering "IRESSA" Cibiru-Bandung	1 Pkt	630,000
4	12 April 2018	Honorarium Pembahas Desain dan IPD Penelitian	3 Org	1,500,000
5	12 April 2018	Uang Saku Peserta Rapat Pembahas Desain dan IPD Penelitian	7 Or/i	1,050,000
6	19 April 2018	Biaya Perjalanan Dinas bulan April 2 orang: An.Drs Sasihudin, M.Pd., dan Dr.H.A. Rusdiana, MM. Kep. Observasi Lokasi	13 Or/i	8,785,000
			<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 13.245,500</b>

Terbilang: *Tiga belas juta duaratus Empat puluh lima ribu Limaratus Rupiah*

Bandung, 30 April 2018

Kes. Tim

**Dr. H.A. Rusdiana, MM**

NIP: 196104211986021001

No. \_\_\_\_\_  
 Telah terima dari Tim Peneliti UIN SGD BANDUNG  
 Uang sejumlah Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah  
 Untuk pembayaran Alat Tulis Kantor Penelitian Terapan pimpinan PTKIS  
dalam mendukung kebijakan SKPI (PTKIS KAPWIL II  
Jabar Banten)  
 Bandung, 11 April 2018  
 Rp. 975.000

METERAI TERAI  
 6000  
 NUR JAYA  
 PS. UJUNGBERUNG LANTAI ATAS 5

**TOKO BUKU**  
**\* NUR JAYA \***  
 PS. UJUNGBERUNG LANTAI ATAS 5

Nota No. \_\_\_\_\_  
 Band. 11 APRIL 2018  
 Tim Peneliti  
 UIN SGD  
 Bandung

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
4 Rim	HVS 70 gram A4	37.500	150.000
3 Rim	HVS 70 gram F4	38.000	114.000
3 Tube	Papir tinta Printer Laser	135.000	405.000
5 pak	Ballpoint	34.000	170.000
1 Per	Flashtline	99.000	99.000
1 Per	Tipe-x	6.500	6.500
2 pak	Map Sngl	15.500	31.000

Tanda Terima  
 Rp. 975.000  
 \* NUR JAYA \*  
 PS. UJUNGBERUNG LANTAI ATAS 5

No. \_\_\_\_\_  
 Telah terima dari Tim Penelitian UIN SGD Bandung  
 Uang sejumlah Tiga ratus Lima ribu rupiah  
 Untuk pembayaran Fotocopy Bahan Mekan Penelitian Terapan pimpinan  
PTKIS dalam mendukung kebijakan SKPI (PTKIS KAPWIL II  
Jabar Banten)  
 Bandung, 11 April 2018  
 Rp. 305.000

METERAI TERAI  
 6000  
 LATANSA  
 PS. UJUNGBERUNG LANTAI ATAS 5

**LATANSA COPY CENTER**  
 Menerima : Photo copy, Penjilidan, laminating  
 Jual Alat-alat Tulis dll  
 Jl. A.H. Nasution No 475 Bandung  
 Hp: 081220908089

Kepada : Tim Peneliti Tgl. 11-04-2018

Banyak	Nama Barang	Harga	Jumlah
500 ltr	Fc perforasi punch	250	125.000
700 ltr	Fc (instan) punch	200	140.000
700 ltr	Fc lap rebat 1-11/11	200	140.000

Berang-barang yang sudah dibeli  
 tidak bisa dikembalikan  
 Tanda Terima  
 Jumlah Rp. 305.000  
 Uang Muka  
 Sisa  
 Hormat Kami





**DAFTAR PENGELUARAN BIAYA  
UANG SAKU PEMBAHASAN DESAIN DAN IPD PENELITIAN**

**No.05**

Judul Penelitian : Kesiapan Pendidikan Tinggi Keguruan Islam Sivitas dalam mendukung Kebijakan Surat Keterangan Peradampung Ijazah (SKPI) Studi di PIRAS Wilayah II Jawa Barat dan Banten"  
 Sumber Dana : DIPA-RM1 IN SGI BANDUNG TAHUN 2018  
 Program : Penelitian terapan dan pengembangan Perguruan Tinggi  
 Kegiatan : Pembahas Desain dan IPD Penelitian

No.	Nama	Volume	Jml Kotor	PPH.21	Jumlah Bersih	Tandatangan
1	Dinda Cleudi, S.H	1 hari x Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 22.500	Rp. 127.500	<i>M/ma</i>
1	Ahmad Zaen, S.Sos.I	1 hari x Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 7.500	Rp. 142.500	<i>Zaen</i>
1	Ukesh Ali Murtado, S.Pd.I	1 hari x Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 7.500	Rp. 142.500	<i>Ukesh</i>
1	Zenal Munakim	1 hari x Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 4.500	Rp. 145.500	<i>Zenal</i>
5	Gulung, Aditya Parba, SI	1 hari x Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 4.500	Rp. 145.500	<i>Gulung</i>
6	Alex, Muhammad Mustofa, S.Sos.I	1 hari x Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 4.500	Rp. 145.500	<i>Alex</i>
7	Nursaidah, S.Pd.I	1 hari x Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 4.500	Rp. 145.500	<i>Nursaidah</i>
<b>Total</b>			<b>Rp. 1.050.000</b>	<b>Rp. 55.500</b>	<b>Rp. 994.500</b>	

Bandung, 12 April 2018  
Ketua Tim Peneliti,

*(Signature)*  
**Dr. H.A. Rusdiana, MM**  
NIP. 196104211986021001

**843961793**

PT POS INDONESIA (PERSERO)  
Kantor APC, UJUNG BERANG DAIR 40299A1  
TAMBAH JEDIDAH  
Setoran Pajak (PPH 21/33%)

Tanggal : 2018-07-03 08:42:50  
No. Resi : 40299A1-01/2018/809085 Pelugas : 970329540

Tanggal Buku : 03-07-2018  
Kode Cabang Pos : 940000  
Kode Billing : 01807820179216  
Kode Billing : 000143218429000  
Kode : UJUNG BERANG BUNUNG GANTI  
Alamat : JL. AH. HASELUTION NO. 105, CIBADUNG, KOTA BANDUNG  
Nomor : 411121  
Jenis Setoran : 100  
Masa Pajak : 04042018  
No SK : 0000000000000000  
HOP :  
Jumlah Setoran : Rp. 55.500 Mata Uang : IDR

Tersilang : (Lima puluh lima Ribu lima ratus rupiah)

**KANTOR POS**  
POS INDONESIA

Lacak resi : <http://www.posindonesia.co.id>



Lamp No.4-5 (notula dan daftar hadir rapat)

**Notulensi Kegiatan Rapat**

**Persiapan : Review Desain dan penyusunan IPD Penelitian**

Kamis, 12 April 2018

Rapat dimulai jam 16.30, dipimpin oleh ketua Tim peneliti Dr.H. A. Rusdiana, MM, notulis Drs. Nasihudin, M.Pd/sebagai Anggota Peneliti. Rapat ini dihadiri dua orang pembahas yaitu Dr. H. Koko Abdul Kodir, MA; Drs. H. Yaya Suryana, M.Ag., dan DR. Ara Hidayat, MPd. Dan dihadiri pula oleh tujuh orang peserta undangan yaitu: Dindin Efendi, SHI; Ahmad Zaeni, S.Sos. I; Deden Ali Murtado, S.Pd.I; Zenal Mutakin; Gilang, Aditia P, ST; Muhammad Alek, S.Sos.I; Nursaadah, S.Pd.I. (daftar hadir terlampir).

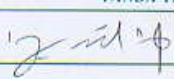
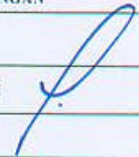

Dalam rapat ini dibahas beberapa permasalahan Persiapan pelaksanaan: Review Desain dan penyusunan IPD Penelitian, diantaranya antara lain:

1. Penentuan tanggal mulainya pengurusan izin dan survey awal ke lokasi penelitian berikut pengurusan administrasinya.
2. Penentuan dan pembagian tugas siapa yang akan berangkat ke masing-masing lokasi penelitian
3. Apa saja yang akan dijadikan instrumen penelitian dan bagaimana menyusunnya Dst.

**DAFTAR HADIR RAPAT**

Persiapan pelaksanaan: Review Desain dan penyusunan IPD Penelitian






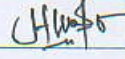



Kamis, 12 April 2018

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. H. Abdul Kodir, M. Ag.	Pembahas-1	
2	Drs. H. Yaya Suryana, M. Ag.	Pembahas-2	2 
3	Dr. Ara Hidayat, M. Pd	Pembahas-1	3 

**DAFTAR HADIR RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN DAN PENYUSUNAN INSTRUMEN PENELITIAN**

Persiapan pelaksanaan: Review Desain dan penyusunan IPD Penelitian

Kamis, 12 April 2018

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DR. H. A. Rusdiana, MM	Ketua Peneliti	1 
2	Drs. Nasihudin, M.Pd.	Anggota Peneliti	2 
3	Dindin Efendi, SHI	Peserta/Undangan	3 
4	Ahmad Zaeni, S.Sos. I	Peserta/Undangan	4 
5	Deden Ali Murtado, S.Pd.I	Peserta/Undangan	5 
6	Zenal Mutakin	Peserta/Undangan	6 
7	Gilang, Aditya Purba, ST	Peserta/Undangan	7 
8	Alex. Muhammad mastofa, S.Sos.I	Peserta/Undangan	8 
9	Nursaadah, S.Pd.I	Peserta/Undangan	9 

Bandung, 12 April 2018  
Ketua Peneliti

  
DR. H. A. Rusdiana, MM  
NIP. 196106211986021001



Lampiran No.06.1

**DAFTAR BELANJA PERJALANAN DINAS  
PENELITIAN TERAPAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI**

Judul Penelitian : Kesiapan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Swasta dalam mendukung Kebijakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Studi di PTKIS Wilayah II Jawa Barat dan Banten  
 Sumber Dana : DIPAPM UIN SGD BANDUNG TAHUN 2018  
 Kegiatan : SPPD Bulan April 2018

No	Tanggal SPPD	No. SPPD	Nama yang Berangkat	Tanggal Berangkat	Kota/Tempat yang Dituju	Jml Hari	Uang harian	Tiket	Hotel	Jumlah
1	18 April 2018	B-210/2018	Drs. Nashudin, M.Pd	21 April 2018	Pantegiang dan Serang	1	430.000	208.000	-	638.000
2	18 April 2018	B-211/2018	Dr. H.A. Rusdiana, MM	21 April 2018	Tangerang dan Depok	1	430.000	313.000	-	743.000
3	18 April 2018	B-212/2018	Drs. Nashudin, M.Pd	24 April 2018	RB-Letak dan Bogor	1	430.000	208.000	-	638.000
4	18 April 2018	B-213/2018	Dr. H.A. Rusdiana, MM	24 April 2018	Bogor dan Sukabumi	1	430.000	285.000	-	715.000
5	18 April 2018	B-214/2018	Drs. Nashudin, M.Pd	26 April 2018	Sukabumi dan Cianjur	1	430.000	228.000	-	658.000
6	18 April 2018	B-215/2018	Dr. H.A. Rusdiana, MM	26 April 2018	Bekasi dan Karawang	1	430.000	265.000	-	695.000
7	18 April 2018	B-216/2018	Drs. Nashudin, M.Pd	28 April 2018	Puncakerta dan Subang	1	430.000	218.000	-	648.000
8	18 April 2018	B-217/2018	Dr. H.A. Rusdiana, MM	28 April 2018	Inoramaya dan Cirebon	1	430.000	270.000	-	700.000
9	18 April 2018	B-218/2018	Drs. Nashudin, M.Pd	2 Mei 2018	Kunegan dan Cirebon	1	430.000	270.000	-	700.000
10	18 April 2018	B-219/2018	Dr. H.A. Rusdiana, MM	2 Mei 2018	Banjar dan Tasikmalaya	1	430.000	283.000	-	713.000
11	18 April 2018	B-220/2018	Drs. Nashudin, M.Pd	5 Mei 2018	Tasikmalaya dan Cianjur	1	430.000	283.000	-	713.000
12	18 April 2018	B-221/2018	Dr. H.A. Rusdiana, MM	8 Mei 2018	Ciuransoka	1	430.000	183.000	-	613.000
13	18 April 2018	B-222/2018	Dr. H.A. Rusdiana, MM	9 Mei 2018	Cimahi	1	430.000	183.000	-	613.000
<b>Total</b>						<b>13</b>	<b>3.440.000</b>	<b>1.993.000</b>	<b>-</b>	<b>8.785.000</b>

**Catatan:**  
 Lampiran No.06 ini, dilengkapi dengan SPPD dan kelengkapannya

Bandung, 30 April 2017  
 Ketua Tim Peneliti  
  
 Dr. H.A. Rusdiana, MM  
 NIP. 1967042119863001



# Lampiran No.06.2 Dokumen kelengkapan SPPD(12 dok)

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

Alamat: Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung, Kode Pos 40134  
Telp. (022) 7800251 Fax. (022) 7800250 Web: www.uin-sugjati.ac.id

REKAMAN BENTUK PENGESAHAN PERUSAHAAN KOPERASI  
KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

Alamat: Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung, Kode Pos 40134  
Telp. (022) 7800251 Fax. (022) 7800250 Web: www.uin-sugjati.ac.id

**RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

Lampiran SPJ Nomor : B-211 /2017  
Tanggal : 19 April 2018

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Uang Harian	Rp. 430.000	1 (satu) Hari
2.	Transport Bus/Kereta Bandung ke Tangerang dan Depok	Rp. 313.000	PP
Jumlah		Rp. 743.000	
Terbilang :		tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah	

Telah dibayar sejumlah Rp. 743.000,-  
Ketua Pegawai,

Bandung, 19 April 2018  
Telah menyetujui dan menyetujui  
Rp. 743.000,-  
Yang Mengesahkan,  
Dr. H. A. Rusdiana, MM,  
NIP. 196104211986021001

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

Alamat: Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung, Kode Pos 40134  
Telp. (022) 7800251 Fax. (022) 7800250 Web: www.uin-sugjati.ac.id

REKAMAN BENTUK PENGESAHAN PERUSAHAAN KOPERASI  
KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

Alamat: Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung, Kode Pos 40134  
Telp. (022) 7800251 Fax. (022) 7800250 Web: www.uin-sugjati.ac.id

**DAFTAR PENGELUARAN RIL**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. A. Rusdiana, MM,  
NIP : 196104211986021001  
Jabatan : Lektor Kepala

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor 211 tanggal 19 April 2018 dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. biaya transport dan penginapan pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Transport Bus/Kereta Bandung ke Tangerang dan Depok	Rp. 313.000
Jumlah		Rp. 313.000

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikurudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengesahkan dan menyetujui  
Ketua Pegawai,

Bandung, 19 April 2018  
Balasana SPJ

Dr. H. A. Rusdiana, MM,  
NIP. 196104211986021001

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung, Kode Pos 40134  
Telp. (022) 7800251 Fax. (022) 7800250 Web: www.uin-sugjati.ac.id email: info@uin-sugjati.ac.id

**LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS**

Tanggal Berangkat	21 April 2018
Kota Tujuan	Tangerang-Depok
Tanggal Kembali	21 April 2018
Uraian	Melaksanakan observasi Lokasi dan Penelitian di STAI Fatmahan Tangerang dan STAI Al-Karimiah Depok
Tanggal Kembali	21 April 2018

**Uraian Kegiatan Perjalanan Dinas:**

I. Tujuan Kegiatan  
1. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tentang Dosen-Dosen yang Mendapat Pembiayaan Penelitian Transan dan Pengembangan Penelitian Tinggi Tahun Anggaran 2018. Nomor: B-016/DK/05V/2018/02/3000/2018 Tanggal 19 Maret 2018.  
2. Surat tugas Nomor B-211/Un.05V/2018/01.104/2018, Tanggal 19 April 2018. Tentang Observasi Lokasi dan pengujian lain Penelitian di STAI Fatmahan Tangerang dan STAI Al-Karimiah Depok

II. Pelaksanaan  
Dr. H. A. Rusdiana, MM, terkait dengan kegiatan penelitian "Kegiatan PTGS Dalam mendukung Implementasi Kebijakan SPKSI Studi di PTGS Koperetas Wilayah II Jawa Barat dan Banten"

III. Kegiatan  
1. Berangkat dari Bandung tanggal 21 April 2018. Jam 03.00. Hls di Tangerang jam 06.00  
Melaksanakan observasi Lokasi dan Pen Penelitian di STAI Fatmahan Tangerang mulai jam 07.00 sd 10.30. Selanjutnya menuju STAI Al-Karimiah Depok  
2. Hls di STAI Al-Karimiah Depok jam 11.30. Setelah sholat Dhuhur sd jam 12.30  
Melaksanakan observasi Lokasi dan Pen Penelitian di STAI Al-Karimiah Depok mulai jam 12.30 sd 15.30. Setelah sholat Ashar sd jam 16.00. Selanjutnya pulang menuju Bandung  
3. Hls di Bandung jam 20.00

IV. Hasil Kegiatan Perjalanan Dinas  
1. Terafsasinya observasi Lokasi dan Pen Penelitian di STAI Fatmahan Tangerang dan STAI Al-Karimiah Depok  
2. Dimungkanya data hasil observasi Lokasi dan Pen Penelitian di STAI Fatmahan Tangerang dan STAI Al-Karimiah Depok

V. Lainnya  
Sebagai penutup, mengadakan pertemuan dengan pihak kampus STAI Fatmahan Tangerang dan STAI Al-Karimiah Depok untuk penjabaran penelitian selanjutnya, ucapan terimakasih dan penutup

Bandung, 21 April 2018  
Yang Beres,  
Dr. H. A. Rusdiana, MM,  
NIP. 196104211986021001

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Bandung 40134 Telp. (022) 7800251 Fax. (022) 7800250 Web: www.uin-sugjati.ac.id email: info@uin-sugjati.ac.id

**SURAT TUGAS**  
B-211/Un.05V/2018/01.104/2017

Merimbang : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tentang Dosen-Dosen yang Mendapat Pembiayaan Penelitian Transan dan Pengembangan Penelitian Tinggi Nomor B-016/DK/05V/2018/02/3000/2018 Tanggal 19 April 2018.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 84).  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5339).  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan.

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019.

**MEMBERI TUGAS**

Kepada : Nama : Dr. H. A. Rusdiana, MM,  
NIP : 196104211986021001  
Pangkat/Gol Ruang : Pembina Tk. I / IV/b  
NVPD :  
Jabatan : Lektor Kepala

Untuk : Melaksanakan observasi awal penelitian tanggal 21 April 2018 di STAI Fatmahan dan STAI Alkarimiyah Tangerang dan Depok.

Bandung, 19 April 2018  
Dr. H. A. Rusdiana, MM,  
NIP. 196104211986021001

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

Alamat: Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung, Kode Pos 40134  
Telp. (022) 7800251 Fax. (022) 7800250 Web: www.uin-sugjati.ac.id

REKAMAN BENTUK PENGESAHAN PERUSAHAAN KOPERASI  
KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

Alamat: Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung, Kode Pos 40134  
Telp. (022) 7800251 Fax. (022) 7800250 Web: www.uin-sugjati.ac.id

**SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)**

1. Tujuan/Perihal Perjalanan Dinas	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
2. Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas	Dr. H. A. Rusdiana, MM, NIP. 196104211986021001
3. a. Tanggal dan Golongan	a. Periode: 19, 20, 21 April 2018
b. Jabatan / Instansi	b. Lektor Kepala
4. Maksud Perjalanan Dinas	Melaksanakan Wawancara dan Pengumpulan Data di Prodi PAI Al-Ashry Kabupaten Ciamis
5. Alat Angkut yang dipergunakan	Bus/Kereta Api
6. a. Tempat Berangkat	a. Kota Bandung
b. Tempat Tujuan	b. Kabupaten Ciamis
7. 8. a. Tanggal Berangkat	a. 19 April 2018
b. Tanggal Kembali	b. 21 September 2017
9. a. Instansi	a. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, DPM/002.04.2.4.3132.010017
b. Akun	b.
10. Keterangan Lain-lain	

Diketahui dan disetujui  
Bandung, 08 September 2017  
Pegawai Komandan Komisioner,

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

Alamat: Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung, Kode Pos 40134  
Telp. (022) 7800251 Fax. (022) 7800250 Web: www.uin-sugjati.ac.id

REKAMAN BENTUK PENGESAHAN PERUSAHAAN KOPERASI  
KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

Alamat: Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung, Kode Pos 40134  
Telp. (022) 7800251 Fax. (022) 7800250 Web: www.uin-sugjati.ac.id

**SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)**

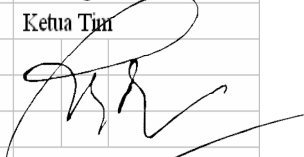
1. Tujuan/Perihal Perjalanan Dinas	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
2. Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas	Dr. H. A. Rusdiana, MM, NIP. 196104211986021001
3. a. Tanggal dan Golongan	a. Periode: 19, 20, 21 April 2018
b. Jabatan / Instansi	b. Lektor Kepala
4. Maksud Perjalanan Dinas	Melaksanakan Wawancara dan Pengumpulan Data di Prodi PAI Al-Ashry Kabupaten Ciamis
5. Alat Angkut yang dipergunakan	Bus/Kereta Api
6. a. Tempat Berangkat	a. Kota Bandung
b. Tempat Tujuan	b. Kabupaten Ciamis
7. 8. a. Tanggal Berangkat	a. 19 April 2018
b. Tanggal Kembali	b. 21 September 2017
9. a. Instansi	a. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, DPM/002.04.2.4.3132.010017
b. Akun	b.
10. Keterangan Lain-lain	

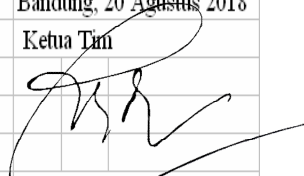
Diketahui dan disetujui  
Bandung, 08 September 2017  
Pegawai Komandan Komisioner,

Batas SPJ 60%

## SPJ Lanjutan 100%

No.07

REKAPITULASI PENGELUARAN BIAYA PERSIAPAN/PRA PENELITIAN				
PENELITIAN TERAPAN DAN PENEGBANGAN PENDIDIKAN TINGGI				
<b>Judul Penelitian</b>	: Kesiapan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta dalam mendukung Kebijakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI): Studi di PTKIS Wilayah II Jawa Barat dan Banten"			
<b>Sumber Dana</b>	: BOPTN/DIPA-RM UIN SGD BANDUNG TAHUN 2018			
<b>Kegiatan</b>	: Pelaksanaan Penelitian			
No.	Tanggal	Uraian Kegiatan	Volume	Jumlah (Rp.)
1	10 Juli 2018	Biaya Perjalanan Dinas bulan Juli 2 orang An.Drs.Nasihudin, M.Pd., dan Dr.H.A. Rusdiana, MM. Untuk Keg. Validasi data ke 24 Lokasi Penelitian	1 Pkt	14,756,000
2	12 Juli 2018	Honorarium Pembantu Pengumpul Data Lapangan 24 Lokasi	24 Pkt	13,344,000
2	12 Juli 2018	Honorarium Pembantu Pengolah Data Lapangan 24 Lokasi	24 Pkt	1,500,000
<b>Jumlah</b>			<b>Rp.</b>	<b>29,600,000</b>
<b>Terbilang: Empat belas Juta Tujuh ratus Limapuluh Enam Ribu Rupiah</b>				
<b>Catatan:</b> Lampiran No.07 ini, dilengkapi dengan 1. SPPD Lengkap bulan Juli..... Rp. 14.756.000 2. Nominasi Pengumpul data 24 orang.. Rp. 13.344.000 3. Nominasi Pengolah data 1 organg.....Rp. 1.500.000 (lihat contoh sebelumnya)			Bandung, 30 Juli 2018	
			Ketua Tim	
				
			<b>Dr. H.A. Rusdiana, MM</b> NIP: 196104211986021001	

REKAPITULASI PENGELUARAN BIAYA PERSIAPAN/PRA PENELITIAN				
PENELITIAN TERAPAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI				
<b>Judul Penelitian</b>	: Kesiapan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta dalam mendukung Kebijakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI): Studi di PTKIS Wilayah II Jawa Barat dan Banten			
<b>Sumber Dana</b>	: BOPTN/DIPA-RM UIN SGD BANDUNG TAHUN 2018			
<b>Kegiatan</b>	: Pelaksanaan Penelitian			
No.	Tanggal	Uraian Kegiatan	Volume	Jumlah (Rp.)
1	11 Agustus 2018	Pegandaan Dokumen Laporan	1 Pkt	816,500
2	11 Agustus 2018	Pembelian Konsumsi Rapat Pembahasan Lap Penelitian 100 % dari Catering "TRESNA" Cibiru-Bandung	1 Pkt	630,000
3	11 Agustus 2018	Honorarium Pembahas Lap Penelitian 100 %	3 Org	1,500,000
4	11 Agustus 2018	Uang Saku Peserta Rapat Pembahas Laporan Akhir	7 O/H	1,050,000
			<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 3,996,500</b>
<b>Terbilang: Delapan belas Juta Delapan ratus Duapuluh Saturibu Rupiah</b>				
Catatan: Lampiran No.07 ini, dilengkapi dengan 1. SPJ FC Penggandaan Laporan..... Rp. 816.000 2. Nominasi Pembahas Lap Akhir 3 org.. Rp. 1.500.000 3. Nominasi Pst rapat 7 orang..... Rp. 1.050.000 4. Nominasi Pengumpul data 24 orang.. Rp. 13.344.000 (lihat contoh sebelumnya)			Bandung, 20 Agustus 2018 Ketua Tim  <b>Dr. H.A. Rusdiana, MM</b> NIP: 196104211986021001	

### 3. Laporan Potensi keluaran (output) lainnya

#### a. Jurnal

## READINESS OF PRIVATE ISLAMIC HIGHER EDUCATION IN SUPPORTING THE IMPLEMENTATION OF CERTIFICATE COMPANION

**A. Rusdiana**

Jurusan MPI FTK UIN Bandung

rusdiana@uinsgd.ac.id

**Nasihudin**

Jurusan PGMI FTK UIN Bandung

nspono@uinsgd.ac.id

#### **Abstract**

Quality education is an irreplaceable and inevitable instrument for change because education is a procedure of civilization and progress. The application of the Diploma Companion Certificate can improve the transparency of academic qualifications and the profession of college graduates. The main reason for the research was to find out the readiness of the Islamic Religious College in supporting the implementation of the policy of applying the Diploma Companion Certificate. This study aims to identify the readiness of Private Islamic Religious Higher Education in applying the Diploma Companion Certificate. This policy has actually been implemented since August 2014. This study uses a qualitative approach, research procedures that produce descriptive data in the form of speech or writing and the behavior of the people observed. A qualitative approach is expected to get an in-depth description of the words, writing and behavior of the people observed. Data analysis is done through; data collection, data reduction, data presentation, and verification. The results showed that; human resources PTKIS Region II West Java and Banten are not ready to apply the Diploma Companion Certificate, because it is still in the learning stage; infrastructure as a support in implementing policies is still minimal, and organizational commitment, has not fully supported the implementation of the SKPI,

**Keywords:** human resources, infrastructure, organizational commitment.

#### **Introduction**

The development of society and the world of work in the global era demands increasingly competent human resources. Therefore, the government considers it necessary to produce qualified graduates, both in the field of hard skills and soft skills. Because university graduates in Indonesia according to the



## b. HAKI

  
REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

### SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu, pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	: EC00201816588, 29 Juni 2018
<b>Pencipta</b>	
Nama	: Dr. H. A. Rusdiana, MM. Dan Drs. Nasihudin, M.Pd.
Alamat	: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No.105 Cibiru, Bandung, Jawa Barat, 40614
Kewarganegaraan	: Indonesia
<b>Pemegang Hak Cipta</b>	
Nama	: Dr. H. A. Rusdiana, MM. Dan Drs. Nasihudin, M.Pd.
Alamat	: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No.105 Cibiru, Bandung, Jawa Barat, 40614
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Ciptaan	: Karya Tulis
Judul Ciptaan	: Kesiapan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) (Studi Di PTKIS Wilayah II Jawa Barat Dan Banten)
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	: 29 Juni 2018, di Bandung
Jangka waktu perlindungan	: Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	: 000110606

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

  
Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.  
NIP. 196811181994031001

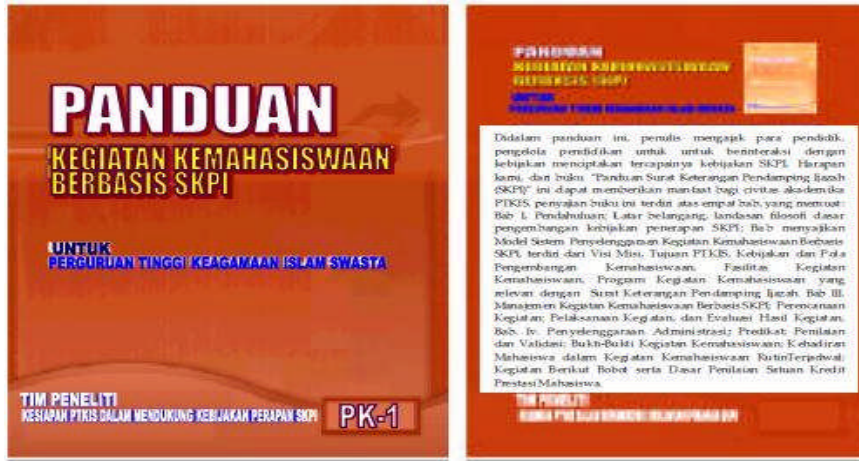








e. Buku Panduan Teknis



<p style="text-align: right;">Dr. H. A. Rusdiana, MM Des. Nasibudin, M.Pd.</p> <p style="text-align: center;"><b>PANDUAN KEGIATAN KEMAHasiswaAN BERBASIS SKPI</b> Untuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta</p> <p style="text-align: center;">PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN UIN SGD BANDUNG 2018</p>	<p style="text-align: center;"><b>PANDUAN KEGIATAN KEMAHasiswaAN BERBASIS SKPI</b> Untuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta</p> <p>ISBN: 978-602-71000-0-0 Cetakan Pertama, Agustus 2018 16 cm x 24 cm - 43 halaman (p) - (k)</p> <p>Penulis: Dr. H. A. Rusdiana, MM Des. Nasibudin, M.Pd.</p> <p>Editor: Mr. Muhardi, Sa, M.Pd.</p> <p>Desain Cover dan Tata Letak: Mr. Zaky Nurrazman</p> <p>Dibuat dan diterbitkan oleh: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat at UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jl. H.A. Nasution No. 105 Bandung</p> <p>Hak Cipta dilindungi UUR No 19/Th. 2002 Dilarang memperjualbelikan, menyalin dan mengutip tanpa izin penerbit</p>
---	---

<p style="text-align: center;"><b>Pengantar Penyusun</b></p> <p>Bismillahirrahmanirrahim.</p> <p>Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala karunianyaNya, sehingga Buku Panduan Kegiatan Kemahasiswaan Berbasis SKPI. Untuk PTKIS, dapat diselesaikan.</p> <p>Buku panduan ini, disusun berdasarkan kebutuhan mendasar bagi PTKIS, dikembangkan atas temuan penelitian Terapan dan pengembangan Perguruan Tinggi, dengan judul "Kesiapan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Dalam Mendukung Kebijakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI): Studi di PTKIS Wilayah II Jawa Barat Dan Banten".</p> <p>Penulis menyadari bahwa buku panduan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak.</p> <p>Akhirnya penulis berharap, semoga buku ini, dapat memberikan sumbangs pemikiran pada Pengembangan PTKIS, pada khususnya dan bagi masyarakat akademik pada umumnya.</p> <p style="text-align: right;">Bandung, 7 Juli 2018 Ketua Tim Penyusun,  Dr. H. A. Rusdiana, MM</p>	<p style="text-align: center;"><b>DAFTAR ISI</b></p> <p>Kata Pengantar ..... i</p> <p>Pengantar Penyusun ..... ii</p> <p><b>BAB I PENDAHULUAN</b></p> <p>A. Latar belakang ..... 1</p> <p>B. Landasan Filosofis SKPI ..... 3</p> <p>C. Dasar pengembangan kebijakan penerapan SKPI ..... 5</p> <p><b>BAB II SISTEM PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEMAHasiswaAN BERBASIS SKPI</b></p> <p>A. Visi Misi, Tujuan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam ..... 7</p> <p>B. Kebijakan dan Pola Pengembangan Kemahasiswaan ..... 11</p> <p>C. Fasilitas Kegiatan Kemahasiswaan ..... 14</p> <p>D. Program Kegiatan Kemahasiswaan Berbasis SKPI ..... 17</p> <p><b>BAB III MANAJEMEN KEGIATAN KEMAHasiswaAN BERBASIS SKPI</b></p> <p>A. Perencanaan Kegiatan ..... 19</p> <p>B. Pelaksanaan Kegiatan ..... 21</p> <p>C. Evaluasi Hasil Kegiatan ..... 22</p> <p><b>BAB. IV. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI</b></p> <p>A. Predikat ..... 25</p> <p>B. Penilaian dan Validasi ..... 27</p> <p>C. Bukti-Bukti Kegiatan Kemahasiswaan ..... 29</p> <p>D. Kehadiran Mahasiswa dalam Kegiatan Kemahasiswaan ..... 31</p> <p>E. Bobot serta Dasar Penilaian Satuan Kredit Prestasi Mahasiswa ..... 33</p> <p><b>LAMPIRAN:</b></p> <p>- Lembaran Penghitungan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)</p> <p>- Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).</p>
---	---

## Apresiasi PTKIS



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM YAMISA  
(STAIY)

SOREANG BANDUNG JAWA BARAT  
Izin Operasional : Keputusan Dirjen Pendidikan Islam  
Kementerian Agama RI Nomor : Dj.I/201 Tahun 2008

Alamat : Jl. Raya Soreang 134 Soreang Kab. Bandung 40912  
Email: staiy\_yamisa@yahoo.co.id Telp./Fax. 022-5891714

• Jurusan Syariah  
Prodi Muamalah (Terakreditasi BAN-PT  
Nomor : 010/BAN-PT/Ak-XI/SI/2008 dan  
telah diperpanjang dengan Nomor :  
028/BAN-PT/Ak-XV/SI/X/2012

• Jurusan Tarbiyah :  
Prodi PAI (Terakreditasi BAN-PT)  
Nomor : 011/BAN-PT/Ak-XI/SI/2008 dan telah  
diperpanjang dengan Nomor : 039/BAN-  
PT/Ak-XI/SI/X/2012

### SURAT APRESIASI

Nomor : 095/STAIY/K/III/2018

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Puji syukur seraya panjatkan kekhadirat Allah SWT, atas segala limpahan karuniaNya, sehingga buku *“Panduan Kegiatan Kemahasiswaan Berbasis SKPI: Untuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta”*, dapat terwujud tepat pada waktunya saat kami memerlukan. Seiring dengan kebijakan Kemenag melalui PMA No 61 Tahun 2016, penerapan Surat Keterangan Pendamping Ijazah perlu segera di implementasikan.

Buku panduan ini, sungguh kami perlukan mendesak untuk segera diimplementasikan, bukan hanya itu, buku panduan semacam ini, telah menginspirasi kami bagi pengembangan STAI YAMISA Soreang-Bandung, pada khususnya PTKI pada umumnya. Kami sadar bahwa untuk mengimplementasi suatu kebijakan, apalagi kebijaksanaan ini merupakan kebijakan baru di dunia pendidikan pada umumnya, khususnya pada PTKIS.

Dengan terbitnya buku *“Panduan Kegiatan Kemahasiswaan Berbasis SKPI: Untuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta”*, kami sangat mengapresiasi pada gagasan dan pemikiran, tim penulis, karena kami sadar bahwa buku panduan ini, tidak akan terwujud tanpa adanya gagasan, pemikiran, wawasan, dan ketekunan tim penulis yang inovatif.

Akhirnya, kami berharap, semoga amal baik tim, medapat ridha dan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. *Amien.*

Bandung, 17 Agustus 2018



Ketua  
Drs. KH. Yayan Hasuna Hudaya, M.Pd.





YAYASAN ISLAMIC CENTRE KABUPATEN CIREBON  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM CIREBON**

- |                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| JURUSAN TARBİYAH : | Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI)     | Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) |
|                    | Prodi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) | Prodi Pendidikan Bahasa Arab (PBA)               |
| JURUSAN SYAR'AH :  | Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah (AAS)       | JURUSAN USHULUDDIN :                             |
|                    | Prodi Ekonomi Syari'ah (EKOS)          | Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)            |

Alamat: Komplek Islamic Centre Kabupaten Cirebon Jl. Tuparev No.111 Tel. 0231-231816 Cirebon 45153 Website : [www.staic.ac.id](http://www.staic.ac.id) E-mail: [staic@staic.ac.id](mailto:staic@staic.ac.id)

**SURAT APRESIASI**

No:109/C/STAIC/IX/2018

*Alhamdulillah Robbil `Alamin.* Segala Puji Bagi Allah Tuhan Semesta Alam. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat, rahmat serta karunia-Nya yang diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat *wal`afiat* serta nikmat panjang umur, sehingga pada saatnya, buku "*Panduan Kegiatan Kemahasiswaan Berbasis Surat Keterangan Pendamping Ijazah: Untuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta*", yang lama kita tunggu, berada di hadapan kita semua.

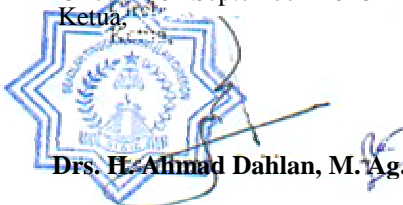
Relevan dengan tuntutan kebutuhan PTKI, pada umumnya dan PTKIS, pada khususnya dalam mengimplemen tasikan Peraturan Menteri Agama RI No 61 Tahun 2016, Seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, sejak 12 Januari 2016, harus mengimplementasikan kebijakan penerapan Surat Keterangan Pendamping Ijazah pada setiap Lulusannya. Memang dalam penerapam suatu kebijakan, perlu ditunjang petunjuk teknis, semacam buku "*Panduan Kegiatan Kemahasiswaan Berbasis Surat Keterangan Pendamping Ijazah: Untuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta*" ini.

Buku panduan ini, sungguh menjadikan suatu kebahagiaan bagi kami sebagai sarana penunjang untuk mengimplemetasikan kebijakan penerapan SKPI. Buku panduan ini juga telah memotivasi, dan membimbing kami, khususnya STAI Cirebon, untuk segera bertindak. Dengan terbitnya buku Panduan ini, yang digagas oleh tim penulis, kami sungguh mengapresiasi.

Akhirnya, kami berdo'a, semoga amal baik tim, medapat ridha dan magfirah dari Allah SWT.

Cirebon, 04 September 2018

Ketua,

  
Drs. H. Ahmad Dahlan, M. Ag.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Rusdiana, 2011. *Implementasi Kebijakan WASDALBIN: Menuju Akuntabilitias Mewujudkan Akuntabilitas PTAIS*. (Disertasi). Bandung: PPs. UNINUS. Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2014. *Kewirausahaan: Teori dan Praktek*. Bandung: Pustaka Setia.
- Amri, A. S., dan Suwondo. 2009. Pengembangan Sumberdaya Aparatur sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja (Studi di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa). *Jurnal Wacana* 12(3).
- Anjarwati, M. 2012. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Accounting Analysis Journal* 1(2).
- Aprila, N. dan S. Hidayani. 2012. The Effect Budgetary Participation, Asymmetry Information, Budget Emphasis and Comitment Organization to Budgetray Slack at SKPD Governmental of Bengkulu City. *Procedding the 13th Malaysia Indonesia Conference on Economics, Management, and Accounting (MIICEMA) Palembang*.
- Arifin,E Zaenal 1993. *Bahasa Yang Lugas Dalam Laporan Teknis*. Cetakan I.Jakarta:CV Akademika Pressindo.
- Behn, R.D. 2001, *Rethinking Democracy Accountability*. Washington, D.C.: Brookings Intitution Press.
- Bovens, Mark. 1998. *The Quest for Responsibility, Accountability and Citizenship in Complex Organizations*. Cambridge: cambridge University Press.
- Bovens, Mark. 2006. Analysing and Assessing Public Accountability. A Conceptual Framework. *European Governance Papers (EUROGOV)*. No. C-06-01.
- Busuioc, A. dan R. R. Birau. 2011. The Role of Information Asymmetry in the Outburst and the Deepening of the Contemporary Economic Crisis. *Academy of Economic Studies Journal*.
- Darwanis dan S. Chairunnisa. 2013. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* 6(2).

- Djalil, Maman Abd. 1998. *Metodologi Penelitian Pendidikan II*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ellwood, Sheila, 1993. *Parish and Town Council: Financial accountability and management Vol 19*. London: Prentice Hall.
- Emzir. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- FASB. 1978. *Statement of Financial Accounting Concepts No. 1. Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises*.
- Frederickson, H. George. 1997. *The Spirit of Public Administration*. San Fransisco: Jossey-Bass Publisher.
- Hadi, Sutrisno. 1987. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- Hamidi. 2007. *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi*. Malang: UMM Press
- Kassel, D. S. 2008. Performance, Accountability, and the Debate over Rules. *Public Administration Review* 68(2): 241-252.
- Keraf, Gorys 2001. *Diksi Dan Gaya Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Koppel, Jonathan GS. 2005. Pathologies of Accountability. ICANN and the Challenge of "Multiple Accountabilities Disorder" *Public Administration Review* 65 (1).
- Kozier, B., Glenora Erb, Audrey Berman dan Shirlee J. Snyder. 2010. *Fundamental Keperawatan (Alih bahasa: Esty Wahyu ningsih, Devi yulianti, yuyun yuningsih, Dan Ana lusyana)*. Jakarta: EGC
- Kron, T. and Gray, A. 1987.. *The management of patient care: Putting Leadership Skills to Work*. 6th ed, Philadelphia: W.B. Saunders Company
- Malik Imron, 2005. *Prosedur Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)*. Lap Akhir. Fakultas Ilmu Sosial Unniversitas Negeri Semarang
- Manullang, M. 2006. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Minogue, Martin, Charles Poliano, dan David Hume. 1997. *Beyond the New Public Management: Changing Ideas and Practices in Governance*, UK: Edward Elgar Publishing.
- Moxham, C. dan Boaden, R. 2007. The Impact of Performance Measurement in the Voluntary Sector. *International Journal of Operations and Production Management* 27(8): 826-845.



- Mulgan Richard. 2000, *Accountability: An Ever Expanding Concept? Public Administration*, hlm.. 78-555; Behn, R.D. 2001, *Rethinking Democracy Accountability*. Washington, D.C.: Brookings Intitution Press.
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, 2009, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nuraini. dan D. Indudewi. 2012. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian, Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Brebes. *Jurnal Solusi* 11(4).
- Nurhalimah, D. dan S. Abdullah. 2013. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Aparatur Perangkat Daerah di Pemerintah Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 2(1).
- O'Connle, Lenahan. 2005. Program Accountability as an Emergent property. *The Role of Stakeholders in aprogram Field. Public Administration Review* 65 (1).
- J.G. Jabbra and O.P. Dwivedi, *Public Service Accountability: A Comparative Perspective*, West Hartford-Connecticut: Kumarian Press, Inc.
- Paterson (1990) dalam Hodge, Graeme, 1993. *Minding Everybody's Business: Performance Management in Public Sector Agencies. Australia*, Melbourne: Montech Pty Ltd.
- Rasul, Syahrudin, 2003. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta: PNRI
- Ruslan, Rosdy. 2003. *Metode Penelitian Publik*. Surabaya: PT Raja Grafindo Persada.
- Shields, M. D. dan S. M. Young. 1993. Antecedents and Consequences of Participative Budgeting: Evidence on the Effects of Asymmetrical Information. *Journal of Management Accounting Research* 5.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Teori & praktek kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Stokke, O. 1995. *Aid and Political Conditonality*. London: Frank Cass.

- Su, C. C. dan F. Y. Ni. 2013. Budgetary Participation and Slack on the Theory of Planned Behavior. *International Journal of Organizational Innovation* 5(4).
- Subiyantoro, Edy dan Saerce Elsy Hatane, 2007, Dampak Perubahan Kultur Masyarakat Terhadap Praktik Pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Publik Di Indonesia, *Jurnal Mnajemen Dan Kewirausahaan*, Vol. 9, No. 1, Maret. 2007.
- Sutomo, dkk. 2010. *Epidemiologi Kebidanan*. Yogyakarta. Fitramaya.
- Suwardjono, 2005. *Teori Akuntansi: Pengungkapan Pelaporan Keuangan* (Edisi III). Yogyakarta: BPFE.
- Tim Penyusun Modul Sistem AKIP, 2002. *Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: PNRI
- Tim Pusat Bahasa 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Diknas.
- Trisnawati, M. D. dan K. Achmad. 2013. Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* 2(2).
- Turner, Mark and Hulme, David ,1997. *Governance, Administrasi, and Development: Making The State Work*. London: MacMillan Press Ltd.
- UNDP, 1995. *Public Sector Management, Governance, and Sustainable Human Developmen*, New York: UNDP.
- Wardhani, IGK, 2008, *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Wilson, James D., dan John B. Campbell. 2007. *Controllershhip: Tugas Akuntan Manajemen*. Edisi Ketiga. Penerjemah: Tjithin Felix Tjendra. Jakarta: Erlangga.
- World Bank, 1997. *World Development Report, 199.; the State in a Changing World*, Oxford: Oxford University Press.
- Yadiati, Winwin. 2007, *Teori Akuntansi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana
- Yilmaz, E. dan G. Ozer. 2011. The Effects of Environmental Uncertainty and Budgetary Control Effectiveness on Propensity to Create Budgetary Slack in Public Sector. *African Journal of Business Management* 5(22).

**Dokumen Peraturan dan Perundang-Undangan:**

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7211 Tahun 2017 Tentang *Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018.*

Peraturan pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan.*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang *Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018;*

Undang-undang No.17 tahun 2003, tentang *Keuangan Daerah*



## PROFIL PENULIS



**Dr. H. A. Rusdiana, Drs., MM.** Lahir di Puhun Ciamis, tanggal 21 April 1961, merupakan anak pertama dari tujuh bersaudara pasangan Bapak Sukarta (Alm), dengan Ibu Junirah. Sejak kecil mengikuti orang tua di Dusun Puhun Desa Cinyasag Kec. Panawangan Kab. Ciamis. Tamat Sekolah Dasar di SD Cinyasag I, tahun 1975. Madrasah Tsanawiyah di Panawangan Ciamis lulus tahun 1979, Madrasah Aliyah Bandung lulus 1982, S-1, Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 1987, S-2 Magister Manajemen (IMMI) Jakarta lulus tahun 2002. dan menyelesaikan S-3 Program Pascasarjana Manajemen Pendidikan Universitas Islam Nusantara Bandung, lulus tahun 2012, dengan Disertasi “Implentasi Kebijakan WASDALBIN Menuju Akuntabilitas Perguruan Tinggi.

Sesuai dengan moto hidupnya “belajar dan mengabdikan”, Ia mengabdikan sebagai Dosen Manajemen Pendidikan pada Fak. Tarbiyah dan Keguruan dan Pascasarjana UIN Bandung. Sampai saat ini, telah menulis buku ajar, Pengantar Manajemen (Tresna Bhakti, 2002), Manajemen SDM (Tresna Bhakti, 2007), Ilmu Sosisl dan Budaya Dasar (Tresna Bhakti, 2008), Pendidikan Kewarganegaraan (Tresna Bhakti, 2009), Sosiologi Pendidikan (BatiC 2010), Antropologi Pendidikan (BatiC 2011); Kebijakan Pendidikan (Lemlit UIN SGD, 20014); Organisasi Lembaga Pendidikan (PPs. UIN SGD, 2015); Manajemen Kantor (Lemlit UIN SGD, 2016). Manajemen Kewirausahaan (UHS, 2017).

Buku teks: Dasar-Dasar Manajemen (Pustaka Tresna Bhakti Bandung, 2002); Manajemen Sumber Daya Manusia (Pustaka Tresna Bhakti, 2008); Manajemen Sumber Daya Manusia (Arsad Bandung, 2012); Manajemen Kewirausahaan Kontemporer (Arsad, 2012); Pendidikan Kewirausahaan (Insan Komunika Bandung, 2012); Membangun Desa Peradaban Berbasis Pendidikan (Insan Komunika Bandung, 2012); Manajemen Kurikulum (Arsad Bandung, 2013); Manajemen Keuangan Sekolah (Arsad Bandung, 2013); Konsep Inovasi Pendidikan (Bandung, 2014); Kewirausahaan (Pustaka Setia, 2014); Manajemen Perkantoran Modern (Insan Komunika, 2014); Asas-asas Manajemen berwawasan Global (Pustaka Setia, 2014); Sistem Informasi Manajemen (Pustaka Setia, 2014); Manajemen Operasi (Pustaka Setia, 2014); Pendidikan Nilai (Pustaka Setia, 2014); Kebijakan Pendidikan (Pustaka Setia, 2015); Pendidikan Multikultural (Pustaka Setia, 2015); Evaluasi Pembelajaran (Pustaka Setia, 2015); Manajemen Konflik (Pustaka Setia, 2015); Pengelolaan Pendidikan (Pustaka Setia, 2015); Pendidikan Profesi Keguruan (Pustaka Setia, 2015); Manajemen Pendidikan dan Pelatihan (Pustaka Setia, 2015). Manajemen Perubahan (Pustaka Setia, 2016);

Pengembangan Organisasi Lembaga Pendidikan (Pustaka Setia, 2016); Sistem Pemikiran Manajemen Pendidikan (Pustaka Setia, 2017); Komunikasi Informasi Teknologi Pendidikan (Pustaka Setia, 2017); Manajemen Evaluasi Program Pendidikan (Pustaka Setia, 2017); Auditing Syari'ah (Pustaka Setia, 2018).

Penelitian: Strategi Pengembangan IAIN Bandung (Tesis) (2002); Profil Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN SGD Bandung. (Studi Analisis tentang Latar belakang Fotensi, Model Motivasi Pengembangan Diri Mahasiswa). (2009); Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah (MBS/M) (Penelitian di MTs Al-Mishbah Cipadung Kec. Cibiru Kota Bandung) (2010); Strategi Akselerasi peningkatan Mutu Jurusan/Program Studi di Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN SGD Bandung. (2011); Implementasi Kebijakan WASDALBIN menuju akuntabilitas PT. (Disertasi) (2012); Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Keterampilan Wirausaha Produk Beras Ketan (di Desa Cinyasag Kec. Panawangan Kab. Ciamis). (2012); Studi Evaluatif Pembelajaran MK Ke-Islaman di Fak. Sains dan Teknologi UIN SGD.(2013); Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Belajar Usaha (KBU) Di Pusat Kediatan Belajar Masyarakat Tresna Bhakti Ds. Cinyasag Kec. Panawangan Kab. Ciamis (2013); Penerapan Pendidikan Karakter melalui pendekatan Pembelajaran Aktif, Kreatif, dan Menyenangkan (PAKEM) di MTs. Al-Mishbah Cipadung Bandung. (2014); Perubahan Perilaku Sosial Keagamaan di Desa Cinyasag Kec. Panawangan Kab. Ciamis, (2015); Implementasi Kebijakan EMIS, menuju Akuntabilitas PTKIS Jabar-Banten (2016); Peran Pimpinan PTKIS dalam Implementasi Kebijakan Kurikulum KKNI, menuju Akuntabilitas Perguruan Tinggi (2017).; Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI (2018).

Disamping itu, tak luput dari pengabdian kepada masyarakat. Ia, membina dan mengembangkan Yayasan Sosial Dana Pendidikan Al-Mishbah Cipadung-Bandung yang menyelenggarakan pendidikan Diniyah, RA, MI, dan MTs, sejak tahun 1984-Sekarang, serta garapan khusus "Bina Desa" melalui Yayasan Pengembangan Swadaya Masyarakat Tresna Bhakti, yang didirikannya sejak tahun 1994 dan sekaligus sebagai Pembina Yayasan, kegiatannya pembinaan dan pengembangan asrama mahasiswa pada setiap tahunnya tidak kurang dari 50 mahasiswa di Asrama Tresna Bhakti Cibiru Bandung. Membina dan mengembangkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tresna Bhakti sejak tahun 2007 di Desa Cinyasag Kecamatan Panawangan Kab. Ciamis.



**Drs. Nasihudin, M. Pd.,** lahir di Bekasi, 20 September 1962, Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah dan dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Wakil Koordinator KOPERTAIS Wilayah II Jawa Barat dan Banten

Pendidikan, S1 Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung lulus tahun 1987, S2 Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2003. Sedang menyelesaikan S3 pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Mengajar mata kuliah Evaluasi Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Jabatan; Wakil Koordinator Bidang Akademik pada Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Jawa Barat dan Banten (2016-sekarang). Mengampu Mata kuliah Evaluasi Pemelaran, dan Statistik Pendidikan pada jurusan PAI dan PGMI Fakultas Tarbiyah Bandung.

Karya Penelitian: Kualitas keberagamaan Keluarga Ojeg di Cipadung Kec. Cibiru Kota Bandung (2013); Upaya meningkatkan minat belajar mahasiswa dalam mata kuliah statistik melalui pembelajaran Peer Teaching, di Jurusan PGMI UIN SGD Bandung (2014); Partisipasi Mahasiswa UIN SGD Bandung dalam Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung (2015); Implementasi Kebijakan EMIS, menuju Akuntabilitas PTKIS Jabar-Banten (2016); Peran Pimpinan PTKIS dalam Implementasi Kebijakan Kurikulum KKNi, menuju Akuntabilitas Perguruan Tinggi (2017). dan menulis Jurnal; Nasionalisme pada sistem pendidikan Pesantren” pada Jurnal At-Tarbiyah IAIN Cirebon tahun 2010. Buku Ajar Evaluasi Pembelajaran Bandung Tresna Bhakti (2016). Peran Pimpinan PTKIS dalam Implementasi Kebijakan Kurikulum KKNi, menuju Akuntabilitas Perguruan Tinggi (2017).; Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI (2018).